



UNIVERSITAS INDONESIA

**“NASIB PETANI DALAM HAL KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DARI ORDE
BARU DAN REFORMASI**

**STUDI KASUS: PETANI DESA SURUH, KECAMATAN SURUH, KABUPATEN
SEMARANG”**

SKRIPSI

DAHLIA MEININGRUM

0806347694

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
DEPOK
DESEMBER, 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**“NASIB PETANI DALAM HAL KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
DARI ORDE BARU DAN REFORMASI**

**STUDI KASUS: PETANI DESA SURUH, KECAMATAN SURUH,
KABUPATEN SEMARANG”**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

DAHLIA MEININGRUM

0806347694

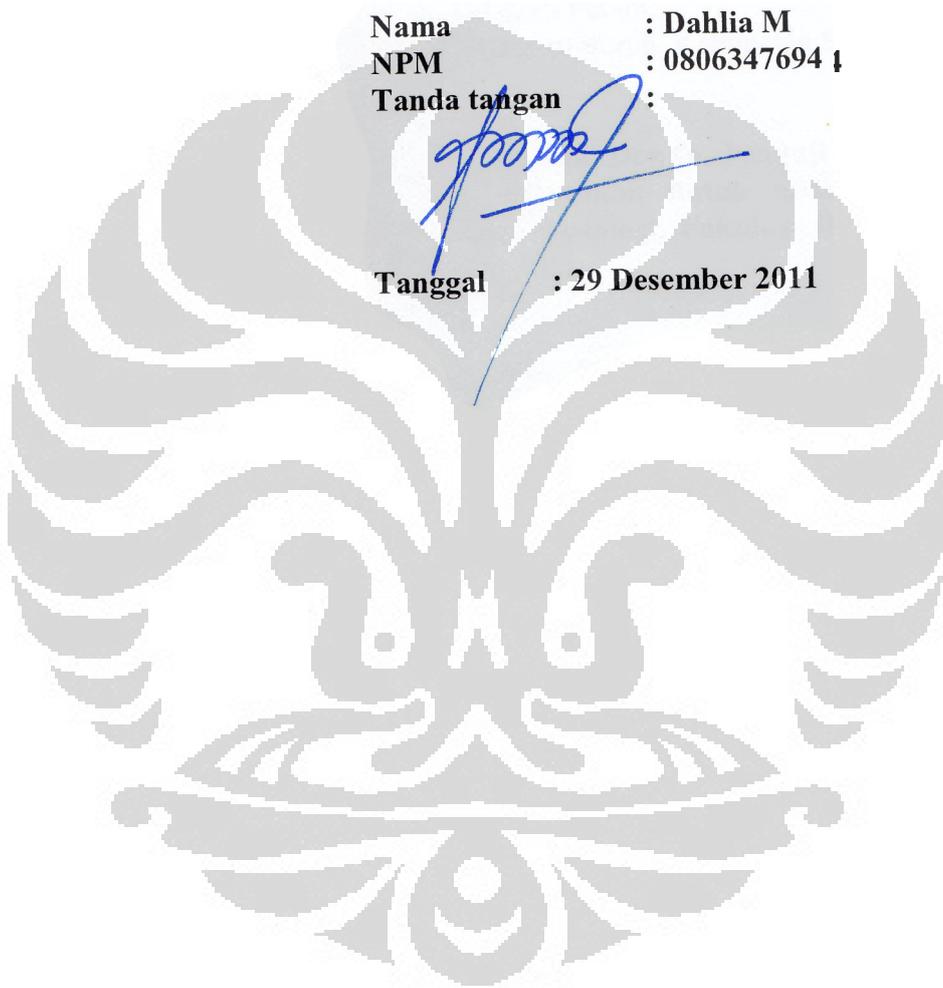
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
DEPOK
DESEMBER, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dahlia M
NPM : 0806347694
Tanda tangan :

Tanggal : 29 Desember 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dahlia M

NPM : 0806347694

Program Studi : Sosiologi

Judul Skripsi : “Ketergantungan Indonesia terhadap Pihak Asing di Masa Pemerintahan Orde Baru hingga Reformasi Menyangkut Masalah Kebijakan Ketahanan Pangan serta Dampaknya terhadap Petani.

Studi Kasus: Petani di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang”

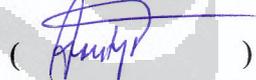
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Kusharianingsih CB, MS

()

Penguji : Dra. Shanty Novriaty, M.Si

()

Ketua Sidang : Dr. Erna Karim, MA

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Desember 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Ketergantungan Indonesia terhadap Pihak Asing di Masa Pemerintahan Orde Baru hingga Reformasi Menyangkut Masalah Kebijakan Ketahanan Pangan serta Dampaknya terhadap Petani, Studi Kasus: Petani di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial di Jurusan Sosiologi yang telah penulis pelajari selama kurang lebih tiga setengah tahun ini.

Peneliti memilih tema dan lokasi penelitian sesuai dengan judul skripsi ini atas landasar ketertarikan peneliti terhadap bidang ketahanan pangan yang belakangan ini menjadi masalah penting yang dibahas di media-media. Di samping itu, peneliti ingin melihat masalah yang banyak diteliti oleh berbagai disiplin tersebut dengan menggunakan kacamata sosiologi, khususnya dengan menggunakan teori dependensi klasik dan perspektif realism.

Segala usaha dan upaya yang dilakukan peneliti hingga mencapai tahap akhir penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Ibu dan Bapak** yang selalu memberi dukungan spiritual dan materiil dan mengingatkan untuk selalu tawakal kepada Allah SWT.
2. **Dra. Kusharianingsih CB, MS** atau Mba Wiwit, selaku pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pendamping, pembimbing, sekaligus inspirator bagi penulis dari awal ide penulisan ini muncul hingga selesai.
3. **Dra. Shanty Novriaty, M.Si** sebagai penguji ahli sekaligus telah bersedia untuk *sharing* terkait perspektif realism.
4. **Mas Iwan Sulastiawan** yang telah bersedia meminjami buku “*State, Market and Society*”.
5. **Andi Rosilala, Habibi Qalbi, Mein Lieber. Viele danke für die begeisterung.**
6. **Ibu Siska Utoyo dan Mbak Anggiya Sitakirana**, terima kasih atas bantuan materiil dan spiritual nya selama ini.

7. **WIC (Women International Club)** . Terima kasih atas bantuan beasiswanya selama ini.
8. **Seluruh informan** yang tidak disebut satu persatu yang telah bersedia bekerja sama dan menyediakan waktu untuk diwawancarai hingga peneliti mendapat kemudahan dalam menjalankan proses penyelesaian skripsi ini.
9. **Geger Riyanto, Muhammad Fajar, One Herwantoko Cepus.** Terima kasih sudah bersedia memberikan contoh skripsi kalian meskipun peneliti tidak jadi menggunakan metode metateori.
10. **Feri Suprpto** yang sering berbagi ilmu kepada peneliti.
11. **Ninis.** Terima kasih sudah menjadi teman curhat atas kegalauan di tengah-tengah pengerjaan skripsi dan atas pemberian bukunya "*Ecology and Society*" karta Luke Martell.
12. **Aulia Kusuma Wardhani.** Teman satu pikiran, satu paham, walaupun beda impian dan tujuan.
13. **Dini Khoirinnisa** teman bareng mengambil beasiswa setiap bulan di *Women International Club (WIC)* setiap awal bulan. Maaf ya din, untuk selanjutnya, kamu harus sendiri ke WIC. Curhatan kita di kereta adalah satu momen sejarah tak terlupakan. ☺
14. **Teman-teman senasib 3,5 tahun: Vivi** (teman yang paling bisa diajak *sharing* dan nyambung(tapi jangan ge'er)), **Anwar** (teman yang paling sering intensitasnya dalam menceritakan progress masing-masing kandidat sarjana semester ganjil ini), **Radit** (teman yang sering banget memberi informasi akademis khususnya dalam hal skripsi), **Bani, Szasza, Mega, Ari.** Semangat ya teman-teman. Kita nanti foto di Balairung bareng-bareng ☺ !!!
15. Teman-teman sosio satu angkatan (2008) yang tidak disebut satu per satu mengingat jumlahnya terlampau banyak. Thank's guys!!! Semangat yaa...

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan laporan penelitian ini tak luput dari salah. Oleh karena itu, "*Tiada Gading yang tak Retak*" peneliti akan menerima kritikan serta masukan yang membangun supaya menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih.

Depok, 29 Desember 2011

Peneliti

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya akan bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahlia M
NPM : 0806347694
Program Studi : Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

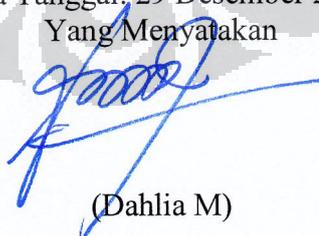
Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, penulis menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Ketertanggung Indonesia terhadap Pihak Asing di Masa Pemerintahan Orde Baru hingga Reformasi Menyangkut Masalah Kebijakan Ketahanan Pangan serta Dampaknya terhadap Petani. Studi Kasus: Petani di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang”.

Serta, perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di: Depok
Pada Tanggal: 29 Desember 2011
Yang Menyatakan


(Dahlia M)

ABSTRAK

Nama : Dahlia M
NPM : 0806347694
Program Studi : Sosiologi
Judul : “Nasib Petani dalam Hal Kebijakan Ketahanan Pangan dari Orde Baru dan Reformasi, Studi Kasus: Petani Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang.”

Ketahanan pangan merupakan konsep penting yang digunakan di dalam penelitian ini. Di dalam perjalanannya, konsep ini memaparkan makna dan arti yang berbeda berdasarkan atas perbedaan masa pemerintahan. Penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif ini akan memaparkan kondisi ketahanan pangan di dua masa periode, yaitu Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, kebijakan Revolusi Hijau dijadikan fokus pejelasan mengenai kebijakan ketahanan pangan pada pemerintahan saat itu. Kemudian, masa Reformasi, kebijakan impor beras dijadikan sebagai agenda baru kebijakan pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. Dua kebijakan tersebut menciptakan pola ketergantungan terhadap pihak asing. Temuan lapangan menggambarkan bahwa pemerintahan Orde Baru lebih memperhatikan nasib petani ketimbang pemerintahan Reformasi.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Dependensi Klasik, dan Realism

ABSTRACT

Name : Dahlia M
NPM : 0806347694
Major : Sociology
Title : “Peasant Fate in the Food Security Policy in New Order Era and Reformation, Case Study: Peasant in Suruh Village, Suruh Sub district, Semarang Regency”.

Food security is the important concept which used in this research. In over time, this is meant a different thing which within period of governance contains different policies. This researches which using qualitative methodology explains two periods in Indonesia. New Order Era and Reformation as regard to food security policy will be explained build on different government period. On New Order Era, Green Revolution is used as focus to see food security program by the government. The implication of this policy will be explained as an impact of peasant dependency on that period. Later, policy of food security on the reformation period will be seen when import policy was used as new agendas. Two policies in those different periods created the dependency pattern which caused of foreign parties. With the results, this research will give explanation about social phenomena in the different periods by using classical dependency paradigm. On the other hand, this research also using critical realism to explain one of the negative excess which suffered peasant in the restrictiveness of government policy. This perspective will point out that the physic factor is not dichotomies within social factor.

Keyword: food security, classical dependency, and critical realism.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN. | iii |
| KATA PENGANTAR. | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH. | vi |
| ABSTRAK. | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GRAFIK..... | xii |
| DAFTAR PUSTAKA. | xiii |
| | |
| 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Permasalahan..... | 7 |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian..... | 10 |
| 1.4 Tujuan. | 10 |
| 1.5 Signifikansi Penelitian. | 11 |
| A. Signifikansi Teoretis. | 11 |
| B. Signifikansi Praktis..... | 13 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... | 14 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka. | 14 |
| 2.1.1 Temuan hasil kajian pustaka mengenai ketidakberdayaan petani..... | 14 |
| 2.1.2 Temuan hasil kajian pustaka mengenai Revolusi Hijau. | 16 |
| 2.1.3 Temuan hasil kajian pustaka mengenai impor beras..... | 21 |
| 2.1.4 Temuan hasil kajian pustaka mengenai Perubahan Iklim. | 22 |
| 2.1.5 Rangkuman hasil kajian pustaka..... | 23 |
| 2.2 Kerangka Teori. | 25 |
| 2.2.1 Teori Dependensi Klasik yang Mengacu pada Penjelasan Sritua Arif dan Adi Sasono. | 25 |
| 2.2.2 Ketahanan Pangan (<i>Food Security</i>)..... | 28 |
| 2.2.3 Perspektif <i>Realism</i> | 30 |
| 2.2.4 Alur Berpikir..... | 32 |
| | |
| III. METODOLOGI PENULISAN. | 35 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian. | 36 |
| 3.2 Subjek Penelitian..... | 34 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.4 Proses Penelitian. | 39 |
| 3.5 Delimitasi dan Limitasi Penelitian. | 41 |
| 3.5.1 Delimitasi Penelitian..... | 41 |
| 3.5.2 Limitasi Penelitian. | 41 |
| 3.6 Sistematika Penulisan. | 42 |
| | |
| IV. DESKRIPSI TEMUAN LAPANGAN. | 44 |
| 4.1 Profil Lokasi Penelitian..... | 45 |
| 4.1.2 Gambaran Umum Desa Suruh. | 49 |

| | |
|---|------------|
| 4.2 Profil Informan..... | 51 |
| 4.4.1 Profil Informan 1..... | 51 |
| 4.4.2 Profil Informan 2..... | 52 |
| 4.4.3 Profil Informan 3..... | 53 |
| 4.4.4 Profil Informan 4..... | 57 |
| 4.4.5 Profil Informan 5..... | 58 |
| 4.4.6 Profil Informan 6..... | 60 |
| 4.4.7 Profil Informan 7..... | 61 |
| 4.4.8 Profil Informan 8..... | 62 |
| V. TEMUAN PENELITIAN..... | 63 |
| 5.1 Temuan Makro..... | 63 |
| 5.1.1 Beras adalah Komoditas Unik..... | 63 |
| 5.1.2 Komoditas Beras di Orde Baru: Kebijakan Revolusi Hijau..... | 67 |
| 5.1.3 Pasca Swasembada Beras: Industrialisasi dan Liberalisasi Pertanian..... | 73 |
| 5.1.4 Komoditas Beras di Era Reformasi: Kebijakan Impor Beras..... | 77 |
| 5.2 Temuan Mikro..... | 81 |
| 5.2.1 Kebijakan Perberasan di Desa Suruh pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Kehidupan Petani..... | 81 |
| 5.2.1.1 Hambatan Pembangunan Sub Sektor Pangan Beras di Masa Orde Baru..... | 85 |
| 5.2.2 Industrialisasi dan Liberalisasi Pertanian di Mata Petani di Desa Suruh..... | 86 |
| 5.2.3 Kebijakan perberasan di Desa Suruh pada Masa Reformasi dan Kehidupan Petani..... | 87 |
| 5.2.4 Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Memecahkan Persoalan Pertanian..... | 92 |
| 5.2.4.1 Masalah Perubahan Iklim dan Gagal Panen..... | 92 |
| 5.2.4.2 Proteksi Pemerintah terhadap Petani..... | 95 |
| 5.2.5 Antara Petani Pemilik Lahan, Petani Penggarap, dan Buruh..... | 97 |
| 5.2.6 Kelompok Tani di Desa Suruh dari Tahun ke Tahun..... | 100 |
| 5.2.6.1 Fungsi dan Tujuan dibentuknya Kelompok Tani..... | 101 |
| 5.2.6.2 Masalah yang ditemui di dalam Kelompok Tani..... | 103 |
| 5.2.7 KUD dan Kredit Usaha Tani sejak awal berdirinya di Desa Suruh..... | 105 |
| 5.2.7.1 KUD (Koperasi Unit Desa)..... | 105 |
| a. Masalah yang dihadapi..... | 106 |
| 5.2.7.2 KUT (Kredit Usaha Tani)..... | 107 |
| b. Masalah dan Hambatan..... | 108 |
| VI. ANALISIS..... | 113 |
| 6.1 Kebijakan Masa Pemerintahan Orde Baru..... | 113 |
| 6.2 Kebijakan Perberasan di Masa Pemerintahan Reformasi..... | 115 |
| VII. PENUTUP | |
| 7.1 Kesimpulan..... | 127 |
| 7.2 Rekomendasi..... | 133 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|------------|
| Tabel 1.1 Impor Beras 1990 sampai 1999 dan Rata-Rata periode 1985-1990 dan 1990-1997 (Ton)..... | 3 |
| Tabel 1.2 Klasifikasi Berbagai Tingkatan Instrumen Kebijakan Terpilih untuk Komoditas Padi/ Beras..... | |
| Tabel 3.1 Subjek Penelitian..... | 38 |
| Tabel 4.1 Data Curah Hujan Wilayah Kecamatan Suruh Tahun 2008... | 43 |
| Tabel 4.2 Pertumbuhan Produksi Padi dan Palawija di Kecamatan Suruh. | 45 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Suruh Tahun 2006 hingga 2011. | 46 |
| Tabel 5.1 Rata-Rata Pengadaan Beras dalam Negeri oleh Bulog (1969-1988)..... | 71 |
| Tabel 5.2 Luas Panen Tanaman Padi di Indonesia 1980-1988 (1000 ha). | 72 |
| Tabel 5.3 Komitmen penurunan Subsidi Ekspor Beras Periode 1995-2004. | 74 |
| Tabel 5.4 Kesepakatan GATT dalam bidang pertanian. | 75 |
| Tabel 5.5 Rangkuman Temuan Penelitian Makro dan Mikro..... | 110 |
| Tabel 6.1 Kategorisasi Isu Temuan Mikro di Masa Orde Baru..... | 115 |
| Tabel 6.2 Kategorisasi Isu Temuan Mikro di Masa Reformasi..... | 121 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Grafik 1.1 | Jumlah Kelaparan Tingkat Dunia dari Tahun 1969-2010 | 6 |
| Grafik 1.2 | 925 Juta Kelaparan akibat Krisis Pangan 2010. | 7 |
| Grafik 4.1 | Profesi Penduduk Kecamatan Suruh. | 45 |
| Grafik 4.2 | Jenjang Pendidikan Masyarakat Kecamatan Suruh menurut Data Terakhir Tahun 2010..... | 48 |
| Grafik 4.3 | Jumlah Penduduk Desa Suruh Menurut Pendidikan dari Tahun 2006-2011..... | 49 |
| Grafik 4.4 | Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian (Data Terakhir 2010). | 48 |
| Grafik 5.1 | Tren Konsumsi Beras Per Kapita 1961-2002..... | 79 |



BAB I PENDAHULUAN

Whether one speaks of human right or basic human needs, the right to food is the most basic of all. Unless that right is first fulfilled, the protection of other human rights becomes a mockery for those who must spend all their energy merely to maintain life itself..
(Presidential Commission on Hunger, 1980)

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang pernah memperoleh penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di Roma, Italia, atas keberhasilannya dalam mewujudkan swasembada pangan di tahun 1985 (Santosa, 2010:21). Atas penghargaan tersebut, Indonesia dijadikan contoh sukses (*success story*) bagi negara sedang berkembang lainnya untuk mengentaskan masyarakat dari kekurangan pangan. Hal ini dibuktikan di tahun 1960-an, produktivitas bibit padi tradisional yang hanya bisa mencapai 1,2 ton per hektar dan di tahun 1984, produktivitas rata-rata padi hasil rekayasa genetika di lahan sawah sudah mencapai 2,60 ton per hektar (Prabowo dalam Jurnal Renai, 2006: 150). Di samping itu, antara periode 1978 hingga 1986 produktivitas pertanian khususnya beras mengalami kenaikan hingga 5.6 % (Arifin, 2006:110).

Namun, apa yang diharapkan, yaitu swasembada beras yang berkelanjutan mengalami kendala. Periode pasca swasembada beras (tahun 1986 hingga 1997) mengalami masa dekonstruksi dimana sektor pertanian mengalami kontraksi tingkat pertumbuhan di bawah 3,4% per tahun karena sektor pertanian mengalami pengacuhan (*ignorance*) oleh para perumus kebijakan. Pengacuhan tersebut terjadi karena munculnya anggapan bahwa keberhasilan swasembada pangan telah memunculkan persepsi pembangunan pertanian akan dapat berjalan dengan sendirinya setelah mendapat pembekalan revolusi hijau (*taken for granted*) tetapi kenyataannya tidak demikian. (Arifin,dalam Jurnal Politika Vol.1 No.2 Agustus 2005: 111)

Kondisi yang kian memburuk terindikasi pada awal 1990-an ketika kebijakan pembangunan ekonomi beralih kepada pembangunan industrialisasi. (Arifin dalam jurnal

Universitas Indonesia

Politika, 2005:111) Konversi lahan pertanian untuk industri berlangsung secara massif, jumlah petani gurem membengkak, ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan semakin lebar. (Hafsah, 2011: 19 ; Amang dan Sawit, 1999) Pilihan untuk melakukan kebijakan industrialisasi pasca swasembada beras didorong oleh kondisi dimana Indonesia merasakan tekanan krisis di tahun 1985 dan 1986 sebagai akibat dari berkembangnya fluktuasi harga komoditas ekspor utama Indonesia di pasaran Internasional yang tidak menguntungkan. Bersamaan dengan itu muncul pula masalah kewajiban pembayaran cicilan hutang luar negeri dan bunganya yang jumlahnya cukup besar untuk pembiayaan pembangunan ekonomi dan sisa hutang dari warisan pemerintahan Orde Lama (Arief dan Sasono, 1987: 1).

Kondisi lain yang berpengaruh terhadap kebijakan beras adalah adanya kesepakatan negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN (Sawit dan Amang, 1999: 122) di bidang ekonomi, yaitu disetujuinya kawasan perdagangan bebas di negara-negara anggota ASEAN yang dikenal dengan nama *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tujuan dari dibentuknya sebuah gagasan dan kesepakatan tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan negara-negara di dalamnya sebagai negara basis produksi dunia. Kesepakatan penting yang dibentuk dalam AFTA tersebut terkait dengan nasib petani lokal, bahwa setiap hambatan perdagangan yang ada di dalam setiap negara harus dihapus demi memperlancar jalur perdagangan tersebut (*no trade barriers*). Dengan demikian, keberadaan AFTA memicu membanjirnya impor barang dari luar khususnya beras. Selain adanya bebas hambatan dalam perdagangan tingkat regional, beban tarif yang dikenakan juga tidak berpihak pada petani lokal dimana harga beras impor relatif lebih murah dibanding beras lokal. Kebijakan ini tampak bias konsumen dimana konsumen lebih mudah mengakses kebutuhan pangan dengan jenis variatif dengan harga yang murah. Tentunya hal ini memicu ketergantungan yang semakin tinggi, khususnya bagi para konsumen yang berada di perkotaan. Sementara, di sisi petani lokal, keberadaan mereka sebagai petani semakin terancam mengingat produksi beras lokal tersaingi oleh membanjirnya beras impor.

Selama periode 1990 hingga 1997, ketergantungan Indonesia terhadap impor beras rata-rata mencapai 800 ribu ton/ tahun. Tampak Indonesia hanya

mampu mempertahankan swasembada beras antara tahun 1984 hingga 1990 (Amang dan Sawit, 1999:165-167). Berikut adalah daftar impor beras di Indonesia sejak tahun 1990 hingga 1999.

Tabel 1.1 Impor Beras 1990 sampai 1999 dan Rata-Rata periode 1985-1990 dan 1990-1997 (Ton)

| Tahun | Impor |
|---------------------------------|----------------|
| 1990 | 29.839 |
| 1991 | 178.880 |
| 1992 | 634.217 |
| 1993 ¹ | -- |
| 1994 | 876.240 |
| 1995 | 3.014.204 |
| 1996 | 1.090.258 |
| 1997 | 523.626 |
| 1998 | 5.782.926 |
| 1999 ² | 2.500.000 |
| Rata-Rata: 1990—1997 | 793.408 |
| Rata-Rata: 1985—1990 | 101.324 |

Sumber: Amang dan Sawit, 1999

Mengacu pada data Departemen Pertanian, puncak impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia terjadi di tahun 1998 dimana tahun tersebut merupakan puncak dari krisis ekonomi di masa pemerintahan Orde Baru yang merembet pada harga pangan termasuk beras. Terbukti, selama Juli 1997 hingga September 1998, rata-rata harga eceran beras kualitas medium di daerah perkotaan meningkat sebesar 207%, yaitu dari Rp 958/kg menjadi Rp 2942/kg. Masalah ini sangat ironi sebab beras merupakan bahan pangan yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, yaitu menyumbang lebih dari 60% konsumsi kalori pada masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya harga beras yang mengalami kenaikan, harga gabah di tingkat petani juga mengalami peningkatan meskipun relatif lambat. Rata-rata harga yang diterima petani di Jawa untuk GKG (Gabah Kering Giling) naik 133%, yaitu dari Rp 530/kg pada

¹ Pada tahun 1993, Indonesia tidak mengimpor beras karena pemerintah pada saat itu memperkirakan produksi dalam negeri akan baik.

² Kondisi 1999 sama seperti kondisi yang dialami di tahun 1966-1967 dimana stok pangan yang minim dalam kelangkaan devisa serta *leter of credit* yang dikeluarkan Indonesia tidak laku di Luar Negeri (Tirtosudiro dalam Beddu Amang, 1999). Indonesia bulan September 1966 kepada para kreditor yang nonkomunis menggambarkan tingkat bencana nasional dimana inflasi tahunan terhitung melebihi 600%. (Ricklefs, 2008: 573-575)

Juli 1997 menjadi Rp 1236/kg pada September 1998. Kemudian, harga dasar gabah meningkat dari Rp 525/kg menjadi Rp 1500/kg sebelum 2001 (www.deptan.go.id). Permasalahan ini bukan hanya persoalan yang menyangkut ekonomi saja melainkan juga menjadi persoalan politik. Dengan demikian, strategi pemerintah dalam menangani krisis beras saat itu adalah dengan mengimpor sejumlah besar beras pada 1998. Harga beras perlahan-lahan mulai menurun. Rata-rata harga eceran beras di daerah perkotaan turun dari Rp 2942/kg pada September 1998 menjadi Rp 2300/kg pada pertengahan 2000, serta harga GKG di tingkat petani di Jawa turun dari Rp 1265/kg pada awal 1999 menjadi Rp 1030/kg pada April 2000. (www.deptan.go.id). Upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk meredam keresahan sosial akibat melambungnya harga beras.

Krisis beras di tahun 1998 membawa malapetaka tersendiri bagi petani lokal. Ketika harga gabah dan beras naik, harga di level petani justru anjlok. Namun, ketika harga di pasar menjadi melonjak naik, pemerintah membuat strategi menambah suplai beras melalui kebijakan impor guna menekan harga yang semakin membumbung tinggi. Di sini petani pun tidak diuntungkan karena dengan menekan harga, harga di level petani pun menjadi jatuh. Di tengah-tengah kondisi tersebut, petani semakin dihadapkan pada gejala perubahan iklim yang tak hanya dirasakan di Indonesia, yaitu fenomena El Nino dan La Nina yang menyebabkan merosotnya suplai beras yang sangat tajam (tahun 1998). (Sawit dan Amang, 1999: 164)

Selain fenomena perubahan iklim³ yang menjadi penyebab turunnya suplai beras, dampak kebijakan Revolusi Hijau pun juga menengarai penurunan suplai beras. Penggunaan sarana produksi seperti pestisida, pupuk kimia dan bibit padi rekayasa genetika telah menimbulkan resistensi bagi produktivitas padi. Penggunaan pupuk kimia dalam jumlah di atas batas normal sebagai syarat dari peningkatan produksi padi juga menyebabkan musuh alami bagi hama pemusnah tanaman padi menjadi berkurang sehingga tanaman padi menjadi rentan terhadap

³ Tahun 2002 merupakan tahun dimana bulan kering naik menjadi empat bulan dan merupakan bulan kering terpanjang selama 50 tahun terakhir. Perubahan iklim ini memberi dampak terhadap produktivitas pertanian/ tanaman pangan khususnya di daerah tropis (Boer dalam Prisma, 2010:85).

serangan hama (James J. Fox⁴). Dengan demikian, persoalan yang harus dihadapi petani tidak hanya sebatas masalah kebijakan yang bias terhadap konsumen tetapi juga faktor di luar kendali manusia yang menyebabkan produktivitas pertanian mengalami penurunan. Dengan demikian, ketika produksi pertanian khususnya beras mengalami penurunan, pemerintah akan mengatasinya dengan menambah suplai beras di dalam negeri melalui impor karena produksi beras lokal sudah tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Prinsip pemerintah dalam menerapkan kebijakan impor sangat sarat akan kepentingan politik. Keterbatasan suplai beras dalam negeri menyebabkan harga beras naik dan dampaknya stabilitas sosial politik negara akan terancam karena hanya masyarakat yang mampu yang dapat mengakses beras dengan harga tinggi. Dengan kata lain, masyarakat yang miskin dan tidak mampu bisa terancam kelaparan akibat dari sulitnya mengakses beras dengan harga murah.

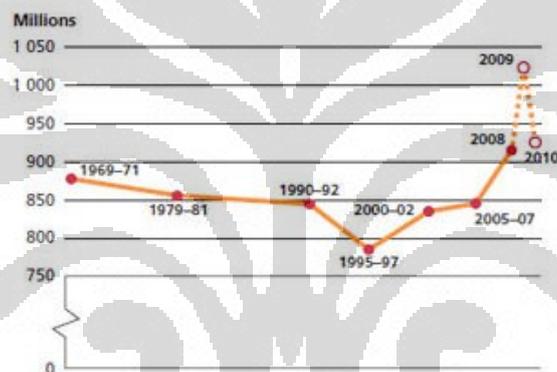
Kelaparan sangat identik dengan krisis beras karena sejak Orde Baru berkuasa, beras dijadikan alat untuk menilai kemakmuran dan indikator keberhasilan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan makmur jika masyarakatnya mengkonsumsi beras. Di samping itu, beras juga digunakan sebagai alat pembayaran gaji pegawai negeri dan TNI/Polri. Hal ini yang ingin dikatakan bahwa beras sejak masa Orde Baru telah dijadikan instrumen kekuasaan dan membentuk konstruksi sosial baru dimana beras adalah kebutuhan pangan pokok seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Salah satu implikasi berbasisasi yang diperkenalkan pada masa itu adalah kebijakan Revolusi Hijau sehingga kebijakan pangan telah mereproduksi kesamaan pemahaman ketahanan pangan dengan swasembada beras. Oleh karenanya, masalah kebijakan pangan dalam penelitian ini memfokuskan pada kebijakan beras yang berimplikasi kepada kerawanan pangan beras bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Mereka adalah golongan yang rentan terhadap akses pemenuhan beras untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Bila hal ini dibiarkan, kelaparan bagi golongan tersebut akan terjadi.

⁴ Di sampaikan di dalam Seminar “*Threats to The Indonesia Rice Crops and Farmer’s Prosperity*”
Universitas Indonesia

Lebih dari 1 milyar manusia di muka bumi ini menderita kelaparan kronis dan 13 hingga 18 juta manusia meninggal per tahun karenanya (dalam *The Hunger Project*, 1989:7). Dari keseluruhan total tersebut, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori *cronically hunger*. Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2007, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya 36 negara mengalami kelaparan krisis pangan yang salah satu diantaranya adalah Indonesia (Pamuji dalam Gatra, 27 Maret 2008, nomor 20).

Berikut adalah pergerakan grafik Jumlah Kelaparan di seluruh dunia dari tahun 1969 hingga 2010.

Grafik 1.1 Jumlah Kelaparan Tingkat Dunia dari Tahun 1969-2010



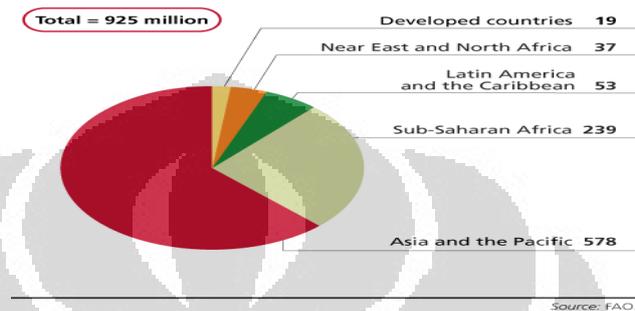
Sumber: FAO

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah angka kelaparan yang disebabkan oleh krisis pangan dunia. Dari tahun 1969 hingga 1997 jumlah kelaparan di belahan dunia mengalami penurunan. Bahkan, penurunan ekstrim jumlah kelaparan terjadi dari tahun 1992 hingga puncaknya 1997. Tahun 1997 merupakan titik terendah dari jumlah kelaparan di dunia. Namun, untuk kasus di Indonesia, tahun 1997 merupakan gerbang krisis besar yang dirasakan masyarakat. Produksi beras dalam negeri merosot mencapai -3,4% pada tahun 1997 dan menjadi -4,6% pada tahun 1998. Untuk mengisisi kekurangan tersebut, pemerintah terpaksa mengimpor beras yang cukup besar di tahun 1998 yaitu mencapai 5,8 juta ton yang merupakan rekor tertinggi impor selama 30 tahun terakhir dari tahun tersebut. (Amang dan Sawit, 1999: 165)

Berdasarkan data di dunia tahun 1997, kelaparan akibat krisis pangan (beras) mengalami kenaikan yang cenderung terjal hingga titik puncak krisis

pangan dialami tahun 2009 yang sekaligus juga merupakan titik balik penurunan jumlah kelaparan.⁵ Berikut adalah wilayah (*region*) yang mengalami kasus kelaparan pada tahun 2010. Untuk tahun 2010, di bawah ini tercantum wilayah-wilayah yang mengalami kasus kelaparan.

Grafik 1.2 925 Juta Kelaparan akibat Krisis Pangan 2010⁶



Sumber: FAO

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2010, Asia lah yang memiliki jumlah terbanyak dalam menderita krisis pangan, yaitu sejumlah 578 atau sebesar 62,5% dari total 925 juta jiwa dan Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang jumlah tersebut. Data tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa krisis pangan yang mengancam ketahanan pangan tidak hanya terjadi di beberapa tempat, khususnya Indonesia. Melihat secara makro untuk mengidentifikasi dan mencoba menyelesaikan masalah krisis pangan di Indonesia merupakan suatu hal kewajiban. Namun, adaptasi impor tidak dapat secara berkelanjutan menjadi sandaran ketika di dalam negeri mengalami lonjakan harga pangan akibat krisis karena roda pembangunan ekonomi di sektor pertanian dipegang kendali oleh petani lokal yang dalam setiap kebijakan selalu dikorbankan.

1.2 Permasalahan

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan tentang dinamika ketahanan pangan dari munculnya kebijakan Revolusi Hijau di Orde Baru hingga munculnya kebijakan impor beras di pemerintahan Reformasi. Implikasi dari setiap kebijakan

⁵ Hunger Notes Departement. 2011 World Hunger and Poverty Facts and Statistics. www.worldhunger.org.

⁶ Ibid.

pemerintah terhadap ketahanan pangan telah melahirkan berbagai masalah yang harus dibebankan kepada petani lokal. Salah satu penulis yang membahas tentang masalah ini adalah Maksim D. Prabowo⁷. Dia menjelaskan tentang kebijakan Revolusi Hijau di masa pemerintahan Orde Baru yang mana telah berimplikasi terhadap menurunnya produktivitas padi sebagai akibat dari resistensi tanah dan tanaman padi. Selain itu, perubahan iklim yang secara global tengah dirasakan pun tak luput juga dari sumbangan penggunaan sarana produksi pertanian yang sarat akan bahan kimia penyebab efek rumah kaca, seperti penggunaan pestisida dan pupuk urea yang kandungan nitrogennya tinggi. Akibatnya, produktivitas pertanian, khususnya beras bukannya mengalami kenaikan yang stabil melainkan mengalami penurunan sebagai akibat dari kebijakan pertanian yang tak ramah lingkungan tersebut.

Kedua, faktor internal yang menyangkut relasi antara petani dan pemerintah juga menjadi alasan mengapa petani selalu dijadikan korban atas kebijakan yang dibuat. Menurunnya suplai beras dalam negeri yang disertai dengan adanya kesepakatan internasional menyangkut perdagangan dan pertanian membuat petani semakin tidak berdaya dalam menjalankan perannya sebagai aktor yang memproduksi beras.

Ketika krisis pangan terjadi, harga kebutuhan pokok termasuk beras mengalami kenaikan dan pemerintah ingin menekan harga dengan memasukan suplai beras dari luar (impor) supaya kenaikan harga pangan tidak mengakibatkan masyarakat miskin kesulitan mendapatkannya. Namun, di sisi lain ketika kebijakan impor terus digulirkan alih-alih melindungi masyarakat miskin dari lonjakan harga, petani mengalami tekanan karena patokan harga yang ditetapkan pemerintah jauh lebih tinggi dibanding dengan realita harga jual petani.

Di satu sisi, ketika posisi petani sebagai konsumen, mereka harus membeli beras dengan harga yang lebih tinggi dari harga jualnya ketika mereka berperan sebagai produsen beras yang harus menjualnya ke pasar. Kondisi ini terjadi karena beberapa aturan kebijakan telah ditinggalkan. Beberapa aturan dalam perdagangan di bidang pertanian telah merujuk pada satu aturan kesepakatan yang dibuat sebagai dampak atas perdagangan bebas.

⁷ Lihat di bagian tinjauan pustaka

Tabel 1.2 Klasifikasi Berbagai Tingkatan Instrumen Kebijakan Terpilih untuk Komoditas Padi/ Beras⁸

| Tingkat Usaha Tani | Tingkat Pasar | Tingkat Nasional |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Subsidi harga output beras/ gabah (masih tetap dipertahankan harga dasar gabah) | <ul style="list-style-type: none"> • Bulog/ STE (<i>State Trading Enterprise</i>) dapat bertindak untuk meningkatkan/ menurunkan harga beras (sejak September 1998, telah dihapus dan harga beras akan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar) | <ul style="list-style-type: none"> • Tarif impor/ Pajak impor belum pernah dilakukan. Selama periode monopoli impor beras oleh Bulog, tarifnya 0%. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Subsidi harga input: benih, pupuk, pestisida dan lain-lain (semua subsidi input telah dihapus pemerintah) | <ul style="list-style-type: none"> • Intervensi pemerintah ke pasar dan stok publik untuk pangan (<i>general food subsidy</i>) telah dikurangi secara drastis, peran OPM (<i>operasi Pasar Murni</i>) semakin kecil. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Non tariff Barrier</i> (NTB) khususnya dalam bidang kesehatan/ label halal dan lain-lain belum ada di dalam komoditas beras. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Subsidi kredit untuk padi (kredit modal kerja atau KUT sebesar Rp 2 juta/ Ha, dengan bunga 10,5%/ tahun) | <ul style="list-style-type: none"> • Subsidi beras (OPK) untuk kelompok sasaran, perannya semakin besar dibandingkan dengan OPM. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuota impor (telah dihapuskan seiring dengan pencabutan monopoli Bulog) |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Land Reform/ Agrarian Reform</i> belum dilaksanakan walaupun memiliki UU Agraria, UU bagi hasil. | <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur pemasaran umumnya terpusat di Jawa | <ul style="list-style-type: none"> • Investasi publik seperti penyuluhan sangat rendah. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Investasi infrastruktur (irigasi dan percetakan sawah baru hamper terabaikan dalam 10 tahun terakhir demikian juga penyuluhan pertanian). Perluasan di lahan gambut 1 juta Ha, tetapi tidak berlanjut. | <ul style="list-style-type: none"> • Terbaikannya penanganan masa pasca panen sehingga besarnya kehilangan hasil dan merosotnya rendemen GKG ke beras. | |

Sumber: Amang dan Sawit dalam *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Era Reformasi*. 1999: 96

Instrumen kebijakan yang tergolong menjadi tiga: tingkat usaha tani, pasar dan nasional yang telah dijabarkan pada tabel di atas tampak kurang memberi proteksi pada petani sebagai aktor yang menggerakkan iklim ketahanan pangan nasional (dalam negeri). Dengan kata lain, liberalisasi pertanian telah diberlakukan sebagai kebijakan yang sekaligus menjadi motor penggerak bagi petani dan pemerintah di negara dunia ketiga dalam mewujudkan ketahanan

⁸ Beddu Amang dan M. Husein Sawit. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Era Reformasi*. 1999. Bogor: Penerbit Institut Pertanian Bogor. Hlm. 96

pangan dunia. Kemudian, adanya tarif 0% pada impor beras menjadi hal yang menyulitkan bagi petani baik sebagai produsen maupun konsumen karena harga padi/ gabah nasional akan semakin anjlok dengan adanya beras saingan dari luar yang lebih murah. Padahal, sehari-harinya petani sangat bergantung pada pendapatan dari hasil panen beras tetapi dengan masalah yang bertumpuk-tumpuk (suplai beras menurun akibat kebijakan revolusi hijau dan perubahan iklim, saingan suplai beras impor, peran mekanisme pasar) pendapatannya tersebut sangat minim untuk memenuhi kebutuhan lain selain makan. Kebutuhan untuk konsumsi pangan mereka bisa menghabiskan 70% hingga 80% dari total pendapatan jika harga pangan mengalami kenaikan (Arifin. dalam Media Indonesia, 2 Februari 2011: 21). Bila 70% dari total pendapatan mereka dialokasikan untuk kebutuhan pangan, sisanya sebesar 30% dibelanjakan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, listrik, air dan lainnya. Dengan demikian, permasalahan yang menimpa kehidupan petani ini akan semakin menambah jumlah kemiskinan di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berawal dari penjelasan dinamika ketahanan pangan yang mengerucut fokus permasalahan yang diutarakan di bagian ini, peneliti ingin mengajukan pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan ketahanan pangan di masa Orde Baru dan Reformasi menyangkut masalah ketahanan pangan serta implikasinya terhadap petani (Studi Kasus di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang)?
2. Bagaimana peran negara dalam membangun kapasitas adaptasi petani penggarap terhadap kendala produksi gabah/ beras?

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan. Pertama, mendeskripsikan kebijakan ketahanan pangan di masa Orde Baru dan Reformasi terkait serta implikasinya terhadap petani. Kedua, peneliti ingin menjabarkan peran negara dalam melakukan pembangunan

kapasitas adaptasi petani terhadap kendala yang dihadapi selama proses produksi. Deskripsi ini dilakukan dengan meneliti kasus ketahanan pangan di Desa Suruh karena lahan sawah di Desa Suruh masih belum mengalami pengalihan fungsi lahan menjadi lahan industri dari masa Orde Baru hingga saat. Selain itu, produksi padi menjadi kebutuhan pokok masyarakat setempat. Selain itu, Desa Suruh memiliki peran penting dalam sistem irigasi di dalam satu wilayah kecamatan. Dengan kata lain, sistem irigasi di Desa Suruh merupakan inti dari hidup matinya pertanian di dalam satu Kecamatan.

Melalui studi ini juga diharapkan dapat dirumuskan kontribusi dalam proses membangun pengetahuan pembaca tentang perubahan yang terjadi di bidang ketahanan pangan, khususnya untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi pertanian di daerah penelitian. Penjelasan mengenai perubahan sosial akan dijelaskan secara komperhensif. Hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran mendalam tentang relasi antara negara (pemerintah), pasar dan petani di Desa Suruh yang dalam perjalanan sejarahnya dan perkembangan di wilayahnya menjadi bagian dalam satu kebijakan dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

Lebih lanjut, peralihan kepemimpinan Orde Baru ke Reformasi dengan munculnya kebijakan impor juga akan diwarnai dengan penjelasan terkait gejala perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan.

1.4 Signifikansi Penelitian:

A. Signifikansi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan relevansi terhadap teori perubahan ekonomi dan pembangunan dan sosiologi lingkungan. Dalam konteks sosiologi perubahan ekonomi dan pembangunan, penelitian ini akan dijelaskan dengan teori dependensi klasik dalam menjelaskan peran negara yang tidak lepas dari ketergantungan kekuatan ekonomi dunia.

Penelitian ini juga memaparkan hasil temuan lapangan dengan mengaitkan faktor keunikan sejarah yang menjelaskan dan menentukan arah pembangunan ketahanan pangan dari masa pemerintahan Orde Baru hingga

Reformasi dengan mengangkat variasi di tingkat mikro. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketergantungan petani terhadap pemerintah dalam hal mendapatkan sarana produksi dan perkreditan dalam membangun pondasi ekonomi pangan.

Dalam studi sosiologi lingkungan, khususnya perspektif *realism* yang juga digunakan sebagai kerangka dalam penelitian ini mencoba untuk digunakan sebagai kaca mata dalam melihat dampak perubahan iklim dan penggunaan sarana produksi terhadap masalah ketahanan pangan. Secara teoretis, perspektif ini menekankan pentingnya memasukkan faktor fisik/ alam sebagai variabel untuk menganalisis masalah lingkungan dimana perubahan iklim telah menyebabkan munculnya serangan hama wereng yang menghabiskan padi petani setempat.

Digunakannya perspektif ini dalam menganalisis juga memungkinkan peneliti untuk melihat isu-isu ini lebih objektif dari dampak perubahan iklim sebagai faktor fisik/ alam yang mempengaruhi kehidupan sosial petani dalam hal ketahanan pangan. Tanpa harus menunggu adanya konsensus bahwa perubahan iklim merupakan masalah karena perubahan iklim telah jelas mengganggu ketahanan pangan.⁹

Adakalanya, sebuah teori tidak dapat digunakan untuk melihat fenomena di beberapa seting wilayah dan waktu. Dengan demikian, menjadi menarik bagi peneliti ketika di dalam penelitian yang dilakukan menemukan hal-hal baru yang kemudian dapat menunjukkan seberapa jauh relevansi perspektif *realism* di dalam kajian sosiologi lingkungan dan teori dependensi klasik dalam studi sosiologi perubahan ekonomi dan pembangunan yang dikaitkan dengan masalah ketahanan pangan. Namun, hal ini bukan berarti strategi untuk membenarkan atau menyalahkan sebuah teori. Peneliti hanya ingin menjadikan teori tersebut sebagai batu pijakan untuk membantu menganalisis masalah ketahanan pangan dalam satu kerangka struktur negara.

⁹ Dampak perubahan iklim bisa secara langsung maupun tidak langsung melalui serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). Fluktuasi suhu dan kelembaban udara yang semakin meningkat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan OPT yang berdampak buruk terhadap pertanian di Indonesia. Peningkatan kejadian iklim ekstrim yang ditandai dengan fenomena banjir dan kekeringan, perubahan pola curah hujan yang berdampak pada pergeseran musim dan pola tanam, fluktuasi suhu dan kelembaban udara yang semakin meningkat yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan OPT. Pengaruh kejadian iklim ekstrim tersebut seringkali menstimulasi ledakan (*outbreak*) beberapa hama dan penyakit utama tanaman. (www.balitiklimat.litbang.deptan.go.id, 2011).

B. Signifikansi Praktis

Ketahanan pangan sangat berpengaruh terhadap urat-urat kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan basis dari masalah kemiskinan dan kelaparan yang pada akhirnya berimbas pada tatanan struktural dan sistem di dalam masyarakat. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan juga dapat memberi rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan khususnya dalam hal mengurangi ketergantungan kebijakan impor yang menyebabkan kerugian pada petani lokal.

Rekomendasi atau usulan kebijakan yang akan diberikan dari hasil penelitian ini terkait dengan ketahanan pangan yang melibatkan kebijakan impor dan adanya pengaruh perubahan iklim adalah dengan menerapkan sistem ekonomi sosiologi kelembagaan baru (Oleh Victor Nee) pada lembaga pertanian Desa Suruh. Usulan ini didasarkan atas fakta-fakta di lapangan yang menggambarkan ketidakberdayaan petani dalam menghadapi kebijakan pemerintah, khususnya impor. Ditambah lagi adanya pengaruh faktor di luar kendali manusia, yaitu faktor alam yang menyebabkan petani semakin tidak berdaya. Oleh karenanya, kebijakan ini diarahkan kepada pemberdayaan petani dan kelembagaan yang mengarah kepada ketahanan pangan yang berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKAN DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan perkembangan penelitian tentang isu kebijakan impor dan perubahan iklim terkait dengan ketahanan pangan. Kedua, dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, di bagian akhir akan diletakkan posisi penelitian ini mengenai isu kebijakan impor beras dan perubahan iklim terkait ketahanan pangan.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, peneliti mengkategorisasikan temuan lapangan sebagai berikut: (1) Ketidakberdayaan petani, (2) Kebijakan tarif impor beras, (3) Revolusi hijau, dan yang terakhir (4) Perubahan Iklim. Berdasarkan keempat temuan pustaka tersebut, peneliti mengelaborasi keterkaitannya satu sama lain dan di akhir penjelasan ini, peneliti akan menjelaskan posisi penelitian berdasarkan dari hasil temuan pustaka yang telah di dapat.

2.1.1 “Krisis Pangan dan Ketidakberdayaan Pengelolaan Petani (Kasus di Desa Reksosari, Kecamatan suruh, Kabupaten Semarang)”. Soeratman (Ed). 2008. Percik: *The Institute for Social Research Democracy and Social Justice*.

“Temuan hasil kajian pustaka mengenai ketidakberdayaan petani”

Penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi ketahanan pangan yang melibatkan unsur sumber daya penggerak, yaitu petani. Dijelaskan dalam tulisan ini bahwa petani sebagai subjek yang mengelola produktivitas padi cenderung kurang memperhatikan pola pengelolaan lahan pertanian yang berdampak pada perubahan iklim. Salah satu contohnya adalah dalam penggunaan pupuk. Mereka tidak menggunakan pupuk berimbang padahal mereka telah mengetahui manfaat penggunaan pupuk berimbang yaitu dapat meningkatkan produktivitas. Keterbatasan modal menjadi kendala. Petani tidak bisa membedakan antara kebutuhan sarana produksi (saprodi) dan kebutuhan rumah

tangga sehingga penggunaan pupuk tergantung dari jumlah uang yang dimiliki petani saat itu. Akhirnya petani tidak dapat meningkatkan produktivitas lahan.

Petani semakin terpuruk terhadap penyediaan modal. Kebutuhan pembelian sarana produksi sering dikalahkan oleh kebutuhan lain dalam rumah tangga (pendidikan, sosial, ekonomi) dan ketidakberdayaan petani penggarap dalam mengakses modal dari pemilik lahan. Pada kenyataannya, penggarap mengalami dilema yang berkepanjangan. Dalam mengelola lahan, pemilik tidak peduli terhadap kesulitan penggarap. Penggarap harus menanggung beban biaya produksi padahal biaya produksi (termasuk tenaga kerja) mencapai 20-30% dari hasil panen. Sedangkan pemilik lahan menerima 50% dari hasil panen. Dengan demikian, seluruh beban biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh pemilik lahan.

Ketidakberdayaan pengelolaan petani dalam pengelolaan usaha tani menjadi dilema antaranya disebabkan oleh: (1) Petani penggarap tunduk terhadap aturan pemilik lahan karena mereka takut kehilangan haknya untuk menggarap sawah, tentunya hal ini mengakibatkan hilangnya pendapatan mereka, (2) Petani penggarap enggan memakai pupuk kandang/ organik karena biaya produksi yang ditanggungnya lebih mahal. Sementara hasil panen dibagi rata antara penggarap dan pemilik tanpa memperhitungkan biaya produksi, (3) Pemilik lahan tidak memperhatikan rehabilitasi lahan sehingga petani penggarap hanya berpikir untuk kepentingan produktivitas lahan saat itu, (4) Keterbatasan modal petani penggarap untuk biaya produksi sulit dipisahkan dengan kebutuhan keluarga sehingga terjadi pengurangan dosis pupuk dan penggunaan pupuk tidak mengikuti teknologi (pemupukan berimbang), (5) Pemberdayaan oleh dinas/ instansi hanya ditunjukkan kepada petani penggarap padahal keputusan pengelolaan petani berada di pemilik lahan, (6) Petani penggarap sulit mendapatkan jenis pekerjaan lain kecuali buruh.

Selain masalah internal di dalam hubungan petani, terdapat masalah eksternal yang dianggap cukup sulit bagi petani untuk memposisikan diri di dalam posisi tawar, yaitu dengan adanya pasar bebas. Adanya pasar bebas membuat petani justru semakin meminggirkan posisi petani (subsidi kebutuhan produksi

petani yang secara prosedural rumit, dan adanya bantuan langsung yang kurang disesuaikan dengan kondisi setempat).

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah ketahanan pangan menjadi isu pokok dalam penelitian. Faktor-faktor yang mendorong tercapainya ketahanan pangan berkaitan erat dengan relasi antar petani (tingkat usaha tani), negara sebagai pembuat kebijakan (adanya keterlibatan pasar bebas), dan dampak penggunaan produk-produk tak ramah lingkungan. Berdasarkan semua faktor yang menjadi pembahasan dalam penelitian Soeratman ini membantu peneliti dalam memetakan masalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Desa Suruh mengingat penelitian Soeratman dilakukan di daerah yang memiliki karakter sosial sama dengan lokasi penelitian peneliti. Selain itu, penelitiannya yang juga merupakan salah satu daerah di Kecamatan Suruh membantu peneliti mengidentifikasi persoalan dan tantangan yang menghambat dan mendorong terciptanya ketahanan pangan di Desa Suruh. Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan bisa menjadi pelengkap untuk analisis penelitian ini terutama tentang penjelasan petani penggarap/ buruh berada pada posisi yang selalu terjepit, baik dengan petani pemilik, negara selaku pemangku kebijakan, dan keberadaan pasar bebas.

2.1.2 “Globalisasi Pangan dan Pertanian Lokal: Berkaca dari Revolusi Hijau”. Maksim D Prabowo. 2006 (Dalam Globalisasi Pangan, Jurnal Renai, Tahun VI No.2, 2006). Salatiga: Percik

“Temuan hasil kajian pustaka mengenai Revolusi Hijau”

Dalam tulisan ini, Maksim mencoba memaparkan pengalaman-pengalaman dalam penerapan teknologi benih rekayasa genetika, keuntungan dan dampak-dampaknya serta upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari dampak buruk yang terjadi. Penerapan teknologi canggih tersebut merupakan upaya yang wajar dilakukan oleh sebuah negara untuk mewujudkan politik kemakmuran bagi rakyatnya. Indikator konkret untuk mengukur kemakmuran tersebut adalah kecukupan pangan yang dalam hal ini adalah beras sebagai makanan pokok.

Varietas padi modern sebagai faktor peningkatan produksi terus diupayakan keberadaannya di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pengenalan

Universitas Indonesia

jenis padi (pertama di Indonesia) varietas IR-8 yang merupakan persilangan antara padi Peta dari Indonesia yang kuat pertumbuhannya dengan jenis Dee-geo woo, varietas kecil dari Taiwan yang memiliki banyak anakan.

Dalam tahap selanjutnya, varietas padi modern tidak hanya berupa hasil persilangan dua atau lebih varietas padi tetapi sudah merupakan produk rekayasa genetika yang kemudian menghasilkan beragam varietas dalam waktu cepat. Ciri-ciri padi hasil rekayasa genetika umumnya antara lain: (1) Penggunaan pupuk nitrogen (urea) yang banyak, (2) Persediaan air yang banyak sehingga hanya cocok digunakan untuk lingkungan sawah beririgasi. Terkait dengan masalah ketersediaan air, di masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan saluran irigasi dan bendungan marak dilakukan. Dalam proses tersebut, masyarakat desa menjadi korban kebijakan karena lahan tempat tinggal mereka terpaksa dikorbankan untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional.

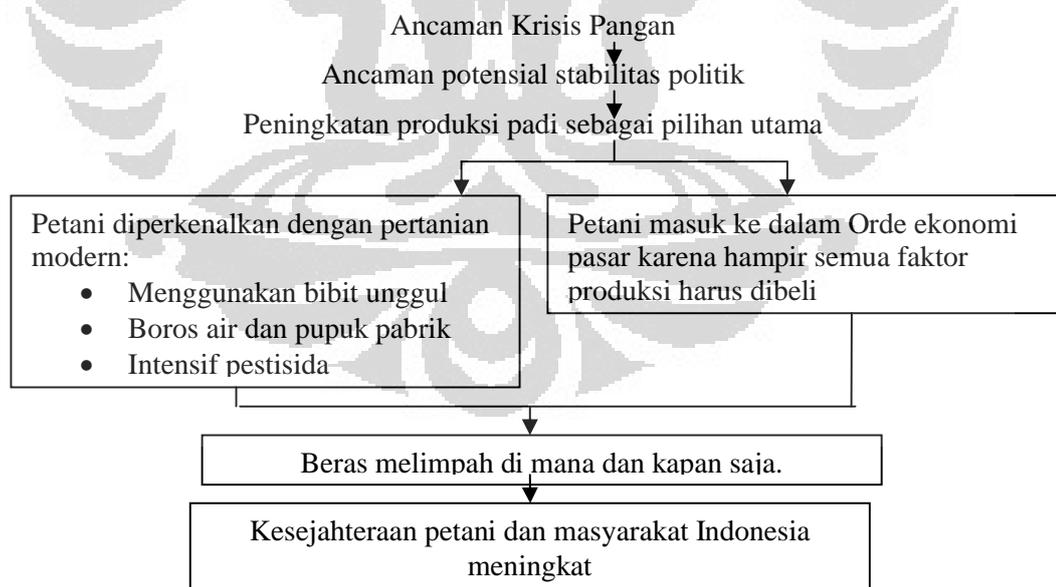
Ketergantungan petani terhadap ketersediaan faktor-faktor produksi pertanian memang menjadi ciri dari penerapan produk rekayasa genetika. Petani lantas tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut sendiri mereka harus membeli benih bersertifikat untuk mendapatkan produksi yang berkualitas. Pupuk alami (pupuk kandang) sudah tidak lagi sesuai digunakan untuk benih rekayasa genetika. Petani pun harus menyemprot pestisida untuk memperkecil ancaman yang melumpuhkan hama penyakit tanaman.

Beberapa dampak sosial dari kondisi yang dipaparkan di atas dicoba dipaparkan oleh Maksim sebagai berikut: *Pertama*, institusi-institusi tradisional seperti lumbung padi desa untuk tempat persediaan benih, kegiatan simpan pinjam level RT atau Dukuh tidak lagi berfungsi. Peran-peran mereka digantikan oleh institusi-institusi baru (modern) seperti PT Pusri sebagai penyedia pupuk, Perum Hyang Sri yang memonopoli penjualan benih bersertifikat, BRI sebagai lembaga penyedia dana bantuan pertanian (kredit pertanian), KUD dan DOLOG yang diharapkan menampung hasil produksi pertanian. Dengan kata lain, ikatan-ikatan sosial tradisional kian memudar seiring dengan munculnya kebijakan rekayasa genetika untuk mendapat produktivitas pertanian yang unggul. *Kedua*, perubahan sosial juga tampak pada hilangnya kesempatan kerja buruh tani perempuan yang

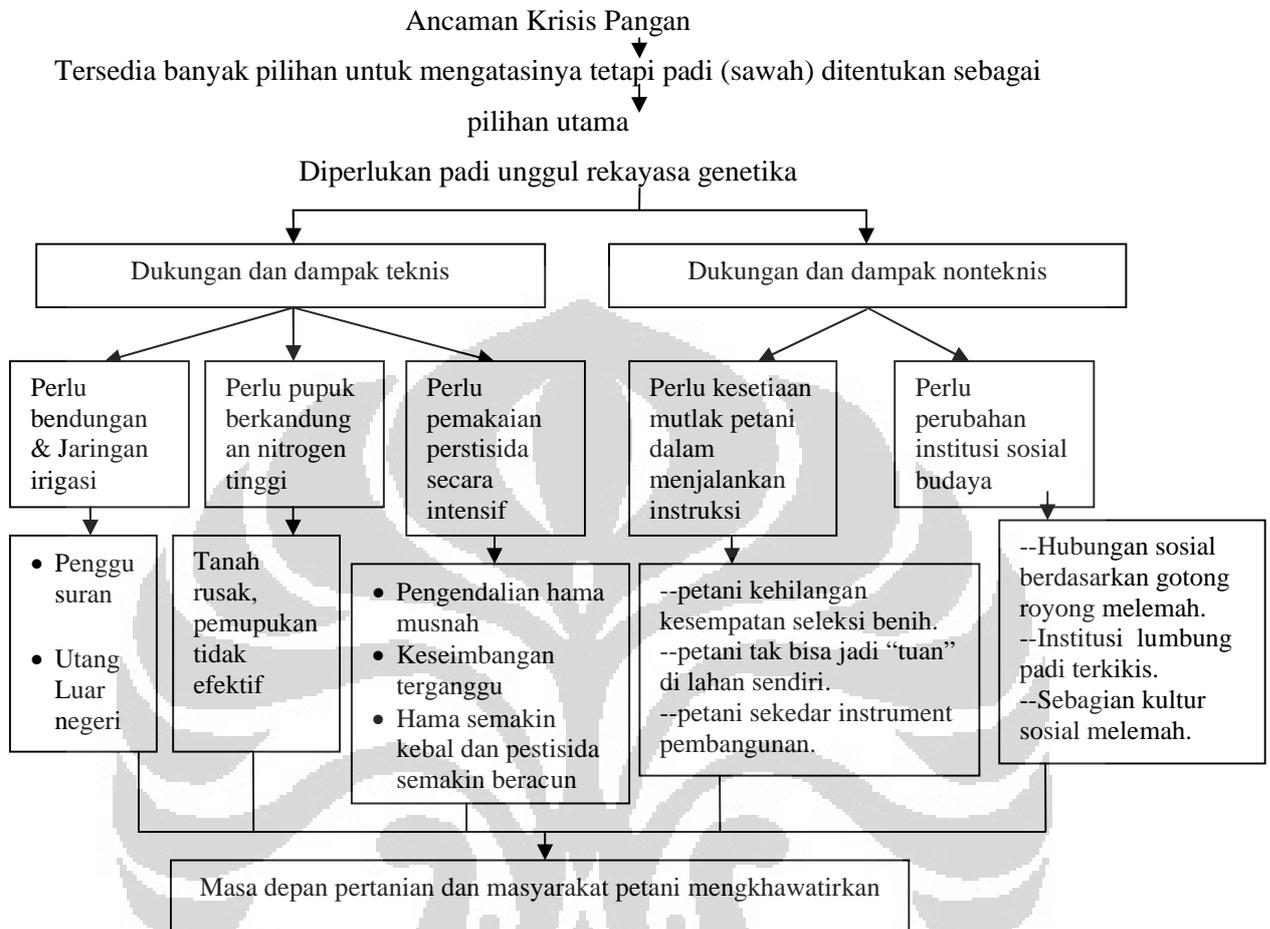
dulunya melakukan panen dengan alat pemotong padi bernama *ani-ani*. Hasil produksi padi dari rekayasa genetika tidak lagi bisa menggunakan alat tersebut untuk memotong padi karena padi lebih pendek dan mudah rontok sehingga dibutuhkan proses panen cepat yang mana itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki (penggunaan traktor dan sabit). Buruh perempuan tidak hanya kehilangan kesempatan kerja saat musim panen saja tetapi juga saat proses produksi. Saat mengolah padi, perempuan tidak lagi digunakan. Awalnya para perempuan membentuk kelompok sosial untuk melakukan penumbukan padi secara bersama tetapi setelah adanya produk rekayasa genetika, proses tersebut digantikan dengan alat yang dinamakan *huller* (pengupas kulit padi) yang kerjanya lebih cepat dan efisien.

Berikut pemaparan Maksim mengenai dua pandangan terhadap kebijakan Revolusi Hijau di masa pemerintahan Orde Baru. Pertama, dia memaparkan bagan mengenai pandangan optimistik terhadap kebijakan tersebut. Kedua, dia memaparkan alur pemikiran mengenai pandangan pesimistik mengenai kebijakan Revolusi Hijau.

Pandangan Optimistik terhadap Revolusi Hijau



Pandangan Pesimistik terhadap Revolusi Hijau



Dia menyatakan bahwa tidak semua orang bisa melihat ke depan untuk memahami kebijakan dari pemerintah. Petani hanya memiliki pemahaman bahwa dirinya harus membeli pupuk pabrik supaya tanamannya tumbuh dengan baik. Mereka menggunakan pestisida agar hama tidak menyerang tanaman produksinya. Jenis tanaman padinya pun sesuai dengan apa yang telah diharuskan oleh pemerintah. Sedangkan penyuluh pertanian hanya memiliki kesadaran terkait dengan tugas-tugasnya: memberi saran tentang pola tanam, penyemprotan dan lainnya. Para kepala desa atau lurah di masa pemerintahan Orde Baru pun hanya memiliki kesadaran meningkatkan produksi padi di wilayahnya guna memenuhi target-target yang ditetapkan di tingkat kecamatan atau kabupaten. Namun, aktor-aktor tersebut tidak memahami apa dan siapa yang bekerja di balik proses perubahan yang mereka alami.

Selain masalah itu, dia juga menyatakan bahwa tidak mudah melihat “biaya” dan penerapan teknologi tinggi secara reflektif dan kritis. Penerapan teknologi menurut Herbert Marcuse memiliki potensi menimbulkan perbudakan baru (rasa enak, nyaman, serta menciptakan kebutuhan semu yang ditanamkan ke dalam benak banyak individu demi kepentingan kapital).

Hasil penelitian Maksim ini memberi elaborasi pada peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan, khususnya masalah revolusi hijau yang menjadi babak awal dari pembahasan penelitian ini. Perubahan yang digambarkan dalam penelitian ini memberi kerangka pikir bagi peneliti bahwa kondisi struktural yang menciptakan revolusi hijau sebagai kebijakan ketahanan pangan menciptakan nilai-nilai baru. Selain itu, tambahan pengetahuan mengenai rekayasa genetika untuk membantu menjelaskan mengapa pemerintah pada saat itu menggunakan taktik rekayasa genetika untuk meningkatkan keuntungan secara nasional dalam rangka kepentingan politik. Hal ini terkait dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu perspektif *critical realism* yang mencoba mengelaborasi sebab dari realitas sosial dengan mengkombinasikan antara faktor fisik dan faktor sosial. Faktor fisik disini adalah perubahan iklim yang mengubah siklus cuaca dan sangat berpengaruh terhadap pola tanam petani. Adanya perubahan iklim di sini dilihat sebagai faktor fisik yang tanpa menunggu kesepakatan bahwa hal tersebut merupakan persoalan yang menyangkut kepada faktor sosial. Secara lebih jelas, iklim merupakan faktor penting yang menjadi perhatian petani khususnya dalam hal penanaman hingga panen. Jika perubahan iklim terjadi, petani akan kesulitan dalam menentukan masa tanam dan panen karena cuaca tidak dapat diprediksikan secara stabil. Hal ini bisa dikarenakan oleh curah hujan yang tinggi dan dalam waktu yang berkepanjangan atau bisa juga dikarenakan kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan.

Di samping hal tersebut, peneliti juga menemukan beberapa temuan data yang sama dengan penelitian yang dilakukan Maksim, antara lain: (1) Perubahan institusi dan lembaga pertanian dengan adanya kebijakan Revolusi Hijau di masa pemerintahan Orde Baru, (2) Perubahan kesempatan kerja pada perempuan di dalam proses produksi pertanian, (3) Pemahaman petani dan penyuluh terhadap peran masing-masing. Berdasarkan dari ketiga temuan lapangan Maksim yang

Universitas Indonesia

relevan dengan temuan lapangan peneliti mempertegas bahwa teknologi berpotensi menciptakan perbudakan baru demi kepentingan kapitalis.

2.1.3 “Analisis Pengaruh Tarif (Bea Masuk) Impor Beras terhadap Harga Eceran Beras di Indonesia”. Djarot Utomo. 2006. Thesis: Perencanaan dan Kebijakan Publik. FE UI

“Temuan hasil kajian pustaka mengenai impor beras”

Tulisan ini memaparkan tentang pengaruh tarif bea masuk impor terhadap harga eceran beras domestik. Penulis menjelaskan hasil analisisnya tersebut melalui analisis Regresi dimana didapatkan bahwa harga eceran beras Indonesia dipengaruhi secara nyata oleh selisih antara harga eceran beras domestik terhadap harga eceran beras dunia, tarif bea masuk impor beras, kurs rupiah terhadap dolar AS, dan PDB.

Namun, berdasarkan analisis koefisiensi, tarif impor bertanda negative. Hal ini dikarenakan selama periode pengenaan bea masuk tarif bea masuk (empat tahun) tren harga beras eceran domestik menurun dan pengaruh tarif masuk tidak signifikan. Artinya, harga beras eceran domestik sebelum dan sesudah dikenakan tarif bea masuk tidak berubah secara nyata.

Penulis menyebutkan beberapa alasan mengapa beban tarif bea masuk impor tidak signifikan, antara lain:

1. Perbandingan antara jumlah impor beras dan jumlah produksi beras domestik hanya merupakan bagian kecil mengingat impor hanya dilakukan bila produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk menutup konsumsi dalam negeri. Jumlah impor beras akan signifikan ketika terjadi penurunan produksi dalam negeri yang sangat drastic seperti ketika terjadi el nimo dan la nina.
2. Impor beras cenderung tidak untuk dipasarkan tetapi untuk pemenuhan stok beras di dalam negeri, seperti untuk operasi padar murni dan untuk operasi pasar khusus.
3. Tarif impor (bea masuk) beras baru dikenakan mulai tahun 2000 dengan rata-rata impor hanya 1 juta ton beras dan pada tahun 2004 terdapat

larangan impor beras karena produksi beras dalam negeri melebihi konsumsi. Dengan demikian, bila dibandingkan data selama 21 tahun maka pengaruh tarif bea masuk beras menjadi kurang signifikan.

4. Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan masuknya beras dari luar negeri (impor beras) terbukti bahwa masih terdapat perbedaan data transaksi antara negara eksportir beras seperti Vietnam, Thailand dan Cina dengan data yang masuk dengan pemberitahuan formal.

2.1.4 “Climate Change and Food Security”. P.J Gregory (ed). 2005. Philosophical Transactions of The Royal Society.

“Temuan kajian pustaka mengenai perubahan iklim”

Dinamika interaksi yang terjadi di dalam lingkungan biogeofisika dengan lingkungan manusia senantiasa menghasilkan sistem ketahanan pangan yang secara kesinambungan melalui proses produksi, distribusi, pemrosesan, serta konsumsi makanan. Sistem ketahanan pangan ini meliputi: ketersediaan (produksi, distribusi, dan pertukaran), akses pangan (daya beli, alokasi, dan pilihan) dan penggunaan pangan (nutrisi, nilai-nilai sosial, dan keselamatan). Namun, ketersediaan ketahanan pangan ini tak bisa dilepaskan oleh faktor-faktor eksternal yang mana dalam penelitian ini lebih mengacu pada pengaruh perubahan iklim terhadap penyusutan ketersediaan pangan.

Perubahan iklim, disebutkan dalam tulisan ini tidak hanya mempengaruhi beberapa sistem pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung digambarkan dengan kondisi curah hujan yang tidak menentu yang pada akhirnya berakibat pada gagal panen. Namun, terdapat rantai kondisi selain dari dampak tersebut, yaitu pengaruh harga pangan di pasar yang juga mengalami perubahan. Kondisi semacam ini tentu memberi pengaruh yang kuat terhadap masyarakat sebagai konsumen yang bergantung pada sektor pangan.

Not all food systems or parts of food systems are equally vulnerable to environmental changes because the capacity to cope with existing variability in bio-physical and socio-economic systems, and the ability of humans to perceive environmental changes and to adapt food systems, differs. Human vulnerability includes both the likelihood of

*exposure to stresses as well as the capacity to cope with such stresses....*¹⁰

Tidak semua sistem atau bagian dari sistem pangan memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim. Hal ini dikarenakan sistem bio-fisik, sistem sosial ekonomi, dan kapasitas sumber daya manusia dalam menerima dan merasakan perubahan iklim tidak sama. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda di dalam merespon kondisi iklim yang membuat mereka berpikir “*how can I survive*”.

Selebihnya, tulisan ini menjelaskan pula tentang bagaimana masyarakat (*human societies*) melakukan proses adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan. Di beberapa belahan dunia, khususnya di daerah semi kering, masyarakat melakukan strategi tertentu saat kekeringan datang melanda. Mereka kembali pada *indigenous knowledge* atau pengetahuan lokal yang membawa nilai-nilai bagaimana tentang menjaga alam.

Kesimpulan yang didapat dari tulisan ini adalah bahwa perubahan iklim merupakan satu dari banyak penyebab ketahanan pangan. Dan setiap wilayah atau kelompok masyarakat tertentu memiliki cara yang tidak sama dalam merespon perubahan iklim tersebut.

Tulisan yang berfokus pada dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan ini digunakan sebagai salah satu acuan kerangka pikir dalam penelitian ini karena memiliki relevansi, yaitu penjelasan mengenai perubahan iklim yang membawa dampak pada krisis pangan dan faktor stabilitas harga pangan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan apa yang ingin dibahas. Selain itu, tulisan ini memberi gambaran tentang adaptasi masyarakat pertanian untuk mengantisipasi krisis pangan yang mana dijadikan solusi untuk memecahkan masalah krisis pangan di dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu bagaimana menciptakan masyarakat yang memiliki kemandirian dan keberlanjutan.

¹⁰ *Food system* didefinisikan sebagai seperangkat interaksi yang dinamis antara faktor biogeofisik dan lingkungan manusia yang menghasilkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Interaksi tersebut melibatkan (i) ketersediaan pangan (ii) akses pangan, dan (iii) pemanfaatan pangan. Selain itu, food sistem melibatkan perhatian yang lebih luas lagi dari masalah produktivitas pangan itu sendiri. (FAO 1996).

2.1.5 Rangkuman Hasil Kajian Pustaka

Pada bagian ini, penulis akan merangkum keterkaitan antara hasil temuan hasil pustaka satu dengan yang lain. Temuan hasil pustaka mengenai ketidakberdayaan petani sebagai aktor penggerak di sektor pangan selalu berada pada pihak yang kurang menguntungkan, baik dengan petani pemilik lahan, pemerintah, dan kepentingan asing. Selain dari faktor manusia, ketidakberuntungan petani juga dirasakan dalam hal menghadapi kebijakan tarif impor beras dan perubahan iklim.

Soeratman, dari penelitiannya di Daerah Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa adanya perubahan iklim merupakan imbas dari pengelolaan lahan pertanian, khususnya penggunaan pupuk yang tidak ramah lingkungan. Petani lebih menggunakan pupuk yang tak berimbang (pupuk kimia) sehingga kondisi tanah menjadi rusak. Sama halnya yang dikemukakan oleh P.J. Gregory et al (1999) yang menemukan kecenderungan pola yang sama. Produksi gandum dan beras mengalami penurunan ketika iklim mengalami kenaikan. Pola yang sama ditemukan disini oleh peneliti lain (Amthor 2011) bahwa naiknya suhu bumi yang mempengaruhi pola panen disebabkan oleh banyaknya kandungan polusi di udara akibat penggunaan pupuk yang tak ramah lingkungan.

Sejalan dengan hal tersebut, revolusi hijau yang menerapkan dan memperkenalkan sistem pertanian dengan cara yang modern yang diungkapkan di dalam tulisan Maksim juga memaparkan kecenderungan dampak kebijakan tak ramah lingkungan. Penggunaan pupuk bernitrogen tinggi (urea) yang dalam angka panjang merusak ketahanan tanah dan menyumbang efek karbon penyebab perubahan iklim. Di samping itu, Maksim juga memaparkan dampak secara sosial yang diakibatkan oleh kebijakan revolusi hijau: (1) Penggunaan air yang banyak sehingga sering terjadi pengusuran lahan sebagai dalih untuk pembuatan waduk raksasa untuk sistem jaringan irigasi. (2) Tidak berfungsinya insitusi tradisional, (2) Kesempatan kerja buruh tani perempuan yang diambil alih oleh laki-laki sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki.

Berdasarkan ulasan hasil kajian pustaka, peneliti ingin memaparkan posisi penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan dari hasil kajian pustaka

tersebut. Peneliti melihat isu ketahanan pangan berdasarkan dari sudut pandang petani penggarap (meskipun informan sebagian besar tidak hanya sebagai penggarap, sawah yang mereka miliki tidak lebih dari satu hektar) beserta kelompok lembaga-lembaga pertanian yang menjelaskan tentang perubahan peran pemerintah, pasar, dan petani sebagai aktor dalam memproduksi pangan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada posisi petani penggarap yang selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan, baik dikarenakan oleh kebijakan pemerintah (revolusi hijau dan kebijakan impor) maupun faktor lain di luar kendali manusia (perubahan iklim). Oleh karenanya, potret kehidupan petani juga menjadi penjelasan yang turut disertakan dalam menjelaskan ketahanan pangan.

2.2 Kerangka Teori

Di bagian kedua akan dipaparkan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini berdasar atas apa yang ditemukan di lapangan. *Pertama*, Teori Dependensi Klasik digunakan sebagai *grand theory* yang menjelaskan tentang ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing. *Kedua*, konsep ketahanan pangan merupakan konsep yang digunakan sebagai payung dalam penelitian ini untuk melihat pola ketergantungan antara pemerintah Indonesia dengan pihak asing dan dampaknya terhadap petani. Terakhir, perspektif *realism* yang digunakan berdasarkan data lapangan yang menggambarkan kondisi dampak perubahan iklim terhadap pertanian (pangan). Perspektif ini dijadikan alasan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara dampak perubahan iklim dengan realitas sosial di lapangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga petani.

2.2.1 Teori Dependensi Klasik yang Mengacu pada Penjelasan Sritua Arif dan Adi Sasono.

Teori dependensi yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengacu pada penjelasan pembangunan politik ekonomi di Indonesia yang dikemukakan oleh Sritua Arif dan Adi Sasono. Asumsi dasar yang diajukan dalam tulisan Arif dan Sasono dalam memaparkan teori dependensi adalah ketergantungan pembangunan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga disebabkan oleh faktor luar. Faktor luar yang dimaksudkan di sini berpijak pada warisan kolonial

Belanda dan dampaknya terhadap pembangunan di Indonesia dimana kebijakan tanam paksa dijadikan pangkal tolak untuk melihat bangunan struktural yang diwarisi Indonesia. Warisan tanam paksa juga dijadikan salah satu faktor penting bagi suburnya keterbelakangan di Indonesia. Berdasarkan atas analisisnya tersebut, disimpulkan bahwa selama masa kolonialisasi, telah terjadi pengalihan surplus ekonomi dari Indonesia ke Belanda yang diperoleh dari tanam paksa dalam jumlah yang sangat besar. Pola serupa menyangkut pengalihan surplus kepada penguasa asing juga ditunjukkan melalui penelitian ini bahwa terdapat peralihan surplus ekonomi dari relasi antara pemerintah dengan pihak asing ketika kebijakan pangan tidak lepas dari kendali mereka. Relasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak asing pun dimanfaatkan oleh pihak feodal domestik. Dalam tulisan Arif dan Sasono, feodal domestik ini adalah para pribumi yang menjadi mandor atas kebijakan tanam paksa, sedangkan dalam penelitian ini, pihak feodal domestik adalah mereka yang disebut sebagai *rent seeker*.

Selain itu, dampak yang disebabkan oleh adanya tanam paksa ialah jumlah petani yang kurang dari kecukupan semakin banyak. Demikian halnya dengan apa yang dialami oleh para petani yang diteliti oleh peneliti bahwa ada atau tidaknya sistem tanam paksa, relasi ketergantungan yang terjalin antara pemerintahan Indonesia dengan pihak asing penyedia modal turut menyebabkan petani di Desa Suruh kurang dari kondisi kecukupan. Dengan demikian, relasi antara pihak asing dan pemerintah tak jauh berbeda dengan aliansi antara penguasa feodal dan para kolonial yang mengambil surplus ekonomi dari hasil kebijakan tanam paksa.

Pembangunan ekonomi di Indonesia dipaparkan oleh Arif dan Sasono melalui lima tolok ukur, antara lain: sifat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, proses industrialisasi, pembiayaan pembangunan, dan persediaan bahan makanan. Terkait dengan masalah penelitian yang diangkat, peneliti hanya mengambil salah satu tolok ukur yang digunakan untuk membangun ekonomi di Indonesia, yaitu terkait dengan persediaan bahan makanan karena penelitian ini lebih memfokuskan kepada ketahanan pangan di masa Orde Baru dan Reformasi.

Teori dependensi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketahanan pangan di Indonesia dari Orde Baru hingga Reformasi yang mana tidak lepas dari situasi ketergantungan dan keterbelakangan di Indonesia. Ketergantungan dalam hal ini digambarkan dengan adanya relasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak asing yang berperan sebagai kreditur bagi pembangunan Indonesia, khususnya terkait tentang kebijakan ketahanan pangan. Dalam hal pembangunan, Indonesia tidak memiliki ketersediaan modal yang cukup untuk mempertahankan stabilitas politik ekonomi dalam negeri sehingga bantuan dari pihak asing menjadi satu-satunya jalan untuk membangun pondasi pertumbuhan ekonomi. Melalui bantuan modal, Indonesia memiliki ikatan ketergantungan terhadap pihak penyedia modal tersebut karena bunga yang dibebankan dan perjanjian yang telah disepakati membuat relasi tersebut tidak mudah untuk dilepaskan. Relasi tersebut lebih dikondisikan agar negara dunia ketiga tetap bergantung kepada para pihak asing ini sebagaimana digambarkan pada penelitian ini dimana kebijakan Revolusi Hijau telah berdampak pada ketergantungan petani lokal terhadap pemerintah. Ketergantungan ini sebenarnya lebih kepada pemenuhan kebutuhan sarana produksi yang sebelumnya (di masa Orde Baru) telah disediakan oleh pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu penyedia sarana produksi oleh pemerintah menginjak krisis ekonomi 1998 tidak lagi berjalan.

Revolusi Hijau ini sendiri merupakan paket kebijakan yang direkomendasikan oleh World Bank yang pada saat itu menjadi kreditur bagi Indonesia. Demikian halnya ketika Reformasi, kebijakan impor pun muncul sebagai kebijakan yang tak lepas dari kepentingan pihak asing. Masyarakat, dengan munculnya kebijakan impor semakin bergantung dengan produk-produk pangan dari luar, khususnya bagi para konsumen di daerah perkotaan. Ketimpangan inilah yang menjadi fokus penelitian ini, dimana petani lokal tak lain dengan petani yang melakukan tanam paksa di masa kolonialisme Belanda yang mana dijadikan sapi perah untuk kepentingan penjajah dan pihak-pihak penguasa feodal di Indonesia.

Dengan demikian, teori dependensi klasik mengarahkan peneliti untuk melihat dominasi asing yang mempengaruhi roda pembangunan Indonesia dalam **Universitas Indonesia**

hal kebijakan pertanian dan ketahanan pangan dari dua masa pemerintahan di Indonesia. Ketergantungan dan dominasi asing inilah yang menjadi fokus teori dependensia. Tentunya, lebih lanjut peneliti menggunakan teori ini untuk menjelaskan dominasi pihak asing dalam mengintervensi kebijakan pemerintahan Orde Baru dan Reformasi dalam membuat kebijakan pangan di Indonesia. Dampak kebijakan yang sarat akan kepentingan dominasi asing tersebut telah memunculkan keterbelakangan bagi petani.

Selain itu, teori dependensi klasik menjelaskan tentang bagaimana ketergantungan itu sebagai persoalan ekonomi yang kemudian berlanjut ke dimensi politik dan sosial. Demikian pula yang dijelaskan dalam penelitian ini dengan melihat upaya pencapaian ketahanan pangan sebagai dampak dari tekanan pembangunan ekonomi.

2.2.2 Ketahanan Pangan (*Food Security*)

Konsep ketahanan pangan merupakan konsep utama yang digunakan di dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana peran aktor-aktor dalam mewujudkan ketahanan pangan baik di level rumah tangga hingga level nasional. Konsep ini dipilih karena pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia yang dalam pemenuhan dan perolehannya menjadi hak asasi paling mendasar bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan di dalam Deklarasi Bali pada tahun 1994 dan Deklarasi Roma bulan November 1996 (saat KTT Pangan di Roma) bahwa kecukupan pangan dan nutrisi merupakan hak asasi manusia. (dalam Thesis Rachmat Syahdjoni Putra, 2004)

Konsep ketahanan pangan pertama kali muncul pada *World Food Conference* tahun 1974. Konsep tersebut merupakan perluasan makna dan revisi dari FAO tahun 1983 (Sen dalam www.dephut.go.id) sebagaimana yang dinyatakan dalam *World Food Summit 1996* (FAO, 1996):

“Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”.
(Sumaryanto dalam www.dephut.go.id)

Menurut Timmer, konsep ketahanan pangan didefinisikan sebagai situasi dimana semua rumah tangga bagi seluruh anggota keluarganya, serta dimana

rumah tangga tidak memiliki risiko kehilangan tersebut. (dalam Amang dan Sawit, 1999). Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan adalah sebagai berikut: “*Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.*”

USAID (*United State Agriculture International and Drug*_Badan Pertanian Internasional dan Obat Amerika Serikat) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana semua orang pada semua waktu memiliki akses fisik dan ekonomi untuk mendapat makanan yang pantas guna memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan makanan (*dietary*) guna mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif. Sedangkan menurut Pasal 1 PP No. 68 tahun 2002, pengertian konsep ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata, dan terjangkau. Demikian halnya yang diutarakan oleh Benny Rachman bahwa konsep ketahanan diartikan sebagai terjaminnya akses pangan untuk segenap rumah tangga dan individu setiap waktu sehingga mereka dapat bekerja dan hidup sehat. Selain terpenuhinya pangan pada level individu, rumah tangga dan level yang lebih luas, konsep ketahanan pangan pun juga menekankan hal tersebut guna mencapai kehidupan yang sehat dalam menjalankan peran di dalam masyarakat. (Rachman, 2002: 1-7) Rachman menambahkan bahwa pemahaman tentang ketahanan pangan telah mengalami evolusi seiring dengan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Pada tahun 1970-an, konsep ketahanan pangan lebih ditekankan pada ketersediaan pangan pada tingkat nasional dan global. Sedangkan pada tahun 1980-an, konsep ketahanan pangan beralih kepada akses pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Dalam periode tersebut, ketahanan pangan masih berkisar pada pertanyaan : “Dapatkah dunia memproduksi pangan dengan cukup”. Selanjutnya pada tahun 1990-an, konsep tersebut lebih mengarah pada paradigma baru, yaitu ketahanan pangan berkelanjutan (*sustainable food security paradigm*) sehingga pertanyaan tersebut menjadi “dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh kelompok miskin dan tidak merusak lingkungan hidup”.

Universitas Indonesia

Di Indonesia, wacana tentang potensi kelangkaan pangan lebih dipersempit pada beras semata. Jenis pangan yang lain kurang diperhatikan padahal manusia adalah makhluk omnivora. Beragam pangannya bersumber dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, laut (ikan, rumput laut, garam), dan hutan (madu, jamur, pakis, pora) (lihat Kompas, Sabtu 22 Januari 2011, hlm.6). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep ketahanan pangan untuk konteks di Indonesia memiliki empat unsur, yaitu: (1) ketersediaan (*vulnerability*), (2) keterjangkauan (*availability*), (3) stabilitas harga, dan (4) suplai dalam hal perberasan.

2.2.3 Perspektif *Realism*

Peristiwa-peristiwa terkait dengan masalah lingkungan yang berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960 hingga 1970-an tidak terlepas dari munculnya perspektif sosiologi lingkungan yang salah satunya digunakan dalam menjelaskan gejala-gejala lingkungan di dalam penelitian ini. Tokoh yang disebut-sebut memberi sumbangan pemikiran tersebut adalah Dunlap dan Catton. Apresiasi dari tindakan kesadaran lingkungan yang menyeruak di tahun-tahun tersebut memunculkan agenda yang tertuang di dalam Undang-Undang (*National Environment Policy Act, 1969*), Hari Bumi (*Earth Day*) 1970 dan Konferensi Dunia (*United Nation Conference on the Human Environment, 1972*) (Dunlap dan Cotton, 1979: 243 dalam Shanty Novriaty, Jurnal Masyarakat, Edisi: Vol. XIII. No. 2. Des-2006: 11). Sejalan dengan Eropa, dimana “hijau” dijadikan kekuatan politik yang membuat kebanyakan topik awal mengenai lingkungan (*environmentalism*) dan gerakan lingkungan. Gerakan *environmentalism* ini muncul pada tahun 1960 hingga 1970-an dengan munculnya wacana mengenai lingkungan yang paling banyak menimbulkan debat, yaitu Thesis “*Limit to Growth*” yang ditulis oleh Meadow (Huber 2001: 2).

Suppose you own a pond on which a water lily is growing. The lily plant doubles in size each day. If the lily were allowed to grow unchecked, it would completely cover the pond in thirty days choking off the other forms of life in the water. For a long time the lily plant seems small and so you decide not to worry about cutting it back until it covers half the pond. On what day will that be? On the twenty-ninth day of course, you have one day to save your pond.
(Meadow et al. 1983:29)

Kutipan di atas merupakan metafora dari keadaan di bumi ini yang telah terkontaminasi polusi. *Pond* disimbolkan sebagai planet bumi, *lily* merupakan gambaran padatnya polusi di bumi ini yang setiap hari semakin bertambah. Meadow menjelaskan kondisi ini dengan menyebutkan faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar dalam menyumbangkan polusi di bumi ini: teknologi, industrialisasi, produksi makanan, dan pengurangan sumber daya semakin hari semakin menunjukkan kenaikannya secara massif. Inilah yang mendorong dimunculkannya gagasan tentang tesis “*Limit to Growth*” yang lebih menekankan solusi secara sosial daripada tehnik. Inilah yang pada akhirnya menjadi bukti bahwa solusi secara sosial merupakan masalah yang sangat signifikan menjadi persoalan dalam kajian sosiologi (Martell, 1994: 32). Dengan demikian, perdebatan yang menyudutkan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tentang masalah lingkungan tidak lagi lazim dikatakan sebagai *latecomer*.

Merujuk pada tulisan Dunlap dan Catton, sosiologi tidak lagi dapat dikatakan sebagai *latecomer* karena sejak tahun 1913 terdapat tulisan awal dari sosiologi yang membahas mengenai lingkungan. Hanya saja, menurut Dunlap dan Catton, karya-karya awal dari perintis sosiologi lingkungan dini diabaikan dan dianggap rendah atau tidak diperhitungkan (Dunlap dan Catton, 1979). Dikotomi antara lingkungan alam dan sosial menjadi bersifat dikotomis sehingga tak heran bila sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji ranah sosial sulit untuk memasukkan masalah lingkungan alam ke dalam analisisnya.

Namun, pada akhirnya, ilmuwan sosiologi mulai mengkritik dikotomi antara alam yang dianggap sebagai prakondisi dari kehidupan sosial dengan lingkungan sosial itu sendiri. Tradisi yang mengesampingkan atau bahkan mengeluarkan alam dari pembahasan sosiologi justru menjadi penghambat bagi ilmu sosiologi itu sendiri dalam menganalisis dan memahami masalah-masalah lingkungan. Oleh karenanya, penelitian ini melibatkan perspektif yang melihat alam sebagai bagian dari lingkungan sosial, yaitu *critical realism*. Perspektif ini digunakan untuk melihat kehidupan sosial petani di Desa Suruh dalam kaitannya dengan masalah ketahanan pangan. Mengapa ketahanan pangan dilihat sebagai sebuah masalah sosial yang terkait dengan isu lingkungan? Alasannya, pangan

Universitas Indonesia

merupakan organisme yang hidup dan tumbuh bergantung pada iklim serta cuaca. Dengan kata lain, pangan sangat bergantung pada pola cuaca yang termasuk ke dalam faktor alam. Sementara itu, manusia pun juga sangat bergantung pada pangan. Oleh karenanya, masalah yang disebabkan oleh cuaca dan iklim memberi implikasi pada manusia.

Dengan demikian, perspektif ini ingin menjelaskan bahwa alam dan masalah sosial berjalan seiringan dan saling menciptakan dialektika yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Sebagaimana yang diutarakan oleh Sutton sebagai berikut:

Critical realism is a method of scientific inquiry that potentially brings together social and nature scientific evidence to better understand why environmental problems occur. (Sutton, 2007: 33)

Perspektif ini melihat masalah sosial yang disebabkan oleh alam secara objektif. Tanpa adanya konsensus bahwa perubahan iklim menjadikan masalah bagi petani, secara sosial pun perubahan iklim didefinisikan sebagai masalah sosial bagi ilmu sosial, khususnya sosiologi.

Meskipun demikian, adanya masalah perubahan iklim yang berimplikasi pada ketersediaan pangan beras dan aksesibilitas untuk mendapatkannya, petani sebagai faktor penggerak tetap tidak bisa melepaskan ketergantungan pada sarana produksi yang menambah pengaruh buruk padalingkungan. Pengaruh buruk tersebut antara lain pestisida dan pupuk kimia yang diproduksi melalui kebijakan pemerintah dari Orde Baru hingga saat ini (Reformasi.)

2.2.5 Alur Berpikir

Ketahanan pangan merupakan objek studi yang digunakan dalam analisis relasi antara negara, pasar dan petani penggarap dalam *setting background* masa Orde Baru dan Reformasi. Namun, ketahanan pangan yang dimaksudkan di dalam penelitian ini hanya mencangkup ketersediaan beras. Sebagaimana yang telah dibahas di bagian latar belakang masalah, ketahanan pangan telah dikonstruksikan oleh pemerintah sebagai instrumen politis sebagai swasembada beras. Dengan demikian, perjalanan kebijakan beras dari masa Orde Baru hingga Reformasi

menjadi *stand point* yang digunakan peneliti untuk menganalisis relasi antara pihak pemproduksi beras dengan pihak yang mengatur kebijakannya.

Upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa Orde Baru ditunjang dengan kebijakan Revolusi Hijau yang memperkenalkan produk-produk pertanian modern seperti: pestisida, pupuk kimia, dan bibit unggul. Kebijakan ini yang kemudian menciptakan suatu ketergantungan petani terhadap pemerintah sebagai penyedia sarana produksi tersebut.

Di tengah ketergantungan petani terhadap pemerintah, petani yang dalam hal ini adalah mereka yang menggarap sawah dihadapkan oleh sebuah persoalan, yaitu industrialisasi. Petani penggarap semakin kesulitan dalam mengakses kebutuhan sarana produksi mereka karena kebijakan pertanian telah tergantikan oleh kebijakan industri.

Lebih lanjut, tren baru menyangkut perdagangan dan pertanian muncul, yaitu kesepakatan antara pemerintah dengan pihak asing yang turut memberi implikasi terhadap sulitnya petani penggarap sawah dalam memperjuangkan haknya mendapat kemudahan sarana produksi. Selanjutnya, masuk di masa Reformasi, kebijakan pertanian dan pangan kembali mengalami perubahan dimana masalah krisis pangan (beras) menjadi pangkal tolak munculnya kebijakan baru, yaitu impor beras. Kebijakan ini pun juga turut ditengarai oleh adanya perubahan iklim yang mempengaruhi langsung produktivitas beras oleh petani.

Berdasarkan atas kebijakan demi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik dari Orde Baru hingga Reformasi, pemerintah pun dalam menangani masalah pangan, pertanian, dan perdagangan tak luput dari peran pihak asing dan mekanisme pasar yang cakupannya internasional. Kondisi inilah yang kemudian peneliti tarik ke level teoretis bahwa Indonesia dalam hal kebijakan pertanian tak luput dari intervensi pihak asing. Dengan demikian, peneliti menggunakan teori dependensi klasik sebagai alat analisis yang menjelaskan tentang ketergantungan dari masa Orde Baru hingga Reformasi. Sebagaimana diasumsikan oleh teori ini bahwa ketergantungan pembangunan yang terjadi disebabkan oleh faktor luar yang tidak berada di dalam jangkauan pengendalinya. Pada akhirnya posisi ketergantungan membawa akibat keterbelakangan petani penggarap.

Universitas Indonesia

Relevansi dependensi klasik dengan *critical realism* dalam menjelaskan isu ketahanan dalam penelitian ini adalah peneliti ingin menjelaskan bahwa terdapat kekuatan asing yang mendominasi setiap kebijakan pemerintah dalam hal pangan. Sepanjang perjalanan Orde Baru menuju Refomasi, tanah sebagai sarana penting bagi produktivitas beras mengalami kejenuhan sebagai akibat dari kebijakan “paksaan” dalam menggunakan sarana produksi. Di satu sisi, petani pun mendapat keuntungan dan kepuasan karena bibit padi yang diperkenalkan telah menciptakan produksi beras secara massif. Demikian pula dengan penggunaan pestisida dan pupuk kimia.

Namun, dalam perjalanannya, kejenuhan tanah terhadap penggunaan sarana produksi tak ramah lingkungan tersebut turut menjadi salah satu faktor penyebab perubahan iklim. Dari pandangan *critical realism* kondisi ini dijelaskan sebagai suatu keadaan dimana petani-petani telah mengetahui dampak buruk atas sarana produksi yang digunakan tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain untuk menghentikannya. Mereka terus bergantung pada sarana produksi tersebut meskipun secara objektif diakui sebagai salah satu penyebab perubahan iklim dan puso. Dua teori tersebut memaparkan sebuah pola yang sama dimana terdapat ketergantungan yang menciptakan ketertinggalan dan keterpurukan bagi pihak yang bergantung tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Berikut merupakan penjabaran tentang bagaimana penelitian dilakukan berdasarkan pada metodologi yang digunakan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yang bertujuan untuk menghubungkan situasi ketahanan pangan di level mikro dan level makro. Relevansi penerapan studi kasus dalam penelitian ketahanan pangan yang telah dilakukan adalah peneliti ingin menunjukkan adanya kekuatan sebab akibat dari kekuatan sosial yang terjadi secara umum yang kemudian memunculkan fenomena partikular di level mikro. (Walton, 1992b: 129 dalam Neuman, 2006: 33) Sebagaimana dikatakan oleh Walton “...*I have tried ... to tell a big story throught the lens of a small case*”, peneliti memaparkan kejadian yang berada pada level mikro berdasarkan kebijakan yang dibuat dari dua masa pemerintahan dengan melihat kasus tersebut melalui unit analisis di level mikro.

Penjabaran tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dan juga merupakan pertanggungjawaban akademis yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari dan menginterpretasikan data penelitian. Berikut akan dipaparkan lebih lanjut tentang hal-hal yang terkait dengan metodologi penelitian: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Subjek Penelitian, (3) Teknik Pengumpulan Data, (4) Proses Penelitian, (5) Limitasi dan Delimitasi Penelitian, dan (6) Sistematika Penulisan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi **kualitatif** dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Walton, logika studi kasus merupakan metode untuk menunjukkan penjelasan tentang sebab akibat bagaimana kekuatan sosial yang terjadi secara umum (general) terbentuk dan bagaimana hal tersebut menghasilkan sesuatu yang bisa dikatakan unik.

“The logic of the case study is to demonstrate a causal argument about how general social forces shape and produce results in particular settings.” (Walton 1992b: 122 di dalam Neuman 2003: 33)

Merujuk pada pernyataan Walton tersebut, peneliti melihat pola-pola umum yang terkait dengan isu ketahanan pangan dari masa pemerintahan Orde Baru hingga Reformasi secara makro. Pola-pola umum tersebut merupakan seperangkat kebijakan yang melibatkan peran negara terhadap petani sebagai penggerak pembangunan di bidang ketahanan pangan. Penjelasan tersebut didapatkan dari sumber-sumber literatur yang kemudian dijadikan pijakan untuk melihat fenomena di Desa Suruh sebagai seting partikular. Langkah selanjutnya, peneliti menggali informasi terkait dengan perubahan peran negara dan dampaknya terhadap petani dalam kaitannya dengan ketahanan pangan melalui wawancara dengan informan.

Peneliti ingin menunjukkan penjelasan yang partikular di Desa Suruh yang menjadi tempat penelitian bahwa fenomena yang terjadi secara makro belum tentu merupakan representasi dari objek yang ingin diteliti di level bawah (mikro). Walaupun demikian, peristiwa-peristiwa yang dilihat secara makro tetap memiliki keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa di level mikro. Inilah yang ingin peneliti jelaskan secara **deskriptif** yang mana merupakan tujuan dari studi ini.

3.2 Subjek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses ketergantungan yang terjadi di masa Orde Baru dan Reformasi dalam menciptakan ketahanan pangan dengan melihat peran negara dan dampaknya terhadap petani dengan mengambil subjek penelitian: petani, lembaga pertanian (KUD, Dinas Pertanian), entitas atau kelompok tani. Tentunya, subjek penelitian ditentukan berdasarkan lokasi yang ingin diteliti, yaitu di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Di sini, petani merupakan pemilik sawah dan petani penggarap sedangkan entitas atau kelompok tani adalah mereka yang memiliki peran dalam menggerakkan jalannya kelompok, misalnya Bendahara, Sekretaris dan Ketua. Subjek penelitian tersebut yang dipilih untuk dimintai informasi terkait perubahan peran negara, pasar, dan petani. Dengan demikian, peneliti dapat melihat perbedaan di dalam

dua waktu yang berbeda dalam mencapai ketahanan pangan karena dua masa pemerintahan yang berbeda turut melibatkan strategi kebijakan yang berbeda pula.

Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan informan antara lain: (1) **Wilayah**. Wilayah dilihat berdasarkan letak geografis, sosial budaya masyarakat setempat dalam mengupayakan sebuah strategi ketahanan pangan dan juga dalam menyikapi perubahan iklim. Wilayah merupakan faktor utama dalam menentukan informan karena wilayah menentukan kondisi yang berbeda-beda. Dengan melihat studi kasus di satu wilayah tertentu, yaitu wilayah Desa Suruh, temuan data menunjukkan kondisi wilayah tersebut dan belum tentu kondisi makro merepresentasikan kondisi mikro di wilayah tersebut. (2) **Gender**. Peran antara laki-laki dan perempuan di dalam mencapai tujuan ketahanan pangan menjadi faktor penting dalam memberi gambaran mengapa secara sosial dan ekonomi petani bisa bertahan hidup meskipun dalam perjalanannya, petani sering kali berada pada posisi yang selalu merugi. Selain itu, gender digunakan juga untuk melihat perubahan nilai-nilai dalam pranata sosial atas desakan struktural (kebijakan pertanian yang pro politik) seperti yang ditemukan di lapangan pada masa pemerintahan Orde Baru yang membawa perubahan hingga sekarang, peran pekerja perempuan dalam proses produksi beras telah digantikan oleh teknologi dan alat-alat yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. (3) **Kepemilikan**. Faktor kepemilikan juga turut terlibat dalam melihat pencapaian ketahanan pangan karena di dalamnya terdapat hubungan kekuasaan yang menentukan input dan output dari kegiatan pertanian, yaitu hubungan antara pemilik lahan, penggarap, dan buruh. Bagaimana pengelolaan lahan hingga pembagian hasil pertanian menjadi alasan mengapa petani berada di posisi sulit. Petani penggarap hanya menerima 25% keuntungan atas proses produksi padahal semua biaya operasional yang dikenakan ditanggung 100% oleh petani penggarap. Sedangkan pemilik lahan menerima bagi hasil keuntungan 50%. (4) **Berapa lama bekerja di sektor pertanian**. Jangka waktu petani bekerja di sektor agraris menjadi cermin yang menggambarkan masa pemerintahan tertentu sehingga semakin lama petani berkecimpung di sawah semakin tajam pula temuan lapangan yang didapat tentang perbedaan dua masa yang ingin digali. Selain petani, peran asosiasi pertanian yang telah berkecimpung di dua masa; Orde Baru dan Reformasi

diharapkan bisa memberi informasi yang semakin beragam tentang bagaimana perbedaan kebijakan yang diturunkan oleh penguasanya dan bagaimana implikasinya. Dengan demikian, deferensiasi penjelasan sekaligus pemaknaan yang ingin diperoleh dalam pengumpulan data akan didapat secara komperhensif.

Berikut merupakan table informan yang telah berhasil diwawancarai selama proses penelitian di Desa Suruh, Kabupaten Semarang.

Table 3.1 Subjek Penelitian

| No | Nama Informan | Status dan Peran di Masyarakat |
|----|---------------|--|
| 1. | En | -Ketua Dinas Pertanian Kecamatan Suruh. -Ibu Lurah -Isteri Petani Pemilik Lahan |
| 2. | Mh | -Mantan Petani Pemilik -Petani Penggarap -Mantan Sopir angkot antar Desa |
| 3. | Jt | -Petani Penggarap dan Pemilik (Sawah warisan orang tua isteri) |
| 4. | Rr | -Petani Pemilik dan Penggarap |
| 5. | Wh | -Petani Penggarap dan Pemilik (Sawah warisan orang tua isteri) -Juragan Pandai Besi -Mantan Juragan Angkutan Umum (1 kendaraan) -Pemuka Agama |
| 6. | Al | -Petani Pemilik -Sekretaris Dusun |
| 7. | Sm | -Petani penggarap dan pemilik -Tengkulak |
| 8. | Sl | -Koordinator KUD |

Berdasarkan dari kedelapan informan yang telah berhasil untuk diwawancarai, hanya beberapa informan yang memaparkan informasi terperinci, seperti informan Jt, Rr, dan Abdul Wh. Selebihnya, sulit untuk dimintai informasi terkait dengan latar belakang kehidupannya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini dimulai dengan merumuskan topik atau gagasan secara bebas. Kemudian, peneliti menentukan siapa dan dimana penelitian ini akan dilakukan dengan berpaku pada rumusan gagasan yang ditentukan, yaitu tentang masalah ketahanan pangan di dua masa pemerintahan. Dalam hal ini, peneliti merumuskan gagasan berdasarkan atas permasalahan yang sedang hangat menjadi perbincangan di media massa. Dalam praktiknya, penelitian lapangan yang dilakukan meliputi: (1) wawancara mendalam (*in depth*), (2) observasi di lokasi pertanian, (3) temuan lapangan yang telah tersedia melalui institusi-institusi terkait untuk mendukung temuan lapangan (data sekunder).

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini merupakan fenomena yang tidak hanya melibatkan orang per orang tetapi juga kelompok dan organisasi yang turut menyumbang perubahan dan peristiwa tersebut seperti halnya peran lembaga, pemerintah dan asosiasi-asosiasi.

Data primer didapatkan melalui penelitian langsung, yaitu melalui wawancara mendalam dengan informan terkait di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Data sekunder yang akan dimanfaatkan untuk mendukung data primer dalam melakukan interpretasi dan analisis akan diperoleh dari institusi-institusi terkait dan sumber lain, seperti Departemen Pertanian, BPS, dan Data lain dari sumber literatur dan internet.

Selain itu, observasi juga dilakukan sebagai tambahan data wawancara dengan informan. Peneliti mengikuti kegiatan sebagian dari informan yang bersedia untuk diikuti selama kegiatan tersebut dilakukan dan peneliti turun langsung melihat proses pemanenan padi di sawah sisa dari serangan hama wereng. Data-data observasi tersebut dilakukan sebagai penunjang analisis data terkait dengan masalah kehidupan sosial rumah tangga petani di Desa Suruh.

3.4 Proses Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan pemilihan topik, yaitu tentang ketahanan pangan yang menjadi fokus perbincangan dalam media massa. Berangkat dari

gagasan tersebut rasanya masih terlalu luas untuk kemudian dilakukan penelitian. Dengan kata lain, topik tersebut memang belum menunjukkan spesifikasi penelitian yang detail. Oleh karenanya, peneliti semakin memperuncing topik tersebut dengan mengajukan sebuah pertanyaan “*Bagaimana kondisi ketahanan pangan di Indonesia?*”. Pertanyaan ini menjadi langkah kedua peneliti setelah menentukan topik. Langkah berikutnya, peneliti merumuskan beberapa hal yang terkait dengan objek yang ingin diteliti, antara lain: Metode apa yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, siapa yang akan dijadikan subjek penelitian, dimana lokasi penelitian yang dijadikan studi kasus, dan bagaimana proses pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti memutuskan menggunakan metode studi kasus (*cases studies*) dengan alasan bahwa masalah ketahanan pangan yang menjadi sorotan publik merupakan masalah makro sehingga peneliti menggunakan metode ini karena membantu peneliti menghubungkan level mikro (tindakan individu) ke level makro. (Neuman, 2003: 33)

Cases studies help researchers connect the micro level, or the actions of individual people to the macro level or large scale social structures and process (Vaughan, 1992)

Sebelum peneliti turun ke lapangan untuk melakukan proses pengumpulan data, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah membuat tinjauan pustaka (*literature review*). Tinjauan pustaka ini merupakan ikhtisar dari studi sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Tinjauan pustaka bertujuan untuk menginformasikan atau membagikan hasil studi atau penelitian yang pernah dilakukan oleh seseorang terkait dengan topik yang sama dengan apa yang ingin diteliti.

It relates a study to the larger ongoing dialogue in the literature about a topic, filling in gaps and extending prior studies.(Cooper, 1984; Marshall&Rossman, 1999)

Selain itu, peneliti juga akan mendapatkan kerangka pikir (*frame work*) untuk membangun tolok ukur penelitian yang penting yang kemudian menjadi bahan perbandingan dengan hasil penelitian yang telah ada.

Langkah selanjutnya setelah tinjauan pustaka dibuat, peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan yang lebih spesifik terkait dengan masalah

ketahanan pangan. Setelah mengidentifikasi permasalahan, dilanjutkan membuat rancangan penelitian (*Research Design*), yaitu memulainya dengan menuliskan latar belakang masalah hingga dikerucutkan menjadi masalah penelitian.

Permasalahan yang telah berhasil diidentifikasi melalui berbagai macam sumber, khususnya dari media massa, memunculkan rumusan pertanyaan, yaitu: “(1) Bagaimana peran Negara, Pasar, dan Petani di masa Orde Baru dan masa Reformasi dalam Ketahanan Pangan untuk Studi Kasus di Desa Suruh, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang? (2) Bagaimana peran Negara, Pasar, dan Petani di masa Orde Baru dan masa Reformasi terkait kebijakan impor beras yang berkaitan dengan ketahanan pangan? (3) Bagaimana peran Negara, Pasar, dan Petani di masa Orde Baru dan masa Reformasi terkait dengan perubahan iklim yang berlangsung pada masa Reformasi?”

3.5 Delimitasi dan Limitasi Penelitian

3.5.1 Delimitasi Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada relasi antara negara dalam hal ini pemerintah, pasar, dan petani dalam menyikapi ketahanan pangan yang mana melibatkan cakupan waktu, yaitu masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi. Selain itu, masalah perubahan iklim akan menjadi satu gejala yang kemudian turut serta dimasukkan ke dalam analisis di dalam konteks Reformasi. Namun, analisis utama dalam penelitian ini lebih fokus pada ketiga aktor tersebut, antaranya dengan melihat peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan implikasinya, peran pasar dalam kaitannya dengan munculnya kebijakan impor, stabilitas harga, serta petani, baik produsen maupun konsumen; petani pemilik tanah dan petani penggarap) yang lebih disoroti sebagai aktor utama yang berhubungan secara konkret dengan pangan.

3.5.2 Limitasi Penelitian

Beberapa kesulitan yang ditemui selama proses penelitian di lapangan antara lain: *Pertama*, waktu menjadi hambatan utama dalam melangsungkan penelitian ini karena konteks waktu menjadi satu kerangka pokok yang menjadi ciri dari penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan hanya bisa dilakukan

selama satu bulan sehingga untuk mendapatkan data-data melalui wawancara yang terkait dengan kebijakan Orde Baru agak sulit mengingat daya ingat informan yang terbatas. *Kedua*, data-data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap dan informasi deskriptif mengenai gambaran umum di lapangan sangat sulit didapatkan. Hal ini dikarenakan data-data monografi tidak dikumpulkan secara terperinci dan sistematis. Selain itu, data-data di Kelurahan sengaja untuk tidak dipublikasikan, khususnya di dunia maya dengan alasan menghindari campur tangan LSM. *Ketiga*, mengingat lokasi penelitian dengan lokasi pengolahan data analisis jauh untuk dijangkau sehingga data-data tambahan yang diperlukan untuk melengkapi data analisis diperoleh melalui via telpon.

3.6 Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan

Bab Pendahuluan merupakan bagian awal dari penulisan penelitian ini yang menjabarkan latar belakang masalah penelitian. Dengan demikian, pembaca akan mengetahui latar belakang informasi dari hasil laporan penelitian yang didapatkan. Tujuannya, peneliti ingin membangun kerangka pikir penelitian supaya para pembaca memahami pada akhirnya penelitian ini terkait dengan penelitian lainnya.

Pendahuluan merupakan langkah awal untuk membangun gagasan dengan menyajikan informasi tentang permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, permasalahan penelitian yang ada diangkat dari masalah nasional yang mana juga melibatkan kelompok sosial di daerah tempat tinggal peneliti. Dengan kata lain, pendahuluan yang telah ada semakin dikerucutkan pada permasalahan yang sekaligus digambarkan konteks penelitian yang akan dilakukan. Pertanyaan yang diajukan dalam rumusan permasalahan akan dijelaskan pula tujuannya hingga diakhiri dengan Signifikansi teoretis dan praktis.

- Bab II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konsep

Tinjauan Pustaka berisikan studi literatur dari penelitian-penelitian yang terkait dan memberi gambaran tentang penelitian ini. Secara lebih rinci mengenai studi literatur, pada bab ini juga diuraikan kerangka teori dan

konsep yang berisi definisi-definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Antara konsep yang satu dengan konsep yang lain saling kait mengait. Dengan demikian, adanya definisi ini akan memudahkan peneliti dalam menganalisis temuan penelitian.

- Bab III: Metodologi Penelitian

Pada Bab ini, peneliti menguraikan pendekatan penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta delimitasi dan limitasi penelitian, dan juga sistematika penulisan.

- Bab IV: Deskripsi Temuan Lapangan

Bab ini berisi mengenai uraian profil lokasi penelitian yang berupa gambaran umum Desa Suruh serta profil Informan 1 hingga informan 8.

- Bab V: Temuan Penelitian.

Pada bab ini, peneliti memaparkan temuan makro dan mikro tentang kebijakan ketahanan pangan (beras) di Indonesia semenjak masa Orde Baru hingga Reformasi. Pertama, peneliti paparkan temuan makro yang didapatkan dari sumber literature seperti: buku, majalah, jurnal, media massa, dan lain-lain. Kedua, peneliti memaparkan temuan mikro sebagai hasil penelitian di lapangan.

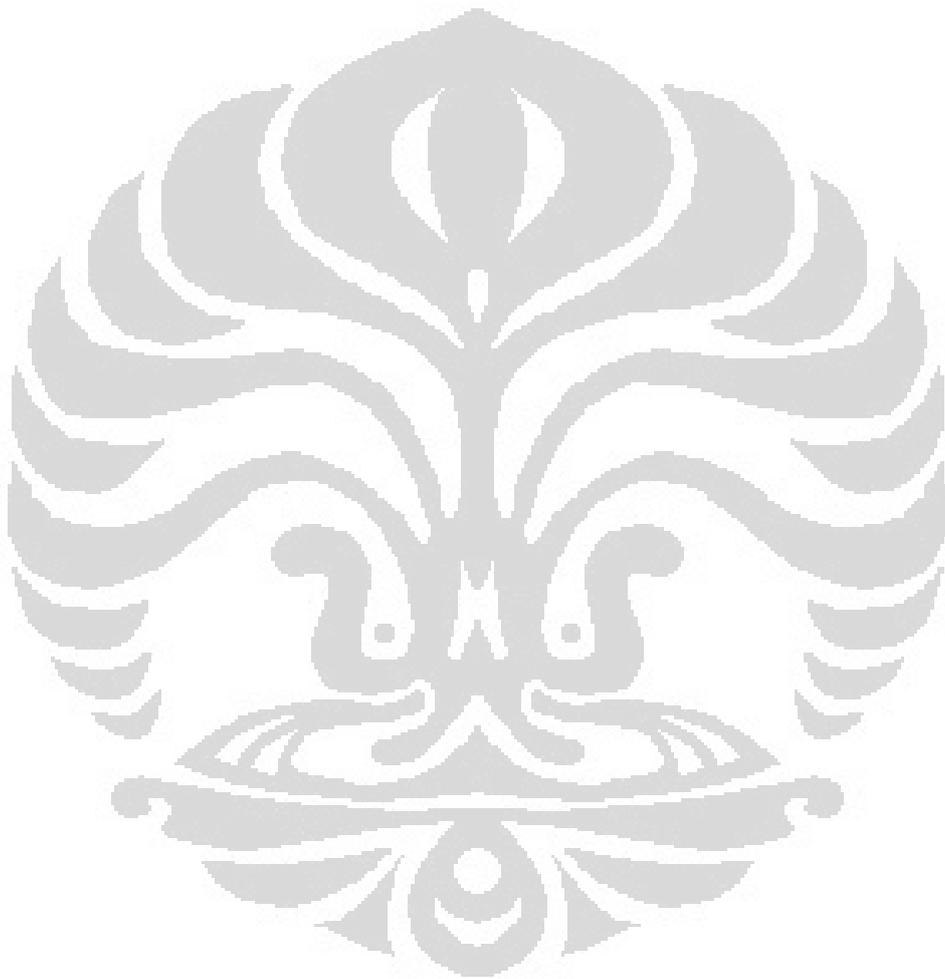
- Bab VI: Analisis

Bab ini merupakan bagian terpenting dari yang lain karena memaparkan eksplanasi sosiologis mengenai kebijakan ketahanan pangan dari Orde Baru hingga Reformasi dengan mengelaborasi temuan mikro dan makro.

- Bab VII: Penutup

Bab ini terbagi menjadi dua sub bab penting. Pertama adalah kesimpulan yang berisi dari ringkasan inti alur analisis dari penelitian ini beserta ringkasan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Kedua, rekomendasi kebijakan. Peneliti berusaha menyumbangkan gagasan

berupa rekomendasi kebijakan dari masalah yang ditemukan dari penelitian lapangan.



BAB IV

DESKRIPSI TEMUAN LAPANGAN

4.1 Profil Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di salah satu daerah di Kabupaten Semarang, tepatnya di Desa Suruh, Kecamatan Suruh. Secara garis besar, Kecamatan Suruh berbatasan dengan empat wilayah kecamatan: Sebelah selatan adalah Kecamatan Susukan; sebelah barat adalah Kecamatan Tengaran; Sebelah Utara adalah Kecamatan Bringin; dan Sebelah Timur adalah Kecamatan Boyolali.

Kecamatan Suruh memiliki luas wilayah 6.336.220 ha yang terdiri dari 761.750 ha sawah sederhana, 1.407.420 ha sawah berpengairan teknis, sawah tadah hujan 378.381 ha lahan kering. Jenis tanah di wilayah Kecamatan Suruh sebagian besar tanah latosol 55% sedangkan 45% lainnya berjenis alluvial, grumosol, dan andosol. Topografi wilayah sangat bervariasi, dari yang bergelombang hingga berbukit-bukit dari kemiringan 15%.

Kecamatan Suruh memiliki iklim sedang yang mana menurut Oldemen termasuk tipe B2 dengan rata-rata curah hujan mencapai 2890mm/tahun yang terjadi pada 126hari hujan. Sementara itu, lahan kering terdiri dari *tegal* (ladang) yang luasnya mencapai 1392,123ha dan pekarangan 1811,044ha. Selain itu, potensi tanaman pangan yang dimiliki antara lain: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah; tananaman perkebunan: kelapa, kopi, dan cengkeh; tananaman kehutanan meliputi: jati, sengon, suren, mahoni, jabon, dan akasia.

Potensi pangan dan tanaman lain yang menjadi asset wilayah Kecamatan Suruh tak terlepas dari curah hujan yang turun di wilayah tersebut. Berikut merupakan data curah hujan wilayah Kecamatan Suruh di tahun 2008:

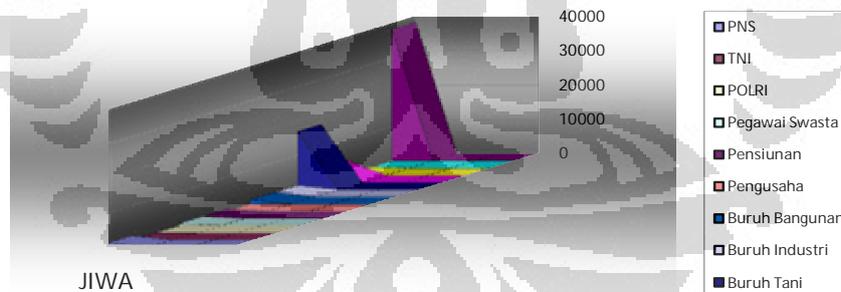
Tabel 4.1 Data Curah Hujan Wilayah Kecamatan Suruh¹¹

| No. | Bulan | Hari Hujan | Curah Hujan (mm) | Rata-Rata Curah Hujan |
|-----|---------------|------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Januari | 9 | 243 | 27.0 |
| 2 | Februari | 6 | 183 | 30.3 |
| 3 | Maret | 13 | 490 | 37.7 |
| 4 | April | 7 | 248 | 35.4 |
| 5 | Mei | 4 | 73 | 18.2 |
| 6 | Juni | 2 | 22 | 11.0 |
| 7 | Juli | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - |
| 9 | September | 1 | 23 | 23.0 |
| 10 | Oktober | 12 | 273 | 22.7 |
| 11 | November | 17 | 529 | 31.1 |
| 12 | Desember | 10 | 197 | 19.7 |
| | JUMLAH | 81 | 2.281 | 28.2 |

Sumber: Diperoleh dari data Kecamatan Suruh Tahun 2008

4.2 Data Penduduk Kecamatan Suruh

Jumlah penduduk Kecamatan Suruh di tahun 2010 sebanyak 67.833 jiwa. Adapun klasifikasi penduduk berdasarkan profesi dipaparkan melalui grafik di bawah ini. Untuk melihat spesifikasi jumlah angka, dapat dilihat pada lampiran 1.

Grafik 4.1 Profesi Penduduk Kecamatan Suruh

(Sumber: Monografi Kecamatan Suruh)

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, bisa dilihat bahwa jumlah terbanyak dari berbagai macam mata pencaharian adalah buruh tani, yaitu tercatat di laporan Kecamatan Suruh Tahun 2010 sejumlah 16880 jiwa. Sedangkan urutan kedua

¹¹ Data ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan fisik yang menjadi pemicu atau faktor penyebab kondisi alam. Hal ini turut mempengaruhi pula aktivitas kegiatan sosial termasuk di dalam cakupan kelembagaan Desa dalam hal ini adalah masyarakat dan Kelompok Tani

adalah petani yang tak lain adalah pemilik lahan sawah. Sebenarnya, jumlah terbanyak adalah mereka yang tidak diidentifikasi secara jelas profesi mereka. Hal ini disebabkan karena pekerjaan yang tidak pasti yang mereka jalani sehari-hari, seperti buruh cuci, pekerja domestik, kernet angkot musiman, pedagang musiman, tukang tambal ban, penjual makanan keliling dan lain-lain. Selain itu juga masih banyak warga Kecamatan Suruh yang pengangguran.

Dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian menjadi sumber utama dan sangat penting bagi masyarakat di Kecamatan Suruh. Bekerja menjadi buruh tani memang tidak membutuhkan skil apa-apa kecuali tenaga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. dan bisa dibandingkan dengan data pendidikan terakhir masyarakat di Kecamatan Suruh berikut ini:

Grafik 4.2 Jenjang Pendidikan Masyarakat Kecamatan Suruh menurut Data Terakhir Tahun 2010¹²



Sumber: Monografi Kecamatan Suruh Tahun 2010

Data terakhir, tahun 2010 menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Suruh hanya menyelesaikan hingga jenjang tamat Sekolah Dasar. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin menurun jumlah partisipasi pendidikan masyarakat. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa rendahnya jenjang pendidikan masyarakat yang mana merupakan kondisi konkret di Kecamatan Suruh menyebabkan mereka memiliki sedikit pilihan pekerjaan. Sementara, jenis pekerjaan yang nyata dan mudah untuk diakses di Desa Suruh berdasarkan kondisi geografis, tak lain adalah bertani. Bertani merupakan pekerjaan yang tidak menuntut skil-skil tertentu sebagaimana dibutuhkan di dalam pekerjaan masyarakat urban, seperti di pabrik, perkantoran, dan lain-lain.

¹² Data terperinci dapat dilihat pada Lampiran 2



Pertanian sebagai basis utama mata pencaharian di Kecamatan Suruh, didukung dengan kelengkapan kelembagaan pertanian antara lain: (1) 1 unit Koperasi Unit Desa (KUD), (2) 6 unit Koperasi Kelompok Tani (KKT), (3) 1 unit BRI Unit Desa, (4) 5 unit BKK/ BPR, (5) 2 unit Bank Swasta, (6) 2 unit pasar ; Pasar Umum dan Pasar Hewan, (7) 10 Orang Petugas Penyuluh. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan kelompok tani, di Kecamatan Suruh telah terbentuk 106 Kelompok Tani sesuai dengan kemampuan kelas kelompok tani masing-masing Desa.

Peneliti tertarik melihat kondisi Desa Suruh untuk dijadikan lokasi penelitian. Pertama, Desa Suruh merupakan pusat aksesabilitas kebutuhan masyarakat yang menyediakan seluruh fasilitas pelayanan masyarakat dimana seluruh kelengkapan kelembagaan yang telah disebut di atas tersedia di Desa Suruh. Sehingga, peneliti mudah untuk mendapat berbagai informasi yang dibutuhkan terkait dengan pertanian.

Kemampuan kelompok untuk membangun organisasi, yaitu kelompok tani tak lepas dari komoditas sumber daya dari masing-masing Desa. Sumber daya yang dimaksudkan di sini erat kaitannya dengan kegiatan pertanian yang juga sekaligus ditopang oleh kelompok tani. Sumber daya atau komoditas alam tersebut menjadi salah satu faktor penting pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi secara umum di tingkat Kecamatan Suruh adalah 3,81% yang mana pertanian tanaman pangan menjadi modal pertumbuhan tersebut. Tingkat pertumbuhan produksi padi dan palawija dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Pertumbuhan Produksi Padi dan Palawija di Kecamatan Suruh

| No. | Komoditas | Produksi Th 2010 (ton/ha) | Sasaran Produksi Th. 2011 |
|-----|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. | Padi | 5.8 | 7.5 |
| 2. | Jagung | 5.1 | 6.5 |
| 3. | Kedelai | 1.5 | 4.1 |
| 4. | Kacang Tanah | 5.2 | 6.1 |
| 5. | Ubi Kayu | 8.5 | 9.4 |
| 6. | Ubi Jalar | 7.5 | 8.5 |

Sumber: Data Olahan dari Dinas Pertanian Kecamatan Suruh 2010-2011

Berdasarkan tabel pertumbuhan produksi padi dan palawija, komoditas padi bukan menjadi komoditas utama yang meraih jumlah produksi tertinggi padahal luas lahan kering 378.381 ha dari total luas 6.336.220 ha. Lahan yang digunakan sebagai lahan sawah: sawah sederhana 761.750 ha, sawah berpengairan teknis 1.407.420 ha, sawah tadah hujan 730.750 ha. Faktor utama mengapa palawija lebih banyak daripada padi adalah komoditas beras hanya dihasilkan dua kali panen dalam satu tahun sementara palawija lebih tahan terhadap berbagai macam iklim dan lebih cepat pula panennya. Dengan demikian, akumulasi dalam satu tahun, palawija dapat mencapai jumlah paling banyak dibanding padi. Tanaman palawija lebih mudah tumbuh di jenis tanah kering dibanding dengan jenis tanaman padi karena padi harus tumbuh di lahan basah. Faktor lain yang mempengaruhinya adalah jumlah sawah atau lahan basah untuk sektor padi telah dikonversikan menjadi lahan industri sehingga jumlah panen padi dalam satu tahun mengalami penurunan. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu informan terkait dengan adanya konversi lahan di Kecamatan Suruh, sebagai berikut:

“yo taun kuwi lah. Itu mulai banyak industri. Banyak lahan-lahan sawah”

(“ya, tahun itu lah. ... (tahun 1986)”

“he’eh.. itu yang dijadikan industri. Sehingga, hasil panen menurun beralih ke... jadi bukan.. bukan... agraris, tapi beralih kee..... (ke industri)”

La, mulai dari itu, Indonesia sudah mulai anu .. sudah mulai tidak mengekspor beras lagi. Jadi, perhatian ke petani pun menjadi (menurun)”

“ya, menurun. Otomatis kan mengejar keuntungan.. sehingga, kebijakan-kebijakan pemerintah, sudah banyak yang di...tinggalkan.

...¹³

¹³ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Mh

4.1.2 Gambaran Umum Desa Suruh

Berdasarkan Laporan Monografi, jumlah Penduduk Desa Suruh dari Tahun 2006 hingga 2011 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Suruh Tahun 2006 hingga 2011¹⁴

| No. | Tahun | Jumlah Penduduk | | |
|-----|-------|------------------|------------------|------|
| | | Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | L+P |
| 1. | 2006 | 3636 | 3643 | 7273 |
| 2. | 2007 | 3633 | 3654 | 7287 |
| 3. | 2008 | 3632 | 3631 | 7263 |
| 4. | 2009 | 3643 | 3642 | 7285 |
| 5. | 2010 | 3827 | 3798 | 7625 |
| 6. | 2011 | 3840 | 3789 | 7629 |

Sumber: Data Monografi Kelurahan Suruh dari tahun ke tahun

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan akhir di Desa Suruh di tahun 2006 hingga 2011 sebagai berikut:

Grafik 4.3 Jumlah Penduduk Desa Suruh Menurut Pendidikan dari Tahun 2006-2011



Sumber: Monografi Kelurahan Desa Suruh 2006 sampai 2011

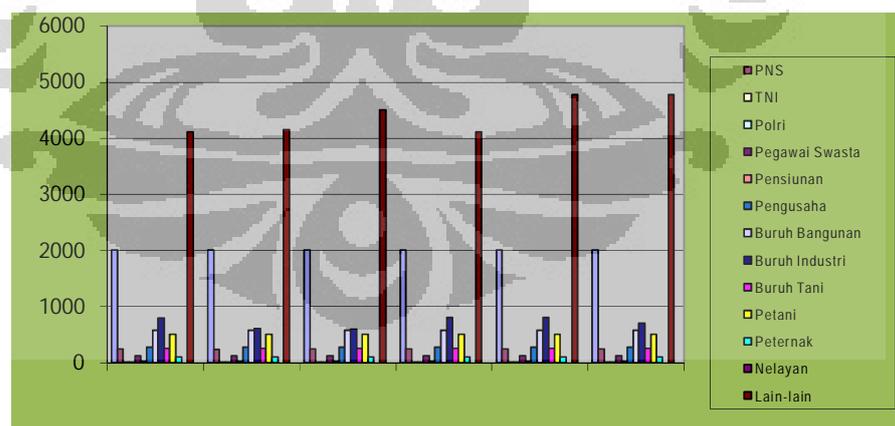
Data mengenai jenjang pendidikan akhir Penduduk Desa Suruh tersebut dimaksudkan untuk mengetahui relevansinya dengan pekerjaan mereka dimana Desa Suruh merupakan wilayah di dalam satu Kecamatan Suruh yang memiliki potensi pertanian tinggi dibanding Desa lain di dalam satu kecamatan. Secara geografis, potensi pertanian tampak dengan lahan-lahan sawah yang masih alami (belum tergusur oleh industri) sehingga hal ini memunculkan anggapan bahwa masyarakat setempatlah yang mengelola lahan sawah tersebut. Dengan kata lain, wilayah yang masih memiliki potensi sawah atau lahan pertanian menunjukkan

¹⁴ Laporan ini berdasarkan pada laporan bulanan yang ada di Desa/ Kelurahan Desa Suruh yang hanya diambil pada total keseluruhan Bulan di Akhir Tahun (Bulan Desember).

bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah agraris yang masyarakatnya mayoritas adalah petani.

Sama halnya dengan kondisi jenjang pendidikan di tingkat Kecamatan, di Desa Suruh jenjang pendidikan yang paling banyak dikenyam masyarakat hanya sampai pada pendidikan sekolah dasar. Rentan antara pendidikan sekolah dasar hingga sarjana sangat jauh dan timpang sekali. Hal ini bisa dilihat di dalam grafik di atas bahwa jenjang masyarakat yang belum tamat SD menduduki garis teratas dibanding jenjang pendidikan yang lain. Kondisi belum tamat yang dialami oleh sebagian penduduk di Desa Suruh dikarenakan oleh salah satu faktor minimnya biaya dan pengetahuan warga setempat akan pentingnya pendidikan. Dari hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa di masa kecilnya, anak-anak lebih dituntut untuk bekerja membantu orang tua di sawah atau lading daripada mengenyam pendidikan. Mencari penghasilan untuk bertahan hidup, khususnya makan menjadi tuntutan utama bagi masyarakat setempat dibanding kebutuhan lain. Kemudian, berikutnya dipaparkan tabel jumlah penduduk Desa Suruh berdasarkan mata pencaharian. Data ini diperoleh berdasarkan data terakhir, tahun 2010.

Grafik 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian (Data Terakhir 2010)



Sumber: Monografi Kelurahan Suruh Tahun 2010

Berdasarkan jumlah penduduk menurut Mata Pencaharian Desa Suruh dengan data berdasarkan penduduk di seluruh Kecamatan tidak sama. Masyarakat Desa Suruh sebagian besar bekerja “serabutan” yang ditulis sebagai ‘lain-lain’.

Universitas Indonesia

Gambaran ini juga didapatkan pada level kecamatan. Namun, hal yang beda kemudian ditemukan dimana setelah 'lain-lain', pekerjaan masyarakat di Desa Suruh cenderung dominan pada sektor industri dan bangunan, urutan berikutnya adalah petani.

Definisi petani menurut informan adalah mereka yang memiliki lahan garapan sedangkan buruh tani adalah mereka yang dipekerjakan secara musiman (disewa bila diperlukan). Memang untuk Desa Suruh, buruh tani sulit ditemukan. Para penggarap sawah mengalami kesulitan menyewa tenaga buruh dalam mengerjakan proses produksi gabah karena industrialisasi dan pekerjaan di sektor urban telah masuk di Desa Suruh sebagai daerah sentral di dalam Kecamatan Suruh. Dengan demikian, tidak heran bila buruh tani yang awalnya bekerja di sektor pertanian bergeser ke sektor industri.

4.2 Profil Informan

4.4.1 Profil Informan I

Ketua Dinas Pertanian Kecamatan Suruh.

Informan pertama adalah Kepala Dinas Pertanian Kecamatan Suruh. Kiprahnya di dalam lembaga pertanian sudah dijalaninya selama 27 tahun. Pekerjaannya tersebut tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang telah digelutinya. Lahir di Kota Semarang, 28 Maret 1962. SPMA adalah latar belakang pendidikan menengah atas yang mengantarkannya menjadi seorang PNS yang kemudian melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Terbuka dan mendapat Gelar Sarjana tahun 2006 di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta tahun 2006.

Informan ini adalah seorang istri Lurah yang telah menjabat selama dua periode. Dia dinikahi seorang lurah yang berlatar belakang duda dan beranak tiga. Sehingga, jabatan Ibu Lurah juga sekaligus disandangnya. Menurut informasi masyarakat Desa setempat, kepemimpinan lurah yang dijabat oleh suami informan dengan dirinya bukan semata-mata karena keberhasilan kampanye melainkan keinginan warga setempat yang mencalonkan dirinya atas kemauan warga sendiri. Menurut informasi, ketika sedang memasuki musim kampanye, warga setempat *memunjung* (menghantarkan) beberapa hasil panen sebagai bentuk permohonan kepada beliau untuk bersedia menjadi pemimpin Desa. Hal tersebut tidak hanya

Universitas Indonesia

dilakukan sekali atau dua kali. Menurut hasil wawancara yang tidak direncanakan, menurut salah seorang warga yang rumahnya sekitar 100 meter dari rumah informan ini, satu Kecamatan Suruh baru dirinya yang dinyatakan berhasil menjadi lurah yang sukses. Menurut warga setempat, dia terkenal sebagai pemimpin yang jujur dan memiliki wibawa. Hal ini pun juga dituturkan oleh isterinya sendiri yang tak lain juga merupakan informan peneliti:

“..... untuk saya sendiri.. kebetulan kan saya juga petani. Suami saya kepala desa tapi terus petani. Dia sudah menerapkan. Satu hektar pemupukan berimbang, **mungkin pakai urea 300 bagaimana kalau bagi-bagi. Saya mensubsidi buruh itu seratus lima puluh.** Sing jenenge buruh harus membeli pupuk. Diitung. **Kalau memang yang namanya buruh ini tidak punya duit, sarana produksi ini saya total, nanti setelah panen, sarana produksi tak ambil dulu.**Tapi berapa persen pemilik yang mempunyai satu orientasi pemikiran seperti itu? Jarang sekali. Ya bukannya sombong, tapi memang kenyataan **suami saya termasuk petani yang memiliki wibawa.** Jadi hubungan pemilik dalam hal ini dia, dengan buruhnya tidak seperti petani pada umumnya yang memeras buruh.”

4.4.2 Profil Informan II

Petani gurem yang pernah juga menjadi pemilik lahan pertanian

Informan kedua, Lahir di Desa Suruh, Kabupaten Semarang 67 tahun yang lalu. Informan ini masa kecilnya dikenal sebagai anak tuan tanah di Desa Suruh. Beliau lahir dalam keadaan yatim, dan ibunya pun meninggal saat melahirkannya. Kehidupannya masa kecil diasuh oleh dua orang kakek nenek yang masa itu terkenal sebagai *wong sugih* (orang kaya raya). Warisan peninggalan orang tua dan nenek kakeknya diserahkan kepada beliau karena informan adalah anak dan cucu semata wayang. Kekayaan yang dimilikinya yang berupa lahan pertanian dan tanah adalah hasil warisan yang diberikan padanya.

Dia menikah dengan puteri seorang *bekel* (sekretaris Dusun) dan dikaruniai enam orang anak. Ketika usia pernikahannya menginjak 14 tahun, isterinya meninggal dunia. Selanjutnya, selang beberapa bulan, duda beranak enam ini menikahi sepupu perempuan dari pihak ayahnya. Isteri kedua tersebut adalah seorang PNS Guru TK yang 2 tahun yang lalu baru menerima status baru sebagai pensiunan.

Informan menghidupi keluarganya melalui hasil tani sebagai penghasilan utama. Keuntungan hasil taninya dibelikan kendaraan umum sejenis oplet yang biasa disebut *kol*. Kendaraan atau yang tepatnya angkutan umum tersebut

digunakan untuk mencari kebutuhan tambahannya, tepatnya ketika anak-anaknya satu per satu mulai memasuki bangku sekolah.

Mulai tahun 2000, tanah hasil warisannya semakin lama semakin habis terjual untuk membiayai kebutuhan sekolah anaknya. Sehingga, sekarang ini sudah tidak lagi memiliki lagi tanah peninggalan warisan orang tuanya. Beliau hanya menjadi petani penggarap yang tugasnya mengelola tanaman padi dan sawah, mulai dari mengolah tanah, membeli sarana produksi (pupuk, benih padi, obat hama, dan lain-lain), dan membayar tenaga buruh. Beliau mendapat hasil panen yang telah dibagi setengah dengan pemilik tanah yang milik orang lain yang bukan tanah miliknya dulu. Tanah peninggalan warisan yang dimilikinya dulu telah dijual untuk biaya pendidikan keenam anaknya hingga jenjang pendidikan sarjana. Namun, setelah keenam anaknya tersebut telah berhasil hidup tanpa topangan biaya orang tua, informan merasa tidak mendapat bantuan materi dari anak-anaknya mengingat semua modal yang dimiliki untuk membiayai anak-anaknya bmenyengam pendidikan telah habis dijual. Saat ini, informan hanya bergantung pada sawah garapan satu hektar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika puso melanda sawah garapannya, informan mengakui tidak mendapat uang selama 6 bulan/ satu kali periode panen.

Dalam proses produksi, informan memaparkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan selama proses produksi ditanggungnya lima puluh persen dari pendapatan yang beliau dapatkan. Artinya, dari jumlah akumulasi pendapatan panen, beliau hanya mendapat seperempatnya saja. Kebutuhan sehari-harinya dianggapnya tidak cukup. Justru informan dihidupi oleh isterinya yang baru beberapa bulan pensiun dari profesinya.

4.4.3 Profil Informan III

Buruh tani

Informan ketiga merupakan seorang laki-laki kelahiran Desa Suruh, 56 tahun yang lalu. Tanggal, bulan, dan tahunnya tidak diketahuinya secara pasti. Informan dibesarkan dari keluarga petani pemilik yang sekaligus juga penggarap. Pekerjaannya sebagai petani telah dilaluinya sejak dia umur 20, pada tahun 1975. Sawah yang digarapnya saat ini, bukanlah milik dia melainkan sawah garapan milik orang yang luasnya kurang lebih satu hektar. Sekalipun dulu ayahnya adalah

petani pemilik, tetapi saat ini dia menggarap sawah milik orang lain karena sawah-sawah peninggalan orang tuanya yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, termasuk juga informan, telah dijual untuk kebutuhan keluarganya, khususnya untuk pendidikan.

Posisinya di dalam masyarakat adalah sebagai ketua RT. Jabatan tersebut telah diembannya selama kurun waktu dua periode. Selama dia bertani, selama itu pulalah dia hidup didampingi seorang isteri. Isterinya adalah seorang buruh tani biasanya disewa untuk menyangi rumput liar yang mengganggu tanaman padi tetapi sekarang sudah jarang digunakan karena petani lebih memilih menggunakan cara tanpa sumber daya buruh tetapi dengan menggunakan obat. Selain itu, ketika panen isterinya adalah seorang buruh yang mencari sisa-sisa rontokan padi ketika panen tiba. Gambar di bawah ini adalah hasil kegiatan isteri informan saat mencari sisa rontokan gabah di saat panen. Informan tampak sedang menjemur gabah karena gabah yang masih baru dari hasil panen harus dijemur kurang lebih satu minggu sebelum digiling supaya beras di dalam tidak hancur saat penggilingan dilakukan.



Selebihnya, tentang kehidupan informan, dia merupakan kepala keluarga yang memiliki lima anak. Tiga diantaranya sudah berkeluarga dan memiliki anak. Latar belakang pendidikan anak-anak informan bermacam-macam. Anak pertama hanya menyelesaikan sekolah hingga tamat SD. Sekarang dia bekerja tak beda dengan ayahnya, yaitu menggarap sawah milik orang. Sedangkan isterinya adalah ibu rumah tangga yang pekerjaan sehari-harinya mengurus anak dan rumah. Anak kedua adalah anak perempuan yang jenjang pendidikannya hanya sampai tamat SMP. Setelah lulus SMP, anaknya dinikahkan dengan seorang buruh tani yang membantu informan mengolah sawah. Dua anak informan yang pertama tinggal

serumah dengan informan. Sedangkan anak ketiganya yang sudah menikah juga tinggal dengan suaminya di lain tempat (Jakarta). Anak ketiganya ini perempuan, berpendidikan tidak lulus SMP dan menikah tahun 2003 dengan laki-laki tukang sayur keliling di Ibukota. Anak ketiga ini mulanya adalah buruh pabrik rokok yang pada saat itu upah yang diterima Rp. 400.000 hingga Rp. 700.000 per bulan. Keputusan menjadi buruh pabrik dipilihnya karena dia tidak lulus SMP dan harus membantu kehidupan keluarganya.



Di atas tampak gambar anak kedua informan sedang melakukan aktivitas dengan suaminya di samping rumah. Aktivitas ini diakui sebagai kegiatan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain menggantungkan dari hasil pertanian. Terlebih lagi saat itu, sawah sedang dilanda puso. Sehingga, harus mencari pekerjaan sampingan untuk bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga mereka. Mereka membuat kerajinan tangan *tumbu* atau semacam wadah/perabot yang digunakan di dapur-dapur. Bahan dasar yang digunakan cukup memanfaatkan pohon bambu di belakang rumah dekat kandang kerbau. Hasil produksi mereka, kemudian dijual ke pasar. Harga satuan kurang lebih 3000 rupiah hingga lima ribu rupiah. Kegiatan ini tidak dilakukan setiap hari, kebetulan ketika observasi ini dilakukan dan didapatkan data saat anak kedua informan sedang menganyam bambu, keluarga mereka (anak kedua informan) sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari karena penghasilan yang didapatkan dari kegiatan suaminya mengangkut dan menggiling gabah tidak maksimal karena sawah diserang wereng.

Kemudian, dari dua anak informan yang belum menikah, pendidikan anak keempat informan hanya sampai lulus SMP. Setelah itu, dia ikut angkutan

umum mencari penumpang (kernet angkutan). Hingga sekarang, dia menggantungkan hidupnya pada pekerjaan kernet angkutan umum penghubung Desa Suruh ke Kota (Salatiga). Sedangkan anaknya yang terakhir baru saja lulus STM yang kini masih pengangguran di rumah dan tinggal di rumah informan.



Pada gambar di atas merupakan salah satu aktivitas menantu informan yang tak lain isteri dari anak pertamanya yang juga serumah dengan informan. Pada gambar paling kiri adalah gambar fasilitas air (*pancuran*) yang biasa digunakan oleh masyarakat di sekeliling rumah informan ketiga. Untuk memenuhi kebutuhan MCK, keluarga informan ketiga harus pergi ke penampungan ark arena rumah informan tidak memiliki fasilitas tersebut.

Bahkan, untuk urusan mencuci baju hingga menjemur, keluarga informan memanfaatkan fasilitas seadanya. Apa yang ada dimanfaatkan.



Gambar di atas merupakan kegiatan isteri informan yang sedang mencuci pakaian di sungai. Untuk kebutuhan MCK yang tidak dilakukan di penampungan air, keluarga informan memanfaatkan sungai yang berjarak 50 m dari rumahnya untuk keperluan mencuci pakaian. Setelah mencuci selesai, menjemur pakaian yang telah dicuci dilakukan di pohon pagar yang terletak di depan rumahnya. Gambar bisa dilihat di atas di bagian paling kanan.



Kondisi tempat tinggal informan hanya bisa diamati dari luar saja. Bisa dilihat gambar di bawah sebelah kiri adalah muka rumah yang berdiri dengan tembok tatanan batu bata. Lebarnya kurang lebih 7 meter dengan bentuk memanjang ke belakang. Di teras rumah tampak tiang pancang dari besi empat yang diikatkan seutas tali raffia warna putih yang digunakan untuk menjemur kain dan handuk. Di samping kanan rumah tampak beberapa ongkok kayu bakar kering yang tertata hingga ujung belakang rumah.

Gambar sebelah kanan tampak salah satu alat produksi yang digunakan untuk membajak sawah. Memang, selain bersawah informan juga memiliki sarana produksi berupa beberapa ekor kerbau untuk membantu membajak mengolah tanah sebelum masa panen tiba. Selain alat untuk membajak sawah, informan ketiga juga memiliki beberapa binatang kerbau untuk membantu membajak sawah.



Gambar sebelah kanan di atas terlihat salah satu hewan piaraan informan yang digunakan untuk mengolah tanah di sawah sebelum masa tanam. Sedangkan pada gambar di sebelah kiri terlihat kandang kerbau yang dibuat dari bambu dan menempel di bagian paling belakang rumah informan.

4.4.4 Profil Informan IV

Informan keempat adalah seorang laki-laki yang berusia 60 tahun. Dia adalah kakak pertama dari informan ketiga. Letak rumahnya pun berada di samping rumah informan ketiga. Dia adalah seorang ayah dari empat orang anak.

Kegiatan bertani sudah dilakukannya setelah dia menikah. Pertama, sawah yang dia garap adalah milik isterinya (warisan) sehingga bertani bukan latar belakang dia sesungguhnya. Sebelum menikah dia ikut tetangganya menjadi buruh pandai besi yang telah dilakukannya sejak informan berada di kelas lima SD. Sampai pada tahun 2008, informan memiliki usaha pandai besi sendiri dengan me-*recruit* buruh-buruh yang tak lain adalah tetangga di sekitar rumahnya sendiri. Kini aktivitas pekerjaannya hanya bertani, menggarap sawah milik orang dan milik isterinya serta membantu usaha *catering* yang dikelola isterinya. Isterinya memulai membuka *catering* sejak tahun 1994 setelah usaha sebelumnya membuat kerupuknya tidak lagi memperoleh keuntungan yang dianggap memadai. Selain usaha *catering*, isteri informan juga memiliki warung namun pada kegiatan sehari-hari. Warung tersebut akan dibuka hanya akan dibuka jika ada pengunjung yang datang ingin membeli sesuatu.



4.4.5 Profil Informan V

Petani Penggarap, pengusaha pandai besi

Informan kelima adalah seorang petani yang mengerjakan pekerjaan sampingan pandai besi. Sawah yang digarapnya adalah peninggalan warisan dari orang tua isterinya sebelum meninggal. Baginya, pekerjaan utamanya bukanlah sebagai petani penggarap melainkan seorang pandai besi yang hanya satu-satunya di Desa Suruh. Pandai besi ini pun merupakan peninggalan Orang tuanya. Di Desa Suruh, khususnya di Dusun Karang Asem dan Pandean sangat dikenal sebagai daerah pengrajin pandai besi . Hal ini menunjukkan bahwa Desa Suruh merupakan

basis pertanian karena peralatan penunjang pertanian seperti cangkul dan sabit dibuat oleh ahli pandai besi sebelum teknologi canggih diperkenalkan kepada masyarakat. Hingga saat ini, pesanan alat-alat tersebut masih banyak. Pesanan sabit dan cangkul biasa dikerjakan 3 hingga 4 hari dengan dibantu oleh dua orang pegawai. Satu hasil pekerjaan dihargai dua ratus hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan upah buruh per hari tiga puluh lima ribu rupiah.

Di gambar di bawah ini tampak informan yang berada di sebelah tengah sedang membuat pesanan cangkul. Terlihat pula dua orang pekerja yang membantu mengerjakan pesanan orang tersebut.



Informan lebih menggantungkan penghasilan pandai besi untuk kebutuhan makan sehari-hari. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an informan sempat memiliki aset mobil angkutan umum untuk pendapatan sambilan tetapi usaha tersebut tidak bertahan lama karena menurutnya, memiliki usaha angkutan umum memiliki banyak risiko dan kendala yang membuat hidup tidak tenang.

Gambaran kehidupan informan yang lebih menggantungkan penghasilannya pada pandai besi bisa dilihat berdasarkan properti yang dimiliki di dalam rumah. Beberapa foto yang berhasil diambil di dalam rumah adalah sebagai berikut:



Kondisi rumah informan bisa dilihat di gambar di atas. Paling kanan adalah warung yang didirikan dari penghasilan tambahan pandai besi dan panen di sawah. Warung ini terletak di rumah bagian depan. Kemudian gambar di tengah adalah kondisi ruang tengah yang digunakan untuk makan. Dalam hal memasak, rumah informan tidak menggunakan kompor gas maupun kompor minyak tetapi mereka memanfaatkan tungku dan bahan bakar kayu minyak tanah. Seperti yang tampak di gambar paling kiri, terlihat ceret aluminium terletak di atas tungku.

Menyangkut pendapatan dari hasil pertanian, diakui oleh informan bahwa pendapatan tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, terutama untuk pendidikan anak-anak mereka. Oleh karenanya, dari kelima anaknya, hanya dua anak terakhir yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi karena pendapatan dari penghasilan pertanian hanya cukup untuk memenuhi makan seadanya setiap hari.

Selain memiliki penghasilan tambahan dari warung dan pandai besi, informan memiliki peran yang dianggap penting bagi masyarakat setempat. Dirinya dianggap pintar dan memiliki ilmu agama yang sering kali membantu masyarakat ketika sedang mengalami masalah, seperti: kesurupan, sakit, keluarga meninggal, pernikahan, dan urusan lain yang terkait dengan spiritual.

Sementara itu, di dalam asosiasi pertanian, informan memiliki peran sebagai bendahara di kelompok tani. Namun, diakui bahwa jabatan bendahara petani hanya sebatas formalitas belaka karena peran bendahara yang dia sandang tidak ada konsistensinya. Dia tidak pernah memegang dana sepeserpun dari hasil usaha kelompok tani. Hanya saja, ketika sedang membutuhkan bantuan saprodi, kelompok tani diwajibkan menyerahkan prososal permohonan yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara terkait.

4.4.6 Profil Informan VI

Sekretaris Dusun

Informan berikut ini (45tahun) adalah seorang yang memiliki andil di dalam masyarakat, khususnya Dusun dimana dirinya tinggal karena dia adalah tangan kanan Lurah yang berwenang untuk menyampaikan pesan dari kelurahan dan menyampaikan permohonan dari masyarakat. Dalam hal urusan pertanian,

sejak 2007 dirinya diangkat sebagai kelompok tani untuk Dusun Pandean Karang Asem, Desa Suruh. Sejak saat itu pula dirinya bergelut dengan segala macam urusan pertanian dan dirinya pun memiliki sawah satu hektar peninggalan orang tuanya.

Di bidang pertanian, khususnya perberasan, informan sebagai ketua kelompok tani berperan penting sebagai penyalur kebutuhan masyarakat ke dinas pertanian. Biasanya, kelompok tani yang mengajukan proposal untuk meminta sarana produksi, penyaluran proposal tersebut diserahkan kepadanya untuk kemudian diserahkan ke kantor pusat di Semarang. Setelah bantuan tiba, misalnya saja pupuk subsidi dari pemerintah, bantuan tersebut diserahkan kepada dirinya. Selanjutnya, para petani mengambil pupuk tersebut dengan membawa uang 82 ribu rupiah. Menurut informasi darinya, subsidi dari pemerintah untuk pupuk adalah sebesar 60%, sehingga 82 ribu merupakan harga pupuk sesungguhnya yaitu delapan puluh ribu dengan tarikan transportasi 2 ribu rupiah.

Pada tahun ini (2011), informan mengakui mengalami gagal panen akibat sawahnya diserang hama wereng sehingga pendapatannya pun hilang dalam dua jatah kali panen. Selama dua puluh tahun terakhir, diakuinya semakin terasa adanya perubahan iklim yang membuat petani tidak bisa atau sulit memprediksi musim. Akibatnya, petani tidak bisa menggantungkan sepenuhnya pendapatannya hanya dari hasil panen padi. Menurut pengalamannya, beserta dengan orang tuanya ketika masih hidup, nilai tukar petani sekarang ini dengan dulu sangat beda. Sekarang petani merasa sangat hidup kekurangan akibat nilai tukar yang tidak memadai. Dulu, hasil panen padi dapat dibelikan tanah hingga menyekolahkan anak tetapi sekarang ini, hasil jual gabah dari petani hanya bisa digunakan untuk membeli pupuk untuk proses produksi selanjutnya. Malah kadang-kadang harga pupuk lebih mahal dari harga per kilogram beras. Disinilah kesulitan yang dialami petani sekarang ini menurutnya.

4.4.7 Profil Informan VII

Tengkulak, petani pemilik, dan penggarap

Informan ketujuh ini seorang petani yang berusia 56 tahun dan lamanya bekerja di sektor pertanian sudah 25 tahun. Dirinya merupakan pemilik tanah

yang sekaligus juga penggarap dan tengkulak/ penebas. Awal mula dirinya melakukan tebas sawah adalah tahun-tahun 1990-an dimana Soeharto masih berkuasa. Diakuinya bahwa sistem tebas atau tengkulak ini sudah ada sejak zaman dirinya masih kecil dan tidak pernah ada larangan dari pemerintah untuk melakukan tebasan sawah.

Sistem tebas ini merupakan sistem dimana si penebas melakukan pembelian gabah yang masih basah. Dengan kata lain, padi yang masih ada di sawah dan siap akan dipanen sudah ditawarkan kepada penebas. Kemudian, si penebas ini menyewa buruh untuk memotong padi hingga menjadikannya beras.



Di atas adalah kegiatan buruh yang disewa penebas untuk melakukan proses panen, yaitu dari memotong batang padi dengan sabit (dilakukan oleh laki-laki), kemudian merontokan padi sebelum digiling menjadi beras. Buruh-buruh ini diberinya upah 15 ribu dari pagi hingga siang tetapi jika mereka melakukannya sampai sore, upah ditambah menjadi 20 ribu.

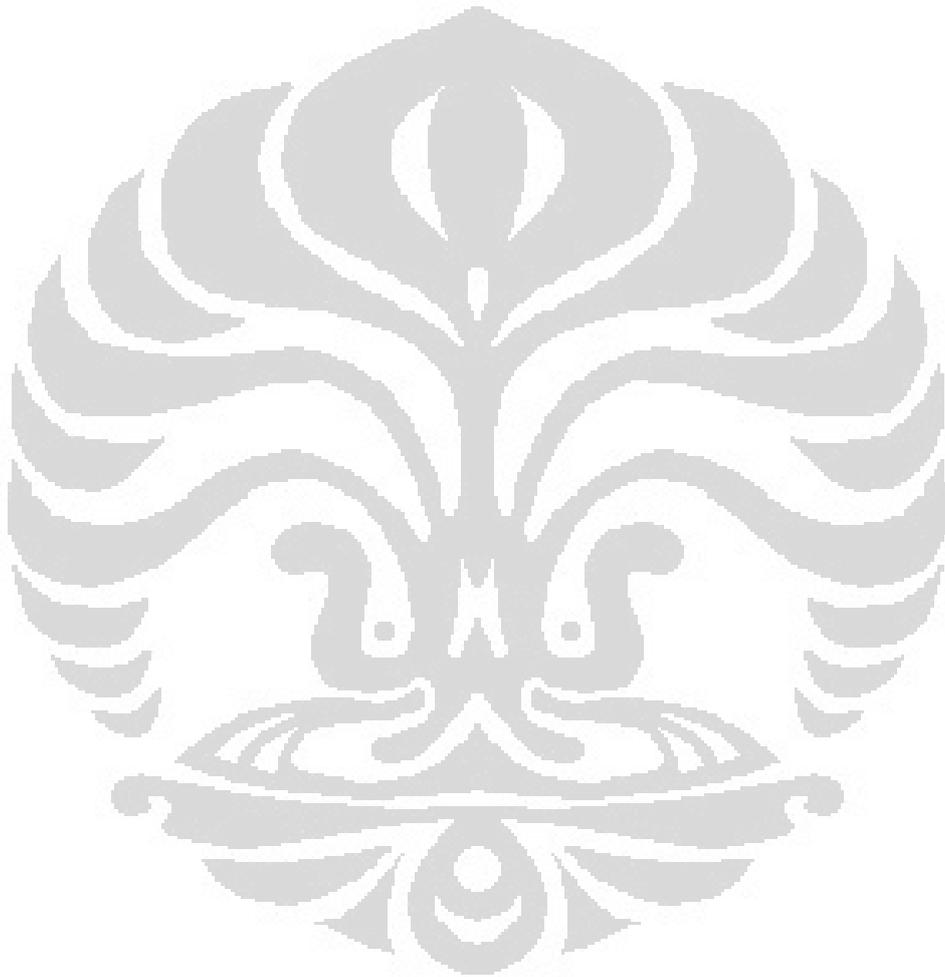
4.4.8 Profil Informan VIII

Koordinator KUT, anggota KUD

Informan terakhir adalah bukan seorang petani melainkan seseorang yang lebih aktif di lembaga pertanian di level Desa. Dirinya sering dipanggil dengan nama belakang diimbuhi 'KUD' karena kesehariannya dihabiskan di KUD. Sebenarnya dia lebih berperan di bagian Kredit Usaha Tani (KUT). Dirinya diangkat sebagai manajer KUT sejak KUT didirikan, yaitu tahun 1998.

Pengangkatan dirinya menjadi koordinator KUD dilatarbelakangi karena dirinya aktif di dalam organisasi Desa, seperti perkumpulan RT, RW, dan Organisasi keagamaan di level Desa. Selain itu, dirinya memang berkecimpung di

KUD untuk membantu pengadaan pangan dari tahun sebelum krisis ekonomi. Dirinya mengakui mulai masuk ke dalam KUD dari tahun 1990-an.



BAB V

TEMUAN PENELITIAN

5.1 Temuan Makro

Pada bagian ini merupakan hasil temuan dari data sekunder atau literatur yang terkait dengan masalah kebijakan ketahanan pangan di masa pemerintahan Orde Baru hingga Reformasi. Temuan ini peneliti jelaskan secara deskriptif untuk melihat kebijakan pemerintah pada dua masa tersebut untuk menganalisis kondisi sosial di Desa Suruh menyangkut ketahanan pangan. Kajian di level mikro, yaitu melalui penelitian lapangan yang telah dilakukan akan dikomparasikan di BAB VI dengan mengaitkannya dengan temuan makro ini.

5.1.1 Beras adalah Komoditas Unik

Beras merupakan komoditas yang mana dari zaman penjajahan Belanda hingga era globalisasi seperti saat ini merupakan komoditas yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah karena menyatu dalam aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Beras, di awal keberadaannya telah dinobatkan sebagai makanan yang mewah. Keberadaannya di Asia sudah sekitar 40 juta tahun yang lalu dan membutuhkan 9000 tahun untuk bisa dikenal secara luas. Hingga saat ini, varietas beras telah tercatat sebesar 100 ribu. Usaha pelestarian dan perkembangannya pun terus dilakukan dalam rangka mewujudkan produk yang dapat tahan terhadap musim yang tidak dapat ditentukan, seperti kemarau, temperatur dingin dan juga tahan terhadap hama penyakit (Ariyanti, dalam Republika 2003). Penggunaan beras varietas di Indonesia sendiri telah diperkenalkan pertama kali ketika Revolusi Hijau mulai dijalankan. Salah satunya adalah pengenalan jenis padi varietas IR-8 yang merupakan persilangan antara padi Peta dari Indonesia yang kuat pertumbuhannya dengan jenis Dee-geo woo, varietas kecil dari Taiwan yang memiliki banyak anakan. Pada tahap selanjutnya, varietas padi modern tidak hanya hasil persilangan dua atau lebih tetapi sudah merupakan produk rekayasa genetika yang kemudian menghasilkan beragam varietas dalam waktu cepat (Sri Setyati Haryadi dalam Maksim D Prabowo: 2006:147). Upaya ini dilakukan seiring dengan laju pertumbuhan populasi yang tidak semakin menurun sehingga produktivitas pangan pokok masyarakat juga

Universitas Indonesia

dengan berbagai macam cara harus ditingkatkan untuk menghindari krisis yang berdampak pada keresahan sosial.

Di tahun 1970-an, beras bagi bangsa Indonesia merupakan komoditas pangan yang sangat penting bagi negara berpenduduk paling besar di dunia dengan tingkat populasi di atas 206,3 juta jiwa, hampir semua penduduk mengkonsumsi beras untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Ariyanti DM, dalam Republika 2003).¹⁵ Dengan demikian, masalah pangan khususnya untuk komoditas beras tidak bisa dianggap remeh. Beras merupakan masalah yang sangat serius dan strategis karena berbicara mengenai beras dalam kaitannya dengan ketahanan pangan tidak dapat ditunda dalam waktu sekejap. Tidak tersedianya pangan beras dalam negeri berpengaruh besar terhadap ketahanan nasional. Negara besar seperti Uni Soviet yang tidak dapat memenuhi ketersediaan pangan nasional telah menyulut perpecahan (Amang, 1995: 3). Ini merupakan contoh nyata bagi Indonesia dimana jika ketersediaan beras untuk sebagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat terpenuhi maka bisa menimbulkan perpecahan sebagaimana yang terjadi di Uni Soviet karena kredibilitas pemerintah dalam menyediakan kebutuhan rakyatnya dianggap gagal.

Secara politis juga bisa dilihat bagaimana gejolak krisis yang terjadi di sepanjang peralihan kekuasaan di Indonesia. Peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi tahun 1998, tampak bahwa kondisi perekonomian nasional masih menunjukkan rendahnya daya beli (*purchasing power*) masyarakat dan pada saat yang sama harga kebutuhan pokok termasuk beras merambat naik. (Sawit dan Amang, 1999: 157) Hal inilah yang kemudian memicu peristiwa kerusuhan 1998. Masyarakat menuntut hak-hak mereka untuk mendapat jaminan kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dengan harga yang mudah dijangkau.

Krisis 1998 dengan berbagai perlawanan merupakan gambaran tentang bagaimana masyarakat tidak lagi mempercayai kredibilitas pemerintahan dalam

¹⁵ Konsumsi beras mencapai sekitar 95%, artinya 95% rumah tangga di Indonesia menggunakan beras sebagai bahan konsumsi utama. Dan tidak dipungkiri juga bahwa pemilihan beras sebagai menu makanan pokok masyarakat dikarenakan kandungan gizi yang ada di dalam beras mengandung 360 Kcal, sedangkan makanan pokok lain yang memiliki kandungan gizi sama, yaitu untuk karbohidrat atau tenaga, jagung kuning 307 Kcal, ubijalar 123 Kcal, singkong 146 Kcal, gaplek 338 Kcal. Demikian halnya dengan kandungan protein yang dikandung di dalam beras, yaitu 6 gram. (dalam Sawit dan Amang, 1999: 92)

menjaga ketahanan pangan nasional. Sebagaimana yang dikatakan Morgan (Dalam Sawit dan Amang, 1999), pangan sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan manusia tetapi bahan pangan tertentu juga memiliki nilai politik yang merembet ke masalah-masalah internasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa beras sangat terkait dengan stabilitas ekonomi maupun politik.

Selain itu, beras juga dimanfaatkan pemerintah sebagai sumber investasi. Meningkatnya pendapatan pada komoditas beras telah menarik sektor lain untuk berkembang di desa, baik yang terkait dengan padi maupun perdagangan. Efek selanjutnya, daya beli akan meningkat dan mendorong sektor lain untuk berkembang, seperti perdagangan, transportasi dan sebagainya. Di luar itu, surplus dari usaha tani dapat digunakan sebagai modal investasi *human capital* seperti membiayai anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dari perdesaan akan meningkat dan kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin tinggi.

Dari aspek ekonomi, beras mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, menekan laju inflasi, dan menekan laju impor beras. Di samping itu, beras sebagai komoditas pangan memiliki ketergantungan yang tinggi di masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa menjaga kestabilan harga sangat penting dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap kredibilitas pemerintah. Ditambah lagi dengan kondisi beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, beras menjadi penyumbang tertinggi dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menjadi indikator inflasi (Amrullah, 2005:51) . Dengan kata lain, menjaga kestabilan harga sama dengan menjaga kestabilan inflasi. Dengan demikian, dapat dikatakan juga bahwa dari segi politik, komoditas beras juga digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk menjaga legitimasi kekuasaan. Bila harga beras mengalami kenaikan, maka yang terjadi selanjutnya adalah keresahan sosial dimana-mana yang berujung penuntutan terhadap penguasa. Dalam setiap fase pergantian pemerintahan, keresahan sosial sebagai akibat dari tuntutan masyarakat akan penyediaan pangan nasional terbukti selalu terjadi.

Dari aspek sosial, sering kali muncul persoalan terkait dengan perberasan yang menyangkut faktor produksi seperti lahan, harga pupuk, sumber daya manusia dan pestisida yang mana semua itu memiliki kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Bisa dilihat dimana saat harga hasil produksi petani berupa gabah atau beras akan menjadi sangat tidak menentu di saat panen raya. Di satu sisi, panen raya memberi keuntungan bagi produsen atau petani karena saat itu juga mereka mendapatkan sumber daya bertahan hidup. Dengan kata lain, petani-petani yang telah melalui masa-masa proses produksi mendapatkan imbalan berupa hasil panen yang melimpah. Bagi petani subsisten, mereka dapat memberi nafkah bagi keluarganya dan dalam jangka pendek mereka dapat dikatakan bebas dari serangan kelaparan. Namun, perlu diketahui juga bahwa kebutuhan masyarakat khususnya mereka yang bertani tidak hanya sekedar menunggu hasil panen dan mencukupi makan keluarga tetapi lebih dari itu. Masih banyak kebutuhan di luar kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, seperti pendidikan, kesehatan, papan, dan sandang yang layak guna memperbaiki kualitas hidup di masa mendatang. Segala macam kebutuhan di luar kebutuhan konsumsi bagi petani tidak akan dapat terpenuhi jika hasil panen yang mereka dapatkan sangat minim. Hal ini terkait sekali dengan nilai tukar bagi petani. Kondisi panen raya tidak semata-mata memberi jaminan keselamatan dari kelaparan. Justru di sisi lain, ancaman panen raya bagi para petani, khususnya untuk mereka yang sekedar menjadi buruh tidak akan mendapat keuntungan yang signifikan karena banyaknya permintaan tidak sebanding dengan jumlah panen secara menyeluruh. Semakin banyak hasil panen yang diperoleh dalam jumlah akumulatif, semakin mudah masyarakat untuk mengaksesnya sehingga memunculkan efek dimana harga beras cenderung merosot. Petani disini akan mengalami dilema yang serius.

Harga jual hasil panen di saat panen raya membuat petani merasa mengalami kerugian. Hal serupa juga akan terjadi di saat gagal panen. Efek selanjutnya dari kondisi yang dilematis tersebut adalah rumah tangga petani akan selalu berada pada kondisi miskin dan serba tidak berkecukupan. Sementara itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut masih sangat terbatas (Amrullah, 2005:52).

Berbicara mengenai bagaimana posisi beras di dalam masyarakat hingga menjadikannya sebagai komoditas unik memancing pengetahuan yang tak lepas dari kebijakan di setiap masa pemerintahan karena kebijakan perberasan erat kaitannya dengan siapa yang membuat kebijakan dan kapan kebijakan itu dibuat. Oleh karenanya, lebih lanjut deskripsi mengenai kebijakan beras yang mengacu pada terwujudnya ketahanan pangan akan dibahas di sub bab berikutnya.

5.1.2 Komoditas Beras di Orde Baru: Kebijakan Revolusi Hijau

Ada daerah-daerah di mana posisi penduduk perdesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup untuk menenggelamkannya.
(Tawney dalam James C.Scott)

Kelaparan yang terjadi pada masyarakat adalah soal hidup matinya sebuah bangsa yang dipegang oleh rezim. Soekarno pernah mengatakan di dalam pidatonya:

“Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka malapetaka oleh karena itu perlu usaha besar-besaran, radikal, dan revolusioner” (dalam Zacky Nouval, 2010:15)

Perkataan tersebut juga yang pada akhirnya melengserkan posisi Soekarno dari tampuk kepemimpinan presiden melalui tiga tuntutan rakyat (tritura) 1966, yang salah satunya adalah permintaan penurunan harga pangan. Relasi antara pemerintah dengan masyarakat pada masa tersebut mengalami gangguan karena stabilitas harga pangan sebagai sumber kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat terpenuhi (Ricklefs, 2005). Oleh karenanya, di era transisi menuju Orde Baru warisan instabilitas politik ekonomi yang dipicu oleh gagalnya pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga memperoleh kecukupan pangan menjadi perhatian utama Soeharto dalam rangka membangun stabilitas sosial, politik, ekonomi.

Akhir tahun 1965, hutang yang tercatat menjadi beban Indonesia adalah 2,36 miliar USD, 59,5% di antaranya merupakan hutang kepada negara komunis, 24,9% kepada negara barat, dan sisanya kepada negara-negara nonkomunis lainnya termasuk Jepang. Pada masa tersebut, pemerintah memberi perhatian yang sangat besar terhadap komoditas beras. Bantuan keuangan dalam jumlah besar

Universitas Indonesia

dari lembaga ekonomi internasional meningkat pesat. Laporan pemerintah Indonesia bulan September 1966 kepada para kreditur nonkomunis menunjukkan tingkat bencana nasional yang dihadapi rezim baru. Inflasi tahunan terhitung melebihi 600%, persediaan uang 800 kali lebih tinggi dari angka di tahun 1955 dan defisit pemerintah 780 kali lebih banyak daripada tahun 1961. Hal ini menjadi kabar baik bagi IMF untuk menjadi konsultan dan sekaligus donatur bagi perekonomian Indonesia. Kemudian, di tahun 1967, perubahan ekonomi berjalan dengan cepat. Inflasi terpankas hingga sebesar 100%. (Ricklefs, 2005: 573-575). Persentase tersebut masih terbilang besar namun mengingat tingkat inflasi sebelumnya, jumlah tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam mengembalikan stabilitas ekonomi.

Indonesia baru bisa dikatakan telah mengalami masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru di tahun 1969. Inflasi yang diwariskan pada pemerintahan sebelumnya benar-benar bisa dikendalikan. Kenaikan harga bisa ditekan hingga sekitar 10% selama tahun tersebut. Selanjutnya, di tahun 1969 pemerintah membuat strategi pembangunan ekonomi yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita yang direncanakan Soeharto sebagai basis pemulihan ekonomi ini terdiri dari Pelita 1 hingga Pelita 4.¹⁶ Pada tahap Pelita 1, pertanian menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Harapan yang ingin dicapai dari pembangunan ini adalah dengan ketersediaan pangan yang cukup, ketahanan pangan level nasional akan terjaga. Dengan demikian stabilitas sosial, ekonomi dan politik akan menjadi baik pula (Ricklefs, 2005).

Langkah utama pembangunan pada saat itu diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Langkah yang diambil untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengencangkan pembangunan di sektor pertanian. Oleh karenanya, Dalam setiap pemberitaan,

¹⁶ Pembangunan sektor pertanian hanya berjalan dari Pelita 1 hingga IV. Dan perlu diketahui bahwa komoditas padi sejak Pelita III sampai Pelita V mengalami peningkatan yang menurun (*increase at decreasing rate*). Dalam Pelita VI (1993-1998), produktivitas padi merosot -0,4% tahun (Amang dan Sawit, 1999: 91).

pada saat itu, sektor pertanian menjadi prioritas pembangunan. Soeharto dalam pidato kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 1988 menyatakan bahwa:

“Garis-garis besar haluan Negara tahun 1983 menetapkan bahwa prioritas pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri serta meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha.”

Kebijakan pembangunan ekonomi pertanian yang merupakan paket Pelita 1 berorientasi pada produksi pangan terutama beras, perbaikan sarana prasarana dengan bantuan asing (bilateral maupun multilateral), dan perluasan kapasitas produktif dengan bantuan investasi langsung dari luar negeri (Arndt yang diterjemahkan oleh Ari Basuki dan Budiawan, 1991: 118). Peningkatan produktivitas pertanian yang dilakukan sebagai dasar awal pembangunan ekonomi difokuskan pada tiga kegiatan utama, yaitu: intensifikasi (penggunaan pupuk, bibit unggul, pestisida, dan teknologi mekanis), ekstensifikasi (perluasan area dengan mengkonversi hutan menjadi lahan pertanian/ sawah), dan diversifikasi.

Upaya menjalankan program intensifikasi juga didukung dengan kondisi Pulau Jawa yang memiliki jenis tanah yang baik untuk dilakukan pertanian beras. Kebijakan tersebut didukung dengan penyuluhan dan pembinaan Kelompok Tani untuk menggunakan pupuk secara efisien dan memanfaatkan teknologi pasca panen untuk mengurangi kehilangan hasil.

Selanjutnya, Program Ekstensifikasi dilakukan dengan melakukan konversi lahan yang tidak produktif menjadi lahan pertanian/ sawah. Program ini didukung dengan transmigrasi, tujuannya adalah untuk meratakan jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia dalam mencanangkan dan menggerakkan program di sektor pertanian. Pemerintah juga menggerakkan lembaga-lembaga di bidang pertanian, salah satunya BIMAS¹⁷ yang merupakan program peninggalan

¹⁷ BIMAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebelum Soeharto yang beranggotakan petani kecil yang berdomisili di tiga wilayah: Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Dengan masuknya mereka menjadi anggota BIMAS, mereka akan mendapat bantuan dana yang disalurkan dari BRI untuk modal produksi pertanian. Pinjaman yang diserahkan tersebut memiliki ketentuan tersendiri, yaitu hanya boleh digunakan untuk membeli modal produksi, khususnya produk-produk revolusi hijau yang telah ditentukan oleh pemerintah (misalnya bibit varietas unggul, pestisida, dan pupuk kimia.)

Masa Pemerintahan Soekarno. Selain itu, juga dibentuk Koordinasi Logistik Nasional (Kolognas) pada tahun 1967 yang tak lama kemudian diganti nama menjadi BULOG (Mears, 1990: 37-39). Tujuan dari dibentuknya Badan Logistik tersebut adalah untuk menyalurkan dana bagi para peserta BIMAS melalui *stake holder* di setiap level daerah (Gubernur dan Bupati) di Jawa Barat, Jawa timur, dan Sumatera Utara yang merupakan tiga provinsi utama bagi program BIMAS. Lembaga keuangan juga disertakan sebagai roda penggerak jalannya program pada saat itu. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Desa yang pada saat itu bernama Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) lah yang merupakan donatur/ lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah bagi petani peserta BIMAS. Kemudian di tahun 1968, pemerintah membentuk program baru, yaitu BIMAS Gotong Royong (BGR) yang bertujuan untuk menghadapi musim tanam bulan Desember 1968, yaitu dengan dilaksanakannya panca usaha tani (Mears, 1990: 39).

Selain membentuk lembaga-lembaga pertanian, pemerintah juga membuat program baru, yaitu “Rumus Tani” yang berperan dalam penentuan harga dasar hasil pertanian. Harga per kilogram beras sama dengan harga satu kilogram pupuk. Harga dasar ini sangat penting bagi tercapainya tujuan pemerintah. Namun, dalam perkembangannya, program Rumus Tani dan Bimas Gotong Royong belum berhasil karena kendala harga beras menurut waktu dan tempat yang menjadikan harga dasar hasil pertanian tidak tercapai. Dengan kata lain, PELITA 1 dan II, pemerintah belum berhasil mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras. (Mears, 1982: 440)

Berikut adalah tabel rata-rata pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog yang juga merupakan perbandingan pencapaian produksi beras di dalam negeri dari Pelita 1 hingga Pelita 4. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa rata-rata pengadaan beras dari tahun 1969 hingga tahun 1988 atau dari Pelita 1 sampai Pelita 4 mengalami kenaikan.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengadaan Beras dalam Negeri oleh Bulog (1969-1988)

| Pelita/ Tahun | Jumlah Pengadaan (Ton) | Produksi Dalam Negeri (ton) | Beras (000) | Pengadaan terhadap Produksi (%) |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| Pelita 1 (1969-1973) | 326.470 | 13.251 | | 2,46 |
| Pelita II (1974-1978) | 550.180 | 15.316 | | 3,59 |
| Pelita III (1979-1982) | 693.860 | 20.487 | | 3,39 |
| Pelita IV (1984-1988) | 2.747.551 | 25.892 | | 6,75 |

Sumber: diolah oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia (1988) dalam Sawit dan Amang (1999)

Meningkatnya jumlah produksi beras dalam negeri dari Pelita 1 sampai Pelita 4 serta jumlah pengadaan beras di dalam Bulog pada Pelita 4 didukung dengan keberhasilan program ekstensifikasi lahan dimana lahan-lahan tidak produktif dijadikan lahan pertanian. Keberhasilan Pelita 4 dalam menciptakan ketahanan pangan melalui swasembada beras merupakan jerih usaha pemerintah Orde Baru dalam menangani pertumbuhan sektor pertanian. Keberhasilan tersebut juga tak luput dari peran lembaga-lembaga yang dibuat untuk menjalankan program swasemba beras, antara lain: lembaga penyuluhan (BIMAS (Bimbingan Massal), Inmas (Intensifikasi massal), dan Supra Insus; Badan Usaha Unit Desa/ Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)¹⁸; Badan Urusan Logistik (Bulog) di tingkat pusat, Depot Logistik (Dolog) di tingkat Provinsi, Sub Depot Logistik (Subdolog) di tingkat kabupaten/ madya. Selain dari lembaga, sarana prasarana penunjang seperti pupuk kimia, pestisida, dan bibit unggul seperti varietas unggul tahan wereng (VUTW) juga diperkenalkan dengan tujuan meningkatkan hasil produksi pertanian.

Sejak dijalkannya Revolusi Hijau¹⁹ pada Pelita 4 (tahun 1984), pemerintah sibuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada petani untuk

¹⁸ BUUD didirikan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab para petani produsen beras dengan tujuan agar para petani produsen beras tidak hanya memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi itu sendiri tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidupnya. (Indonesia raya, 8 Juni 1973 dalam Skripsi Hikmah Rafika Mufti, 2005)

¹⁹ Program ini tidak terlepas dari peranan CGIAR (*Consultative Group On International Agricultural Research*), yaitu suatu lembaga pertanian yang khususnya menyebarluaskan **Universitas Indonesia**

peningkatan produktivitas pertanian, khususnya beras. Untuk menjalankan program tersebut, dana menjadi bagian penting untuk menjalankan program ini sehingga Soeharto meminta suntikan dana dari Bank Dunia. Yang menjadi persoalan disini adalah sumbangan tersebut tidak lepas dari syarat yang telah ditentukan. Petani harus menggunakan pupuk, pestisida, dan benih impor. Oleh karenanya, keikutsertaan petani sebagai pelaku langsung yang terjun dalam proses produksi pertanian menjadi faktor utama akan keberhasilan syarat tersebut.

Kebijakan stok beras nasional selama masa swasembada beras justru menyebabkan harga dasar untuk komoditas gabah merosot tajam karena beras melimpah dimana-mana. Hal inilah yang menyebabkan jumlah permintaan konsumen terhadap beras mengalami penurunan. Konsumen tidak merasa was-was kekurangan beras karena akses untuk mendapatkannya sangatlah mudah. Oleh karenanya, petani lebih memilih untuk menjual beras yang baru dipanen dengan harga murah kepada tengkulak daripada Bulog. Harga jual beras ke tengkulak dianggap lebih menguntungkan petani daripada harga jual ke Bulog.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan kenaikan luas Panen Tanaman Padi di Indonesia di tahun 1980 sampai 1998 dimana pada tahun tersebut, kebijakan pertanian masuk pada paket Pelita 3 dan 4 yang mengarah pada pencapaian swasembada beras yang kemudian disusul oleh penyusutan luas panen oleh karena adanya kebijakan pengalihan fungsi lahan untuk industri.

Tabel 5.2 Luas Panen Tanaman Padi di Indonesia 1980-1988 (1000 ha)

| Tahun | Padi Sawah | Padi Ladang | Jumlah Lahan Padi |
|-------|------------|-------------|-------------------|
| 1980 | 7.824 | 1.181 | 9.005,1 |
| 1981 | 8.191 | 1.190,8 | 9.381,8 |
| 1982 | 7.872,6 | 1.115,8 | 8.988,4 |
| 1983 | 7.986,9 | 1.175,6 | 9.162,5 |
| 1984 | 8.547,1 | 1.216,4 | 9.763,6 |
| 1985 | 8.755,7 | 1.146,6 | 9.902,2 |
| 1986 | 8.888 | 1.100,4 | 9.988,5 |
| 1987 | 8.796,3 | 1.126,3 | 9.922,6 |
| 1988 | 7.116,2 | 1.134,7 | 8.250,9 |

program Revolusi Hijau dengan cara memberikan bantuan berupa bibit unggul, pestisida, dan pupuk kimia. Lembaga ini didirikan pada tahun 1971 oleh Robert S. Mc Namara, Presiden Bank Dunia saat itu. Ia merupakan mantan pimpinan perusahaan Ford dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat ketika terjadi Perang Vietnam. (Prisma edisi 3 Maret 1994. Hlm 3-21)

Sumber: Sawit dan Amang, 1999

Masuknya era industrialisasi di akhir tahun 1980 akan lebih detail dibahas dalam sub bab berikut ini.

5.1.3 Pasca Swasembada Beras: Industrialisasi dan Liberalisasi Pertanian.

Pasca swasembada beras 1984, kebijakan Indonesia beralih dari awalnya kebijakan sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan pertama yang tampak secara fisik tentu adalah pengurangan lahan pertanian ke lahan industri. Secara jelas lahan yang semula menghasilkan produksi pangan nasional menjadi kian mengalami penurunan. Efek selanjutnya, subsidi untuk pembangunan pertanian semakin berkurang. Padahal tingkat ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah semakin tinggi. Ini yang mungkin tidak diperhatikan pemerintah bahwa sektor pertanian khususnya sawah merupakan sektor yang tidak bisa dikembalikan seperti fungsi sediakala (*irreversible*) (Amang dan Sawit, 1999:94), yaitu tidak dapat dikembalikan ke fungsi semula bila lahan telah dikonversikan menjadi area industri. Satu hal yang penting dan terlupakan oleh Pemerintah adalah sawah dapat melindungi banjir atau mengurangi erosi, mengurangi longsor, memperbaiki air tanah serta kualitas air, melindungi habitat serta menurunkan temperatur (suhu udara).

Bila merujuk pada paradigma strukturalis, keterabaikannya sektor pertanian ini menurut Hirschman karena tidak adanya dorongan langsung (*lack of direct stimulus*) yang memberi efek keterkaitan (*linkage effect*) terhadap kegiatan baru. Lain dengan neo klasik yang melihat sektor pertanian sebagai *black box*. Mereka hanya menyediakan tenaga kerja, pemasok pangan, juga modal ke sektor industri sehingga tidak memerlukan modernisasi pada pertanian.

Di bidang subsidi ekspor, Indonesia memberikan komitmen untuk mengurangi tingkat subsidi ekspor beras baik dalam jumlah dan nilainya. Berdasarkan pada ketentuan perjanjian pertanian untuk perhitungan subsidi ekspor digunakan tahun 1986- 1990 dimana pada saat itu Indonesia melakukan ekspor beras bersubsidi rata-rata sebesar 299.750 to per tahun, dengan nilai subsidi

sebesar 28 juta USD. Oleh karena itu, Indonesia memberikan komitmen penurunan subsidi ekspor selama 10 tahun dengan rincian seperti:

Tabel 5.3 Komitmen penurunan Subsidi Ekspor Beras Periode 1995-2004²⁰

| Tahun | Nilai Subsidi (USD) | Volume Ekspor bersubsidi (Ton) |
|-------|---------------------|--------------------------------|
| 1995 | 27.667.872 | 295.553 |
| 1996 | 26.987.515 | 291.357 |
| 1997 | 26.307.157 | 287.160 |
| 1998 | 25.626.800 | 282.964 |
| 1999 | 24.946.422 | 278.767 |
| 2000 | 24.266.085 | 274.571 |
| 2001 | 23.585.727 | 270.374 |
| 2002 | 22.905.369 | 266.178 |
| 2003 | 22.225.021 | 261.981 |
| 2004 | 21.544.654 | 257.785 |

Sumber: diperoleh dari Thesis Rachmat Syahdjoni Putra. 2004.

Tekanan ekonomi semakin bertambah setelah tahun 1995 pemerintah menghilangkan cukup banyak subsidi mulai dari pupuk hingga pembibitan. Selain komponen-komponen biaya yang sulit untuk dikendalikan, petani juga tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk bersaing dengan komoditas impor. Masalah ini ditengarai oleh adanya suatu bentuk tren baru di awal 1990-an dimana negara-negara di dunia membentuk sebuah wadah untuk melakukan jalur perdagangan bebas. Fenomena yang terlihat begitu menonjol di era 1990-an adalah tatanan hubungan internasional dalam rangka mempercepat determinasi prinsip perdagangan bebas antara negara yang satu dengan negara yang lain. Negara-negara yang turut terlibat dalam tata niaga internasional ini menurunkan beban tarif/ hambatan tarif yang berarti liberalisasi ekonomi telah dibuka. Salah satu lembaga yang memiliki prinsip perdagangan bebas adalah APEC. Puncak pertemuan APEC yang dinamakan “*APEC Economic Leader Meeting*”(ALEM) yang diikuti 15 negara anggota. Hasil pertemuan tersebut menyepakati pemikiran bahwa ekonomi negara-negara yang tergabung ke dalam APEC semakin

²⁰ Pengurangan Subsidi ekspor merupakan salah satu poin dari kesepakatan pertanian yang disepakati oleh WTO. Tujuannya dikurangnya ekspor ini adalah untuk mementingkan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan pangan dalam negeri. Dengan kata lain, pemerintah lebih berpihak kepada konsumen daripada produsen. Namun, di sisi lain pemerintah tetap membuka kran impor dengan instrument deregulasi kebijakan.

tergantungan dan menggerakkan *platform* ke ekonomi Asia Pasifik. Visi misi yang dikeluarkan pada pertemuan tersebut mengacu pada “*Vision Statement*” yang berbasis pada perdagangan bebas dan ekonomi terbuka. Visi tersebut semakin mendapat celah ketika diadakan pertemuan di Bogor, November 1994. Anggota-anggota yang tergabung di dalamnya terdiri dari 18 negara yang cakupannya Asia Pasifik. Tujuan dibukanya perdagangan bebas/ pasar bebas di Asia Pasifik adalah untuk memberi kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Pasifik. Dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa mereka berkomitmen untuk menciptakan perdagangan bebas dan investasi terbuka dalam kurun yang telah disepakati. (Amang dan Sawit, 1999: 131-137)

Dalam masalah ini, Indonesia sebenarnya lebih awal melakukan paket kebijakan yang telah disepakati di dalam APEC, yaitu dengan pengurangan tarif hingga tahun 2003. Secara lebih rinci tahap awal yang telah dilakukan oleh Indonesia antara lain: (1) Paket deregulasi 23 Mei 1995 termasuk tarif pengurangan komoditas (tarif 10%-15% dikurangi 5% poin; dan tarif 40% atau lebih dengan 10% poin), (2) Membuat jadwal pengurangan tarif untuk periode 1995-2003, yaitu: tarif 20% atau kurang akan dikurangi maksimal 5% pada tahun 2000, tarif yang lebih besar dari 20% akan menjadi maksimal 20% pada tahun 1998 dan dikurangi lagi menjadi 10% poin pada tahun 2003. (3) Mempercepat pelaksanaan komitmen putaran Uruguay dalam mengurangi tarif tambahan (*tariff surcharges*).²¹

Tabel 5.4 Kesepakatan GATT dalam Bidang Pertanian

| | Negara Maju (1995-2000) | Negara Berkembang (1995-2004) |
|---------------------------|---|--|
| A. Akses Pasar: | | |
| 1. Tarififikasi | Wajib | Wajib |
| 2. Penurunan Tarif | <ul style="list-style-type: none"> • 36% dalam 6 tahun • 15% pada setiap tarif item | <ul style="list-style-type: none"> • 24% dalam 10 tahun • 10% pada setiap tarif item |
| 3. Minimum akses | <ul style="list-style-type: none"> • Ya, pada tingkat 3% | <ul style="list-style-type: none"> • Ya, pada tingkat 3% |

²¹ Putaran Uruguay mengamanatkan pengurangan 172 jenis tariff tambahan dalam sepuluh tahun. Indonesia melaksanakan pengurangan 153 jenis tariff tambahan, atau 87% dari komitmen Putaran Uruguay.

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| B. Subsidi Domestik: | | | |
| 1. Penurunan Subsidi Produksi | • 20% dalam 6 tahun | • 13% dalam 10 tahun | |
| C. Subsidi Ekspor: | | | |
| 1. Penurunan Nilai Subsidi | • 36% dalam 6 tahun | • 24% dalam 10 tahun | |
| 2. Penurunan Volume Subsidi | • 21% dalam 6 tahun | • 14% dalam 10 tahun | |

Sumber: Tito Pranolo, *Bunga Rampai Beras, LPEM FEUI, 2001, hlm.217*

Perubahan lain di dalam perdagangan pertanian adalah ditandatanganinya *Agreement on Agriculture (AoA)* dari WTO²² karena keberpihakan pemerintah terhadap petani semakin berkurang. Mekanisme produksi pertanian hingga pembentukan harga sepenuhnya diserahkan oleh mekanisme pasar²³. Dengan demikian, petani dalam hal posisi tawar semakin tidak memiliki kekuatan.

²² Terhitung sejak tahun 1945 telah terjadi delapan kali perjanjian perdagangan multilateral. Lima perjanjian pertama serupa dengan negosiasi bilateral sejajar dimana suatu negara bernegosiasi dengan sejumlah negara mitranya sekaligus secara berpasangan. Perundingan yang keenam yang disebut dengan Putaran Kennedy yang berakhir pada tahun 1967 yang menghasilkan penurunan tariff 50% untuk semua pos tariff bagi negara industri utama kecuali bagi negara-negara yang tarifnya tidak berubah. Dalam penutupannya, putaran ini berhasil menurunkan tariff rata-rata sebesar 35% (Krugman dan Obstfeld, 2000). Putaran Tokyo, perundingan ke tujuh yang berlangsung dalam kerangka kerja *General agreement on Tariffs and Trade (GATT)* diakhiri April 1979, menurunkan tariff dengan suatu rumus yang lebih rumit dari rumus yang digunakan dalam putaran Kennedy berdasarkan kelompok komoditas yang luas bukan atas pertimbangan produk per produk. Pada putaran ini kesepakatan pemotongan tariff mencapai 31% untuk AS, 27% untuk UE, 28 untuk Jepang, dan 34% untuk Kanada. Namun, kebanyakan pemberlakuan tariff tersebut mulai berjalan delapan tahun setelah 1980. Selanjutnya putaran ini berhasil membuat aturan untuk mengawasi semakin berkembangnya hambatan bukan tariff seperti pengendalian ekspor sukarela dan persetujuan badan pemasaran. Akhirnya pada tahun 1994, perundingan ke delapan yang disebut putaran Uruguay berhasil mengeluarkan beberapa perjanjian seperti Perjanjian Pertanian (PP) atau *the Agreement on Agriculture (AoA)*. Saat ini, tariff impor (*applied*) yang berlaku di Indonesia adalah besaran-besaran yang diusulkan dalam LOI (*Letter of Intent*) antara pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (DMI) atau *International Monetary Fund (IMF)* bagi beragam komoditas. (dalam Hutabarat, 2000: 60) Melalui *letter of intent*, salah satu butir yang mengatur bahwa peran bulog yang selama ini memonopoli hasil pertanian harus dikurangi, praktis komoditas pangan dilepas ke mekanisme pasar, terkecuali yang dipertahankan komoditas beras. Kebijakan sektor pertanian seringkali tampak bahwa sektor pertanian tidak lagi dominan pada komoditas ekonomi tetapi menjadi komoditas politik. Nampak kepentingan politik jauh lebih menonjol dari kepentingan ekonomi.

²³ Para ekonomi neo klasik lebih percaya bahwa kegiatan ekonomi masyarakat akan lebih baik terjadi alokasi sumber daya yang efisien dan optimal melalui mekanisme pasar. Untuk itu, kelompok ini menolak peran pemerintah untuk mengatur ekonomi pasar. Seiring terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, maka pemerintah memerlukan bantuan melalui dana moneter internasional. Berhubung dana moneter internasional maupun lembaga keuangan internasional lebih mengadopsi aliran aliran neoklasik yang sangat pro pasar. Maka pemerintah tentu saja harus mengikuti aturan yang diterapkan oleh dana moneter internasional.

Dibukanya kebebasan untuk mengimpor komoditas-komoditas tanaman pangan sejak tahun 1988 menyebabkan petani lokal harus bersaing dengan produk-produk impor.

APEC, AFTA, dan WTO merupakan tiga kekuatan besar dari pihak asing yang mempengaruhi kebijakan pertanian dan perdagangan Indonesia menginjak tahun 1990-an. Peran negara dalam membuat kebijakan pertanian tidak bisa lepas dari sistem yang digariskan secara internasional.

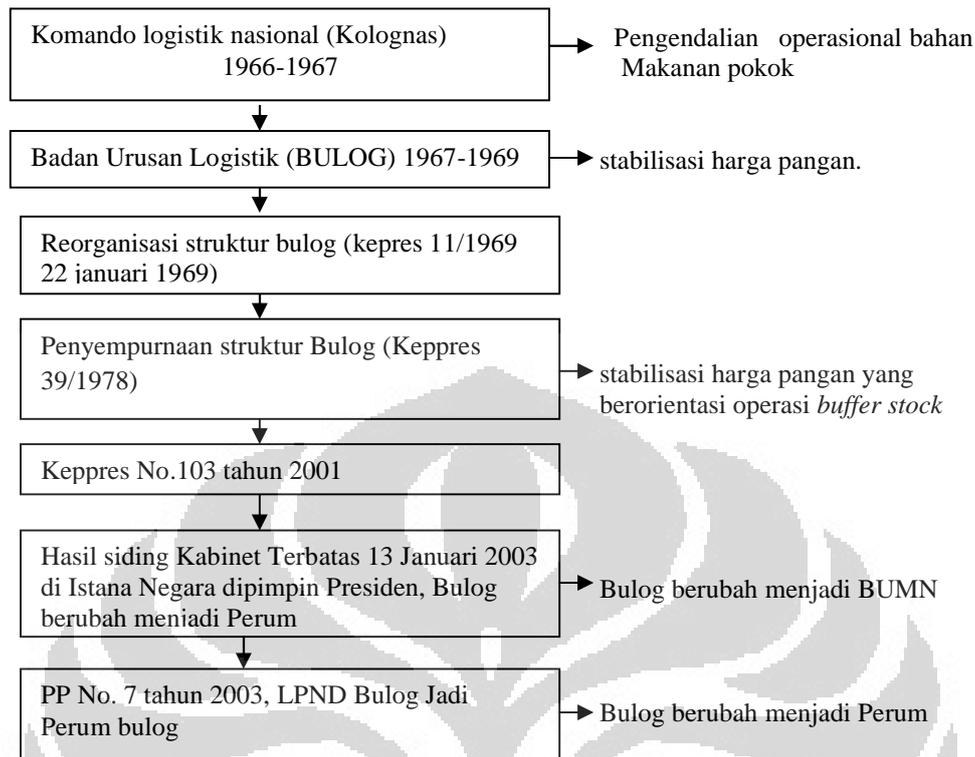
5.1.4 Komoditas Beras di Era Reformasi: Kebijakan Impor Beras.

Shortage of food can lead a civil war
(David Nelson, Newsweek 1996)

Sejak tahun 1998, banyak perubahan eksternal dan internal yang mempengaruhi peran dan operasi Bulog.²⁴ Melalui *letter of intent*, salah satu butir yang mengatur bahwa peran Bulog yang selama ini memonopoli hasil pertanian harus dikurangi, jelas bahwa komoditas pangan dilepas ke dalam mekanisme pasar. Penghapusan monopoli impor beras dan pencabutan subsidi bunga bank telah berpengaruh besar terhadap operasi Bulog. Di dalam negeri, publik menuntut agar Bulog dapat menjalankan fungsi publiknya secara transparan, efisien, dan bebas KKN. Dalam Keppres no.29 tahun 2000 disebutkan bahwa Bulog melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah bagan sejarah perubahan peran Bulog dari Orde Baru hingga Reformasi:

²⁴ Maret 1999, membanjirnya beras impor dengan bea masuk 0% mengakibatkan harga beras turun. Sebenarnya, impor beras telah dilakukan mulai September 1998 dan selama 4 bulan telah mencapai 1.318 juta ton (data bea cukai). Realisasinya impor beras terus meningkat hingga mencapai 3,154 juta ton pada tahun 1999, kemudian menurun menjadi kurang lebih 900 ribu ton saja pada tahun 2000 karena dikenakan bea tariff masuk Rp. 430,- selanjutnya pada tahun 2001 diperkirakan hanya 600 ribu ton saja. Sejak tahun 1999, operasi pasar murni digantikan dengan operasi pasar khusus dalam jumlah yang cukup besar yaitu hampir 3,2 juta ton dan di tahun 2000 operasi pasar khusus mencapai 1,862 juta ton.

SEJARAH LEMBAGA BULOG



Sumber: Anonim (1995), Kepres No.103/2001/ Peraturan Pemerintah (PP) No.7 tahun 2003, dalam Amrullah (2003)

Adanya perubahan di dalam tubuh lembaga pemerintah dalam urusan pertanian dan perberasan, dalam hal ini Bulog untuk mengelola, menyediakan, mendistribusikan, dan mengendalikan harga telah mempengaruhi pengadaan beras di dalam negeri. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin meningkat pula permintaan beras di dalam negeri. Setiap tahun terjadi peningkatan kebutuhan konsumsi beras nasional. Saat ini, rata-rata kebutuhan konsumsi beras di Indonesia sebesar 139-160 kg per kapita per tahun (Achmad Ya'cub dalam Presentasi Kontroversi Impor Beras di FEUI, 29 September 2011). Berikut adalah grafik yang menggambarkan jumlah konsumsi beras per kapita dari Tahun 1961 sampai Tahun 2002. Berdasarkan grafik di bawah ini, perbandingan kebutuhan akan konsumsi beras di Indonesia dan negara-negara tetangga berpenduduk besar seperti Korea, Cina dan Jepang menunjukkan Indonesia adalah negara berpenduduk besar yang kebutuhan konsumsi beras per tahun mengalami peningkatan.

Grafik 5.1 Tren Konsumsi Beras Per Kapita 1961-2002



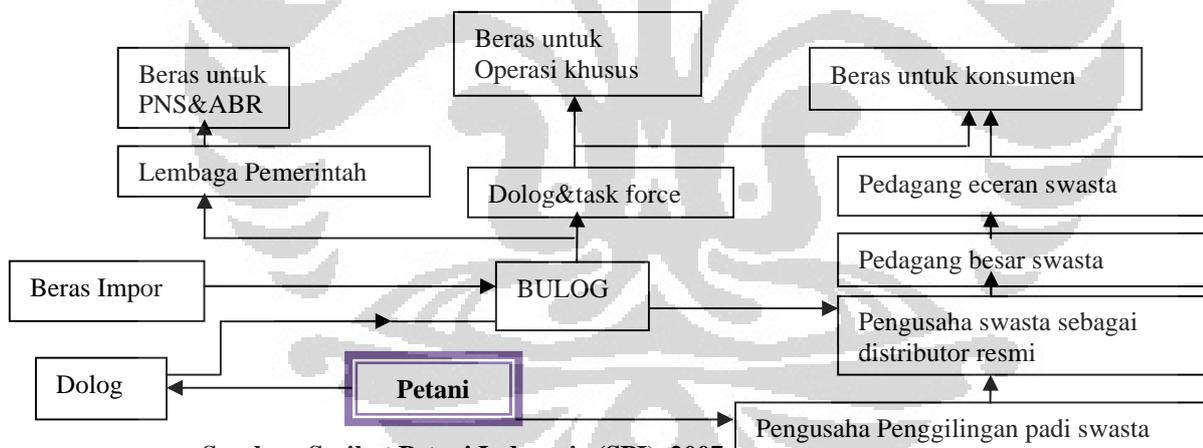
Sumber: IRRI, 2007 (dalam presentasi Achmad Ya'kub, "Pertanian Rakyat untuk Kedaulatan Pangan". 29 September 2011)

Relevansi grafik di atas dengan kebijakan impor di dalam jalur perdagangan bebas adalah, peneliti ingin menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula kebutuhan konsumsi beras. Semakin banyaknya konsumsi beras nasional dalam grafik di atas lebih menekankan pada semakin banyaknya jumlah penduduk yang membutuhkan stok beras, bukan jumlah produksi beras per kapita. Pertumbuhan penduduk Indonesia sendiri di awal tahun 2011 mencapai 1,49%. Untuk memenuhi kebutuhan beras, diperlukan penambahan 5,3 juta hektar sawah baru dari 13 juta hektar sawah yang sekarang ada. Namun, mengacu pada Badan Pertanahan Nasional, pencetakan sawah baru sulit dilakukan. Selama tahun 1994-2004, luas sawah di Jawa berkurang 36.798 hektar atau rata-rata 3.679 hektar per tahun. (Lihat Kompas, "Ancaman Krisis Pangan di Depan Mata" Selasa, 11 Januari 2011, hlm.1-15) Kondisi dimana ledakan penduduk semakin besar dan dibarengi dengan semakin besar pula kebutuhan akan konsumsi beras memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan impor mengingat luas sawah per tahun semakin mengalami penyusutan. Kondisi ini menguntungkan bagi pihak asing sebagai kreditur maupun *partner* dagang bilateral dan multilateral bagi Indonesia karena membangun investasi pangan beras di Indonesia cenderung lebih menguntungkan.

Dari sisi petani, kondisi ini menjadi semakin menyulitkan karena selain proteksi dari pemerintah yang dihapuskan, posisi tawar petani sebagai produsen di dalam mendistribusikan hasil panennya ke pasar akan bersaing dengan beras produk impor. Ini artinya, produksi dalam negeri sudah tidak bisa lagi digantungkan secara 100% kepada produsen dalam negeri. Impor beras menjadi alternatif dalam hal pengadaan pangan nasional. Bulog bukan lagi lembaga pemerintah yang nonprofit melainkan Badan Usaha Milik Negara yang perannya dalam pengadaan pangan nasional lebih kepada keuntungan. Hal ini berdasar atas intruksi presiden dan atas kesepakatan hitam di atas putih yang telah disepakati antara Indonesia dan WTO dimana WTO melarang pasar dalam negeri (Indonesia) untuk menutup pasarnya dari perdagangan asing. Dengan demikian, kran impor terus dibuka sebagai akibat dari perjanjian tersebut.

Berikut adalah alur distribusi beras dari petani ke pasar dan pemerintah setelah peran pemerintah diserahkan kepada mekanisme pasar:

Alur Distribusi Beras Versi Bulog (2004)



Sumber: Serikat Petani Indonesia (SPI), 2007

Berdasarkan alur distribusi beras di atas, bisa dilihat, beras dari petani dialirkan ke dua tempat, yaitu Dolog (Bulog level Provinsi) dan Pengusaha penggilingan padi swasta. Melalui Dolog, beras dialirkan ke Bulog sebagai stok pengadaan pangan nasional. Di samping itu, beras yang telah masuk ke Bulog akan dijadikan sebagai alat untuk menggaji pegawai pemerintah (PNS/Polri) melalui lembaga pemerintah terkait. Kemudian, beras di Bulog juga digunakan sebagai stok penyangga untuk intervensi pasar sewaktu-waktu harga beras di pasaran anjlok atau melonjak naik akibat ketersediaan beras yang fluktuatif.

Informasi yang terkait dengan kebijakan pangan berdasarkan sudut pandang makro yang telah dijelaskan dalam bab ini membantu peneliti untuk melihat proses yang terjadi di lapangan, Desa Suruh terkait dengan masalah ketahanan pangan dan dampak langsung terhadap petani di Desa setempat. Relevansi bab ini dengan bab IV yang memaparkan deskripsi lokasi penelitian adalah bahwa segala informasi yang didapatkan menyangkut masalah pangan dan petani dari masa Orde Baru hingga Reformasi memiliki benang merah dengan segala macam urutan peristiwa dari kacamata makro.

Pada bab IV, dimana peneliti mendeskripsikan profil informan yang tak lain merupakan data yang menggambarkan latar belakang kehidupan rumah tangga petani dari Orde baru hingga Reformasi yang juga tak lepas dari akibat kebijakan pemerintah. Poin-poin penting yang didapatkan di dalam kehidupan informan menjadi penjelasan tambahan mikro di bab ini.

5.2 Temuan Mikro

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai temuan lapangan yang berkaitan dengan komoditas beras di masa Orde Baru hingga Reformasi yang melibatkan unsur petani, pranata sosial dan peran lembaga-lembaga pemerintah.

5.2.1 Kebijakan Perberasan di Desa Suruh pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Kehidupan Petani.

Kebijakan Perberasan di masa pemerintahan Orde Baru di sub bab ini akan lebih difokuskan pada pembangunan sektor pertanian dari awal tahun 1980-an. Hal ini dikarenakan pengetahuan informan dan daya ingat masa lalu mereka sangat terbatas. Di samping itu, batasan penelitian ini juga hanya memfokuskan Revolusi Hijau sebagai kebijakan ketahanan pangan yang dipilih di masa pemerintahan Orde Baru.

Revolusi Hijau merupakan program pemerintah yang mendorong animo petani untuk lebih memiliki sikap proaktif terhadap proses produksi beras. Hal itu didorong dengan berbagai bantuan pemerintah untuk modal operasionalisasi mereka. Di dalam program tersebut, petani diperkenalkan dengan Lembaga pemerintah yang disebut BIMAS (Bimbingan Massal). Melalui BIMAS, pemerintah menurunkan bantuan dana kepada petani. Besaran bantuan yang

diberikan kepada mereka bermacam-macam. Tidak terdapat patokan secara pasti untuk memberikan jumlah nominal uang kepada mereka. “Mh” pada saat itu diberi pinjaman dana sebesar kurang lebih Rp. 800.000,-. Biaya tersebut merupakan bantuan operasional sawah untuk luas satu hektar dengan pengembalian tanpa bunga di waktu panen tiba. Berikut hasil penuturannya kepada peneliti:

“..... Dan pada waktu itu juga disubsidi *karo* (oleh pemerintah). Termasuk BIMAS itu ya, Bimbingan Massal dulu itu istilahnya dipinjami uang, jadi per hektar itu kurang lebih berapa itu ya? Per hektar itu dipinjami 800 ribu ya’e (mungkin)... Itu per hektar kalau nggak salah 800rb...dalam waktu... nanti panen mengembalikan.
..²⁵

Namun, menurut “Sm”, seorang petani dari tahun 1980, bantuan pinjaman uang dari pemerintah untuk penunjang sarana produksi pertaniannya diberikan sebesar dua juta rupiah dengan bunga 2% diberikan saat panen tiba. Alasan perbedaan pemberian bantuan pinjaman uang tersebut tidak diketahui secara pasti oleh mereka.

Bantuan dari pemerintah melalui BIMAS tersebut, menurut Koordinator KUD selaku lembaga yang pada masa itu menjadi bagian dari pemerintah, tak lepas dari peran BRI di Desa Suruh. BRI di Desa Suruh merupakan lembaga keuangan yang dibangun di tahun 1985 (informasi diperoleh dari wawancara tak terstruktur kepada salah seorang warga setempat) sebagai lembaga simpan pinjam bagi petani. Pemerintah, melalui BRI, memberikan dana kepada BIMAS untuk diperbantukan sebagai pinjaman dana kepada petani pada saat itu.

Selain pinjaman berupa uang, BIMAS juga melayani bantuan pinjaman pupuk kepada petani. Sama halnya dengan pinjaman uang untuk modal petani, pinjaman pupuk yang diperbantukan pemerintah akan dikembalikan dalam bentuk uang di saat panen tiba tanpa dikenakan bunga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang informan berikut ini:

“... Pak Harto kae ki masalah pupuk kuwi diutang jaman Pak Harto. La saiki ora iso utang. Jaman Pak Harto kae ndhisik diutang sik petani. Petani mula do ngelem Pak Harto. Pak Harto kae ki jane nak ora ono masalah ki jane apik. Ngonooo... pemerintahan Soeharto apik nak masalah petani.”²⁶

²⁵ Wawancara dengan Mh

²⁶ Wawancara dengan Sm

(Bedanya, pada masa itu, petani diberi pinjaman pupuk. Oleh karenanya, petani lebih memuji kepada Pak Harto. .. Pemerintahan Soeharto sangat bagus terhadap petani)

Di samping bantuan modal uang dan pupuk, pemerintah juga masih memberi bantuan ternak kepada petani, seperti sapi. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah membuat kondisi petani relatif tenang karena tanggungan operasional yang dikeluarkan oleh petani (petani penggarap) tidak diusahakan sendiri tetapi ada peran pemerintah untuk meringankan beban operasional mereka. Dengan demikian, dari segi modal dana, sarana produksi seperti pupuk, dan sarana penunjang lain seperti ternak telah disediakan pemerintah untuk para petani. Harga gabah dan beras pada saat itu juga masih terbilang stabil sehingga kondisi petani di Desa Suruh lebih tenang. Hal ini diakui oleh salah seorang informan berikut:

“... Pak Harto masih stabil... stabil... jadi harga pangan, operasional petani masih... masih stabil.”²⁷

Selain itu, pemerintah memberikan sosialisasi mengenai permasalahan pertanian yang disampaikan langsung oleh presiden melalui media elektronik. Oleh karenanya, petani mengetahui permasalahan yang dihadapi pada saat itu dan mengetahui solusi yang harus dilakukan. Hal ini disampaikan oleh salah seorang informan berikut ini:

“... Pada masa **Pak Harto itu petani proaktif**, sering ada apa itu namanya e... penayangan-penayangan tentang pertanian. dulu kan harus menayangan ini ini. **Jadi petani tau *problem* tentang petani dengan adanya media elektronik kan.** Ya kan tau dari Presiden langsung. Presiden menyampaikan sendiri secara langsung di media. Terus ada GAPOKTAN, ada lomba yang hubungan dengan pertanian. dulu sering termasuk ya membuat animo masyarakat dengan adanya bantuan-bantuan. Cuma hanya sekarang saja, adanya petani modern tapi pada kenyataannya di lapangan tidak bisa modern”²⁸

Selanjutnya, kebijakan pertanian sub sektor beras di bidang struktural adalah dengan adanya pembangunan bendungan dan saluran irigasi. Di Desa Suruh sendiri, bendungan air dan saluran irigasi yang saat ini masih ada tak lain merupakan peninggalan bangunan masa pemerintahan Orde Baru. Masyarakat sekitar menyebut lokasi tersebut dengan istilah ‘*mudal*’. *Mudal* ini secara bahasa

²⁷ Wawancara dengan Mh

²⁸ Wawancara dengan Al

berasal dari kata ‘*udal*’ yang berarti lepas. Jadi, menurut salah seorang warga (hasil wawancara tak terstruktur) menyebutkan bahwa *mudal* ini menunjukkan sebuah tempat yang mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi, mata air yang semula kecil, dipugar atau bahasa di Desa Suruh *dibedah* menjadi menyerupai bendungan. Kemudian, air di dalam bendungan tersebut dilepas dengan mengalirkannya menjadi sungai ke penjuru Desa-Desa lain, yaitu Desa yang masih di lingkup Kecamatan Suruh.

Berdasarkan informasi yang di dapat melalui wawancara dan observasi, petani di Desa Suruh mendapat berbagai macam keuntungan sebagai imbas dari kebijakan pertanian saat itu. Pembangunan irigasi besar-besaran dilakukan sebagai sarana pertanian karena pada saat Revolusi Hijau, kapasitas air yang diperlukan harus sangat banyak sebagai syarat kelancaran produksi beras. Dari 11 Desa dalam satu kecamatan, Desa Suruh merupakan sumber pembangunan irigasi yang digunakan untuk mengairi sawah di seluruh desa dalam satu kecamatan.

Dengan demikian, adanya bendungan tersebut sangat bermanfaat dan membantu kelancaran proses penanaman padi. Hal ini diutarakan oleh informan berikut ini:

Wong kae ki irigasi dibangun kok. Yo nang mudal kuwi lak tinggalane Pak Harto tho.. Ndak ora ono kuwi sak Suruh ki ra eneng banyu. La nyatane endi, tekan seprene malakan ra tahu dibenak ke utawa didandani nok malah”
 „29

Seperti kebijakan Pak Harto itu bagus. **Irigasi pun juga menjadi salah satu agenda pembangunannya di bidang pertanian.** “*mudal*”(nama bendungan di Desa Suruh) merupakan bangunan irigasi peninggalan Soeharto tetapi sayang hingga saat ini tidak ada perbaikan padahal jika sumber mata air itu tidak dibangun dan dijadikan sumber air irigasi se Desa Suruh tidak akan mendapat air.)

Berikut merupakan gambar peninggalan pembangunan irigasi di masa pemerintahan Orde Baru di Desa Suruh. Sarana inilah yang menghidupi petani-petani di seluruh Desa Suruh hingga Desa lain di dalam cakupan Kecamatan Suruh. Tanpa adanya pembangunan irigasi di Desa Suruh, sawah-sawah di Desa hingga Kecamatan tidak akan bisa memproduksi gabah/ padi hingga sekarang.

²⁹ Wawancara dengan Sm

Pembangunan Irigasi Peninggalan Pemerintahan Orde Baru



5.2.1.1 Hambatan Pembangunan Sub Sektor Pangan Beras di Masa Orde Baru

Beberapa Hambatan yang dihadapi oleh petani dalam proses produksi pangan beras di masa pemerintahan Orde Baru antara lain: *Pertama*, bantuan berupa pinjaman uang yang diberikan pemerintah melalui BIMAS kepada petani tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya, pinjaman yang diberikan tersebut dikembalikan saat panen tiba tetapi pada masa panen, justru petani mengalami puso karena serangan hama sehingga petani-petani tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Puso terjadi setelah swasembada beras tahun 1984 yang mengakibatkan petani tidak dapat memproduksi beras seperti yang pernah didapat di saat swasembada beras. Petani juga mengakui bahwa swasembada beras, dimana hasil panen beras melimpah ruah hanya terjadi sebentar di tahun 1980-an.

“taonnn.. (mengernyitkan jidat)..taon delapan puluhan ya’e. taon .. saat Indonesia dinyatakan tercerdas. Tercerdas.. Jadi kelebihan beras sampai diekspor ke luar. Tapi ora suwe tu. Sampe taun berapa kuwi ya?”³⁰

(“tahunn... tahun delapan puluhan mungkin. Saat Indonesia dinyatakan tercerdas. **Jadi kelebihan beras sampai diekspor ke luar. Tapi tidak lama itu.** Sampai tahun berapa ya ituu..?”)

Kedua, tahun 1986, kebijakan pertanian mengalami perubahan ke sektor industri. Meskipun pengalihan fungsi lahan dari agraris menjadi lahan industri tidak terjadi di Desa Suruh tetapi kebijakan pemerintah berimbas pada petani.

³⁰ Wawancara dengan Mh
Universitas Indonesia

Menurut “Mh”, mulai tahun 1986, ekspor beras sudah tidak dilakukan lagi. Kebijakan-kebijakan pertanian mulai ditinggalkan. Imbas dari kebijakan tersebut terhadap petani adalah kelangkaan pupuk. Seperti yang diutarakan oleh “Mh” di bawah ini bahwa keuntungan menjadi tujuan utama dari pembangunan pemerintah pada saat itu.

“ya, tahun itu lah (1986)... itu yang dijadikan industri. Sehingga, hasil panen menurun beralih ke... jadi bukan.. bukan... agraris, tapi beralih kee ke industri... **La, mulai dari itu, Indonesia sudah** mulai anu .. sudah **mulai tidak mengekspor beras lagi**. Jadi, **perhatian ke petani** pun menjadi **menurun**. Otomatis kan mengejar keuntungan.. sehingga, **kebijakan-kebijakan pemerintah, sudah banyak yang di...tinggalkan. Termasuk kelangkaan pupuk**. E... apa itu..?? ya kebijakan-kebijakan tani tu *kaya-kaya* (sepertinya) sudah tidak lagi dipedulikan.”³¹

Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang sudah tidak dianggap melindungi petani ini telah menghantarkan pada fase berikutnya, yaitu industrialisasi dan liberalisasi. Pembahasan ini terkait dengan temuan lapangan di Desa Suruh akan di jelaskan di sub bab berikut.

5.2.2 Industrialisasi dan Liberalisasi Pertanian di Mata Petani di Desa Suruh.

Industrialisasi tidak begitu dipahami oleh banyak kalangan petani di Desa Suruh karena pembangunan yang menggantikan fungsi lahan agraris ke industri bisa dikatakan tidak ada. Hanya saja, perubahan yang nampak dan dirasakan oleh para petani sejak tahun 1986 adalah perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian perlahan mengalami penurunan. Demikian halnya dengan adanya liberalisasi pertanian, petani tidak memahami dan mengetahui sebab-sebab berubahnya kebijakan pertanian di saat liberalisasi pertanian dilakukan oleh pemerintah melalui kesepakatan internasional.

Hal-hal yang diingat oleh para petani, di tahun 1990-an antara lain jumlah tengkulak semakin banyak dan pemerintah tidak pernah turun ke lapangan untuk membeli hasil panen petani. Justru tengkulak yang setiap kali *menebas*/membeli gabah dari petani.

Terkait dengan masalah kebijakan impor, menurut penuturan “Rr”, jika beras dari luar didatangkan ke dalam negeri, harga beras dari petani akan turun.

³¹ Wawancara dengan Mh

Padahal, selama proses produksi, petani harus mengeluarkan biaya untuk menyewa buruh. Artinya, seluruh biaya operasional yang dikeluarkan petani penggarap selama proses produksi hingga panen tidak sebanding dengan harga penjualan gabah. Dari sinilah petani merasa dirugikan dan sengaja dijatuhkan. Sebagaimana yang dikatakannya berikut ini:

“yo akeh.. yo angger dihuni beras ko kana, kene midun yo rugi. Karo anu, upahe le ngglidhig ke..”³²

(Tengkulak banyak. Kalau beras dari luar didatangkan kesini, harga beras disini turun. Belum lagi petani harus mengeluarkan biaya untuk nyewa buruh)

Demikian halnya yang dikatakan informan berikut ini:

“.....Petani ya rugi. Petani kan **dengan adanya impor beras harga dalam negeri tidak ditentukan oleh pemerintah tetapi itukan oleh malah ditentukan pasar.** Termasuk penebas-penebas (tengkulak) itu kan pasar. Jadi pemerintah itu cuman memberikan standar harga-harga *plafon* harga ‘sekian’. Tapi kenyataan, pemerintah tidak berani beli, yang beli ya pasar tadi. *Ngono* (begitu)...kebijakan pemerintah itu cuman kalau harga sembako naik. Operasi pasar. Itu, kebijakan pemerintah kan Cuma itu kan. Cuman itu. Harga melambung, beras datang lagi. Operasikan pasar. Paling-paling itu kan cuman berlangsung selama satu bulan *thok* (saja).”³³

Dengan demikian, adanya kebijakan impor beras memang tidak secara langsung bersaing dengan beras-beras produksi petani di Desa Suruh tetapi kebijakan yang menyangkut kebijakan impor tersebutlah yang mempengaruhi kehidupan petani. Beberapa hal yang dirasakan petani sebagai imbas kebijakan tersebut antara lain: kelangkaan pupuk, harga jual gabah dari petani anjlok, dan ketentuan harga ditentukan oleh tengkulak.

5.2.3 Komoditas Beras di Desa Suruh pada Masa Reformasi dan Kehidupan Petani.

Sejak krisis ekonomi 1998, pemerintah sudah tidak lagi memberi bantuan pinjaman modal kepada para petani. Petani, dalam hal memperoleh modal untuk biaya produksi harus mencari sendiri tanpa bantuan dari pemerintah, baik modal dalam bentuk uang, pupuk, maupun sarana produksi lainnya. Hal ini pun diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

La ndang krisis kuwi ... krisis kuwi ndang ra iso golek utangan yooo... berdiri sak karepe dhewe kuwi mau o... pemerintahan ora isoh ngutang wisan.. dadine wes ra utang karo negara. Negara wes ra

³² Wawancara dengan Rr

³³ Wawancara dengan Mh

*ngutangi saiki. Krisis ki negara wes ra ngutani. Negara saiki rak wes ora ngutangi karo petani.. Mboh ddialihke nang sembako opo piye mbuh.*³⁴

Setelah krisis, kami tidak dapat mencari hutangan. Kami berdiri sendiri tanpa ada aturan dari pemerintah seperti sediakala. Pemerintah sudah tidak dapat memberi pinjaman dana. Sehingga, kami sudah tidak lagi hutang kepada negara. Apakah mungkin bantuan itu diganti dengan pemberian sembako, saya tidak tahu.

Informan lain menyatakan:

*“Alah krisis palan rekasa. Gabah malak an murah ik. Gabah palan anjlok.. Regane palan ndek ilo..seka negara jane dhuwur ya.. ning ternyata nang kene malah murah .Tetep didol...Dadi ana permainan harga ngono. Sing menguasai penebas-penebas kuwii...”*³⁵

“Krisis malah membuat susah. Harga gabah murah. Gabah malah anjlok, padahal dari negara patokan harga naik tetapi ternyata pada kenyataannya, harga di lapangan jatuh. Kami tetap menjual tetapi ada permainan harga. Ya, yang menguasai tengkulak-tengkulak itu.”

Krisis ekonomi 1998 merupakan masa-masa sulit bagi petani di Desa Suruh. Di saat patokan harga gabah dari pemerintah tinggi, justru harga di lapangan anjlok. Akhirnya, petani menjual harga gabah mereka kepada tengkulak karena pemerintah melalui KUD sudah tidak membeli gabah langsung kepada petani.

Kondisi serba mahal di saat itu membuat kehidupan petani semakin terjepit. Di satu sisi, mereka harus mendapat keuntungan dari penjualan gabah untuk menutupi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lainnya tetapi di sisi lain mereka justru dirugikan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh tengkulak dengan memberikan pinjaman uang kepada petani yang membutuhkan bantuan modal usaha, mengingat pemerintah sudah lepas tangan dalam hal pemberian pinjaman modal bagi petani. Tengkulak memberikan perjanjian sebelumnya bahwa pinjaman dana akan diberikan dengan syarat mereka harus menjual gabah kepada tengkulak dengan harga murah. Inilah yang dimaksudkan oleh informan dimana terdapat permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak di saat krisis ekonomi melanda.

Selanjutnya, di tahun 2000-an, kebijakan pertanian tidak lagi berorientasi pada ekspor tetapi impor beras atau setelah pemerintahan Gus Dur berakhir,

³⁴ Wawancara dengan Sm

³⁵ Wawancara dengan Jt

kebijakan pertanian selalu mendatangkan pangan dari luar. Dampaknya, petani dirugikan karena harga tidak lagi ditentukan oleh pemerintah tetapi ditentukan oleh pasar termasuk juga para penebas (tengkulak).

Pemerintah semakin melepaskan perlindungannya kepada petani. Petani merasakan bahwa di masa Reformasi, mereka lebih susah karena bantuan pinjaman modal sudah diberhentikan. Petani harus mencari modal sendiri dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Kebutuhan hidup lain menuntut mereka untuk mendapat penghasilan lebih tetapi tidak didukung oleh pendapatan yang layak. Petani butuh dibantu secara modal untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam produksi beras karena hambatan utama yang mereka rasakan adalah modal.

“Apik... Apik! Apik Pak Harto daripada saiki ki. Pandha’an rekasa saiki. Rekasane masalah utang ki ra gelem nguatangi o’... wong tani ki keadaan mes kudu diutangi nak njaluk apik. Kaya Pak Harto kae apik..”³⁶

(Pak Harto lebih bagus daripada sekarang ini. sekarang malah justru serba susah. Pemerintah tidak mau memberi pinjaman. Petani itu butuh bantuan (hutang) pupuk jika pemerintah menginginkan hasil yang bagus. Seperti kebijakan Pak Harto itu bagus.)

Persoalan modal petani tidak hanya sebatas “apakah cukup biaya yang mereka miliki untuk operasional produksi beras?” tetapi lebih dari itu. Dengan modal terbatas, petani harus membagi uang yang dimiliki untuk kebutuhan saprodi (sarana produksi) dengan kebutuhan sehari-hari karena masa sekarang dengan masa dulu sangat lain. Di masa dulu (Orde Baru), harga pupuk yang dibutuhkan dengan hasil panen yang didapatkan selisihnya sangat jauh, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan di bawah ini:

“...Artinya, kalau dulu harga gabah sekintal dijual untuk membeli pupuk masih ada sisa, **sekarang gabah sekwintal dijual buat beli pupuk kurang**. Jadi terbalik kan? Jadi nilai nominal hasil pertanian itu sejahtera dulu. **Kalau hasil panen dua juta terus digunakan untuk pupuk Cuma 40ribu, perbandingannya jauh kan. Sekarang nggak**. Hasil tanem satu kwintal katakan harganya sejuta tigaratus, lalu buat beli pupuk, malah kurang. Nilainya ya.. makanya petani-petani dulu makmur-makmur, sisa hasil jual gabah dipakai untuk beli tanah.”³⁷

³⁶ Wawancara dengan Sm

³⁷ Wawancara dengan Al

Belum lagi masalah dilematis yang dirasakan oleh petani. Ketika panen raya, harga gabah anjlok tetapi setelah masa panen usai, harga gabah kembali melonjak naik. Petani merasa bahwa kondisi ini memang sengaja diciptakan oleh para tengkulak yang ingin mencari keuntungan dari petani. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut:

“Ngonu kuwi digawe karo tengkulak-tengkulak kok. Ngonu kuwi o. kene ki ndak pas panen murah. Ndak wes bar panen larang. Ngonu kuwi kok. La piye, yo digawekke ngono tho. Tani yo dadine mblesek tho.... Mula angger bar panen, gabahe murah, ngko nak wes bar panen larang. Ngko gabah larang nak wes bar panen. Nak ngene ki gabah dituku murah. Pokok’e angger panen, gabah ki murah. Ning ndak pas wes ora panen yo larang meneh. La nak angot beras dimurahke lek pupuk e larang yo bangkrut tho wong tani..”³⁸

(Bertani itu tak lepas dari tengkulak-tengkulak. Ketika panen, harga murah tetapi setelah itu harga kembali naik. Petani dijatuhkan. Setelah panen, harga gabah murah setelah itu mahal kembali. Gabah mahal setelah usai panen. Kalau sekarang ini gabah dibeli murah. Jadi, setiap kali panen, gabah dibeli murah oleh para tengkulak tetapi setelah panen usai harga gabah naik. Kadang harga beras dimurahkan tetapi harga pupuk mahal sehingga petani rugi.)

Selain munculnya dominasi tengkulak di tengah-tengah kehidupan petani, peran pemerintah dalam mematok harga pasar pun juga dikalahkan oleh pasar (tengkulak). Bantuan pinjaman modal di Orde Baru tidak berkelanjutan hingga sekarang ini. Pasar menjadi dominasi atas pertukaran yang dilakukan antara produsen dan konsumen. Memang, dalam memberikan proteksi kepada produsen beras, pemerintah melakukan standardisasi harga (plafon) untuk komoditas beras. Namun, kenyataan di lapangan, pemerintah justru tidak membeli beras langsung kepada petani dan harga patokan dari pemerintah pun bisa berubah-ubah sesuai dengan patokan pasar. Berikut salah satu penuturan yang disampaikan oleh salah seorang informan:

“Kalau pasar itu sekarang malah e... ya bukan mengambil alih pemerintah ya. Mungkin pemerintah kurang ke lapangan langsung ke pasar. **Jadi harga jual petani itu bisa dipermainkan oleh pedagang-pedagang pasar. Jadi katakan dulu KUD bisa mengambil hasil panen petani, lha sekarang nggak kan.** Bukan tidak perhatian, tapi kurang seperti dulu lah. Jadi harga padi sekarang, pemerintah mematok per kilo sekian, katakan tiga ribu. Terus itu harga gabah ya.. la nanti pedagang malah melakukan permainan harga. Katakan harga beras sekian, pemerintah nggak bisa. Kalah di lapangan. Mungkin harga ke pasar pemerintah kurang pro aktif. Ya

³⁸ Wawancara dengan Rr

sudah perhatian, tapi kurang proaktif. Masalah harga dipermainkan oleh pedagang-pedagang pasar.”³⁹

Kendatipun di masa Reformasi bantuan pinjaman modal tidak ada dan juga peran negara telah didominasi pasar, pemerintahan Reformasi yang dipimpin oleh SBY tahap kedua ini telah berupaya untuk memberi bantuan kepada petani. Bantuan dari pemerintah untuk rumah tangga petani di Desa Suruh pernah diberikan walaupun tidak berkesinambungan. Keluarga “Jt” pernah menerima bantuan dari pemerintah melalui Sekretaris Dusun berupa uang senilai seratus hingga tiga ratus ribu rupiah selama tiga kali di tahun 2009 hingga 2010. Selain bantuan berupa pemberian uang, pemerintah juga memberikan sembako yang salah satunya pembagian beras miskin kepada petani miskin dan kurang mampu.

Selanjutnya, di masa kepemimpinan SBY tahap dua, kebijakan pertanian mulai diperhatikan kembali yaitu dengan memberi subsidi pupuk sebesar 60%. Harga pupuk dari distributor sebenarnya sebesar Rp. 200.000,- kemudian setelah disubsidi oleh pemerintah, harga pupuk menjadi Rp. 80.000,-. Kebijakan ini merupakan bentuk proteksi dan sekaligus bantuan dari pemerintah kepada petani dalam hal pemenuhan sarana produksi pertanian. Selain itu, perlindungan pemerintah terhadap petani adalah dengan menutup akses distribusi pupuk ke toko-toko sehingga petani hanya dapat memperoleh pupuk dari pemerintah.

Di samping bantuan subsidi pupuk, petani di masa Reformasi sekarang ini juga diuntungkan oleh beberapa hal, antara lain: penyediaan teknologi yang lebih banyak dari sebelumnya, seperti traktor; pengenalan teknologi baru, sistem *oven* untuk mengeringkan gabah jauh lebih cepat, terutama di saat musim hujan; pengenalan bibit padi unggul seperti IR 64 dan Pandan Wangi.

“Petani modern ya yang dulu pakai pembajak, **terus sekarang sudah ada traktor**, sistem tanamnya, pupuknya ada yang pupuk sebar ada yang tablet. Sekarang untuk hasil daripada petani kan belum. Sekarang juga ada **sistem open**. Begitu panen, lalu dimasukkan kedalam **open** semalam, padi langsung kering. Paginya diseleb. Proses.. istilahnya yo kuwi, petani modern. Ehmm.. dulu kan belum ada. Semua masih pake tradisional. Sekarang sudah modern lah.”⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Al

⁴⁰ Wawancara dengan Al

5.2.4 Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memecahkan persoalan Pertanian.

Di bagian sub bab ini, peneliti akan paparkan hasil temuan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah terhadap persoalan yang menyangkut pertanian dan kehidupan rumah tangga petani. Persoalan yang digariskan di sini terdapat dua hal: (1) Persoalan Perubahan Iklim yang sedang dirasakan petani di Desa Suruh (pertengahan tahun 2011). (2) Proteksi pemerintah terhadap petani penggarap menyangkut kebijakan impor beras.

5.2.4.1 Masalah Perubahan Iklim dan Gagal Panen

Adanya serangan hama wereng yang merusak tanaman padi di Desa Suruh telah menyebabkan gagal panen. Ironisnya, gagal panen telah terjadi dua kali masa panen terhitung dari pertengahan tahun 2010 hingga pertengahan 2011. Musibah yang menimpa petani ini baru dirasakan saat itu karena sejak serangan wereng di tahun 1985, belum pernah terjadi lagi hingga saat itu. Hal ini pun diakui oleh “Sm” yang mengawali bertani sejak tahun 1980.

“Rung tahu.. aku selama selawe tahun gek keneng pindho.. selawe tahun neng sawah gek keneng pindho kuwi.. wingi karo iki. Sing parah tenan dhek ingi.. ki ra patia.. Daerah Suruh gek gagal panen.”⁴¹

“Selama dua puluh lima tahun aku bekerja di sawah, baru dua kali ini merasakan gagal panen besar yang separah ini.”

Pernyataan tersebut juga disepakati oleh informan lain:

“...Cuaca ekstrim kaya sekarang ini belum pernah ada. Bisa dipatikan musimnya. Petani bisa stabil. Sekarang musim ekstrim. Padi nggak sehat. Sekarang .. buah-buahan klengkeng nggak keluar, mangga nggak stabil..nangka nggak keluar. Keluarnya jarang-jarang lah. Karena cuaca yang tidak...”⁴²

Sayangnya, sejauh ini tidak ada upaya dari peran Pemerintah setempat untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan gagal panen. Seperti yang dituturkan oleh beberapa informan berikut ini:

“Ndak jalan itu. Mereka hanya pinter teorinya saja. Tapi praktiknya nol. Nggak pernah ada opo kuwi jengenge (apa itu namanya) penyuluh

⁴¹ Wawancara dengan Sm

⁴² Wawancara dengan Al

dari Dinas Pertanian turun melihat langsung kondisi lapangan seperti apa.”⁴³

“ Ya, kalau menurut saya, aparat pemerintah seharusnya ‘turun’ memberikan suatu... apa ya istilahnya, bimbingan kepada masyarakat. tentang masalah iklim yang akan datang begini begini begini, kalau iklim yang terjadi begini, akan terjadi apa istilahnya wereng berkembang atau *piye* (bagaimana) gitu lalu pemerintah memberikan... ‘seharusnya anda-anda menanam padi jenis ini’ itupun diusahakan. Jangan hanya memberikan gambaran tapi *golek a dhewe-dhewe* (cari saja sendiri- sendiri). Itukan rata-rata begitu...”⁴⁴

“Penyuluh pertanian kene rung tau ketekanan...”⁴⁵

“**di sini belum pernah kedatangan penyuluh pertanian**”

“*Kapan kae gur kabar thok. Jare kon njipuk obat wereng nang kecamatan ngono yo nyatane kene ora ono. Ora ono sing njipuk, soale anu... ora dikandhak ake sing jelas. Penyuluhane gur liwat monitor cangkem siji siji ngono. Adu cangkem dho pethuk nang ndalan. Ora dilumpukake. Kudune jane orang ngono ya...petani diklumpukke nang kelurahan kae..*”⁴⁶

(Beberapa waktu yang lalu hanya memberi kabar wacana saja. Katanya waktu itu telah ada atau disediakan obat pembasmi hama wereng. Tetapi tidak ada satupun yang mengambil karena tidak diberitahukan secara jelas. Penyuluhan hanya melalui ‘monitor mulut’. Disampaikan ke orang melalui tatap muka. Jadi, tidak ada perkumpulan atau dikumpulkan di kelurahan)

“Ra eneng kene, penyuluhane yo no kecamatan kono. Tegese medhun nang lapangan no ra ono.”⁴⁷

(Disini tidak ada penyuluhan dari kecamatan. Maksudnya, tidak ada penyuluh yang turun ke lapangan untuk melihat kondisi secara langsung)

Hal ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam hal reaksi cepat untuk menghadapi anomaly iklim belum terwujud. Padahal, di awal tahun 2011, tepatnya Bulan Januari, Kementrian Pertanian Republik Indonesia berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perpres) tentang Kebijakan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim untuk memperkuat Ketahanan Pangan Nasional. Kenyataannya, satu tahun pasca rencana tersebut tercetus, kebijakan tersebut

⁴³ Wawancara dengan Mh

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Mh

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Wh

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Jt

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Rr

masih nihil. Bantuan untuk petani korban anomali iklim baik bantuan tunai maupun sarana produksi hanya sebuah wacana. Di dalam peraturan tersebut, pemerintah telah menyebutkan beberapa poin penting, antara lain: (1) Alokasi anggaran tanaman padi puso/ gagal panen 100.000 hektar dan alokasi anggaran untuk tanaman padi yang rusak karena hama penyakit, banjir atau kekeringan 400.000 hektar. (2) Besaran nilai bantuan penuh bagi tenaga kerja pengolahan lahan hingga pemeliharaan yang mengalami gagal panen. (3) Besaran nilai bantuan sedang-berat bagi petani yang mengalami kerusakan produksi. (4) Bantuan Sarana Produksi berupa benih unggul, pupuk, dan pestisida gratis bagi petani yang mengalami gagal panen (Lihat Kompas, Sabtu, 22 Januari 2011, hlm. 17). Berdasarkan empat poin penting di dalam Perpres tersebut, tidak ada satu pun yang telah terwujud di Desa Suruh. Padahal, Dampak anomali iklim sudah bukan lagi sebagai wacana tetapi menjadi masalah yang secara objektif dapat didefinisikan secara sosial bahwa implikasinya berpengaruh pada nasib petani.

Di samping tidak konsistennya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pertanian, petani hanya memiliki pemahaman terbatas mengenai penyebab perubahan iklim. Sebagaimana yang diutarakan oleh “Mh” dan “Al” berikut:

“...semua pasti ada efek. Tapi efek nya tidak berakibat yang fatal. Cuman, tanah berubah jadi keras. Tanahnya itu tidak kelet, *ora mawur gitu lho..* Ya ada pengaruh tapi tidak berefek fatal, gitu ndak.”⁴⁸

“Sementara ini tidak memiliki alternatif untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim karena pemikiran-pemikiran *piye* ya... diberi pupuk cair misalnya..yang harganya lebih efektif, ya tanggapannya pasif. Petani kalau tidak pakai mes (pupuk kimia) ndak percaya.

Persoalan gagal panen yang menimpa petani di Desa Suruh, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pemberitahuan secara intensif dan berkesinambungan mengenai permasalahan pertanian oleh pemerintah. Interaksi yang tidak terjalin ini menyebabkan petani merasa dirugikan.

⁴⁸ Wawancara dengan Mh

Persoalan gagal panen rupanya tidak hanya terjadi di Desa Suruh, Jawa Tengah. Masalah tersebut juga telah melanda beberapa wilayah di Pulau Jawa untuk komoditas non-padi. Mulai tahun 2010, hampir semua petani dan buruh tani merasa kesulitan dalam bertani. Petani mangga di beberapa daerah di Jawa Barat seperti: Indramayu, Cirebon, dan Jawa Barat mengalami kegagalan. Petani Manggis di daerah Purwakarta, Jawa Barat pun merasakan hal yang sama (Lihat Kompas, Selasa, 11 Januari 2011, hlm. 1). Dampak dari anomali iklim tersebut, selain produksi berkurang, pendapatan harian para petani ini pun mengalami penyusutan.

Dengan demikian, masalah perubahan iklim bukan lagi masalah yang secara subjektif didefinisikan oleh beberapa kalangan di daerah tertentu. Beberapa bukti tersebut di atas menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan masalah sosial yang secara objektif melanda dan berimplikasi pada kehidupan sosial.

Selain masalah gagal panen, berikut akan dibahas temuan lapangan mengenai proteksi pemerintah terhadap petani.

5.2.4.2 Proteksi Pemerintah terhadap Petani

Saat ini bentuk perlindungan pemerintah terhadap petani, khususnya dalam hal perlindungan dari dampak kebijakan impor sama belum terwujud. Patokan harga *plafon* gabah yang ditentukan oleh pemerintah justru semakin dipermainkan oleh mekanisme pasar. Di saat biaya operasional produksi gabah dan hasil panen meningkat, petani yang menentukan harga standar gabah justru tidak membeli gabah-gabah tersebut dari petani. Dengan kata lain, pemerintah hanya bisa memberikan patokan standar harga gabah tanpa membelinya. Justru, petani-petani yang menjual hasil panennya kepada pasar mendapat permainan harga dari pasar sehingga petani mengalami kerugian.

“dadine (jadi) kalau petani harga beras naik, otomatis bahan beras termasuk gabah kan naik. Tapi kenaikan itu ya cuman kenaikan...jadi, beras naik, harga beras naik, operasionalpun naik. Ongkos termasuk ongkos kuli-kuli itu ya naik. Termasuk harga pupuk juga naik. Gitu lho. Wong pupuk itu sebelum harga-harga pakan (pangan) naik, itu pupuk lebih dulu naik. Ditambah dulu kenaikan BBM, otomatis semua harga naik, ongkos traktor naik. Sedangkan kenaikan operasional dan kenaikan hasil produksi itu malah tidak seimbang. Pemerintah menentukan harga beras ‘segini’ tapi kenyataane pemerintah yo ra tuku, ngono lho (ya tidak beli, gitu lho). Dadi kan cuman koyo bengok-bengok thok ‘kuwi regane semene’(jadi kan hanya seperti

teriak-teriak saja. 'itu harganya segini'), tidak memberikan solusi. *Nak* (kalau) memberikan solusi kan *jane* (seharusnya) KUD-KUD *disabuk'i* (diikatkan) dengan petani."⁴⁹

Di saat harga gabah di pasaran melonjak naik, pemerintah tidak turun tangan membantu memecahkan solusi supaya petani tidak terjebak pada kerugian. Petani tidak lagi mampu berbuat apa-apa meskipun patokan harga telah ditentukan, pasarlah yang memegang kendali atas kesepakatan harga tersebut. Langkah untuk merevitalisasi kembali lembaga pemerintah untuk menjadikan wadah perekonomian petani pun tidak dilakukan. Menurut Mh, semestinya, pemerintah tidak hanya menyuarakan tentang ketetapan harga gabah dan beras saja tetapi juga memecahkan solusi dengan menyediakan tempat pendistribusian gabah dan beras bagi petani supaya mereka tidak terjebak pada permainan pasar.

Di samping itu, pemerintah justru tidak bersikap melindungi petani dalam memberikan patokan harga jual beli gabah. Pemerintah menetapkan bahwa harga gabah basah dan harga gabah kering adalah sama. Padahal, gabah kering harus melalui proses pemanenan yang membutuhkan biaya tersendiri. Otomatis biaya produksi akan bertambah dibandingkan dengan harga gabah basah. Berikut yang dituturkan oleh salah seorang informan:

"pemerintah ora tau napa-napa. Nak melindungi, rego teles karo garing ki padha. Kaya-kaya ki dhuwur penebas mau, ngono lho"⁵⁰
(Pemerintah tidak pernah bertindak apa-apa. Pemberian harga gabah basah dan kering sama saja. Malahan, lebih tinggi harga yang ditetapkan oleh tengkulak.)

Di samping itu, berbagai hambatan produksi dialami petani dari mulai tersendatnya distribusi pupuk, buruknya jalan usaha tani (JALUT), terbengkalainya saluran irigasi dan saluran pembuangan air. Rasa keterasingan petani akibat pengabaian peran pemerintah daerah dan pusat semakin dirasakan.

Masalah tersebut turut dirasakan oleh petani-petani di daerah lain seperti: Cirebon, Tegal, Pemalang, Kendal, Demak, Purwodadi, Blora, Sragen, DIY, Ngawi, dan Kediri. Perhatian pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kepala desa masih kurang dan sejauh ini hanya sebatas

⁴⁹ Wawancara dengan Mh

⁵⁰ Wawancara dengan Rr

wacana. Kebijakan pusat tidak sepenuhnya sampai kepada petani. Di sisi lain, petani juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan persoalan yang mereka hadapi karena lemahnya pendidikan, kultur, dan kurangnya akses yang memadai. . Absennya PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) ke lapangan menyebabkan petani harus memecahkan masalahnya sendiri padahal pemerintah pusat telah mengalokasikan dana ganti rugi gagal panen sebesar Rp.370 miliar atau Rp. 3,7 per hektar. Namun, informasi tersebut tidak sampai ke telinga petani. Sementara, PPL, kepala desa, camat, dan pemda juga tidak turun lapangan memantau keadaan. (Lihat Kompas, Senin, 26 September 2011, hlm.1).

Jaringan irigasi peninggalan Orde Baru mengalami penurunan kualitas karena tidak pernah disentuh dan diperbaiki oleh pemerintah. Kondisi ini mengancam kelangsungan produksi pertanian. bukan hanya Desa Suruh yang mengalami hal ini, di daerah Lampung dan Sulawesi Selatan juga mengalami hal serupa.

5.2.5 Antara Petani Pemilik Lahan, Petani Penggarap, dan Buruh

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti mengkategorikan petani berdasarkan tiga jenis: (1) Petani Pemilik, (2) Petani Penggarap, dan (3) Buruh Tani. Petani pemilik adalah dia yang memiliki lahan sawah dengan luas minimal 1 hektar dengan sistem pengerjaan produksi padi oleh orang lain. Pemilik hanya memiliki peran dalam penyediaan lahan di area persawahan saja. Di saat waktu tanam, pemilik lahan mencari petani penggarap untuk memberdayakan lahan ini. Si penggarap biasanya adalah orang-orang yang sudah pernah mengerjakan pengelolaan lahan si pemilik dalam waktu yang sudah lama atau dia sudah mendapat kepercayaan untuk mengelola lahannya.

Selanjutnya, petani penggarap adalah mereka yang dimintai pemilik lahan sawah untuk mengelola dan menggarap sawah dari musim tanam hingga panen. Dalam hal pembagian keuntungan, kedua belah pihak mengikuti kesepakatan yang sudah turun temurun digunakan, yaitu bagi hasil 50%:50%. Jika hasil panen yang didapat Rp.2000.000,-, pemilik dan penggarap, masing-masing mendapat Rp.1000.000,-. Dari uang bagi hasil tersebut, penggaraplah yang mengeluarkan biaya operasional sepenuhnya, yaitu dari pengolahan tanah pra panen, hingga padi siap dipanen. Biaya operasional yang dikeluarkan antara lain:

Universitas Indonesia

menyewa tukang cangkul tanah, tukang pencabut rumput liar, tukang *tandur*/menanam padi, membeli pupuk, membeli obat hama, dan lain-lain. Penggarap rata-rata menghabiskan biaya operasional setengah dari pendapatan bagi hasil dengan penggarap saat panen. Dengan demikian, sisanya lagi baru digunakan untuk menghidupi keluarganya. Berikut yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kecamatan Suruh terkait dengan relasi antara pemilik dan penggarap:

“... Pemilik kadang nggak mau tau. Yang namanya adat istiadat bagi hasil 50%:50% itu terus menjadi satu turun temurun. Ini yang sering saya sampaikan ke kelompok tani ‘*tidak bisa Pak seperti itu, mari kita buka bersama yang namanya pemilik ya tolonglah bisa mensubsidi buruh. Tapi ya tolong, buruh jangan hanya mengandalkan tenaga.*’ Kan gitu. Memang tidak mudah memberikan satu pengertian kepada pemilik tidak mudah. Penguasa dalam hal ini pemilik masih *alot*. Bagaimana mungkin yang namanya produktivitas dikatakan baik kalau sarana produksinya tidak terpenuhi. Maksud saya begini, kalau memang itu pemilik.. e... buruh tani.. analisa nya kita hitung yang betul. Nanti biaya yang dikeluarkan buruh, juga menjadi biaya pemilik juga kan begitu. Sehingga seperti itu. Tapi selama ini kan jarang dilakukan. Kan capek sebagai buruh, sudah ngeluarin tenaga juga ngeluarin dana ‘*saya tetap harus mendapatkan bagian 50% saya*’ tetap bagi buruh seperti itu.⁵¹

Sebagaimana juga dituturkan oleh informan berikut:

“*Sing nggarap? Separo.. bagi dua. Penggarap dibagi dua. Pemilik sawah separo, penggarap separo. Pama nggarap sak hektar mau entuk sekitar 6x3.5 rong puluh juta, satu hektar adalah dua puluh juta. Berarti entuk sepuluh juta, penggarap.*”⁵²

(Penggarap mendapatkan setengah dari hasil panen. Pemilik tanah mendapat setengah dan penggarapnya juga mendapatkan setengah.)

Bahkan kendala yang dihadapi petani penggarap dalam mempergunakan pendapatannya dari bagi hasil tersebut sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya.

“...Contoh ya, sekarang aku panen. Hasil ini untuk ke depan, nggak usah ditabung-ditabung lagi. Ya tadi itu masalahnya. Petani itu petani buruh. Kalau pemilik sendiri kan biaya untuk menggarap kan seperempat dari biaya panen, misalnya panen itu harganya dua juta, petani buruh itu Cuma satu juta, yang satu jutanya lagi untuk yang punya sawah. Jadinya petani kan punya satu juta. Yang dipake untuk biaya tadi setengah juta. Jadi penggarap kan panen dua juta. Sejuta untuk pemilik. Sejutanya buat penggarap. Nah yang setengah juta daripadanya digunakan untuk menggarap lagi. Na itu kan kalau dipakai untuk makan kan habis lagi. Gitu.. nanti waktunya menggarap, uang sudah habis. Jadi seperempat ... jadi petani ini hanya mendapat

⁵¹ Wawancara dengan En

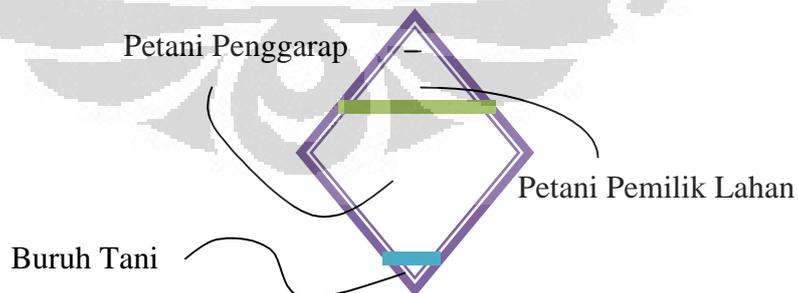
⁵² Wawancara dengan Sm

seperempat dari harga total. Itupun kalau tidak ada kendala, kendala yang lain. Artinya, tidak terkena hama tikus, wereng.”⁵³

Sementara, buruh tani adalah mereka yang disewa oleh petani penggarap untuk mengolah sawah dari pencangkulan hingga padi siap panen. Buruh tani tidak harus orang bayaran dari luar, kadang petani penggarap meminta isteri mereka untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan, misalnya: menanam benih padi dan menyiangi rumput. Buruh yang dipilih oleh penggarap disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Di sini peran gender masih tampak terlihat dalam proses pengerjaan proses produksi meskipun peran perempuan sudah sangat jarang digunakan.

Setiap kali membayar upah buruh, petani penggarap mengeluarkan biaya Rp. 15.000,- . Upah tersebut diberikan kepada buruh yang bekerja dari pukul 08:00 pagi hingga 12:00 siang. Jika buruh mengerjakan hingga pukul 15:00, upah garapan biasanya ditambah Rp.5000,-.

Di Desa Suruh, jumlah petani penggarap jauh lebih banyak dibanding petani pemilik. Menurut informasi yang disampaikan oleh Bapak Ali Ma'sum petani, rata-rata adalah petani buruh (petani penggarap) sehingga dalam pengelolaan pertaniannya mereka menggunakan versi buruh. Mereka mengerjakan proses produksi dengan pikiran bahwa hasil yang akan didapat akan dekenyam lebih banyak untuk para pemilik tanah. Bila digambarkan perbandingan antara jumlah petani pemilik, petani penggarap dan buruh, seperti di bawah ini.



Petani pemilik lahan biasanya memiliki asset lahan pertanian sebagai peninggalan warisan orang tua. Saat ini, jumlah petani pemilik di Desa Suruh mengalami penurunan karena sebagian besar mereka menjual lahan sawah untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. seperti yang dilakukan oleh Bapak

⁵³ Wawancara dengan Al
Universitas Indonesia

Mahyudin, Bapak Sambudi, Bapak Asrori, dan Bapak Rujito. Petani pemilik hanya memiliki simpanan tanah untuk memenuhi kebutuhan keluarga di samping kebutuhan makan.

Sementara, petani penggarap rata-rata adalah mereka yang juga memiliki sebagian kecil lahan sawah peninggalan orang tua atau mantan pemilik lahan sawah. Dengan demikian, di saat lahan sawah mereka telah terjual, pekerjaan yang masih bisa dilakukannya adalah menggarap sawah milik orang karena tidak ada skil lain yang bisa dilakukan untuk menutupi kebutuhan hidup. Biasanya, mereka juga memberdayakan isteri mereka untuk membuka usaha.

Kemudian untuk buruh tani, mereka biasanya justru datang dari daerah-daerah terpencil yang terpaksa mencari pekerjaan untuk menghidupi mereka. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah yang sulit terakses fasilitas dan sarana prasarana hidup. Dengan demikian, buruh tani di wilayah orang yang dianggap lebih maju dipilihnya sebagai sandaran tulang punggung keluarga.

Bagi buruh tani perempuan, seiring dengan diperkenalkannya teknologi pertanian seperti traktor, sabit, obat, peran mereka dalam proses produksi juga mengalami penurunan. “It” memaparkan fakta di lapangan tentang hilangnya peran wanita dalam proses produksi yang digantikan dengan teknologi:

“Ra ono, matun ra ono.. maene maen semprot. Ning anu.. nak semprot sukut ki gejalane anu.. kendalane ora apik. Apik e manual. Manual ki matun tangan wi lho. Nak semprot, mes e sing kendel.. Nak ra kendel parine dho mati. Saiki kidul kana gek diserang wereng. Wereng karo tikus.”

(Tidak ada buruh yang menyiangi rumput lagi. **Kami lebih memilih memakai obat semprot gulma** tetapi memang dampak yang disebabkan tidak baik. Sebenarnya bagus manual. Bila menggunakan obat semprot gulma, pupuk yang digunakan harus banyak kalau tidak, tanaman padi bisa mati)

5.2.6 Kelompok Tani di Desa Suruh dari Tahun ke Tahun

Satu-satunya organisasi petani yang ada sejak masa Orde Baru hingga Reformasi adalah Kelompok Tani. Organisasi ini merupakan wadah bagi para petani untuk memperoleh bantuan sarana produksi pertanian dari pemerintah. Berikut akan dijelaskan lebih dalam tentang kelompok tani di Desa Suruh, yaitu mengenai fungsi dan tujuan, serta kendala dan hambatan yang dihadapi.

5.2.6.1 Fungsi dan Tujuan dibentuknya Kelompok Tani

Seiring dengan berubahnya sistem pemerintahan, yaitu dari Orde Baru ke Reformasi, berubah pula fungsi dan tujuan kelompok tani di Desa Suruh. Saat pemerintahan Orde Baru, kelompok tani merupakan tempat untuk menyalurkan bantuan pinjaman uang dari pemerintah. Namun, sekarang ini, kelompok tani sudah tidak lagi digunakan sebagai wadah penyaluran bantuan pinjaman dari pemerintah.

Menurut informasi yang didapatkan, sejak awal tahun 2000, pemerintah mewajibkan bagi petani untuk tergabung ke dalam organisasi kelompok tani. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kecamatan Suruh, Eny Sri Widayati, Kelompok tani merupakan kumpulan petani yang telah mendapat piagam pengukuhan kelompok sehingga diakui kelegalannya untuk mendapat binaan penyuluh pendamping. Di Desa Suruh, Hanya 60% kelompok tani yang memiliki kegiatan rutin, salah satunya Desa Suruh.

Namun, hal yang bertolak belakang dari pernyataan Kepala Dinas Pertanian tersebut adalah kelompok tani ini merupakan organisasi formalitas sebagai syarat untuk menurunkan bantuan subsidi pupuk dari Dinas Pertanian. Tanpa ada kelompok tani pupuk bersubsidi dari pemerintah tidak akan diberikan kepada para petani. Dengan demikian, setiap petani penggarap di setiap Dusun harus tergabung di dalam organisasi kelompok tani. Berikut pernyataan salah seorang informan:

“... Ora ono kelompok tani, *mes* ra iso medun nduk saiki. Manfaate kelompok tani tuku mess thok. La terus piye nduk, la nggregetake ik. Entuk bantuan duit malah ra tau dibalekke nang simpan pinjam ik. Hahahaha...”⁵⁴

Kalau tidak ada kelompok tani, pupuk tidak bisa turun. Manfaatnya ya hanya membeli pupuk. Dulu pernah digunakan sebagai tempat bantuan simpan pinjam tetapi malah uang-uang yang dipinjam tidak dikembalikan.

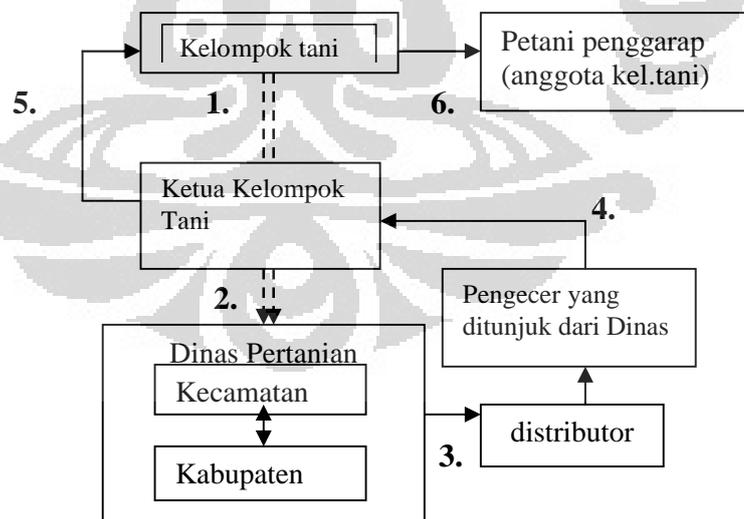
Prosedur permohonan pupuk bersubsidi ini dilakukan dengan mengajukan proposal atas nama kelompok tani setempat. Kemudian, proposal yang telah ditandatangani oleh ketua dan bendahara, dibawa oleh ketua kelompok

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Rujito
Universitas Indonesia

ke Dinas Pertanian di tingkat kecamatan. Selanjutnya, bantuan pupuk tersebut akan diserahkan melalui distributor dan pengecer utusan Dinas Pertanian kepada kelompok tani. Berikut penjelasan yang diberikan oleh salah seorang informan yang juga merupakan ketua kelompok tani:

“... Nanti bulan ini misalnya butuh sekian, dalam satu tahun itu ya. Dalam satu tahun ini missal mengajukan PDKK kepada pemerintah. Nanti pemerintah pergi ke distributor. Misalnya Kelompok Tani Karang Asem mengajukan pupuk sebesar 15 ton dalam jangka waktu dua musim. Artinya, disini kan musimnya dua kali dalam satu tahun, nanti pembagiannya dua kali, Januari sampai Bulan Juli nanti turun pertama, yaitu pas mau turun panen. Kedua, Bulan Juli sampai Desember. Nah, nanti distributor nunggu kapan Kelompok tani mengajukan, ‘Aku butuh mes 5 ton, butuhnya setengah bulan setelah mengurus. Nah distributor nanti ada pengecer, lha nanti, aku masuk ke distributor. distributor melalui pengecer. Lha pengecer ini adalah seseorang yang ditunjuk ke dinas. Ehmmm ... Pupuk Logistik tingkat Kabupaten. Petani ya menunggu karena pupuk sudah tidak bisa lagi diperjualkan secara bebas. Artinya, itu ada pengendalinya lah untuk mengantisipasi permainan harga. Oleh karenanya harga pupuk bisa dikendalikan. Ehmmm harga pupuk dari pengecer paling selisihnya 1000 atau 2000 aja. Harga *plapon* 80.000, sampai sini 82.000 itu termasuk transport. Kan dulu tidak. Delapan puluh ribu terus harga pengecernya 100 ribu sampai seratus lima. Nah itu permainan harga pengecer. Sekarang nggak bisa. Dari pemerintah delapan puluh ribu ya disini delapan puluh ribu. Terus sampai pengecer... pengecer nanti kesini 82.000. transportasi, ganti ini, ganti itu.”

Bagan Distribusi Pupuk Bersubsidi dari Pemerintah



Pupuk bersubsidi ini tidak diedarkan di pasaran secara bebas sehingga petani penggarap tidak dapat memperolehnya jika mereka tidak tergabung di dalam keanggotaan kelompok tani. Langkah ini dimaksudkan pemerintah untuk

melindungi petani dari permainan harga pasar. Sebagaimana pernah terjadi di tahun 2000-an, dimana harga pupuk jauh lebih tinggi dibanding harga jual gabah. Hal ini terjadi karena otoritas pemerintah sebagai penentu harga sarana produksi telah jatuh ke tangan pasar. Namun, di sisi lain, petani merasa kebijakan ini sangat menyulitkan petani. Alasannya, pupuk bersubsidi yang diajukan melalui kelompok tani, menuntut para anggotanya untuk membayar terlebih dahulu. Sementara, petani sangat kesulitan modal untuk memperoleh sarana produksi sebelum panen tiba. Hal ini yang menjadi masalah.

5.2.6.2 Masalah yang ditemui di dalam Kelompok Tani

Beberapa masalah yang ditemui di dalam organisasi Kelompok Tani di Desa Suruh antara lain: *Pertama*, Kelompok tani kurang bisa berjalan dengan baik karena petani rata-rata adalah petani buruh, bukan petani yang memiliki lahan sendiri sehingga dampaknya petani penggarap kurang menunjukkan sikap aktif untuk membangun produktivitas pertanian.

“Menurutku kelompok tani kurang bisa berjalan dengan baik karena petani-petani itu Pandean Karang Asem itu petani buruh. Artinya bukan petani yang memiliki lahan sendiri gitu lho. Jadi untuk mensejahterakan petani pribadi ya kurang. Jadi lahan-lahan petani yang luas itu punya *wong sugih-sugih*. Terkedala petani itu biaya. Kalau biaya sudah tidak ada *yowes* petani sudah tidak bisa menggarap. Sudah tidak mau lagi. Kurang lancarnya begitu. Lain kalau kelompok petani kalau petani yang punya jiwa petani itu lain, jadi dia punya program ‘aku harus punya tabungan sekian, untuk biaya khusus padi’. Sekarang kan nggak. Biaya petani juga digunakan untuk makan, ya untuk sekolah. Nah nanti pada saat menggarap, dana sudah habis. Kelompok tani Pandean Karang Asem kurang maju. Artinya ya itu.. dikasih penyuluhan ini begini ya tidak mau. Maunya mes ya udah”⁵⁵

Kedua, Kebijakan pemerintah yang sudah tidak lagi memihak petani menyebabkan para petani bergerak sendiri-sendiri. Implikasinya terkait dengan kelompok tani, petani menjual hasil panennya sendiri-sendiri tanpa melibatkan keberadaan kelompok tani dan juga koperasi. *Ketiga*, anggota kelompok tani kurang bisa kooperatif. Mereka enggan membayar pupuk yang telah dipesan melalui kelompok tani. Hal ini disebabkan karena keterbatasan modal petani penggarap dalam memperoleh sarana produksi pertanian. Sementara, pemilik lahan tidak memberikan subsidi atau bantuan kepada penggarap untuk memperoleh sarana produksi. Dengan kata lain, kendala modal menjadi

⁵⁵ Wawancara dengan Al
Universitas Indonesia

penghambat bagi kinerja kelompok tani dalam membagikan pupuk dari pemerintah.

“...kelompok tani kan begini ‘Besok seminggu lagi mes turun, ayo pada bayar kalau tidak bayar saya tinggal’ itu kenyataannya pada nggak mau bayar. Kan disini bingung. Masalah kesejahteraannya bingung juga. Beli mes itu *owel* (pelit). ‘Nanti saja saya bayar kalau sudah panen’ Lha uang siapa yang akan dipake untung menalangi mes nya itu? Akhirnya dengan demikian saya dan Pakdhe Din menalangi dulu. Tapi ya itu, begitu mes turun mereka baru mengambil mes itu sebulan dua bulan.”⁵⁶

“Ya tadi itu masalahnya. Petani itu petani buruh. Kalau pemilik sendiri kan biaya untuk menggarap kan seperempat dari biaya panen, misalnya panen itu harganya dua juta, petani buruh itu Cuma satu juta, yang satu jutanya lagi untuk yang punya sawah. Jadinya petani kan punya satu juta. Yang dipake untuk biaya tadi setengah juta. Jadi penggarap kan panen dua juta. Sejuta untuk pemilik. Sejutanya buat penggarap. Nah yang setengah juta daripadanya digunakan untuk menggarap lagi. Na itu kan kalau dipakai untuk makan kan habis lagi. Gitu.. nanti waktunya menggarap, uang sudah habis. Jadi seperempat ... jadi petani ini hanya mendapat seperempat dari harga total. Itupun kalau tidak ada kendala, kendala yang lain. Artinya, tidak terkena hama tikus, wereng.”⁵⁷

Keempat, kelompok tani hanya sebuah organisasi formalitas untuk menerima bantuan dari pemerintah, seperti pupuk bersubsidi. Menurut salah seorang informan yang juga merupakan bendahara kelompok tani di Desa Suruh, dirinya mengaku tidak pernah menerima uang simpanan milik kelompok. Di samping itu, peran dan fungsi bendahara di dalam Kelompok Tani hanya untuk kelengkapan birokratis dalam pengajuan bantuan pupuk bersubsidi. Berikut yang dikatakannya:

“He’em.. ngono wi nak arep ngerti, ngono lho. Situasi pemerintahan kan ngono kuwi. Dadine jane organisasi gur ge kudung. Nak aku no jeneng kanca we piye yoo? Wes karepmu .. hahaha”⁵⁸

“He’em.. begitu lah kalau ingin tau, begitu. Situasi pemerintahan kan begitu itu. Jadi organisasi sebenarnya hanya sebagai ‘kerudung saja. Kalau saya yang namanya teman ya bagaimana lagi? Sudahlah terserah.. hahaha”

“Oraa... bendahara opo, *wong* pandha’an ra tau nyekel duit ya.. kuwi anu...mung dilebok ke thok ge njaluk tanda tangan ..”⁵⁹

⁵⁶ Wawancara dengan Al

⁵⁷ Wawancara dengan Al

⁵⁸ Wawancara dengan Wh

⁵⁹ Wawancara dengan Wh

“Nggak.. bendahara apa, *wong* malah tidak pernah memegang uang ya.. itu anuu.. hanya dimasukan nama saya hanya untuk meminta tanda tangan”

Lebih lanjut, peneliti akan memaparkan temuan lapangan mengenai fungsi KUD di Desa Suruh sebagai sarana Kelembagaan pemerintah yang terkait dengan sektor pertanian.

5.2.7 KUD dan Kredit Usaha Tani sejak awal berdirinya di Desa Suruh.

5.2.7.1 KUD (Koperasi Unit Desa)

KUD (Koperasi Unit Desa) merupakan wadah perekonomian masyarakat Desa yang didirikan pada 30 Agustus 1970, di Desa Suruh. Dari awal berdirinya, KUD berada di bawah lindungan dan pengawasan pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai wadah perekonomian masyarakat. KUD juga memiliki fungsi dalam hal pengadaan pangan bagi masyarakat Desa. Dalam pelaksanaannya, KUD bekerja sama dengan toko-toko yang disebut dengan TPK (Tempat Pelayanan Koperasi) yang membantu KUD melayani kebutuhan masyarakat supaya seluruh masyarakat dapat secara merata mengaksesnya mengingat KUD di Desa Suruh hanya terdapat 1 unit. Namun, harga jual tetap ditentukan KUD. Di sini, prioritas utama pemilihak TPK lebih berdasar pada kebutuhan petani supaya mereka lebih mudah mengakses kebutuhan yang mereka butuhkan. Seperti yang dituturkan oleh menejer KUD di bawah ini:

“.....nah KUD nanti ngedrop ke toko-toko kayak misalnya di Pak Kasrin, Mbak Halim yang disebut TPK, gitu. TPK itu Tempat Pelayan Koperasi. Mereka tadinya gabung dengan KUD. Khususnya yang diprioritaskan petani gitu.”⁶⁰

Di samping menyediakan pengadaan pangan bagi masyarakat dan khususnya untuk petani, KUD juga berperan sebagai penyalur hasil panen petani ke masyarakat dan DOLOG.

“KUD diberi fasilitas oleh pemerintah, .. Dari aspek anggota kelompok tani, sumber dananya kan tadinya dari KUD. Ya membayar listrik, pengadaan pangan... kan KUD beli beras ke petani, dijual ke

⁶⁰ Wawancara dengan SI
Universitas Indonesia

DOLOG, itu dulu. Sembako, beras, Gula, gandum, KUD kan beli untuk para nasabah. ”⁶¹

“Prosedurnya dulu begini, pemerintah kan memberi dana untuk membeli padi, KUD lalu beli, KUD beli, lalu diseleb lalu dibawa ke DOLOG, lalu DOLOG membayar ke KUD untuk dibelikan padi lagi, begitu.”

KUD di Desa Suruh, sejak masa pemerintahan Orde Baru telah bekerja sama dengan tengkulak dalam hal jual beli gabah dari petani. Namun, hal tersebut tidak selalu dilakukan karena terkadang, petani menjual hasil panennya yang sudah menjadi beras ke KUD. Berikut pengakuan yang disampaikan oleh salah seorang informan:

“Tengkulak sudah ada dari zaman dulu, KUD dulunya juga beli ke tengkulak-tengkulak gitu. Tidak, pemerintah tidak melarang, mereka itu sendiri-sendiri. Mandiri. Kalau tengkulak itu. Tadinya KUD juga beli ke tengkulak itu. ...tadinya tengkulak juga jadi *best friend* nya KUD.”

Kemudian, bentuk perlindungan pemerintah terhadap lembaga ini adalah dengan memberinya kepercayaan untuk mengkoordinir petani dalam proses produksi. Dengan demikian KUD tidak mati suri karena tetap memiliki masukan dari hasil kerja sama dengan para petani. Di masa Orde Baru, KUD juga disebut sebagai perantara antara petani dengan pihak pemerintah dalam proses jual beli hasil petani. Namun, saat ini, wewenang tersebut sudah tidak lagi diberikan pemerintah kepada pihak KUD. Berikut pernyataan informan:

Perlindungan dari pemerintah: “misalnya tebu. Dari KUD mengkoordinir petani untuk menanam tebu. Nanti tebu-tebu diseleb ke pabrik gula. Nanti harganya segini gitu misalnya.. nanti hasilnya diberitahukan ke petani”
 “KUD disini jadi perantara. KUD bagus di zaman Soeharto. Perubahan zaman ya mungkin. Tadinya pupuk pupuk diberikan. ”⁶²

Selanjutnya, masalah yang dihadapi dalam kinerja KUD akan di bahas di bagian selanjutnya di bawah ini.

a) Masalah yang dihadapi

⁶¹ Wawancara dengan SI

⁶² Wawancara dengan SI

Masalah utama yang dihadapi KUD adalah sejak tahun 2000-an, KUD sudah tidak memiliki prioritas untuk membeli padi karena pemerintah telah melepaskan KUD. Di masa pemerintahan Orde Baru, KUD mendapat perlindungan dari pemerintah, selain itu juga menjadi koordinator para petani untuk menanam beberapa komoditas pangan. Hasil panen dari komoditas tersebut dibeli oleh KUD dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian, dari KUD dibawa ke seleb untuk kemudian dijual.

“Sekarang Pemerintah sudah tidak memberi fasilitas dan prioritas jadi tidak jual.”

Justru, sekarang KUD hanya melayani jasa pembayaran rekening listrik. Usaha Simpan pinjam (melalui KUT) yang mulanya ada, kini mengalami kemacetan karena masalah pengembalian oleh nasabah. Di samping itu, prioritas untuk menampung padi dari petani sudah tidak lagi diperintahkan oleh pemerintah. Berikut adalah pendapat informan mengenai disorientasi KUD di Desa Suruh:

“sekarang KUD hanya tempat membayar rekening listrik dan simpan pinjam. Simpan pinjam pun juga macet. Mereka mikirnya, ‘ini dari KUD, berarti dari pemerintah, udah ndak usah dibayar’.”⁶³

“KUD sekarang sudah tidak diberi prioritas untuk membeli padi, yang beli DOLOG langsung ke petani, namanya satgas. Dari petugas DOLOG itu disuruh langsung ke petani. Tapi disini belum ada.”⁶⁴

“Waaah, hidup segan mati tak mau. Hehehe. Tidak diurus pemerintah tapi masih dianggap badan usaha. Sudah dilepaskan pemerintah sekarang”⁶⁵

5.2.7.2 KUT (Kredit Usaha Tani)

KUT merupakan program yang dibentuk oleh Habibie pada tahun 1998, setelah krisis ekonomi. Alur kinerja KUT adalah pemerintah mengucurkan dana melalui Bank-Bank. Selanjutnya, Bank-Bank menunjuk koperasi salah satunya KUD untuk memberi bantuan kepada petani melalui kelompok tani. Kemudian, dari kelompok tani diserahkan ke para anggotanya.

⁶³ Wawancara dengan SI

⁶⁴ Wawancara dengan SI

⁶⁵ Wawancara dengan SI

Secara procedural, KUT melalui KUD memiliki peran untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat, khususnya dalam hal ini masalah pengadaan pangan termasuk membeli gabah dari petani langsung. KUD memberi bantuan pinjaman dana kepada petani melalui lembaga KUT tersebut. KUT memberikan pinjaman uang atas nama kelompok tani, kemudian kelompok tani menyerahkan pinjaman tersebut kepada anggotanya. Sistem pengembalian pinjaman adalah setelah masa panen, petani-petani yang meminjam uang mengembalikannya melalui kelompok tani dengan bunga sepuluh persen dalam jangka pinjaman satu tahun.

“Pemerintah melalui KUD memberi dana untuk petani. Lha petani itu melalui kelompok tani nanti dananya diberikan kesitu. Gitu. La nanti petani pinjamnya dari situ. Kalau sudah panen, baru petani-petani nanti mengembalikan ke kelompok tani. Setelah itu baru disetor ke KUD, gitu. Bunganya ada sepuluh setengah persen, setahun. Ringan sebenarnya. Tapi tidak mengembalikan. Ya begitu itu. Uang KUD dianggap dana bantuan dari pemerintah”

Namun, dalam praktiknya, sistem peminjaman dana tersebut menuai masalah. Masalah tersebut akan dibahas di bagian selanjutnya di bawah ini.

b) Masalah dan Hambatan

KUT belum berhasil mencapai visi misinya untuk mensejahterakan petani. Kendala dari pihak petani adalah mereka enggan mengembalikan dana bantuan yang dipakai untuk hutang karena dianggap uang pemberian dari pemerintah yang mana bagi mereka sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan secara cuma-cuma. Kendala dari pemerintah, sejak tahun 2000-an koperasi sudah tidak diberi otoritas untuk menjalankan perannya dalam membuka kredit usaha tani. Berikut merupakan penuturan dari menejer KUT:

“Kendalanya, petani *mbeling* (tidak bertanggung jawab). Mereka tidak membayar hutang. Hehehe... Itu kan sebenarnya begini mbak, petani mikirnya, *‘itu kan dari pemerintah, jadi ya ndak usah dibayar utangnya. hehee’*. Dulu pernah pada saat Gus Dur mengucapkan statement KUT dibebaskan, begitu. Tapi ndak. Cuma sebentar. Petani kan jadinya ndak mau membayar utang.”⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan S1

Permasalahan yang dihadapi pemerintah setempat, yaitu Sekretaris Dusun dalam memberdayakan petani di Desa Suruh adalah sikap petani yang tidak kooperatif dalam menerima bantuan pinjaman dana. Pinjaman yang pernah diberikan kepada beberapa petani melalui pengajuan proposal kepada Dinas Pertanian Kabupaten tidak dikembalikan sebagaimana mestinya. Petani, dengan kondisi ekonomi terbatas mempergunakan bantuan pinjaman dana maupun modal lainnya seperti binatang ternak justru untuk dijual atau diuangkan kembali.

“...disini itu masyarakatnya ... *piye* ya.. Dulu pernah ada bantuan dari pemerintah. Tapi ya itu, yang *dipinjemi* ndak bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Kan itu dicatat. Nah tahun berikutnya saya mengajukan lagi, pemerintah kan Tanya ‘*yang tahun lalu buat apa?*’ wah ya saya bingung *tho* jawabnya, wong saya ngerti itu bantuan dipakai untuk apa kok. Hasilnya kemaren *jane* bagus, tapi... misalnya gini, kemaren diberi bantuan sapi saya suruh *ngerumat* ya biar kembali modal lah. Nanti kan modalnya *dibalik’e* kesana lagi tapi kalau nggak ada ya aku *wegah*.”⁶⁷

“... Sekarang diberi bantuan seperti itu tapi juga nggak beres. Maksudnya kan tiap panen setor, tiap panen setor, gitu... ketidakberesan itu dari petani ke ketua kelompok atau sudah sampai ke ketua kelompok tapi nggak disetorkan, la itu yang nggak tahu.”⁶⁸

“...Nah sebenarnya bantuan-bantuan itu tadi kan buat membantu kesejahteraan masyarakat juga. ‘*ini tak silihi modal gawenen usaha*(ini saya pinjami modal silakan digunakan untuk usaha)’ kan gitu. ***Malah BANK thithil*** ini masih menjadi sarang bantuan kredit masyarakat. Lawong dipinjami, ini modalnya, ngembalikannya nggak usah pakai bunga, ya *to*. Semampunya. Tapi nggak ditanggapi secara aktif.”⁶⁹

Petani-petani di Desa Suruh, dalam hal melakukan pinjaman dana, lebih tertarik untuk melakukan pinjaman kepada pihak rentenir yang disebut dengan *Bank Thithil*. Prosedur peminjamannya, tukang rente ini mendatangi rumah per rumah dan menawarkan pinjaman uang. Kemudian, nasabah yang tertarik akan diberikan bantuan yang mereka minta dengan potongan pinjaman sebesar sepuluh persen. Misalnya, si A meminjam uang senilai Rp. 300.000,- tetapi jumlah nominal yang diberikan akan dipotong Rp. 30.000,- atau 10% sehingga menjadi Rp. 270.000,-. Selanjutnya, sistem pengembaliannya dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, apakah dalam hitungan hari atau minggu, dalam waktu

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Al

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Al

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Al

12 kali pengembalian. Pinjaman yang diberikan senilai Rp. 270.000 dari Rp. 300.000,-, kewajiban untuk pengembaliannya @Rp. 36.000,- x 12 kali pembayaran sehingga total bunga yang dikenakan sebesar 54%.

Kredit uang ini dipilih mereka dengan alasan lebih mudah dibandingkan meminjam atau menerima bantuan pinjaman dari pemerintah. Nasabah tidak perlu menyerahkan beberapa kelengkapan persyaratan pinjaman seperti: KTP, foto, Kartu Keluarga, Data Penghasilan, dan Sertifikat seperti yang disyaratkan oleh pinjaman dari pemerintah. Mereka sangat menghindari segala sesuatu yang berurusan dengan hukum. Jika mereka meminjam kepada rentenir/ *Bank Thithil*, setiap kali mereka belum bisa mengembalikan pada waktu yang ditentukan, mereka akan menghindar dan pergi dari rumah supaya tidak bertemu dengan pihak rentenir tersebut. Lain persoalan jika mereka meminjam ke pemerintah. Pinjaman dari rentenir tidak dikenakan bunga tambahan jika nasabah telat membayar.

Tabel 5.5 Rangkuman Temuan Penelitian Makro dan Mikro

| No. | Kebijakan Pembinaan Sub Sektor Pangan Beras | Orde Baru | | Reformasi | |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | Makro | Mikro | Makro | Mikro |
| 1. | Kelembagaan Pertanian | 1)Peningkatan produktivitas pertanian pada tiga kegiatan utama, yaitu: intensifikasi (penggunaan pupuk, bibit unggul, pestisida, dan teknologi mekanis), ekstensifikasi (perluasan area dengan mengkonversi hutan menjadi lahan pertanian/ sawah), dan diversifikasi . 2)Pemerintah menggerakkan BIMAS (Bimbingan Massal) yang bertujuan menjadi lembaga penyalur bantuan dari pemerintah kepada petani. 3) Menggerakkan KUD yang bertujuan untuk | 1)Muncul lembaga BIMAS (Bimbingan Massal) yang memberikan bantuan berupa dana dan pupuk untuk petani penggarap melalui kelompok tani. 2)Pendirian KUD (Koperasi Unit Desa) pada tahun 1975. KUD adalah tempat bagi para petani untuk melakukan penyetoran hasil panen untuk dijual kepada konsumen. Selain itu, KUD juga wadah bagi petani untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam untuk kepentingan | -BIMAS sudah tidak ada semenjak peralihan pemerintahan. -BULOG tidak lagi berorientasi pada kepentingan ketahanan pangan nasional tetapi lebih kepada Badan Hukum yang mencari keuntungan melalui komoditas pangan. -BIMAS sudah ada peralihan pemerintahan. -BULOG tidak lagi berorientasi pada kepentingan ketahanan pangan nasional tetapi lebih kepada Badan Hukum yang mencari keuntungan melalui komoditas pangan. | -BIMAS sudah tidak beroperasi. -Pendirian Kredit Usaha Tani di tahun 1999 oleh B.J. Habibie. Namun, tidak berjalan lama. Tahun 2000 awal mengalami kemandegan. Selanjutnya, petani mencari bantuan pinjaman uang melalui rentenir yang persyaratannya lebih mudah dan fleksibel meskipun bunga yang ditetapkan sangat melilit (54%) |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| | menumbuhkan dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab para produsen beras dengan tujuan agar para petani produsen beras tidak hanya memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi itu sendiri tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidupnya. | produksi. 3)Pendirian BRI di tahun 1985. | |
| | 3) Menggerakkan BULOG sebagai lembaga untuk menampung, mendistribusikan dan mengelola beras. | | |
| 2. Penyediaan Sarana Pertanian | -Pengenalan jenis bibit rekayasa genetika (Dee-Geo Woo), pestisida, dan pupuk kimia, teknologi. | - bantuan pinjaman pupuk kimia dari pemerintah. - bantuan sarana produksi berupa hewan ternak penunjang produksi padi, seperti sapi. -Bantuan pinjaman dana sebagai modal usaha tani melalui GAPOKTAN senilai Rp. 800.000 hingga Rp.2000.000 per petani penggarap. -Ketiga bantuan saprodi tersebut dikembalikan setelah panen di musim panen berikutnya. Untuk peminjaman dana, hanya dikenakan bunga sebesar 2%. - Pengenalan | -Subsidi Pupuk Urea 60% bagi petani yang diberikan melalui kelompok tani. Dengan demikian, petani yang tidak tergabung di dalam keanggotaan kelompok tani yang telah diakui secara legal, tidak mendapat bantuan subsidi pupuk. Pupuk hanya bisa dibeli melalui Dinas Pertanian setempat. Artinya, bagi petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani, tidak dapat mendapatkan pupuk karena pupuk urea tidak diperjualbelikan di pasaran secara bebas. |

| | | | |
|----|------------------|---|---|
| | | jenis padi pandan wangi yang masa panennya 4,5 bulan. | |
| 3. | Perkreditan | <p>1. Di bangun BRI sebagai lembaga keuangan perbankan yang berfungsi sebagai simpan pinjam petani.</p> <p>2. Operasi BIMAS sebagai lembaga penyalur bantuan dari pemerintah kepada petani.</p> | <p>Tahun 1980-an sampai sebelum krisis 1998</p> <p>-Bantuan dana/kredit diberikan dari pihak pemerintah melalui BIMAS kepada petani. Jumlah nominal yang diberikan sebesar Rp. 800.000 hingga 2.000.000 untuk operasional sawah per hektar. Pinjaman tersebut dikembalikan setelah panen tanpa pungutan bunga.</p> <p>Tahun 1999-2000 awal</p> <p>-Terdapat Kredit Usaha tani yang didirikan oleh B.J. Habibie tetapi tak lama karena mengalami kendala dari nasabah.</p> <p>Setelah ditutupnya KUT</p> <p>Kredit swasta <i>Bank Thitihil</i>.</p> |
| 4. | Pengorganisasian | - Dibentuknya kelompok tani sebagai wadah penyalur bantuan dari BIMAS dan KUD. | <p>-Kelompok Tani Fungsi: Penyalur bantuan dana dari pemerintah.</p> <p>-Kelompok Tani Fungsi: Syarat pengambilan pupuk bersubsidi dari pemerintah.</p> |

BAB VI

ANALISIS

Di bagian sebelumnya, telah diuraikan temuan penelitian, yaitu temuan makro dan mikro menyangkut ketahanan pangan di masa Orde Baru dan Reformasi. Selanjutnya, peneliti akan mengelaborasi dua temuan penelitian tersebut ke dalam analisis mikro dan makro pada BAB ini. Pertama, peneliti akan uraikan analisis temuan mikro dan makro di masa pemerintahan Orde Baru dengan sedikit merangkum temuan lapangan ke dalam tabel 6.1. Kedua, peneliti akan uraikan analisis temuan mikro dan makro di masa Reformasi yang diawali dengan penjelasan singkat mengenai temuan mikro di dalam tabel 6.2.

6.1 Kebijakan Masa Pemerintahan Orde Baru

Di Desa Suruh, pencapaian dan pemenuhan ketahanan pangan dilakukan dengan memberikan bantuan pinjaman uang kepada para petani, khususnya dalam hal ini adalah petani penggarap selaku pihak yang mengelola secara penuh proses produksi padi. Selain itu, pemerintah juga memberi pinjaman modal berupa pupuk dan ternak untuk kelancaran sarana produksi pertanian mereka.

Kebijakan pemerintah dalam memberi bantuan pinjaman modal tersebut merupakan paket kebijakan Revolusi Hijau yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu. Salah satu program di dalamnya adalah pengenalan panca usaha tani kepada para petani, yang isinya antara lain: (1) Pemilihan bibit unggul, (2) Pengolahan Tanah, (3) Irigasi, (4) Pemupukan, dan (5) Pemberantasan hama.

Di Desa Suruh sendiri, bantuan pinjaman modal berupa dana, pupuk, dan ternak merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap petani di Desa Suruh. Petani tidak menyadari bahwa bantuan yang diberikan tersebut merupakan program pemerintah yang tidak hanya diperuntukan untuk para petani. Kebijakan pemerintah yang mengacu pada pembenahan sub sektor pangan beras melalui Revolusi Hijau tak lepas dari unsur kekuatan pihak asing. Program ini tidak terlepas dari peranan CGIAR (*Consultative Group On International Agricultural Research*), yaitu suatu lembaga pertanian yang khususnya menyebarluaskan program Revolusi Hijau dengan cara memberikan bantuan berupa bibit unggul,

Universitas Indonesia

pestisida, dan pupuk kimia. Lembaga ini didirikan pada tahun 1971 oleh Robert S. Mc Namara, Presiden Bank Dunia saat itu. Ia merupakan mantan pimpinan perusahaan Ford dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat ketika terjadi Perang Vietnam.

Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan pihak World Bank ketika Indonesia mengajukan sejumlah pinjaman dana untuk melakukan pembangunan. Praktis, di tengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan ditambah dengan ambisi untuk melakukan pembangunan secara cepat, Indonesia mengambil langkah untuk melakukan pinjaman dana terhadap pihak tersebut. Catatan yang disyaratkan untuk memperoleh pinjaman dana, salah satunya Indonesia harus menerapkan pertumbuhan ekonomi pertanian dengan tata cara yang telah ditentukan, yaitu dengan penerapan Revolusi Hijau pada komoditas padi⁷⁰.

Namun, kondisi di balik kebaikan pemerintah dalam memberikan bala bantuan kepada petani di Desa Suruh sama sekali tidak terlintas di dalam pikiran mereka. Bagi mereka, pemerintahan Orde Baru sangat mepedulikan nasib petani. Di satu sisi memang dari ketiga belah pihak, yaitu pihak asing (*World Bank*), pemerintah, dan petani telah terjalin simbiosis mutualisme dimana masing-masing pihak mendapat segi keuntungan. Dari segi petani, mereka adalah rakyat kecil yang hanya memiliki modal kemampuan tenaga untuk menggarap sawah.

⁷⁰ Berdasarkan pada *Asian Journal of Food and Agro-Industry* (www.ajofai.info, 2009:299), Program Revolusi Hijau dikenalkan pada tahun 1968 oleh William Gaud, seorang direktur USAID, sumbangan lembaga dari Pemerintahan Amerika Serikat. Program Revolusi Hijau membawa perubahan secara massif di dalam sektor pertanian. Dua negara yang telah menilaskan bukti perubahan beras dalam politik adalah Soviet dengan Revolusi Merah dan Iran dengan Revolusi Putih. Meksiko juga menjadi negara yang pernah menggunakan Revolusi Hijau tersebut untuk mengubah sistem pertanian secara drastis. Tahun 1943, Meksiko menjadi negara pengimpor Gandum, kemudian di tahun 1956, Meksiko dapat memenuhi kebutuhan Gandum tingkat nasional bahkan dapat menjadi negara Pengekspor Gandum. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kontribusi Ford Foundation dan Rockefeller yang membantu memberi ekstensi pendidikan dan teknologi.

Keberhasilan tersebut memacu keinginan Ford Foundation dan Rockefeller untuk menyebarkan gagasan tersebut ke negara lain, salah satunya Indonesia dengan fokus produktivitas padi. Mereka mengenalkan jenis padi varietas unggul IR 64 dan IR 36.

Indonesia mulai mengimplementasikan program revolusi hijau dengan Program Panca Usaha Pertanian (PUP) yang bertandas pada kebijakan penggunaan pestisida dan pupuk kimia.

Universitas Indonesia

Selebihnya, untuk modal materi sebagai penunjang sarana produksi, mereka sangatlah lemah. Dengan demikian, dengan adanya bantuan pinjaman modal berupa dana, pupuk, dan binatang ternak, mereka mereka sangat terbantu. Paling tidak, mereka dapat melaksanakan proses produksi dengan lancar karena segala macam modal telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian dari segi pemerintah, keberhasilan yang dicapai melalui swasembada beras di tahun 1984 telah menghantarkan pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena dianggap telah berhasil menciptakan ketahanan pangan nasional. Sebab, sebelum swasembada beras, Indonesia masih belum berhasil dalam mencapai target pembangunan ekonomi khususnya dalam bidang pertanian, yaitu dalam agenda PELITA 1 hingga PELITA 3. Dari pihak World Bank, pada saat Indonesia meminta bantuan dana, dia tidak akan was-was atas kredit pinjaman karena Revolusi Hijau telah menuai hasil.

Berikut merupakan tabel kategorisasi isu temuan mikro, yaitu kondisi petani di Desa Suruh dalam kaitannya dengan kebijakan ketahanan pangan pemerintah.

Tabel 6.1 Kategorisasi Isu Temuan Mikro di Masa Orde Baru

| ORDE BARU | |
|---|--|
| Fase | Temuan Lapangan |
| Swasembada Beras (1984) | (+) <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman dana, pupuk, binatang ternak (sapi). - Pembangunan Irigasi dan Bendungan air <i>Mudal</i> - Pembangunan BRI di tahun 1985 - Beras melimpah pada tahun 1984-1985. - Kerjasama antara KUD dengan petani. |
| | (-) <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi puso/ serangan hama tikus pada tahun 1986 - Pasca 1986, bantuan pinjaman tidak berkelanjutan karena kebijakan industrialisasi. |
| Industrialisasi dan Liberalisasi Pertanian | (-) <ul style="list-style-type: none"> -Kelangkaan Pupuk -Harga Gabah Anjlok -Harga jual gabah ditentukan oleh para tengkulak |

KUD di Desa Suruh pada saat itu masih difungsikan sebagai wadah bagi petani untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan penyaluran hasil produksi. Namun, KUD tidak lepas dari unsur keterlibatan tengkulak di dalamnya. sebagaimana yang telah terpapar sebelumnya bahwa tidak jarang tengkulak merupakan distributor antara petani dan KUD. Hal ini disebabkan karena KUD hanya bisa menerima hasil produksi padi dalam wujud beras. Alasannya, KUD di Desa Suruh sangat memiliki keterbatasan fasilitas dalam pengelolaan hasil panen petani sehingga dia harus membeli produk yang sudah jadi. Sementara itu, dari sisi petani, jika mereka menjual gabah ke KUD dalam bentuk yang sudah kering atau jadi, mereka memerlukan biaya tambahan untuk panen padi. Dengan demikian, petani lebih memilih menjual gabah melalui tengkulak yang biasa dilakukan pada saat gabah masih basah. Berikut merupakan hasil olahan temuan lapangan mengenai alur pemasaran gabah yang melibatkan peran KUD dan tengkulak:



Sumber: Diolah dari temuan Lapangan di Desa Suruh

⁷¹ Setelah KUD dilepas pemerintah, (pasca Orde Baru), KUD sudah tidak terlibat kembali dalam jalur perdagangan beras. Jalur distribusi ini masih tetap berjalan hingga saat ini tetapi tanpa melibatkan KUD, DOLOG, dan BULOG.

Selanjutnya, bantuan yang diberikan pemerintah rupanya tidak berjalan lama, di tahun 1986, petani Desa Suruh mengalami gagal panen akibat serangan hama tikus. Oleh karenanya, pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa dikembalikan. Sejalan dengan terjadinya wabah tersebut, pemerintah diakui oleh petani sudah tidak lagi menyediakan bantuan pinjaman seperti sedia kala. Kelangkaan pupuk terjadi dan petani terbengkalai. Setelah menerima angin segar dari pemerintah untuk dapat memproduksi padi melimpah, akhirnya hanya bisa dinikmati sesaat. Pada masa-masa tersebut, pemerintah tersandung masalah kewajiban pembayaran cicilan hutang luar negeri dengan bunga yang jumlahnya cukup besar untuk pembiayaan pembangunan ekonomi. (Arief dan Sasono, 1987: 1)

Masuk di tahun 1990-an, harga gabah petani mengalami penurunan/anjlok. Lagi-lagi kelangkaan pupuk terjadi. Petani Desa Suruh yang mulanya dimanjakan dengan berbagai macam bantuan pinjaman, saat itu mereka harus berusaha mencari pinjaman modal sendiri. Satu-satunya pihak yang berperan penting membantu menyelamatkan petani dari krisis bantuan pinjaman modal adalah tengkulak/ penebas. Mereka datang kepada petani dengan menawarkan bantuan pinjaman modal. Namun, syarat yang harus dipenuhi adalah petani harus menjual gabah mereka kepada tengkulak tersebut. Kemudian, tengkulak ini memiliki strategi untuk membeli gabah basah pada petani. Alasannya, harga yang diberikan dari petani akan lebih murah karena si petani tidak memerlukan biaya tambahan untuk proses panen.

Kondisi-kondisi dimana petani berada di dalam kondisi krisis bantuan pinjaman modal serta anjloknya harga gabah, bila ditarik ke level makro dapat dilihat bahwa pemicu terjadinya kondisi itu adalah adanya kebijakan industrialisasi.

Maraknya industrialisasi di awal 1986 menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan petani Di Desa Suruh. Secara umum, lahan-lahan sawah mengalami penyusutan sebagai akibat dari konversi lahan. Meskipun di Desa Suruh sendiri konversi lahan hingga kini belum pernah ada tetapi orientasi masyarakat setempat menjadi beralih. Di bab IV telah dideskripsikan bahwa jumlah penduduk menurut profesi di Desa Suruh lebih banyak di sektor non

pertanian. Mereka memilih profesi tersebut karena daerah-daerah lain di luar Desa Suruh telah menjadi daerah industri perkotaan, misalnya Salatiga, Ungaran, dan Semarang. Bagi masyarakat setempat, pekerjaan non pertanian lebih menjanjikan untuk memberikan upah yang lebih tinggi dibanding bekerja di sektor pertanian.

Bapak Mahyudin, salah seorang informan mengakui bahwa sejak tahun 1986 hingga seterusnya telah menghapuskan citra Indonesia sebagai negara agraris. Sejak saat itu pula, Indonesia sudah tidak mengutamakan kebijakan ekspor beras tetapi menjadi negara pengimpor beras. Perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian sedikit demi sedikit menurun karena konsentrasi baru dalam membangun pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu pembangunan industri. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pertanian mulai ditinggalkan karena pemerintah lebih memprioritaskan untuk mengejar keuntungan demi terselamatkannya masa depan ekonomi nasional dari beban bunga cicilan atas pinjaman modal asing.

Selain dari beban hutang dan modal asing yang menyebabkan krisis di tahun 1985, faktor eksternal lain yang turut menstimulus kebijakan industrialisasi adalah di pertengahan abad 20, analisis peran pertanian banyak memaparkan fakta tentang peran pertanian dan proses pertumbuhan. Fakta tersebut melahirkan pemikiran neo-klasik yang mengatakan bahwa pertanian merupakan sektor yang peranannya terus merosot. Pertanian lebih merupakan *black box* (istilah Little (1982)) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian hanya terbatas sebagai penyedia tenaga kerja, pemasok pangan dan juga modal bagi sektor industri. Dengan kata lain, pertanian tidak memerlukan kebijakan untuk modernisasi pertanian karena sektor ini terus menunjukkan penurunan peran dalam pertumbuhan ekonomi secara alami. Rei dan Ranis (1964) dalam *Economic Development with Unlimited Supplies of Labor* mengabaikan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk modernisasi pertanian tradisional agar dapat berperan positif terhadap sektor-sektor lain.

Sah dan Stiglitz (1984) pun turut memberi sumbangan pendapat tentang alasan sektor pertanian mengalami pengabaian (*ignorance*). Ekonomi yang sedang mengalami pertumbuhan secara relatif mengalami penurunan karena adanya kebijakan yang mengarah kepada percepatan tingkat akumulasi investasi oleh

pemerintah dengan cara kebijakan harga. Harga komoditas industri terus naik sedangkan harga komoditas pertanian terus menurun. Kebijakan yang demikian inilah yang dianggap mensejahterakan masyarakat terlepas dari kondisi petani sebagai aktor yang melakukan proses produksi di sektor pertanian yang berada di posisi kurang menguntungkan.

Masalah yang kemudian dihadapi oleh petani khususnya setelah tahun 1995 adalah pemerintah menghilangkan cukup banyak subsidi mulai dari pupuk hingga pembibitan. Padahal, petani tidak bisa menggunakan produk-produk lain yang dijual bebas dipasaran selain dari produk yang dikenalkan pemerintah. Harapan petani terhadap bantuan pemerintah tidak bisa diharapkan lagi karena dengan berkurangnya subsidi pupuk dan bibit tanaman padi, petani harus mendapatkannya sendiri tanpa mendapat subsidi atau pinjaman dana dari pemerintah. Di tahun tersebut, kondisi nasional sedang mengalami tekanan ekonomi sehingga pemerintah menghilangkan cukup banyak subsidi mulai dari pupuk hingga pembibitan.

Di samping itu, hilangnya proteksi pemerintah dalam pemberian bantuan pinjaman modal juga didorong oleh kondisi di luar jangkauan masyarakat petani, yaitu ditandatanganinya *Agreement on Agriculture (AoA)*. Sebagaimana telah dibahas di BAB IV bahwa adanya kesepakatan dengan pihak asing telah berdampak pada jatuhnya otoritas pemerintah dalam melindungi kegiatan produksi pertanian. Sebab, hal ini merupakan poin penting yang dihasilkan di dalam kesepakatan tersebut dimana segala macam bentuk hambatan perdagangan di dalam negeri sebisa mungkin di hapuskan. Dengan demikian, dominasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pertanian juga kian memudar karena peran pasar yang lebih dominan dalam mengatur kegiatan perekonomian dalam negeri.

Kondisi ini tidak diketahui oleh para petani di Desa Suruh. Mereka hanya sebatas mengetahui bahwa pemerintah telah berpaling dari mereka sebagai akibat perubahan zaman. Keterbatasan pengetahuan mereka juga beralasan, mereka rata-rata berasal dari pendidikan rendah, kemudian sarana informasi yang mereka peroleh pun juga terbatas karena tidak memiliki akses untuk itu.

6.2 Kebijakan Perberasan di Masa Pemerintahan Reformasi

Permasalahan yang dihadapi oleh petani Desa Suruh sejak tahun 1998 adalah semakin jelasnya krisis bantuan pinjaman modal dari pemerintah. Mereka benar-benar harus mencari pinjaman hutang atas inisiatif sendiri. Mengingat kondisi sosial ekonomi mereka yang terbilang minim, yang bisa mereka lakukan adalah memanfaatkan bantuan seadanya. Dalam kondisi ini peran tengkulak semakin mendominasi dalam proses penjualan produksi beras.

Semenjak krisis ekonomi 1998, harga gabah di kalangan petani Desa suruh mengalami penurunan yang sangat tajam. Hal ini dirasa sangat sulit bagi mereka mengingat seluruh harga komoditas kebutuhan pokok mengalami peningkatan. Kondisi ini diperparah dengan tihapusannya sama sekali bantuan pinjaman dari pemerintah kepada petani untuk kelancaran produksi. Di tengah-tengah semua harga naik, gabah yang mereka jual mengalami keanjlokkan. Petani harus membeli sarana produksi seperti, bibit, pupuk dan obat dengan harga yang melambung sementara hasil produksi yang diperoleh justru lebih rendah dan murah dari biaya produksi. Kondisi semakin menekan petani. Dalam satu fase, mereka dihadapkan oleh tiga kondisi yang sangat menyulitkan, yaitu hilangnya bantuan pinjaman modal dan naiknya seluruh harga kebutuhan ditambah dengan anjloknya harga gabah.

Jika menarik masalah ini ke level nasional, yang terjadi saat krisis ekonomi 1998, pemerintah pada tahun tersebut melakukan impor beras dalam jumlah terbanyak dari yang pernah dilakukan, yaitu 5.782.926 ton. Delapan tahun terakhir, dari tahun 1990 hingga 1998, pemerintah memang telah melakukan kebijakan impor beras tetapi total beras yang dimasukkan ke dalam negeri paling banyak adalah di tahun 1998. Selibuhnya dapat dilihat pada tabel 1.1 pada BAB I. Kondisi lain yang menyebabkan pemerintah melakukan suplai beras dalam jumlah banyak adalah adanya gejala perubahan iklim yang ditandai dengan El Nino dan La nina. Namun, kebijakan pemerintah untuk mensuplai beras nasional dengan mendatangkan beras dari luar tidak diketahui oleh para petani. Mereka hanya memahami bahwa pada saat itu Soeharto lengser dari kekuasaan sehingga lengser pula seluruh kebijakan yang pernah dilakukan untuk para petani di Desa Suruh.

Kemudian, memasuki masa transisi dimana Soeharto sebagai pemimpin masa Orde Baru sudah tidak menjadi penguasa negara, peran pasar telah menggantikan pemerintah. Harga gabah sudah tidak lagi ditentukan oleh pemerintah. Bentuk pasar yang paling nyata bagi petani adalah para tengkulak/penebas.

Penebas / tengkulak memanfaatkan kesempatan hilangnya peran pemerintah dalam memberi bantuan pinjaman dengan menyediakan bantuan pinjaman dana kepada petani. Namun, kesepakatan yang dibuat untuk dapat memperoleh bantuan pinjaman tersebut, pihak petani harus bersedia menjual gabahnya kepada tengkulak. Tentu harga jual petani telah ditekan oleh tengkulak dengan harga murah, hitung-hitung sebagai kompensasi bunga atas pinjaman yang diberikan. Petani tidak memiliki cara lain untuk memperoleh pinjaman dana. Meskipun terdapat lembaga perbankan, BRI, petani-petani justru enggan melakukan pinjaman di instansi pemerintah tersebut. Persyaratan yang diajukan dianggap rumit dan menyulitkan mereka. belum lagi masalah mental mereka yang sangat menghindari urusan hukum.

Tabel 6.2 Kategorisasi Isu Temuan Mikro di Masa Reformasi

| REFORMASI | |
|----------------------------------|--|
| Fase | Temuan Lapangan |
| Krisis ekonomi 1998 | <ul style="list-style-type: none"> - Harga gabah petani anjlok - Mulai muncul dominasi pasar (tengkulak) - Bantuan pinjaman pupuk dan dana untuk modal produksi pertanian sudah sama sekali tidak ada. |
| Masa transisi (1999-2000) | <ul style="list-style-type: none"> - Harga gabah ditentukan oleh pasar (Setelah kepemimpinan Gus Dur berakhir) - Dibentuk lembaga simpan pinjam oleh BJ. Habibie, yaitu Kredit Usaha Tani (KUT) tetapi tidak berkelanjutan karena ketidakkooperatifan para nasabah (para petani) |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 2000 ke atas hingga sekarang | (+) - Kebijakan sembako murah dan raskin. - Pemberian BMM (Bantuan Masyarakat Miskin) kepada petani berupa uang sebesar Rp. 100.000,- hingga Rp.300.000,- (tetapi hanya tiga kali,yaitu di tahun 2010) - Pemberian subsidi pupuk kepada petani melalui kelompok tani sebesar 60% di masa pemerintahan SBY tahap II. |
| | (-) - Memudarnya peran KUD akibat dilepaskan oleh pemerintah. - Tengkulak semakin menguasai petani. - Gagal panen di pertengahan 2010 hingga pertengahan 2011 akibat hama wereng. -Absennya pemerintah setempat (penyuluh dan Dinas Pertanian) dalam mensosialisasikan masalah pertanian. |

Sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam deskripsi temuan mikro, lembaga perkreditan petani, Kredit Usaha Tani (KUT), sempat didirikan oleh BJ. Habibie di tahun 1999. Namun, dalam perjalanannya, pinjaman tersebut mengalami kemacetan. Nasabah (petani) yang meminjam kredit ke KUT enggan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Mereka berpikir bahwa sudah seharusnya mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah secara cuma-cuma tanpa tuntutan untuk mengembalikan yang disertai bunga. Petani di Desa Suruh telah ketergantungan dengan bantuan pinjaman dari pemerintah. Hilangnya peran negara dalam menyediakan bantuan sarana produksi membuat mereka hidup semakin sulit.

Di samping adanya ketergantungan terhadap bantuan pinjaman/ kredit tani, mereka juga tidak bisa lepas dari penggunaan pupuk kimia. Dua hal yang petani tidak bisa melepaskan untuk memperoleh produksi beras adalah dana dan pupuk. Jika kedua hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka kehidupan rumah tangga petani akan terancam kelaparan akibat tidak memiliki pendapatan untuk

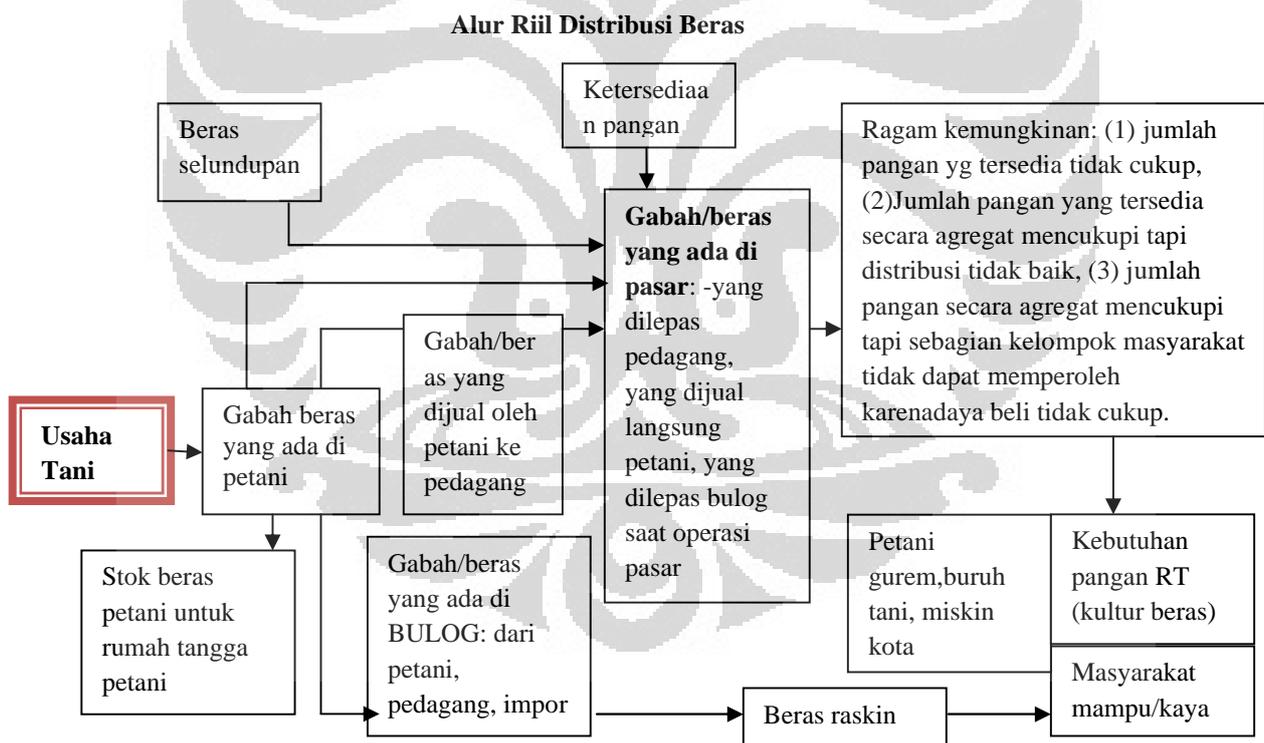
mengakses kebutuhan makan. Selanjutnya, jika kebutuhan makan pun tidak mudah dicapai, kebutuhan pokok lain seperti pendidikan untuk anak, kesehatan dan kebutuhan lain juga tidak akan didapatkan.

Oleh karenanya, di masa pemerintahan SBY tahap dua, bantuan untuk mempermudah petani dilakukan dengan pemberian subsidi pupuk sebesar 60%. Bantuan tersebut diberikan melalui kelompok tani. Kelompok tani sendiri memang salah satu pengorganisasian yang masih digunakan sebagai penyalur bantuan pinjaman dari pemerintah.

Kendatipun demikian, proteksi pemerintah terhadap petani sudah tidak ada lagi. Dominasi pasar menjadi penentu kebijakan harga gabah dari petani. KUD sudah tidak lagi berfungsi untuk menampung hasil produksi gabah dari petani karena wewenangnya telah dilepas oleh pemerintah. KUD mengalami pengalihan fungsi peran dari yang semula sebagai wadah aktivitas ekonomi petani Desa Suruh, kini justru menjadi tempat pembayaran rekening listrik. KUD mengalami mati suri. Pemasukan dana di dalam lembaga tersebut tidak lagi berasal dari dana pemerintah tetapi atas usaha dan inisiatifnya sendiri untuk mendapat keuntungan, yaitu dengan menjadikannya tempat penyaluran biaya pembayaran rekening listrik.

Lepasnya lembaga pemerintah menyangkut persoalan petani disebabkan oleh adanya perubahan di dalam tubuh lembaga pemerintah dalam urusan pertanian dan perberasan. Satu-satunya lembaga pemerintah, BULOG, yang memiliki peran dalam mengelola, menyediakan, mendistribusikan, dan mengendalikan harga telah dilepaskan. Berdasarkan hasil siding Kabinet Terbatas pada tanggal 13 Januari 2003, BULOG diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dimana tanggal 31 Mei 2003 harus sudah menjadi perusahaan ekonomi nasional dalam bidang pangan. Peralihan peran dan fungsi tersebut otomatis telah memutus lembaga-lembaga lain di bawahnya yang mulanya merupakan bentukan pemerintah. Dengan demikian, lepasnya KUD Desa Suruh dari perlindungan dan naungan pemerintah merupakan imbas dari adanya perubahan kebijakan baru mengenai tata kelola penyediaan pangan beras.

Dengan kata lain, peran-peran lembaga pemerintah untuk mengurus pertanian, khususnya sub sektor beras bukan lagi lembaga pemerintah yang non-profit melainkan perusahaan ekonomi nasional yang mencari keuntungan melalui pengadaan pangan. Keputusan ini berdasar atas intruksi presiden yang telah disepakati antara Indonesia dan WTO dimana WTO melarang pasar dalam negeri (Indonesia) untuk menutup pasarnya dari perdagangan asing. Dengan demikian, kran impor terus dibuka sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Adanya impor beras merupakan peluang bagi BULOG untuk mendapat keuntungan karena beras impor lebih murah dari beras dalam negeri. Selain itu, dengan dibukanya segala macam hambatan bagi komoditas asing untuk masuk ke pasar dalam negeri semakin menguntungkan BULOG untuk menerima stok pangan dari asing. Berikut adalah alur distribusi gabah atau beras yang melibatkan peran impor beras.



Pemetaan saluran pemasaran beras di atas diawali dari Bulog membeli gabah dari kontraktor baik dari yang berbadan hukum koperasi atau non koperasi, sebelumnya hanya dari koperasi. Mulai tahun 2000, para pedagang dan koperasi harus memenuhi berbagai persyaratan yang terpenting (Bulog, 2002): (1)

Berbadan hukum dan memiliki ijin usaha penggilingan, (2) Memiliki/ menguasai/ mengelola sarana dan prasarana pengolahan, antara lain pengeringan (lantai, jemur, *dryer*). Penggilingan padi (*husker, pulisher, blower*, ayakan menir) dan gudang. (3) Penggilingan yang dimiliki/ dikuasai mampu memproduksi beras sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. (4) Disamping itu, kualitas gabah (GKG) yang dibeli Bulog harus memenuhi kriteria seperti: kadar air (14%), butir hampa/ kotoran 3%, butir kuning/ rusak 3%, butir hijau/kapur 5%, dan butir merah 3%. Berdasarkan criteria tersebut, KUD di Desa Suruh sangat lemah dalam hal penyediaan fasilitas pertanian. KUD Desa Suruh tidak memiliki mesin penggilingan, area penjemuran gabah, penyediaan mesin teknologi pengolah gabah, dan fasilitas lain. Dengan demikian, posisi KUD dalam menampung produksi beras Desa menjadi terhambat selain memang otoritas pemerintah untuk melindunginya telah dilepaskan.

Selanjutnya, beras yang tersedia di Bulog sebagian besar digunakan untuk raskin dan stok nasional sebesar 1 juta ton untuk tiga bulan kebutuhan. Kebijakan ini yang dirasakan petani Desa Suruh bahwa bantuan pinjaman modal usaha pertanian telah tergantikan dengan adanya sembako murah dan raskin. Di samping itu, stok di dalam BULOG juga digunakan untuk kebutuhan mendesak serta untuk intervensi pasar (operasi pasar murni) di saat harga beras meningkat dalam waktu singkat melebihi batas wajar, misalnya bila kenaikannya lebih dari 30% dalam periode 1-2 minggu. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pemerintah dalam hal memberi perlindungan kepada petani hanya sebatas pada operasi pasar ketika harga beras naik ataupun anjlok tanpa ada solusi konkret untuk memberdayakan petani lebih maju.

Terlebih lagi dengan adanya gejala perubahan iklim yang secara nyata baru dirasakan petani di pertengahan tahun 2010 hingga 2011, pemerintah dirasa tidak pro aktif untuk melindungi petani. Gagal panen yang didapat pada panen 2010 dan 2011 tidak diantisipasi secara dini melalui pemberian penyuluhan dari Dinas Pertanian. penanggulangan dampak pun juga tidak disosialisasikan kepada petani.

Kurang berperannya pemerintah dalam memberikan proteksi terhadap petani melalui penyuluhan dan sosialisasi akan dampak perubahan iklim, secara tidak langsung terkait dengan perjanjian yang telah dibuat antara pemerintah dengan WTO. Kedua belah pihak telah menyetujui pengaturan terhadap perdagangan komoditas pertanian di dalam AoA (*Agreement on Agriculture*). AoA merupakan hasil perundingan WTO di Uruguay yang diberlakukan efektif sejak Januari 2005. Selain mengatur masalah perdagangan di sektor pertanian, AoA juga mengatur tentang bagaimana mengelola masa depan dikelola.

Tiga aspek yang diatur dalam kesepakatan AoA yang berdampak pada kebijakan pemerintah dan berimbas pada petani di Desa Suruh antara lain: (1) Perluasan akses pasar yang artinya bahwa hambatan-hambatan perdagangan yang selama ini ada, seperti bea masuk, akan dikurangi. Ini artinya, proteksi pemerintah terhadap produksi beras lokal akan hilang. (2) Pengurangan subsidi domestik. Pemerintah mencabut segala subsidi pangan yang selama ini diberikan kepada petani. Sebelum krisis ekonomi 1998, pemerintah melalui BULOG menjaga ketersediaan, distribusi serta stabilitas harga pangan. Setelah krisis, mekanisme harga yang selama ini mendapat campur tangan pemerintah melalui instrumen subsidi diserahkan kepada mekanisme pasar. (3) Pengurangan subsidi ekspor. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa menurut penuturan salah seorang informan, orientasi pemerintah sejak akhir tahun 1980-an telah beralih kepada kebijakan impor. Hal ini disebabkan oleh pengurangan subsidi yang diberikan negara kepada pelaku usaha yang melakukan ekspor produk pertanian. Alasan yang digunakan pemerintah adalah pengurangan berbagai fasilitas ekspor adalah petani diharapkan lebih berprioritas pada ketersediaan dan kecukupan kebutuhan dalam negeri.

Ketiga poin penting tersebut yang menjadi penyebab mengapa pemerintah selama ini tidak memberikan upaya perlindungan petani secara konkret menyangkut berbagai masalah yang dihadapi, khususnya dalam proteksi harga dan pencegahan dampak perubahan iklim.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, peneliti ingin menyatakan bahwa setiap kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah kepada petani tidak serta merta

secara murni berasal dari kepentingan dalam negeri. Sejak Revolusi Hijau, kepentingan pihak asing dalam mempengaruhi kebijakan pertanian sudah terjadi dan hal ini terus berlanjut hingga saat ini. Meskipun kebijakan di setiap fase pemerintahan mengalami perubahan, ketergantungan pemerintah terhadap pihak asing tidak bisa dilepaskan. Mengapa peneliti menyebutnya sebagai ketergantungan? Keterlibatan pihak asing yang dalam hal ini adalah *World Bank* dalam mempengaruhi kebijakan pertanian, dalam satu waktu belum menunjukkan sebuah ketergantungan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perubahan kebijakan yang terjadi di Indonesia menuntut adanya pihak asing untuk terlibat. Hal ini dikarenakan modal Indonesia dalam menjalankan program pembangunan mengalami keterbatasan. Satu-satunya jalan yang ditempuh untuk mendapatkan modal pembangunan adalah dengan melakukan pinjaman kepada pihak asing.

Namun, pada kenyataannya, pinjaman yang dimaksudkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ketahanan pangan justru menjebak masyarakat di level bawah kepada keterbelakangan. Segala macam bentuk kebijakan pemerintah telah membuat petani tidak berdaya, khususnya dalam hal mendapatkan akses bantuan pinjaman usaha. Semakin berjalannya waktu, petani-petani di Desa Suruh dalam hal memproduksi beras bukan menjadi semakin maju tetapi justru semakin terpuruk. Hilangnya peran pemerintah turut mengendurkan peran asosiasi di lingkup petani yang seharusnya dapat digunakan menjadi wadah untuk mendapat bantuan pinjaman.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Suruh, penulis menyimpulkan beberapa poin penting: (1) Ketika krisis pangan terjadi, konsep ketahanan pangan dipersempit hanya pada krisis beras sehingga pangan telah dikonstruksikan sebagai komoditas pangan beras meskipun tidak semua masyarakat Indonesia mengkonsumsinya sebagai sumber makanan pokok. (2) Ketahanan pangan yang dikonstruksikan ke dalam ketahanan beras tidak lepas dari unsur politik ekonomi di masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memiliki kepentingan politik untuk membangun kepercayaan rakyat dalam hal pembangunan ekonomi melalui target swasembada beras. Hal ini pun bukan semata-mata mutlak dari pemerintah saja melainkan masuknya intervensi pihak asing penyedia dana pembangunan (*World Bank*) yang turut menyumbang gagasan pembangunan di sektor pertanian. Presiden World Bank yang sekaligus pencetus Revolusi Hijau memperkenalkan produk bibit padi rekayasa genetika yang dapat dipastikan produksi pertanian Indonesia akan mencapai puncak surplus produksi. Hal ini pun turut dirasakan petani di Desa Suruh sebagai keuntungan yang diperoleh dari kebijakan Soeharto pada masa itu. Jelas, bahwa pemerintah bukan hanya ingin mensejahterakan rakyat dan petani melainkan juga ingin mendapat keuntungan dari sistem kebijakan yang dibuat. Persetujuan antara Indonesia dengan pihak penyedia modal pertanian merupakan wujud penting adanya kepentingan politis dari pemerintah untuk membangun kredibilitasnya di atas rakyat jelata. (3) Adanya kepentingan politik ekonomi tersebut mengakibatkan petani di Desa Suruh lebih berpihak pada kebijakan masa pemerintahan Orde Baru. Dengan kata lain, pemerintahan Orde Baru lebih baik dalam hal kebijakan ketahanan pangan yang berimplikasi pada kehidupan sosial ekonomi petani di Desa Suruh. (4) Petani di Desa Suruh, sejak diberlakukannya bantuan pinjaman modal dan subsidi sarana produksi di Orde Baru menjadikannya selalu bergantung pada pemberian bantuan pemerintah. Bantuan tersebut menjadikan candu bagi para petani penggarap dalam menjalankan proses produksi

beras. Mentalitas petani yang mulanya selalu didikte pemerintah dan diberi kemudahan bantuan pinjaman membuat mereka kurang kooperatif dengan setiap bantuan yang datang. Mereka enggan mengembalikan pinjaman/ kredit yang diberikan oleh lembaga pemerintah sehingga masalah ini menjadi hambatan utama bagi kelompok tani, KUD, dan KUT setempat sebagai sarana penyedia bantuan usaha. Dengan demikian, pemerintahan di masa Orde Baru secara sadar maupun tidak telah menciptakan kondisi ketergantungan petani terhadap bala bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Terbukti, ketika bantuan ini sudah tidak diberikan, mereka tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjalankan proses produksi beras. Hutang kepada rentenir menjadi satu-satunya jembatan untuk dapat mengakses segala macam kebutuhan rumah tangga petani. (5) Semakin menuju ke pemerintahan Reformasi, petani di Desa Suruh menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai produsen pangan beras. Pemerintah benar-benar sudah tidak lagi memberi kesempatan untuk memberi pinjaman modal usaha. Pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan ketahanan pangan nasional melalui kebijakan impor beras. Hal ini dikarenakan adanya kesepakatan dengan pihak asing untuk tetap membuka pasar dalam negeri. Implikasinya, petani di Desa Suruh tidak menyalurkan hasil produksinya kepada pemerintah untuk dijadikan stok persediaan pangan dalam negeri. Petani lebih memilih untuk menjual kepada tengkulak. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar lebih berkuasa dibanding dengan peran pemerintah dalam memberikan proteksi terhadap petani.

Keacuhan pemerintah pun semakin terlihat ketika Desa Suruh dilanda gagal panen akibat serangan wereng dan perubahan iklim. Pihak pemerintah tidak pernah lagi memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada petani terkait dengan permasalahan dan penanggulangan gagal panen.

Perubahan iklim yang menyebabkan merosotnya suplai beras di Desa Suruh tersebut merupakan masalah karena secara tidak langsung mempengaruhi kondisi ekonomi sosial rumah tangga petani. Biaya operasionalisasi yang telah dikeluarkan untuk proses produksi tidak dibarengi dengan tujuan hasil panen yang dicapai. Petani mendapat kerugian besar karena mereka gagal panen. Artinya, perubahan iklim yang dirasakan petani di Desa Suruh diakui petani sebagai

masalah. Walaupun demikian, petani tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang menyebabkan perubahan iklim terjadi meskipun bahaya yang ditimbulkannya dirasakan oleh mereka. Sesuatu yang pasti yang tidak dapat terelakkan berdasarkan dari hasil temuan lapangan adalah bahwa faktor alam yang merupakan faktor di luar kehidupan sosial bukan sesuatu yang dikotomis yang oleh karenanya harus selalu dipisahkan. Justru, belajar dari pengalaman ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa faktor fisik di luar kendali manusia merupakan hal yang sangat melekat dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya bagi mereka yang bergantung pada faktor alam.

Adanya bukti-bukti tentang faktor alam yang menyangkut masalah ketahanan pangan di Desa Suruh telah memberi jawaban bahwa masalah sosial bisa muncul dan disebabkan oleh adanya faktor di luar kendali manusia tersebut. Dengan demikian, sekali lagi ditegaskan bahwa masalah sosial yang dirasakan petani sebagai produsen pangan menjadi satu bagian dengan gejala-gejala yang bersumber dari faktor alam. Pandangan inilah yang diangkat oleh perspektif *critical realism* dalam menjelaskan persoalan sosial. Namun, berbagai macam permasalahan yang disebabkan oleh perubahan iklim tidak akan dapat diselesaikan tanpa melibatkan adanya *social justice*.

Di masa Reformasi ini *social justice* menjadi kendala, khususnya untuk konteks wilayah yang diteliti. Ketergantungan menjadi basis utama bagi tidak adanya *social justice* di lingkungan pertanian. Petani menjadi objek yang dikorbankan dalam mencapai kebijakan pembangunan dalam negeri. Kemudian, ketahanan pangan hanyalah digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan keuntungan politis bagi pemerintah.

Dalam hal menurunkan kebijakannya, pemerintah dari masa Orde Baru hingga Reformasi tidak lepas dari intervensi pihak asing. Revolusi Hijau yang diterapkan di Desa Suruh merupakan bentuk implementasi dari kesepakatan antara pihak pemerintah dan World Bank dalam memberi dan menerima bantuan dana. Dalam hal ini, petani hanya memiliki sebatas pengertian bahwa bantuan yang digulirkan dari pihak pemerintah di masa Orde Baru dalam wujud sarana produksi

merupakan wujud budi baik untuk menciptakan keberlangsungan rumah tangga petani. Di samping itu, munculnya ketergantungan tersebut secara perlahan telah mengubah sistem pranata di dalam masyarakat khususnya di dalam sistem pertanian. Peran perempuan di dalam proses produksi sebagian telah digantikan dengan teknologi canggih sehingga mereka tidak hanya kehilangan kesempatan kerja tetapi juga kehilangan mata pencaharian untuk menambah kebutuhan hidup keluarga.

Ironisnya, di tengah-tengah ketergantungan petani terhadap pemerintah dalam hal pemberian modal dan bantuan, muncul dominasi pihak asing yang mana Indonesia masuk menjadi anggota bagian di dalamnya, antara lain: IMF, World Bank, APEC, Afta, dan WTO. Kenyataan ini semakin menyulitkan petani karena kebijakan pertanian dan pangan semakin diintervensi oleh pihak-pihak tersebut. Mereka semakin kehilangan orientasi karena subsidi dan bantuan dari pemerintah sudah tidak lagi diberikan kepadanya. Mereka seperti berdiri di atas kaki sendiri untuk tetap melakukan produksi padi walaupun pemerintah sudah tidak lagi memihak keberadaan mereka sebagai produsen pangan. Meski demikian, kemandirian petani dalam proses produksi masih terbelenggu oleh keterbelakangan yang semakin tajam. Petani enggan menerima masukan dan menerima hal-hal baru dalam pertanian karena mereka merupakan golongan lapisan bawah yang memiliki kapasitas minim dalam menerima pengetahuan.

Petani semakin tidak berdaya karena beras dari luar yang masuk ke dalam negeri telah menjatuhkan harga gabah/padi yang mereka produksi. Bahkan, bantuan dari pemerintah untuk melindungi petani dari jatuhnya harga gabah tidak pernah dilakukan kecuali dengan melakukan operasi pasar khusus. Selibuhnya, antisipasi untuk menanggulangi imbas kebijakan pemerintah yang merugikan petani tidak pernah ada. Imbas dari kebijakan impor beras menjadi malapetaka bagi petani. Di saat pemerintah tidak memberikan bantuan kepada mereka, harga keperluan produksi pertanian terus mengalami kenaikan. Sementara itu, produksi gabah yang mereka hasilkan justru terjual dengan harga lebih murah dibanding dengan biaya yang mereka keluarkan untuk operasional.

Berdasarkan fakta di lapangan tersebut, ditemukan adanya relevansi dengan teori dependensi klasik dimana ketergantungan pemerintah terhadap pihak asing dalam hal memberi dan meminta bantuan justru tidak menciptakan kemandirian bagi petani. Kenyataan yang terjadi justru mereka terus mengharap adanya bantuan dari pihak pemerintah dengan minimnya upaya untuk membangun kreativitas supaya dapat bertahan dalam kondisi apapun. Terbukti bahwa di antara dua masa pemerintahan, mereka cenderung memuji masa pemerintahan Orde Baru yang dianggap pro terhadap kepentingan petani meskipun di dalam agenda-agenda pemerintah pada saat itu (pemberian bantuan sarana produksi) terselubung kepentingan politis yang tidak disadari oleh para petani.

Dengan demikian, relevansi penelitian ini dengan asumsi teoretik dependensi klasik sangat kuat dimana fakta di lapangan telah jelas menunjukkan bahwa pelapisan dan pranata sosial di level Desa tidak mampu bertahan dan bertarung dengan kepentingan modal asing. Mereka pun juga tidak mampu memanfaatkan modal asing tersebut untuk pembangunan berkelanjutan dan mandiri di Indonesia. Justru dengan adanya ketergantungan dari pihak asing untuk mendapatkan bantuan modal untuk pembangunan, petani yang dalam hal ini menempati pelapisan sosial bawah semakin tidak berdaya karena bergantung pada peran pemerintah dalam memberi bantuan.

Terakhir, kondisi-kondisi yang didapatkan melalui temuan lapangan, baik mikro maupun makro dari Orde Baru hingga Reformasi menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal membuat kebijakan tidak pernah lepas dari pihak asing. Ketergantungan pemerintah inipun juga dirasakan oleh petani dimana mereka selalu bergantung pada pemberian bantuan pemerintah. Di tengah-tengah kondisi ini, alam dan lingkungan sebagai faktor penting yang menyangkut ketahanan pangan mengalami kejenuhan. Secara kasat mata mereka menyadari bahwa wujud bantuan pemerintah melalui pihak asing sebenarnya bisa mengancam kehidupan mereka sebagai petani karena adanya kerusakan lingkungan. meskipun demikian, secara objektif mereka tidak bisa melepaskan diri dari bantuan tersebut. Inilah alasan mengapa peneliti menggunakan dependensi klasik untuk menjelaskan pembangunan ekonomi sektor pertanian yang dipadukan dengan *critical realism*.

Kedua teori ini sama-sama melihat bentuk ketergantungan yang bukan menciptakan suatu kondisi yang lebih baik. Justru, lebih mengarah pada ketidakberdayaan.

7.2 Rekomendasi

Dalam rangka menciptakan ketahanan pangan, peran pemerintah tidak bisa digantikan oleh mekanisme pasar sepenuhnya karena ketahanan pangan bukan hanya bentuk kuantitas produk pangan (beras) yang dapat didistribusikan ke seluruh masyarakat. Selama ini kebijakan pemerintah hanya mengarah kepada pencapaian keuntungan yang tanpa disadari hanya bertahan sesaat. Pembangunan wadah perekonomian di bidang ketahanan pangan, pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di sektor pangan yang berkelanjutan dan mandiri adalah dengan membangun kembali Koperasi (KUD) yang sekarang ini sudah dilepas oleh pemerintah sebagai akibat dari dominasi mekanisme pasar.

KUD difungsikan kembali menjadi koordinator bagi para petani untuk menanam komoditas pangan khususnya beras. Dalam kerangka kerjanya, model sosiologi ekonomi kelembagaan baru menjadi dasar bagi keberhasilan pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Pembangunan organisasi koperasi khususnya pertanian berguna untuk meningkatkan kekuatan produktif dan perbaikan status sosial ekonomi petani dan juga membantu pembangunan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Dengan catatan, pemerintah turut berperan dalam memunculkan kembali peran KUD ini.

Sebagaimana pernah terjadi di dalam lembaga BULOG di tahun 1995, pegawai BULOG diberi anugerah sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, pemerintah andil dan bertanggung jawab dalam memperhatikan masyarakat kecil. Kelemahan KUD di Desa Suruh terletak pada minimnya sumber daya manusia dalam mengelola lembaga pertanian. Hal tersebut juga dikarenakan latar belakang pendidikan anggota KUD yang mengelola sangat rendah.

KUD seluruh Indonesia harus bergerak dan berjalan secara serentak dengan visi misi yang sama dan bergandengan. Jika pemerintah memperlakukan anggota koperasi sebagaimana yang pernah dilakukannya untuk pegawai BULOG pada tahun 1995, sumber daya manusia yang andil di dalam lembaga perekonomian rakyat untuk menciptakan ketahanan pangan akan lebih baik. Dengan demikian, keuntungan yang didapat dari perbaikan sistem lembaga KUD ini antara lain: (1) Membuka lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia terdidik mengingat jumlah populasi masyarakat kian meningkat dan semakin meningkat pula jumlah pengangguran. Di sisi lain, kebutuhan pangan semakin meningkat pula (2) Status sosial ekonomi rumah tangga petani akan lebih baik karena ada wadah nonprofit yang menampung hasil panen mereka. Petani bukan lagi sebagai mesin produksi beras tetapi mereka lebih berperan sebagai *partner* di dalam lembaga KUD, khususnya yang memiliki andil penting dalam terciptanya ketahanan pangan.

KUD yang telah dikelola oleh Sumber Daya manusia terdidik yang juga diberi peran sebagai pegawai negeri sipil harus menyediakan sarana kebutuhan petani, seperti: kredit, pemasaran, perdagangan, pengolahan pertanian, dan penyuluhan. Selama ini, KUD di Desa Suruh hanya sebatas organisasi yang tidak memiliki saran prasarana penunjang bagi kesuksesan pengadaan pangan bagi masyarakat setempat.

Selain itu, kegagalan KUD di Desa Suruh terletak pada tidak adanya tanggung jawab dari nasabah (petani) yang meminjam kredit melalui Kredit Usaha Tani di KUD. Mereka menganggap uang tersebut sudah menjadi hak mereka sehingga tidak perlu untuk dikembalikan. Hal ini menyiratkan bahwa manajemen pengelolaan dan fungsi KUD di perdesaan belum berjalan dengan baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KUD harus senantiasa dirangkul sebagai monopoli penampungan hasil panen gabah dan beras dari petani.

Kemudian, penyaluran kredit petani dilakukan dengan membuat perjanjian antar kedua belah pihak, ketika panen tiba, gabah yang dijual ke KUD sekaligus digunakan untuk membayar tanggungan kredit petani. Permasalahannya sekarang adalah petani lebih memilih menjual gabahnya ke tengkulak dengan

alasan bahwa pemerintah dalam hal menetapkan harga beli kepada petani lebih rendah dibanding tawaran dari tengkulak sehingga petani segan menjual gabahnya ke pemerintah terlebih lagi pemerintah dalam menetapkan harga gabah basah dan gabah kering sama. Dengan demikian, petani rugi, padahal proses menjadikan gabah kering telah mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit.

Lebih lanjut, belajar dari pengalaman, dampak negatif dari modal asing dan pengurangan tarif impor telah membuat keterpurukan bukan menciptakan produktifitas yang mandiri dan keberlanjutan. Dengan demikian, pemerintah dalam membeli gabah dari petani harus menggunakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang disesuaikan dengan harga dasar.

Dalam jangka panjang perbaikan perekonomian nasional akan membaik karena di level daerah, provinsi dan nasional dibentuk federasi bisnis berdasarkan jenis usaha (kredit, pemasaran, perdagangan, dan pengolahan pertanian) secara terpisah. Di tingkat nasional selain dibentuk federasi bisnis juga dibentuk Dewan Nasional Koperasi Pertanian. Pembinaan pada sistem dan kinerja pemerintah dan manajemen penyuluhan pertanian harus optimal sehingga tidak hanya sekedar lembaga birokrat yang bersifat formalitas sebagaimana fungsi Dinas Pertanian di Desa Suruh. Di sisi lain, penyuluhan tidak hanya sekedar menyerukan kepada petani untuk membuat asosiasi pertanian sebagai wadah penerimaan sarana produksi bersubsidi dari pemerintah, seperti pupuk tetapi juga meliputi penyuluhan di berbagai bidang. (1) Kegiatan kolektif untuk perencanaan pertanian. Sebagai contoh kegiatan ini harus melibatkan seluruh unsur masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Federasi-federasi KUD di seluruh level harus digerakkan (Desa, Kabupaten, Provinsi, Nasional) dengan menyertakan anggota-anggota terdidik di dalamnya. (b) Kegiatan kolektif untuk mengkonsolidasi lingkungan hidup produksi pertanian. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan, pembekalan tentang lingkungan juga harus dimasukkan ke dalam agenda perencanaan pertanian, seperti tata cara penggunaan sarana produksi yang ramah lingkungan, pengenalan *back to nature* harus disosialisasikan mengingat perubahan iklim semakin mengancam ketahanan pangan (c) Kegiatan kolektif untuk pengembangan penelitian dan penyuluhan teknologi produksi yang melibatkan akademisi dan lembaga penelitian.

Universitas Indonesia

Terwujudnya masyarakat yang berkelanjutan dan mandiri tidak bisa melepaskan diri dengan pihak lain yang turut andil dalam menyumbangkan pengetahuan tentang dunia pangan dan pertanian. Lembaga-lembaga penelitian di bidang pertanian harus dilibatkan di dalam federasi KUD sebagai lembaga Riset di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan progress informasi tentang kondisi fisik, misalnya penelitian tentang dampak penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan bibit rekayasa genetika dalam jangka panjang seperti apa. Kemudian, setiap periode tertentu, lembaga riset ini secara kolektif menyuarkan hasil penemuan terbaru yang menyangkut tentang ketahanan pangan. Dengan demikian, eksese-eksese negatif dari produk pertanian yang mengancam keberlanjutan lingkungan dapat dengan segera ditanggulangi sebelum terjadi. (d) Kegiatan kolektif untuk pengembangan penelitian dan penyuluhan teknik-teknik manajemen pertanian. Upaya ini lebih menekankan pada kegiatan pembekalan dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan ketahanan pangan. Hal ini ditujukan untuk merangsang kreativitas petani sekaligus para akademisi untuk mengembangkan kreativitasnya di dalam menciptakan ketahanan pangan. Secara detail, langkah ini pun digunakan untuk mencapai keberlanjutan dalam bersaing dengan modal asing yang masuk ke Indonesia karena sektor ekonomi menengah ke bawah seperti pertanian lah yang mampu bertahan dan menopang negara sewaktu-waktu krisis terjadi (baik krisis di dalam negeri maupun krisis internasional).

Terlepas dari semua itu, hal-hal penting yang harus diperhatikan antara lain: (1) Dalam membangun ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan, rantai ketergantungan yang menjerat kehidupan sosial ekonomi masyarakat miskin dan petani harus segera diputuskan. Selain itu, pemerintah tidak menambah beban hutang negara untuk kepentingan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan pihak asing. (2) Sistem kerangka kerja Koperasi yang berbasis pada sosiologi ekonomi kelembagaan baru harus tetap terpantau oleh pemerintah supaya tidak menciptakan oligarki yang mengambil keuntungan atas monopoli beras. Di samping itu, petani-petani sebagai produsen beras harus selalu disosialisasikan secara intensif untuk memonitoring input dan output yang keluar masuk dari KUD. Setiap petani yang menyeter hasil produksi juga harus

Universitas Indonesia

tercatat di dalam asosiasi kelompok tani. Kemudian, plafon harga jual gabah/beras harus secara ketat dijaga oleh pemerintah sehingga niat-niat “kotor” segelintir orang yang berada di dalam lembaga dapat terpantau. Sistem sosiologi ekonomi kelembagaan baru ini memiliki struktur yang mana jika satu federasi di dalam struktur tersebut ingin membuat kongsi sendiri, kinerjanya tidak akan berjalan. Petani bertugas sebagai produsen. KUD merupakan lembaga penampung hasil produksi dari petani yang digaji pemerintah, tugasnya menerima produksi gabah dan juga sebagai penyalur ke konsumen. Jika petani tidak ingin bergabung menjadi bagian KUD, mereka tidak akan bisa memasarkan produksi gabah dengan harga yang dilindungi pemerintah. Sebaliknya, jika KUD melepaskan petani sebagai produsen gabah, KUD tidak akan mendapat gaji dari pemerintah karena peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai stabilisator, monitor, dan pelindung rakyat kecil serta petani.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER LITERATUR:

- Amang, Beddu dan M. Husein Sawit. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Era Reformasi*. 1999. Bogor: Penerbit Institut Pertanian Bogor.
- Amrullah, Sabarrudin. 2003. *Kebijakan Ekonomi Beras Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Urusan Logistik.
- Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1987. *Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri, dan ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Arifin, Bustanul. *Pembangunan Pertanian Indonesia Selama 60 Tahun (Dalam 60 Tahun Indonesia Merdeka, Jurnal Politika, Jurnal Empat Bulanan, Volume 1, No.2 Agustus 2005)*.
- Arndt, H. W. 1991. *Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Boer, Rizaldi. 2010. *Membangun Sistem Pertanian Pangan Tahan Perubahan Iklim (dalam Perubahan Iklim & Tantangan Peradaban: Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi)*. LP3ES: Prisma.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Second Edition). Sage Publications.
- Data Program Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, Tahun 2011.
- F, Nouval Zacky. 2010. *Petaka Politik Pangan Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Gregory, P.J (ed). 2005. *Climate Change and Food Security. Philosophical Transactions of The Royal Society*
- Jurnal Economica. 2011. Menyemai Asa dari Pangan Indonesia (Edisi 46-2011). Badan Otonom Ekonomi-FE UI.
- Jurnal Masyarakat. 2006. *Pengembangan Sosial dan Lingkungan Hidup* (Edisi Vol. XIII.No.2.Des-2006). Lab Sosio.
- Martel, Luke. 1994. *Ecology and Society an Introdustion*. Blackwell
- Mears, Leon A 1969. *An Operational Rice Policy for Indonesia* dalam EKI no. XVII. Jakarta: LPEM FE-UI.
- Mears, Leon A 1982. *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mears, Leon A. 1990. *Kebijakan Pangan dalam Anne Booth*. *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Mufti, Hikmah Rafika. 2005. *Kebijakan Pangan Pemerintahan Orde Baru dan Nasib Kaum Petani Produsen Beras Tahun 1969-1988*. SKRIPSI. UI Press

- Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto (ed). 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Neuman, W. Lawrence. 2003. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education.
- Pamuji, Heru. 2008. *Ekonomi: Krisis Pangan Di Negeri Agraris*. *Gatra* Nomor 20, 27 Maret 2008.
- Pearce, David et.al. 1997. *Economics and Environment in The Third World*. Great Britain: Institute for Environment and Development.
- Prabowo, Maksim D. *Berkaca dari Revolusi Hijau* (dalam *Globalisasi Pangan*, *Jurnal Renai Tahun VI No. 2*. 2006). 2006. Salatiga: Percik
- Putra, Rachmat Syahdjoni. 2004. *Perubahan Kebijakan Perberasan Indonesia dari Monopoli Bulog ke Mekanisme Pasar kaitannya terhadap pendapatan Petani: Suatu pendekatan persamaan Simultan*. Thesis: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas ekonomi Universitas Indonesia
- Rachman, Benny. 2002. *Konsepsi dan Performa Ketahanan Pangan: Concept and Performance of Food Security*. *Jurnal Agribisnis*.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Rusastra, I Wayan et.al. *The Impact of Support for Imports on Food Security in Indonesia*. CAPSA Working Paper No. 101: *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*.
- Santosa, Purbayu Budi. 2010. *Politik Beras dan Beras Politik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. The Hunger Project. (1989). *Ending Hunger: An Idea Whose Time Has Come*. New York: Praeger
- Soeratman (ed). 2008. *Krisis Pangan dan Ketidakberdayaan Pengelolaan Petani (Kasus di Desa Reksosari, Kecamatan suruh, Kabupaten Semarang)*. Percik: *The Institute for Social Research Democracy and Social Justice*.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. LP FE-UI
- Suwarsono dan Alvin Y.So. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia*. LP3ES
- Sutton, Philip W. 2007. *The Environment: A Sociological Introduction*. Cambridge: Polity Press.

SUMBER WEBSITE:

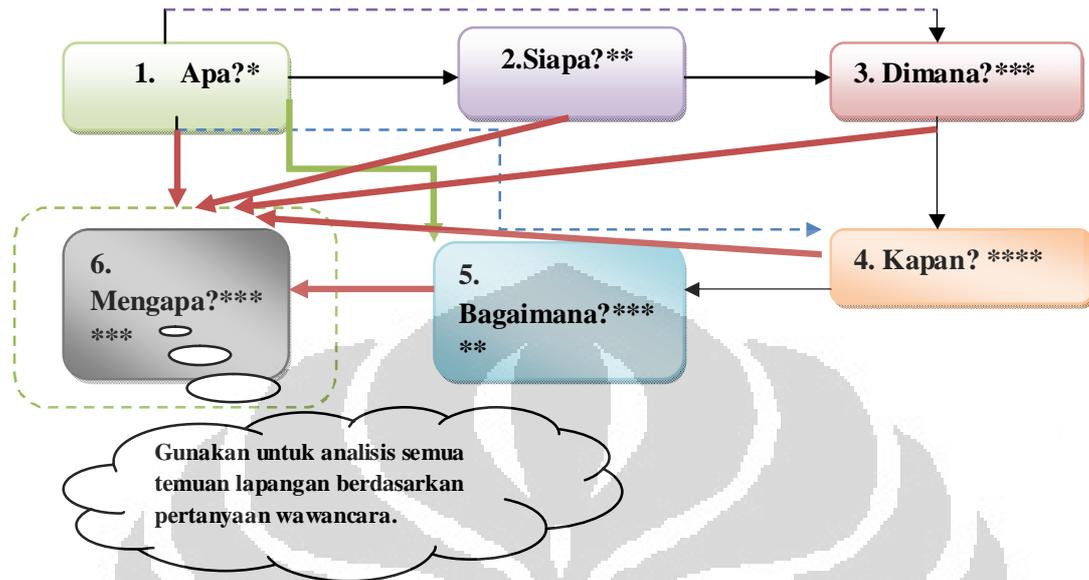
Asian Journal of Food and Agro-Industry .www.ajofai.info,2009

- Fanslow, Greg. 2007. *Rice Today: Prosperity, Pollution, and the Green Revolution*. www.irri.org
- Hunger Notes Departement. 2011 *World Hunger and Poverty Facts and Statistics*. www.worldhunger.org.
- Pusat Pengembangan Distribusi Pangan.(2001) “*Are Rice Prices Low?: A review of price trends in Indonesia since the crisis*”. www.deptan.go.id.
- Sen, Amartya. 1981. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* . www.dephut.go.id.
- Sumaryanto. (Peneliti pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian). *Diversifikasi Menjadi Salah Satu Pilar Utama*. www.dephut.go.id.

SUMBER SURAT KABAR:

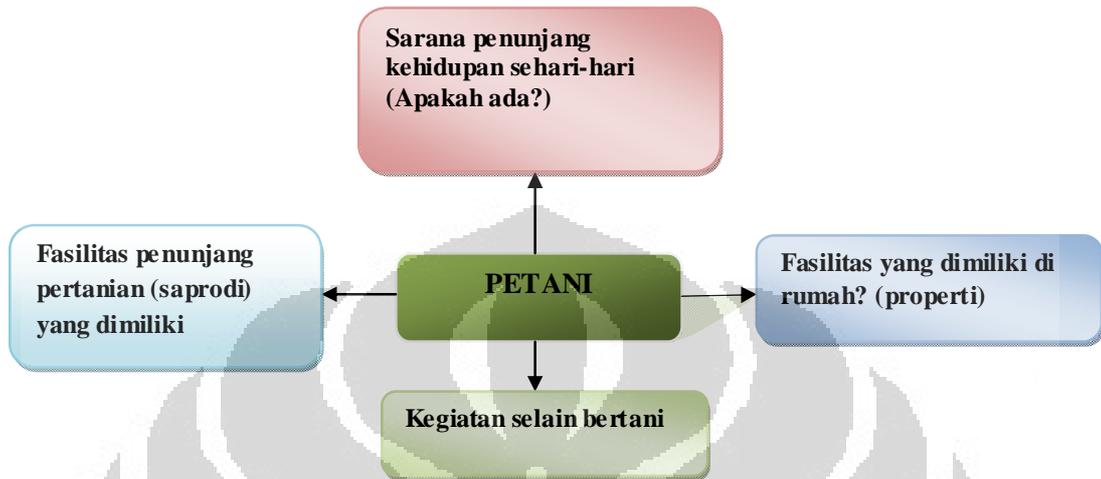
- ____Media Indonesia, 21 Februari 2011.Statistik Indonesia dan Data Sosial Ekonomi, BPS.
- ____. *Beralih Pangan Mencegah Pemanasan Global*. Media Indonesia, Selasa, 28 Juni 2011.
- ____.Edan ! 1,1, Juta Hektar, Laju Kerusakan Hutan Indonesia, Jumat, 27 November 2009, diakses dari <http://sains.kompas.com/read/2009/11/27/18190192/edan.11.juta.hektar.laju.kerusakan.hutan.indonesia>, pada Minggu, 28 Februari 2010.
- ____. *Ancaman Krisis Pangan di Depan Mata*. Kompas, Selasa, 11 Januari 2011.
- ____. *Melepas Jerat Kekacauan Alam*. Kompas, Selasa, 11 Januari 2011.
- ____. *Hanya Tiga Komoditas yang Harganya Turun: Dana Perlindungan Sosial Bisa Dibandingkan Sekaligus buat Tiga Bulan*. Kompas, Sabtu, 22 Januari 2011.
- ____. *Lumbung Beras Tak Terurus, Petani Harus Berjuang Sendiri*. Kompas, Senin, 26 September 2011.
- Cahyaningrum, Siwi Yunita. *Melepas Jerat Kekacauan Alam*. Kompas, Selasa, 11 Januari 2011.
- Khomsah, Ali. *Ketahanan Pangan Vs Jalan Tol*. 2008. Kompas, Kamis 20 November 2008.
- Metha, Arianti Dian. 2003. Beras Memproduksi buruh tani. Republika 25 Mei 2003.
- Husodo, Siswono Yudo. *Indonesia Krisis Pangan?* Kompas, Sabtu 22 Januari 2011.
- Yustika, Achmad Erani. 2011. *Krisis Pangan dan Daya Beli Masyarakat*. Media Indonesia, 21 Februari 2011.

PEDOMAN WAWANCARA



- * : -.... Yang dirasakan dari Orba hingga Reformasi (terkait Ketahanan Pangan)
 : -.... Yang dilakukan pemerintah untuk petani terkait (Kebijakan Revolusi Hijau, Industrialisasi, kebijakan impor, masalah krisis, masalah gejala perubahan iklim)
 -.... Tugas utama .. (lembaga, instansi_ Dinas Pertanian, Kelompok Tani, KUD, KUT)
 -....Manfaat penggunaan.... (pupuk, pestisida, teknologi canggih)
 -.... Penyebab..... (Gagal panen?)
- ** : -.... Yang memerintah
 : -.... Yang mengelola
 : -.... Diuntungkan
- *** : - Pemasaran pangan
- **** : -Kebijakan... berlangsung (Revolusi Hijau, industrialisasi, kebijakan impor)
 -Perubahan terjadi
- ***** : -Kebijakan Orba (terkait Ketahanan Pangan)
 -Kebijakan Reformasi (terkait Ketahanan Pangan)
 -Nasib petani di Orba dan Reformasi
 -Kehidupan petani ... (relasi antar petani, pemilik dan penggarap, petani dengan pemerintah)

PEDOMAN OBSERVASI

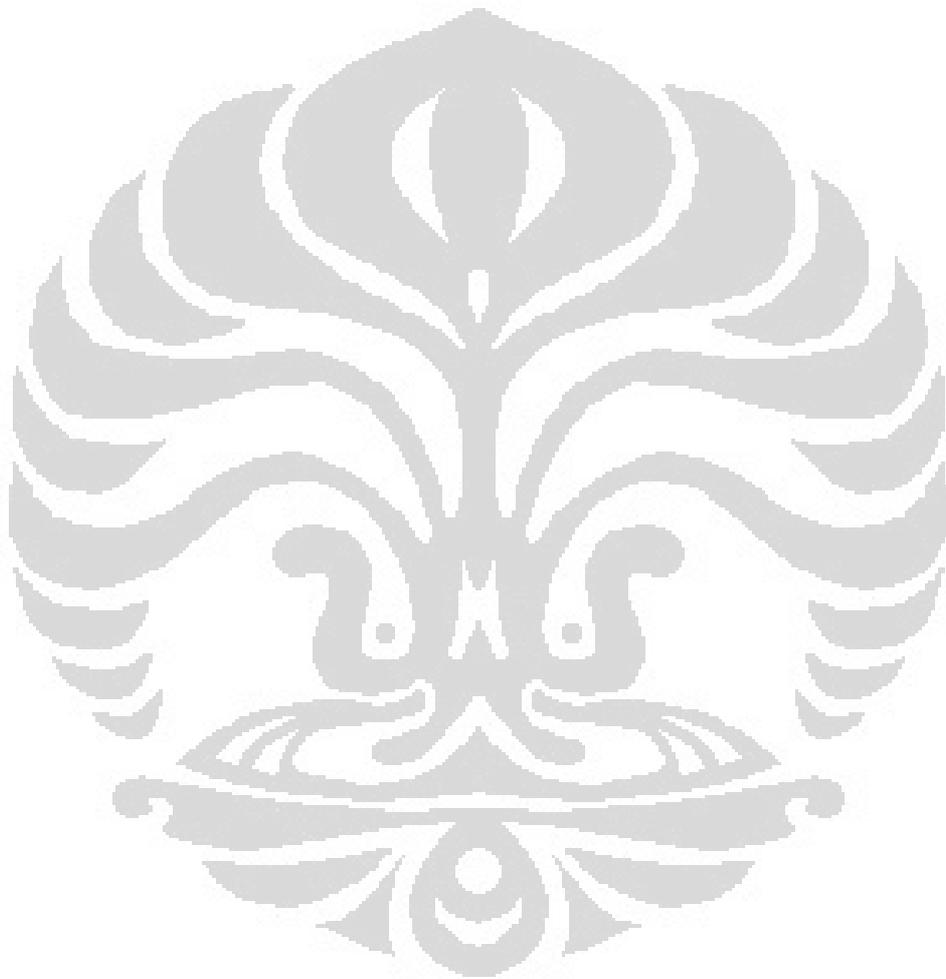


| Hasil Wawancara | Kategorisasi Isu |
|--|--|
| <p>Bapak Mahyudin (Petani sejak 1985) Rabu, 27 Juli 2011; 11:04 -11:41 Pertanian di Era Orde Baru dan Reformasi</p> | <p>a. Kondisi petani Era Orde Baru: -Tahun 1986, konversi lahan (industri ke agraris) mulai dirasakan petani.</p> |
| <p>P : “<i>taon lapan puluh nam?</i>” (“tahun delapan puluh enam?”) I : “<i>yo taun kuwi lah. Itu mulai banyak industri. Banyak lahan-lahan sawah</i>” (“ya, tahun itu lah”) P : “konversi lahan?” I : “<i>he’eh.. itu yang dijadikan industri. Sehingga, hasil panen menurun beralih ke... jadi bukan.. bukan... agraris, tapi beralih kee.....</i>” P : “industri” I : “ke industri... La, mulai dari itu, Indonesia sudah mulai <i>anu ..</i> sudah mulai tidak mengekspor beras lagi. Jadi, perhatian ke petani pun menjadi” P : “menurun?” I : “ya, menurun. Otomatis kan mengejar keuntungan.. sehingga, kebijakan-kebijakan pemerintah, sudah banyak yang di...tinggalkan. Termasuk kelangkaan pupuk. E... apa itu..?? ya kebijakan-kebijakan tani tu <i>kaya-kaya</i> (sepertinya) sudah tidak lagi dipedulikan.” P : “Tahun 2009??” I : “(mengangguk-angguk) itu mulai terasa lagi bahwa Indonesia <i>ora</i> (tidak) mengekspor, tapi <i>mengempor</i> pangan. Lah, dengan adanya... keluh kesah petani tidak ada kenaikan pangan di petani, <i>mangka</i> (padahal) produksi operasionalnya tu kan meningkat. Operasional petani kan meningkat. Jadi kebijakan pemerintah <i>ora ana</i> (tidak ada). <i>Lha, kuwi</i> (Nah, itu) mulai tahun sembilaaan.dua ribu <i>pira ya</i> (berapa ya?) Dua ribu <i>pira</i> (berapa) ya, presiden.. SBY kedua <i>ki lho</i> (itu lho)” P : “2009” I : “itu mulai berpikir untuk menghidupkan petani kembali. Diantaranya mensubsidi pupuk..” P : “O...” I : “teruss, mensubsidi sebagian benih bibit.” P : “Gratis?.. Eh” I : “Ya Gratis, tapi kan ... kalo pupuk <i>ndak</i>. Sebenarnya harga pemerintah itu, kalo pupuk, itu hampir dua ratus per sak, dua ratus ribu. Terus, dijual pada petani delapan puluh ribu.. per sak. Yo, delapan puluh ribu per sak. Harga pemerintah sebetulnya kan ya dua ratus. Kurang lebih dua ratus ribu per sak nya. Lha... kelebihanannya dari delapan puluh ribu disubsidi pemerintah. ” P : “Lha, paaas, <i>pas jamane pak Soeharto niku, program panca usaha tani niku merugikan napa menguntungkan petani</i>” (.. waktu zaman Soeharto, program Panca Usaha tani justru merugikan petani atau sebaliknya?) I : “Panca Usaha Petani?” P : “Njih (iya), wonten BIMAS (yang ada BIMAS)... ” I : “yo.. ituuu.. itu.. ya istilahnya petani itu tenang. Harga kan stabil. Dan pada waktu itu juga disubsidi <i>karo</i> (oleh pemerintah). Termasuk BIMAS itu ya, Bimbingan Massal dulu itu istilahnya</p> | <p>-Mulai tahun itu pula kebijakan ekspor beras tak lagi diberlakukan.</p> <p>-Kebijakan-kebijakan pertanian mulai ditinggalkan (imbasnya ke kelangkaan pupuk, salah satunya) dan keuntungan menjadi tujuan utama dari pembangunan. Oleh karenanya, prospek industri menjadi kekuatan di atas pertanian.</p> <p>- Kebijakan Revolusi Hijau salah satunya diturunkannya panca usaha tani. Untuk mendukung operasionalisasi petani, BIMAS (Bimbingan Massal) dari pemerintah menurunkan bantuan dana sebesar kurang lebih Rp. 800.000,- per hektar tanpa dipungut bunga. Pinjaman tersebut dikembalikan setelah panen. Namun, kenyataannya, pada masa panen, justru petani mengalami puso karena serangan hama. Sehingga, petani-petani tidak dapat mengembalikan</p> <p>-Kondisi petani relatif tenang karena harga gabah dan beras stabil.</p> <p>-Kebijakan harga untuk pangan lebih stabil dah kebijakan tersebut lebih didominasi oleh pemerintah.</p> <p>b. Kondisi petani Era Reformasi: - Tahun 2000-an, kebijakan pertanian tidak lagi kepada tujuan ekspor tetapi justru impor beras.</p> <p>- Tidak ada kebijakan</p> |

| | |
|--|---|
| <p>dipinjami uang, jadi per hektar itu kurang lebih berapa itu ya? Per hektar itu dipinjami 800 ribu <i>ya'e</i> (mungkin)”</p> <p>P : “<i>Niku</i> (itu) dalam jangka waktu?”</p> <p>I : “per hektar, pada waktu Pak Harto. Eh, Gusdur <i>opo.... Bar Pak Harto ki sopo to</i> (setelah Pak Harto itu siapa?)”</p> <p>P : “Habibie”</p> <p>I : “Ya, mulai dari Pak Harto. Dari Pak Harto itu di... istilahnya di.. pinjami tanpa bunga. Itu per hektar kalau <i>nggak</i> salah 800rb.”</p> <p>P : “dalam jangka waktu setaun apa...”</p> <p>I : “dalam waktu... nanti panen mengembalikan. Tapi karena petani pada waktu itu diserang hama dan tikus. Sehingga, dalam tempo yang ditentukan pemerintah, petani terpaksa tidak bisa mengembalikan. Terus, lama, itu tidak ditarik kemudian pada waktu pemerintahan Gusdur dinyatakan, ‘hapus’ . jadi petani-petani yang dulu pinjam, karena memang pada waktu itu betul-betul petani itu apa istilahnya, hasilnya di di di makan hama. Akhirnya pada waktu pemerintahan Gusdur, dinyatakan ‘hapus’. Pada tahun berapa itu? Ya kalau Pak Habibie tidak menyentuh pada petani. Baru Gusdur itu, setelah dinyatakan ‘dihapus’, oh <i>anu ding</i>, pada waktu Gusdur dipinjami lagi. Pinjaman lagi. Pinjaman modal untuk petani. Penggarap lah. Petani penggarap. Oh..Gusdur <i>po sapa kae</i> (atau siapa ya?)? oya Gusdur.. Gusdur.. <i>Bar kuwi</i> (setelah itu) sampai sekarang, <i>yo koyo ngono kuwi</i> (ya seperti itu) selalu mendatangkan dari luar.”</p> <p>P : “Setelah kebijakan impor beras turun, petani seperti apa?”</p> <p>I : “Petani ya rugi. Petani kan dengan adanya impor beras harga dalam negeri tidak ditentukan oleh pemerintah tetapi itukan oleh malah ditentukan pasar. Termasuk penebas-penebas itu kan pasar. Jadi pemerintah itu cuman memberikan standar harga-harga <i>plafon</i> harga ‘sekian’. Tapi kenyataan, pemerintah tidak berani beli, yang beli ya pasar tadi. <i>Ngono</i> (begitu).”</p> <p>P : “<i>mboten wonten perlindungan saking pemerintah?</i>” (tidak ada perlindungan dari pemerintah?)</p> <p>I : “Tidak ada. Ya kebijakan pemerintah itu cuman kalau harga sembako naik. Operasi pasar. Itu, kebijakan pemerintah kan Cuma itu kan. Cuma itu. Harga melambung, beras datang lagi. Operasikan pasar. Paling-paling itu kan cuman berlangsung selama satu bulan <i>thok</i> (saja).”</p> <p>P : “Berarti pasar lebih mendominasi daripada pemerintah?”</p> <p>I : “iya. iya”</p> <p>P : “zaman Pak Harto....”</p> <p>I : “Pak Harto masih stabil... stabil... jadi harga pangan, operasional petani masih... masih stabil.”</p> <p>P : “<i>terus, menawi sakniki, iklim niku mboten saged dititoni, upaya pemerintah untuk mengatasi priipun?</i>” (Terus, kalau sekarang, iklim tidak dapat lagi ditentukan secara pasti, upaya pemerintah untuk mengatasinya seperti apa?)</p> <p>I : “Tidak ada. Sepanjang ini tidak ada. Terus sing istilahe bimbingan petani itupun tidak ada yang memberikan pengarahan. Jadi, pengarahan itu merupakan hasil jerih payah kelompok petani itu sendiri yang meminta pada pembimbing tani. <i>Opo kuwi jenenge</i> (apa namanya?)..</p> <p>P : “Penyuluh?”</p> <p>I : “Iya, penyuluh. Selama ini <i>sing jenenge</i> (yang namanya) penyuluh pertanian itu hanya sebatas formalitas saja. Itu dari dulu. ”</p> <p>P : “<i>Mriki lak wonten Dinas Pertanian toh?</i>” (disini ka nada Dinas</p> | <p>pemerintah yang melindungi petani. Dalam hal ini upaya untuk membantu kemudahan operasionalisasi petani dalam memproduksi gabah/beras.</p> <p>-Biaya operasionalisasi petani naik tetapi seimbang dengan hasil yang diperoleh. Dengan kata lain, biaya input semakin naik tetapi output yang dihasilkan tidak meningkat.</p> <p>-Pemerintah SBY yang kedua, mulai ada perhatian terhadap petani, yaitu dengan subsidi pupuk sebesar 60% (Harga pemerintah Rp. 200.000, dijual ke petani Rp. 80.000).</p> <p>-Pada masa pemerintahan Gus Dur, petani penggarap diberi pinjaman.</p> <p>-Setelah pemerintahan Gus Dur berakhir, kebijakan pertanian selalu mendatangkan pangan dari luar. Dampaknya, petani dirugikan karena harga tidak lagi ditentukan oleh pemerintah tetapi ditentukan oleh pasar termasuk juga para penebas (tengkulak).</p> <p>-Pemerintah, dari aspek kebijakan hanya memberi standar harga tetapi kenyataan di lapangan, pasar yang menentukan harga pemerintah tidak berani membeli.</p> <p>-Perlindungan dari pemerintah selain dari menetapkan standar harga, operasi pasar jika harga sembako naik.</p> <p>-Pasar lebih dominan dalam mengatur kebijakan pertanian dibanding negara.</p> <p>c.Keberadaan Lembaga-Lembaga Pertanian & entitas.</p> <p>-Tidak ada upaya dari Lembaga Pertanian untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan gagal panen.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>Pertanian?)</p> <p>I : “<i>Ndak</i> jalan itu. Mereka hanya <i>pinter</i> teorinya saja. Tapi praktiknya <i>nol</i>. Nggak pernah ada <i>opo kuwi jengenge</i> (apa itu namanya) penyuluh dari Dnas Pertanian turun melihat langsung kondisi lapangan seperti apa.”</p> <p>P : “Kalau harga beras naik?”</p> <p>I : “<i>dadine</i> (jadi) kalau petani harga beras naik, otomatis bahan beras termasuk gabah kan naik...”</p> <p>\P : “Nggih” (ya)</p> <p>I : “Tapi kenaikan itu ya cuman kenaikan...jadi, beras naik, harga beras naik, operasionalpun naik. Ongkos termasuk ongkos kuli-kuli itu ya naik. Termasuk harga pupuk juga naik. Gitu lho. <i>Wong</i> pupuk itu sebelum harga-harga <i>pakan</i> (pangan) naik, itu pupuk lebih dulu naik.”</p> <p>P : “O,....”</p> <p>I : “Ditambah dulu kenaikan BBM, otomatis semua harga naik, ongkos traktor naik. Sedangkan <i>hasile</i> wong tani, <i>kenaikane</i> seimbang. Dadi, kenaikan operasional dan kenaikan hasil produksi itu malah ora imbang. Pemerintah menentukan harga beras ‘segini’ tapi <i>kenyataane</i> pemerintah <i>yo ra tuku, ngono lho</i> (ya tidak beli, gitu lho). <i>Dadi</i> kan <i>cuman koyo bengok-bengok thok ‘kuwi regane semene’</i>(jadi kan hanya seperti teriak-teriak saja. ‘itu harganya segini’), tidak memberikan solusi. <i>Nak</i> (kalau) memberikan solusi kan <i>jane</i> (seharusnya) KUD-KUD <i>disabuk’i</i> (diikat) dengan petani.”</p> <p>P : “KUD...”</p> <p>I : “KUD sekarang itu tidak diberi wewenang untuk membeli gabah dari petani <i>ngono ora</i> (begitu, tidak) cuman <i>fungsi</i> mengelola listrik <i>karo opo neh...</i> (dengan apa lagi)”</p> <p>P : “<i>Ket riyin?</i>”(dari dulu..?)</p> <p>I : “iya”</p> <p>P : “Bab (tentang) Kelompok Tani?”</p> <p>I : “<i>Waaa yo suwe ki</i> (wah ya lama ini)... <i>ketuane Lek Ali</i>. Dia hanya tau sebatas organisasi petani <i>lo</i>. Per Dusun ada kelompok Tani.”</p> <p>P : “Menurut pendapat <i>njenengan</i> (anda) <i>pripun</i> (bagaimana) supaya ketahanan pangan tetap terjaga. <i>Napa malih wonten gejala perubahan iklim?</i> (terlebih lagi muncul gejala perubahan iklim)”</p> <p>I : “ Ya, kalau menurut saya, aparat pemerintah seharusnya ‘turun’ memberikan suatu... apa ya istilahnya, bimbingan kepada masyarakat tentang masalah: (1) iklim yang akan datang begini begini, kalau iklim yang terjadi begini, akan terjadi apa istilahnya wereng berkembang atau <i>piye</i> (bagaimana) gitu lalu pemerintah memberikan... ‘seharusnya anda-anda menanam padi jenis ini’ itupun diusahakan. Jangan hanya memberikan gambaran tapi <i>golek a dhewe-dhewe</i> (cari saja sendiri- sendiri). Itukan rata-rata begitu... la sedang petani itu kan sungkan suruh cari... yang ada itu <i>ngendi</i> (dimana) gitu kan <i>wegah</i> (tidak mau) kan. instan. maksudnya, kalau dalam negeri ini harga pangan naik, otomatis pemerintah <i>tuku</i> (beli). Jadi tidak memberikan... ke depannya tu biar stabil tu <i>piye</i> (bagaimana) gitu nggak ada. Instan <i>thok</i> (saja). <i>Kaya-kaya</i> (sepertinya) diserahkan pasar sepenuhnya. Kebijakan-kebijakan itu diserahkan pasar sepenuhnya.”</p> <p>P : “Pemerintah...”</p> <p>I : “Pemerintah tahunya.. <i>ora rekasa untung</i> (tidak susah tapi untung). Instan tadi. <i>Lha kuwi</i> (la itu). Pelaku.. yang untung pelakunya.</p> | <p>-Tidak ada bimbingan dan pengarahan dari instansi pemerintah yang memiliki wewenang atas kebijakan pertanian.</p> <p>-Kelompok Tani yang berjerih payah meminta pembimbing tani untuk menangani masalah pertanian.</p> <p>-Dinas pertanian tidak menjalankan perannya. Penyuluh tidak langsung melihat kondisi permasalahan lapangan sebenarnya.</p> <p>d. Relasi antara Petani pemilik dan petani buruh.</p> <p>-petani pemilik adalah orang yang menyewakan lahan sawahnya kepada orang yang ingin menggarap sawah. Sistem keuntungan dibagi dua. Sistem ini biasa disebut dengan sistem bagi hasil. Perbandingannya adalah 50%:50%. 50% untuk petani penggarap masih dipotong setengahnya untuk biaya operasional (termasuk menyewa buruh untuk mengolah lahan: mencangkul, menanam, menyiangi, manen, dan lain-lain)</p> <p>e. Ketahanan Pangan:</p> <p>- Aspek Manusia (Kebijakan).</p> <p>-Pemerintah tidak mau susah tetapi mendapat keuntungan (pelaku industri pangan yang mendapat untung). Ketika harga pangan naik, pemerintah yang telah menetapkan standar harga tidak mau membeli hasil panen. Justru pemerintah mengambil langkah instan untuk mengimpor pangan ke dalam negeri.</p> <p>- Aspek Pengadaan Pangan:</p> <p>Kondisi puso menyebabkan harga gabah dan beras dan operasional naik. Upah untuk</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>P : “Pelaku... pelaku... pelaku pangan. pelaku industri pangan.”</p> <p>I : “Nasib petani...”</p> <p>I : “kamu kan bisa <i>survey</i> sendiri, ya gitu gitu itu hidupnya.”</p> <p>P : “Perbaiki infrastruktur?”</p> <p>I : “saya kira, ndak ada tho ya. Kalau petani <i>yowes ngono ngono kuwi</i> (ya seperti itu). Yang <i>nggarap</i>, panen, sirkulasinya kan <i>ngono kuwi</i> (seperti itu). <i>Mula generasi-generasi nom tu nggak ada</i> (Oleh karenanya generasi-generasi muda tidak ada ..).. penerus petani tu nggak ada. <i>Iki sing tuwa sing nggarap-nggarap sawah ki yo sing tuwa-tuwa</i> juga. (yang menggarap sawah ya yang tuwa-tuwa saja).”</p> <p>P : “walah.... Sawahnya habis?”</p> <p>I : “hahahaha..... kalau dulu nggak. Petani gairah ya rata-rata gitu kan, masalahnya cukup untuk makan. Sekarang kan jelas. Andai kata, keadaan pemerintah itu, sekarang untuk ijin pengeringan lahan basah ke lahan kering itu sulit. Memang <i>saike ngono</i> (sekarang begitu). <i>Yo iki merga wes mentok</i> (ya karena sudah mentok). Dalam negeri sudah susah untuk makan. Tidur di rumah. ... pabrik Tapi <i>ngono</i> (begitu) itu hanya laku sebagian. Nyatane yo masih ada juga sawah kering yo okeh. Kurangnya kedisiplinan untuk menegakkan hukum. Memang ya sulit. Kurang kesinambungan. Tidak berkesinambungan. Del del del del wes.. yo yoyoyo...udah. Itu menyatakan, peraturan baru lagi... yoyoyoyo... wes bar.. sulit. dadi wes ora. Cara piye yo... cara pembuat hukum dan penagakannya ora sinkron. Contoh Jakarta mbiyen kan ‘bebas asap rokok’, yang merokok, denda, dihukum, waaaaa gek pirang anu kan baru berapa anu kan, wes peeeet.. ngono. Terus sebagai pengemudi sing melanggar nganti nubruk wong ngono kae, wah ito iyoooo.. polisi-polisi kan banyak memberikan pengarahan-pengarahan. Nak wes peeeet peeeet. Tidak ada kesinambungan. Kesinkronan nggak ada. Entah apakah memang menteri-menteri SBY ngono atau ora nduwe wibawa apa piye ra mudeng aku. Semua-semua ngono. Dalam menegakkan hukum, mandeg setengah-setengah.”</p> <p>P : “Mbah, pernah mboten, petani-petani merasakan kados sapi perah ngoten?”</p> <p>I : “maksud e?”</p> <p>P : “Dados kebijakan industrialisasi, sektor pertanian niku diperes untuk input industri niku lho”</p> <p>I : “Saya kira ndak ada.. andaikata ada itu pasti ada kesepakatan antara pelaku dan pelaku industri sendiri.”</p> <p>P : “Bab pupuk. Menapa pupuk niku berefek ke dampak perubahan iklim ingkang sakniki dipunraosaken?”</p> <p>I : “Yo semua pasti ada efek. Tapi efek ki ora berakibat yang fatal ki ora. Umpamanya sekarang pupuk urea diimbangi dengan TS atau pupuk kandang. Seharusnya kan diimbangi gitu. Tapi karena berhubung operasionalnya dianut seperti apa... interupsi pemerintah, petani nggak bisa gerak apa-apa. Cuman, tanah berubah jadi keras. Tanahnya itu tidak kelet, ora mawur gitu lho.. ya kayak model kelet ngono ki opo jenenge. Dadi ora iso mawur. Ya ada pengaruh tapi tidak berefek fatal, gitu ndak.”</p> <p>P : “Tanggung jawab pengelola.....”</p> <p>I : “yang mengelola sawah, nanem, sampai manem. Petani itu mengelola, jadi sub-sub e.. sub sub sing tandur, nandur, yo sing buruh-buruh wi... upahnya orang tandur borongan. Per hektar 500.000. Lha kalau sing buruh matun, itu setengah hari itu 15.000. makan, ongkos 15.000.”</p> | <p>kuli, harga pupuk, naik. Malah, pupuk lebih naik dulu sebelum harga pangan naik. Belum lagi jika BBM naik. Tentu biaya traktor akan juga naik. Permasalahannya adalah, ketika biaya operasional atau input pertanian melambung, petani tidak bisa melakukan apa-apa karena harga telah ditentukan pemerintah. Namun, pemerintah selaku aktor yang memiliki wewenang atas penetapan standar harga tidak berani membeli. Justru pasar yang membeli. Seharusnya, dengan kondisi seperti itu, pemerintah bersikap konsisten. Harga pangan yang telah ditetapkan dibelinya melalui lembaga-lembaga terkait, misalnya ada hubungan dengan KUD. Sehingga hasil panen tidak jatuh dan diintervensi penuh oleh pasar.</p> |
|--|---|



| Hasil Wawancara | Kategorisasi Isu |
|---|---|
| <p>Bapak Asrori (Petani sejak Tahun 1970) Rabu, 27 Juli 2011; 18:46 – 19:10 Pertanian di Era Orde Baru dan Reformasi</p> | <p>a. Kondisi petani Era Orde Baru: -Pupuk sulit didapat. -Hasil panen dibeli oleh para tengkulak.</p> |
| <p>I : “... Wong wedok gur ewang-ewang thok. Padhane matun ngono kuwi nak wong wedok. Karo ndak tanduur. La nak wong lanang sing macul karo sing ngurusi banyu-banyuu barang ngono kuwi..” (Perempuan hanya membantu saja, misalnya seperti <i>matun</i> (menyiangi rumput) dan menanam benih padi sedangkan laki-laki mencangkul tanah sampai dengan mengurus sistem pengairan sawah.) </p> | <p>b. Kondisi petani Era Reformasi: -Pemerintah dan tengkulak tidak sama dalam hal menentukan harga. Pemerintah menentukan harga gabah kering giling sedangkan tengkulak biasanya membeli gabah basah.</p> |
| <p>P : "Ceritakna, bab gaweanmu nang sawah Pakdhe" (Ceritakan tentang pekerjaan anda di sawah)</p> | <p>-Toko-toko tidak memperjualbelikan pupuk karena pemerintah telah menyediakan subsidi pupuk.</p> |
| <p>I : “Ngonu kuwi digawe karo tengkulak-tengkulak kok. Ngonu kuwi o. kene ki ndak pas panen murah. Ndak wes bar panen larang. Ngonu kuwi kok. La piye, yo digawekke ngono tho. Tani yo dadine mblesek tho.... Mula angger bar panen, gabahe murah, ngko nak wes bar panen larang. Ngko gabah larang nak wes bar panen. Nak ngene ki gabah dituku murah. Pokok’e angger panen, gabah ki murah. Ning ndak pas wes ora panen yo larang meneh. La nak angot beras dimurahke lek pupuk e larang yo bangkrut tho wong tani..” (Bertani itu tak lepas dari tengkulak-tengkulak. Ketika panen, harga murah tetapi setelah itu harga kembali naik. Petani dijatuhkan. Setelah panen, harga gabah murah setelah itu mahal kembali. Gabah mahal setelah usai panen. Kalau sekarang ini gabah dibeli murah. Jadi, setiap kali panen, gabah dibeli murah oleh para tengkulak tetapi setelah panen usai harga gabah naik. Kadang harga beras dimurahkan tetapi harga pupuk mahal sehingga petani rugi.) </p> | <p>-Pemerintah tidak pernah bertindak apa-apa. Pemberian harga gabah basah dan kering sama. Malahan, lebih tinggi harga yang ditetapkan oleh tengkulak. Sehingga, petani dirugikan. -Tengkulak menentukan harga beli gabah basah. -Pemerintah tidak pernah membeli hasil panen petani.</p> <p>c. Keberadaan Lembaga-Lembaga Pertanian & entitas. -Tidak ada penyuluh yang turun ke lapangan untuk melihat kondisi secara langsung</p> |
| <p>P : “Awit kapan ngono kuwi?” (sejak kapan (harga pupuk mahal?))</p> | <p>d. Relasi antara Petani pemilik dan petani buruh. - Petani penggarap yang berperan mengolah hingga memproduksi pangan. sehingga, semua biaya operasional ditanggung 100% oleh petani penggarap.</p> |
| <p>I : “Opo-opo larang ki tahun piro tho? Mes e larang ningo berase murah ki taun piro tho? Pirang tahun?” (Apa-apa mahal itusejak tahun berapa sih? Pupuk mahal tapi beras murah itu tahun berapa ya?)</p> | <p>-Petani penggarap dan pemilik membagi hasil panen 50%:50% dari hasil penjualan dengan tengkulak.</p> |
| <p>P : “awit krisis tahun 1998? Awit Pak Harto Lengser?” (Sejak krisis ekonomi 1988? Ketika Pak Harto Lengser?)</p> | <p>- Petani penggarap juga yang menjual hasil produksi/ panen gabah kepada tengkulak. Petani pemilik hanya ‘meminjami’ laha. Selebihnya untuk urusan proses produksi, petani pemilik tidak tahu kecuali masalah pembagian hasil penjualan</p> |
| <p>I : “Iyo, he’ehh... “ </p> | |
| <p>P : “... beras seko luar dilebokke rene ngono lho. Terus pari-pari kene kesaing ngono lho, mudeng?” (.beras dari luar negeri dimasukan ke dalam negeri sehingga menyebabkan beras dalam negeri tersaingi. Apakah anda tau tentang hal itu?)</p> | |
| <p>I : “Yooo ambleg. ngko lik medun ngono lho”</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>(Ya harga beras jatuh kemudian harga turun)</p> <p>P : “ tengkulak’e....?”</p> <p>I : “yo akeh.. yo angger didhuni beras ko kana, kene midun yo rugi. Karo anu, upahe le ngglidhig ke..” (Tengkulak banyak. Kalau beras dari luar didatangkan kesini, harga beras disini turun. Belum lagi petani harus mengeluarkan biaya untuk nyewa buruh)</p> <p>....</p> <p>I : “Nak kene anu,, o,... tebasan o. .. tebasno sawah..” (disini menggunakan sistem tebasan.)</p> <p>...</p> <p>I : “Ora... soale pemerintah karo tengkulak ki ora pada..” “Kadang pemerintah nak ngke’i rega lak anu oo.. kering giling o... la ning lak tengkulak wi lak sawah teles...ning yo kuwi.. mes larang.. toko-toko ra eneng. tukune wes didumi ko KUD, Pak Bayan..” (Pemerintah dan tengkulak tidak sama dalam hal menentukan harga. Kadang pemerintah menentukan harga gabah kering giling sedangkan tengkulak biasanya membeli gabah basah. Sementara itu, harga pupuk mahal, toko-toko tidak ada yang menjual. Belinya dengan pemerintah melalui KUD, Pak Kadus)</p> <p>P : “piro mbayare?”</p> <p>I : “wolung puluh lima” (Harganya delapan puluh ribu)</p> <p>P : “kanggone..”</p> <p>I : “kuwiiii 4ha.. setengah kintal.” (Pupuk setengah kuintal digunakan untuk 4hektar.)</p> <p>.....</p> <p>P : “... Apa ora enek penyuluhan ko kecamatan tho?”</p> <p>I : “Ra eneng kene, penyuluhane yo no kecamatan kono. Tegese medhun nang lapangan no ra ono.” (Disini tidak ada penyuluhan dari kecamatan. Maksudnya, tidak ada penyuluh yang turun ke lapangan untuk melihat kondisi secara langsung)</p> <p>P : “melu kelompok tani pora?” (Apakah anda tergabung dalam anggota kelompok tani?)</p> <p>I : “Yo melu... sing jenenge KUT mau lho” (Ya, namanya KUT)</p> <p>....</p> <p>P : “Eling pora wayah krisis ekonomi 1988? Tani dho piye?” (Apakah anda ingat masa-masa Krisis Ekonomi 1998?)</p> <p>I : “Yo rumangsaku padha wae. Kadhang sengsara kadhang yo ora. Nak gek panen yo ra sengsara o . ning nak ngene ki yo sengsara.. wong urung panen. Ning jane ngene iki apa-apa yo gampang. Pokok e nak ono duit. Dadi pupuk barang wi yo gampang ora koyo jaman ndhisik. Iki yo gek ntes dingel-ngel kok. Pupuk barang wi ra didumi. Dadi tani kuwi kekurangan pupuk ngono wi lho . Taun pira ya? Taun rong ewuuuuuuuu....</p> | <p>gabah.</p> <p>e.Ketahanan Pangan: Aspek Manusia (Kebijakan).</p> <p>-Tengkulak banyak. Jika beras dari luar didatangkan ke dalam negeri, harga beras disini turun. Belum lagi petani harus mengeluarkan biaya untuk nyewa buruh. Sehingga hasil penjualan produksi beras dengan biaya total pengolahan tidak sesuai. Petani mengalami kerugian.</p> <p>-Petani dijatuhkan.</p> <p>-Pemerintah tidak pernah turun ke lapangan untuk membeli hasil panen petani. Justru tengkulak yang setiap kali menebas/ membeli gabah (hitungannya adala per luas sawah.)</p> <p>- Aspek Pengadaan Pangan:</p> <p>-Perempuan (biasanya isteri penggarap) memiliki peran membantu, misalnya seperti <i>matun</i> (menyiangi rumput) dan menanam benih padi sedangkan laki-laki mencangkul tanah sampai dengan mengurus sistem pengairan sawah.</p> <p>-Pekerjaan sambilan menjadi alternatif lain selain bertani.</p> |
|--|---|

(Menurutku sama saja. Kadang susah kadang tidak. Kalau sedang panen tidak susah tetapi kalau seperti saat ini (puso) jadi susah karena belum panen. Tetapi seperti saat ini juga bisa dikatakan mudah asal ada uang. Pupuk misalnya, sekarang ini relatif lebih mudah dibanding dengan jaman dulu. Sebenarnya belum lama ini pupuk juga dipersulit. Pupuk tidak dibagi. Jadi petani kekurangan pupuk.....)

-
- P : “ ndak jagak ke tani thok ngono iso urip pora pakthe?”
(Apakah bisa bertahan hidup hanya dengan bertani?)
- I : “yo isoh.. isoh.. anggere panen no yo isoh.. ge mangan ngono yo isoh”
(Ya bisa, asalkan panen ya bisa makan.)
-
- I : “pemerintah ora tau napa-napa. Nak melindungi, rego teles karo garing ki padha. Kaya-kaya ki dhuwur penebas mau, ngono lho”
(Pemerintah tidak pernah bertindak apa-apa. Pemberian harga gabah basah dan kering sama saja. Malahan, lebih tinggi harga yang ditetapkan oleh tengkulak.)
-
- I : “yo sing untung yo penebas mau.. nak tani yo ora.. la nak wes anu.. ge apa... ge Ngglidhig ake.. ge mburohake wi lho, ngko lik ‘semene semene’ metune ra nyocoki yo rugi.. Iha nak gabah payu wi kadhang suk entuk turahan sithik”
(yang untung adalah tengkulak. Petani tidak untung, karena biaya operasional yang digunakan untuk memenuhi input tidak cocok atau tidak menghasilkan output yang sesuai. Keuntungan hanya sedikit)
-
- I : “contone ya, padhane rong yuta, yo sak yuta edhing.. ngono.. dadine nak buruh ngono untung sing nduwe... ora ragad , ora opo...”
(Misalnya harga gabah basah dibeli tengkulak dua juta. Pembagiannya, penggarap dan pemilik masing-masing mendapat satu juta. Jadi yang diuntungkan adalah pemilik sawah karena dia tidak mengeluarkan biaya sama sekali.)
-
- P : “Pakthe.. la nak jaman e Pak Harto nebas gabah teles oleh?”
(Apakah sistem tebas oleh tengkulak di Zaman Soeharto diperbolehkan?)
- I : “yo entuk o..”
(Ya, boleh)
- I : “Yoo o... wi awit mbiyen o ...awit kowe rung ono...”
(Sistem tebas sudah ada dari zaman dulu sebelum kamu lahir)
-
- P : “Ora tau didol KUD Pak?”
(Apakah hasil padi tidak pernah dijual ke KUD?)
- I : “Orak...”
(Tidak..)
- P : “”Dijipuk i pemerintah?
(Pemerintah membelinya?)
- I : “Ora... yo penebas-penebas kuwi..yo pokok e diparani nang sawah.. ki rego piro, ki rego piro...”
(Tidak pernah, penebas-penebas (tengkulak) itulah yang

mendatangi kami ke sawah saat saat menjelang panen untuk menentukan harga belinya)

.....
P : “Ia bedane mbek ndisik?”

(Kalau begitu, perbedaan dulu dengan sekarang apa?)

I : “Yo padha wae.. ning anggere anu.. panen. La ning kan ana sambenane to ya.. pokok e beras ra tuku”

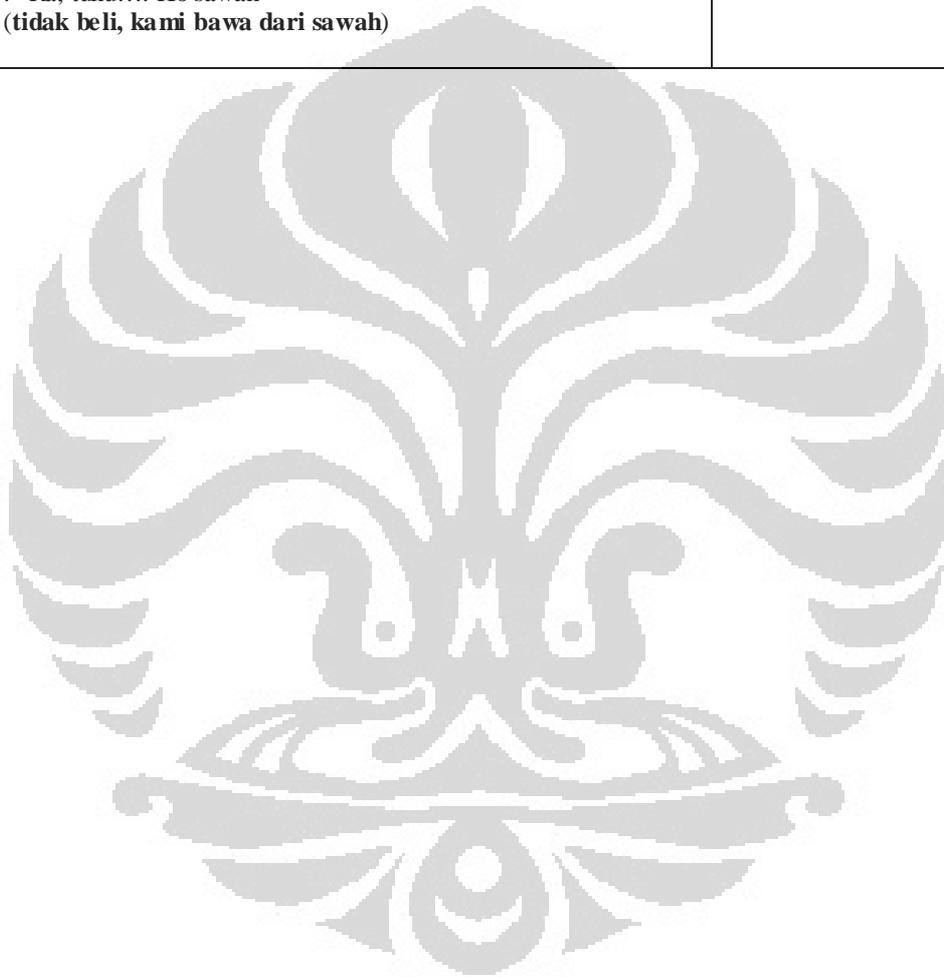
(Sama saja, asalkan panen tetapi kan kami punya pekerjaan sambilan. Yang pasti, kami tidak membeli beras.)

P : “dadi beras...”

(Jadi, beras...)

I : “Ra, tuku.... Ko sawah”

(tidak beli, kami bawa dari sawah)



| Hasil Wawancara | Kategorisasi Isu |
|--|--|
| <p>Bapak Rujito (Petani sejak 1975) Rabu, 27 Juli 2011; 19:24 - 1948 Pertanian di Era Orde Baru dan Reformasi dan Kelompok Tani</p> | <p>b. Kondisi petani Era Orde Baru:</p> <p>f. Kondisi petani Era Reformasi:</p> |
| <p>...</p> <p>P : “Lha zaman Pak harto ndhisik rak ora ono leren-lerenan barang tho..” (Apakah di Zaman Soeharto sistem tanam padi ada fase ‘mengistirahatkan tanah’?)</p> <p>I : “ora ono ek” (Tidak ada)</p> <p>P : “Setaun panen ping pindo nganti ping telu” (Dalah waktu setahun panen bisa dua atau tiga kali?)</p> <p>I : “Ora ono” <i>(istri: yo ra iso tho nduk, le mae dhewe-dhewe)</i> “ping telu ki daerah Banyubiru, Mbahrawa¹ ki lho” (Tidak ada, tanahnya berbeda. Disini setahun panen dua kali)</p> <p>P : “La saiki mbek ndhisik bedane opoPakdhe? Sejahtera ndi ngono lho” (Perbedaan sekarang dengan dulu mengenai kesejahteraan masyarakat bagaimana?)</p> <p>I : “Sejahtera.. Sejahterane..Sejahterane ki yo nek..yo tak kira imbang-imbang nduk. Pemerintahane pada” <i>(Istri: “Yo beda, ndisik ra eneng sembako”)</i> “O. iyo, ndhisik ra eneng sembako. Bedane lak jaman Pak Harto piye ya.. keto’e .. lak saiki ono bantuan-bantuan..” (Kalau masalah sejahtera, saya kira seimbang. Pemerintahannya sama saja. Oiya, dulu tidak ada sembako kalau sekarang ada. Perbedaan Zaman Soeharto lebih kepada kalau sekarang banyak bantuan-bantuan.)</p> <p>P : “Bantuanne..” (Berapa apakah bantuannya?)</p> <p>I : “Yo kuwi mau.. sembako.. BBM” (Sembako dan BBM)</p> <p>P : “Opo? BBM?” (BBM itu apa?)</p> <p>I : “Sing entuk telung atus.. ning saiki wes ra metu. Jamane Pak sapa wi?” (Dapatnya tiga ratus ribu tetapi sekarang sudah tidak ada lagi.)</p> <p>...</p> <p>P : “Kelingan po ra jaman krisis?” (Apakah ingat ketika krisis ekonomi 1998?)</p> <p>I : “Alah krisis palan rekasa. Gabah malak an murah ik.” (Krisis malah membuat susah. Harga gabah murah)</p> <p>P : “Hmm..”</p> <p>I : “Gabah palan anjlok.. Regane palan ndek ilo.. seka negara jane dhuwur ya.. ning ternyata nang kene malah murah” (Gabah malah anjlok padahal dari negara patokan harga naik tetapi ternyata pada kenyataannya, harga di lapangan jatuh.)</p> <p>P : “La terus piye?” (Lalu..)</p> <p>I : “Tetep didol...Dadi ana permainan harga ngono”</p> | <p>-Terdapat bantuan sembako dari pemerintah dan juga uang. Namun, bantuan berupa uang tidak berkelanjutan. Bantuan uang hanya diberikan tiga kali (tiga ratus ribu, seratus lima puluh ribu dua kali)</p> <p>-Saat krisis ekonomi, harga gabah jatuh.</p> <p>g. Keberadaan Lembaga-Lembaga Pertanian & entitas.</p> <p>-BULOG susah menurunkan bantuan, khususnya uang.</p> <p>-Pemerintah tidak pernah turun untuk membeli gabah/beras secara langsung kepada petani.</p> <p>-Adanya kelompok tani hanya berfungsi sebagai akses mendapatkan pupuk bersubsidi.</p> <p>-Kelompok tani pernah menjadi tempat kegiatan simpan pinjam untuk kebutuhan bertani tetapi terkendala pada beberapa anggota yang meminjam tidak mengembalikan.</p> <p>h. Relasi antara Petani pemilik dan petani buruh.</p> <p>- Petani penggarap menyewa buruh dengan upah lima belas ribu dari pagi hingga siang. Kalau mereka sampai sore ditambah lima ribu.</p> <p>i. Ketahanan Pangan:</p> <p>- Aspek Manusia (Kebijakan).</p> <p>-Saat krisis ekonomi 1998, pemerintah mematok harga pangan tinggi tetapi kenyataannya harga di lapangan justru rendah. Ada semacam permainan harga</p> <p>- Bulog tidak pernah membeli beras langsung kepada</p> |

¹ Ambarawa

| | |
|---|---|
| <p>P : “sing nguasai...” (Yang menguasai..)</p> <p>I : “Sing menguasai penebas-penebas kuwii...” (Yang menguasai penebas-penebas itu)</p> <p>P : “Bulog?”</p> <p>I : “Ora... Bulog ki suk ngene yaa... Nak midun I, duite suk angel. Bulog ki suk rana reene.. dadi angel. Nak tertib ngono yo Bulog mlaku.” (Tidak. Bulog setahu saya tidak berjalan dengan baik, bantuan uang susah keluar karena birokrasi)</p> <p>...</p> <p>I : “Ora tau njikuk nang petani. Njikuk e oprasi pasar. Tukune nang pasar-pasar wi lho. Ning rasane kan beras ko bulog jadi Raskin ngono kae ya... kuwi rasane kan beda. Kan diobati.. Gen awet ki lho.. Gen ra pangan uler ilo..Jane berase ki beras apik ning nak diobati kan.. karepe negara no apik. Wong gen awet.. ning wong-wong dho nggregetake..” (Bulog tidak pernah membeli beras langsung kepada petani. Mereka membeli beras melalui operasi pasar. Beras yang ditabung di Bulog sebenarnya adalah beras raskin yang rasanya tidak seperti hasil panen karena diberi obat supaya awet. Tujuannya negara tidak salah karena kalau beras tidak awet bisa dimakan serangga)</p> <p>...</p> <p>P : “La nak buruh-buruh e piye?” (Bagaimana dengan buruh?)</p> <p>I : “O.. nak ngono wi, esuk tekan bedug, mo las.. la ngko ndhak ashar tengah telu ka ewes dho mentas, rong puluh... tambae gur mang ewu” (Petani penggarap menyewa buruh dengan upah lima belas ribu dari pagi hingga siang. Kalau mereka sampai sore ditambah lima ribu)</p> <p>...</p> <p>P : “la nak matun?” (Bagian yang menyiangi ?)</p> <p>I : “Ra ono, matun ra ono.. maene maen semprot. Ning anu.. nak semprot sukut ki gejalaane anu.. kendalane ora apik. Apik e manual. Manual ki matun tangan wi lho. Nak semprot, mes e sing kendel.. Nak ra kendel parine dho mati. Saiki kidul kana gek diserang wereng. Wereng karo tikus.” (Tidak ada. Kami lebih memilih memakai obat semprot gulma tetapi memang dampak yang disebabkan tidak baik. Sebenarnya bagus manual. Bila menggunakan obat semprot gulma, pupuk yang digunakan harus banyak kalau tidak, tanaman padi bisa mati)</p> <p>P : “Penyuluhan ngono ana po ra?” (Bagaimana dengan penyuluhan?)</p> <p>I : “Ana ko kecamatan” (Ada di Kecamatan)</p> <p>P : “ngapa wae?” (Apa saja yang dilakukan?)</p> <p>I : “Kapan kae gur kabar thok. Jare kon njipuk obat wereng nang kecamatan ngono yo nyatane kene ora ono. Ora ono sing njipuk, soale anu... ora dikandhak ake sing jelas. Penyuluhanne gur liwat monitor <i>cangkem</i> siji siji ngono. Adu cangkem dho pethuk nang</p> | <p>petani. Mereka membeli beras melalui operasi pasar. Beras yang ditabung di Bulog sebenarnya adalah beras raskin yang rasanya tidak seperti hasil panen karena diberi obat supaya awet. Tujuannya negara tidak salah karena kalau beras tidak awet bisa dimakan serangga</p> <p>- Aspek Pengadaan Pangan: Mereka lebih memilih memakai obat semprot gulma supaya tanaman padi tidak diganggu tanaman parasit tetapi memang dampak yang disebabkan tidak baik. Sebenarnya bagus manual. Bila menggunakan obat semprot gulma, pupuk yang digunakan harus banyak kalau tidak, tanaman padi bisa mati.</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>ndalan. Ora dilumpukake. Kudune jane orang ngono ya...petani diklumpukke nang kelurahan kae..”</p> <p>(Beberapa waktu yang lalu hanya memberi kabar wacana saja. Katanya waktu itu telah ada atau disediakan obat pembasmi hama wereng. Tetapi tidak ada satupun yang mengambil karena tidak diberitahukan secara jelas. Penyuluhan hanya melalui ‘monitor mulut’. Disampaikan ke orang melalui tatap muka. Jadi, tidak ada perkumpulan atau dikumpulkan di kelurahan)</p> <p>P : “Opo ra ono kelompok tani?”</p> <p>(Apa tidak ada kelompok tani?)</p> <p>I : “Ana... Ora ono kelompok tani, mes ra iso medun nduk saiki..”</p> <p>(Ada, Kalau tidak ada kelompok tani, pupuk tidak bisa turun)</p> <p>P : “La kelompok tani manfaate opo?”</p> <p>(Manfaat apa yang diperoleh dengan adanya kelompok tani?)</p> <p>I : “tuku mess thok. La terus piye nduk, la nggregetake ik. Entuk bantuan duit malah ra tau dibalekke nang simpan pinjam ik. Hahahaha...”</p> <p>(Hanya membeli pupuk. Dulu pernah digunakan sebagai tempat bantuan simpan pinjam tetapi malah uang-uang yang dipinjam tidak dikembalikan.)</p> <p>...</p> <p>P : “Sing jenenge mes ra eneng nang toko-toko...”</p> <p>(Dengar-dengar pupuk tidak diperjualbelikan di toko-toko?)</p> <p>I : “Ra eneng.. Ra ono ..iyo.. disubsidi pemerintah, nak ra disubsidi pemerintah.. Ora ono kelompok tani angel.”</p> <p>(Tidak ada memang. Pupuk disubsidi dari pemerintah. Kalau tidak ada kelompok tani susah mendapatkan pupuk.)</p> <p>...</p> <p>I : “... nak ra nek kelompok tani yo ra metu tenan o’ mes e ki..metune lak bangsane kuwi.. mes majemuk. Mes e oplosan ning ranganggo PUSRI. ZA, Fotka, karo HCL, karo opo no wi jenenge... ngko rupane jambon..”</p> <p>(Kalau tidak ada kelompok tani, pupuk benar-benar tidak bisa kami dapatkan.)</p> | |
|---|--|

| Hasil Wawancara | Kategorisasi Isu |
|---|---|
| <p>Ibu Eny Sri Widayati (Penyuluh Pertanian selama 25tahun) Rabu, 28 Juli 2011; 16:58 – 17:30 Ketahanan Pangan dan Kelompok Tani</p> | <p>- Keberadaan Lembaga-Lembaga Pertanian dan Kelompok Tani. Penyuluh pertanian di dalam Dinas Pertanian Kecamatan merupakan tangan panjang dari Dinas Pertanian.</p> <p>- Tidak ada kekuasaan hirarki di dalam lembaga penyuluhan pertanian. semua memiliki tugas</p> |
| <p>P : “Bu, yang pertama saya ingin mengetahui kelembagaan pertanian...”</p> <p>I : “He’eh... di Kecamatan itu yang pertama ada koordinator pelaksana Dinas. Koordinator Pelaksana Dinas situ tugas pokok dan fungsinya, dia e....di dalam program-program dinas, terutama di Dinas-Dinas pertanian Kabupaten Semarang itu kan ada tiga Bidang; Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan. Jadi tugas pelaksana dinas di tingkat kecamatan istilahnya e..tangan panjang.. e.. me..</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>tangan panjang memfasilitasi program yang ada di Dinas Kabupaten ke Kecamatan. Itu yang pertama. Kemudian ada yang dinamakan koordinator penyuluh pertanian. itu singkatannya KPP. Koordinator Penyuluh Pertanian yaitu e... mengkoordinir program-program penyuluhan. Hanya penyuluhannya saja. Sementara yang program dinas itu KPD, kemudian program penyuluhannya itu KPP, Koordinator Penyuluh Pertanian. <i>Upama</i> tugas di lembaga kelompok tani GAPOKTAN itu ada penyuluhan, terus ada kelompok-kelompok yang ingin mengajukan bantuan, permohonan, itu masuknya di KPP dulu, baru nanti program teknisnya di KPD. terus kemudian dibantu oleh teman-teman penyuluh. Teman-teman penyuluh pertanian tanaman pangan, penyuluh kehutanan, dan yang ketiga PHLTBPT. Jadi kalau struktur di Kecamatan tidak ada. Semua fungsional. Semua mendapat jabatan yang sama, yaitu penyuluh.”</p> <p>P : “berarti horizontal..”</p> <p>I : “Iya.. itu e... secara horizontal tidak ada atasan, bawahan. Jadi tidak ada pimpinan. Mereka menjabat sebagai jabatan fungsional, begitu. Cuma yang membedakan adalah wilayah kerja. Kebetulan di kecamatan itu ka nada tujuh belas desa. Sehingga, e,... Kebijakan saya ya di bagi habis.”</p> <p>P : “Setiap desa....”</p> <p>I : “Setiap desa saya bagi... ada 101 kelompok tani pria dewasa, kemudian ada 101 nya.. eh kok 101.. ya pokoknya 101 itu kelompok tani pria dewasa, wanita, dan remaja. Sementara masih ada kelompok tani kelompok tani yang masih belum di ... kukuhkan, disahkan. Sehingga, program proyek yang dilakukan oleh kelompok tani harus dilampiri dengan piagam pengukuhan kelompok. Saya tidak mau... sebuah kelompok mengajukan bantuan <i>maaf njih</i> nanti muncul kelompok-kelompok baru. Saya nggak mau seperti itu. Kelompok itu harus sudah ada. Sehingga, secara legalitas diakui dan itu menjadi binaan penyuluh pendamping. Karena bantuan itu kan nggak ada..”</p> <p>P : “Terus kegiatan yang pernah di lakukan ke level petani ”</p> <p>I : “Ke level petani itu kunjungan. Kunjungan itu bisa terbagi menjadi dua. Yaitu kunjungan ke kelompok dan kunjungan petani. Kemudian ada sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu. Sekolah pengelolaan lapang terpadu .. kebetulan untuk 2011 ini ada 28. 10 untuk SLPTT padi hibrida, 12 untuk SLTPTT padi nonhibrida, 5 untuk e...SLPTT jagung. Sementara, ada 1 SLTPTT kacang tanah, tetapi ini kayanya dibatalkan <i>njih</i>. Karena yang dinamakan dana pemerintah untuk yang namanya e.. kacang tanah ini hanya disubsidi saprodinya, dan swadainya beli. Itu program yang mengarah ke sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu, sebagai sistem pembelajaran di petani. Jadi di kelompok tani, itu ada materi SLPTT yang harus disampaikan ke petani. Seorang penyuluh pertanian pendamping harus menyampaikan e... dengan mengumpulkan.. mengumpulkan petani sekitar 25 sampai 30 orang. Di situ dia diberikan suatu pembelajaran, e..bagaimana yang namanya budidaya baik tanaman padi maupun tanaman lain. Sementara itu ada 1 ha yang diberi e..... itu kan diperuntukan tanaman padi non itu 25ha, itu yang 25ha diberikan bantuan e.. gratis e.. <i>bendi</i>, kemudian diambil e... diambil 1ha lagi diberi sarana produksi dan e.. sekolah lapangnya untuk 25 orang.”</p> <p>P : “Sejauh ini, kendala apa yang ditemui?”</p> <p>I : “Kendalanya dari sekolah lapang itu.. Dananya kan .. e,... jadi</p> | <p>dan fungsi yang sama, yaitu sebagai penyuluh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para penyuluh menjabat sebagai jabatan fungsional yang mana satu sama lain sama. Tidak ada atasan bawahan dan tidak ada pimpinan. - Kelompok tani merupakan kumpulan petani yang telah mendapat piagam pengukuhan kelompok sehingga diakui kelegalannya untuk mendapat binaan penyuluh pendamping. - Hanya 60% kelompok tani yang memiliki kegiatan rutin. <p>b. Kegiatan penyuluh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan ke kelompok dan kunjungan petani. -Sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu yang disampaikan oleh penyuluh kepada petani yang dikumpulkan sekitar 25 hingga 30 orang. <p>c. Ketahanan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek Manusia (Kebijakan). - Aspek Pengadaan Pangan: -Saat ini, petani sedang mengalami puso (gagal panen) yang disebabkan oleh serangan hama. -Petani cenderung menanam komoditas yang sama dalam satu tahun. Seharusnya harus ada satu berubahan komoditas lain untuk memotong siklus hama tersebut. Petani, jika menanam padi terus menerus gagal, dia kurang menganggap bahwa dirinya adalah petani. -Penyuluh tetap memberikan satu penyuluhan, satu gerakan massal, bagai mana cara pengendalian hama |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>pemupukan itu kan 1 dibanding 20. Kalau satu itu diberi sarana produksi, harapannya, yang 25 kan juga ikut. Tapi kan kadang sekarang itu, keterbatasan permodalan yang ada di petani. Sementara petaninya petani buruh, selaku pemilik inikan dia.. taunya itu panen tanpa memberikan... <i>yo</i> ada sih tapi prosentasinya kecil, memberikan subsidi silang untuk kegiatan sarana ini. ” (Datang tamu dari Kabupaten Semarang yang meng ACC dana bantuan JALUT (Jalan Usaha Tani)).</p> <p>(Lanjut lagi)</p> <p>: “Itu tadi pemberdayaan.. kemudian ada program irigasi. Itu ada yang namanya JITUT. Ada namanya JALUT itu jalan MAKADAM menuju e.. tempat dimana itu ada sawah sehingga untuk mempermudah e.. arus transportasi dari panen. Biasanya kalau mereka tidak ada jalan MAKADAM nya kan <i>ndadak</i> jaraknya jauh. Kemudian roda empat jauh dari situ. Itu kan beban biaya.. terus kemudian ada JITUT, itu tadi, yaitu Jaringan Irigasi Tempat Usaha Tani. JALUT, Jalan Usaha Tani. Jalan kan <i>kalih</i> Irigasi kan lain. Salah satunya itu.”</p> <p>P : “Buk, maaf JALUT itu yang tadi dibahas dengan Bapak yang datang tadi ya? ”</p> <p>I : “Iya”</p> <p>P : “Itu seperti apa?”</p> <p>I : “Itu jalan Makadam yang hanya <i>totonan</i> (tatanan) batu. Kalau irigasi... itu belum ada tanggul. Untuk ada totonan kan mengakibatkan kebocoran. Sehingga, petani-petani yang lokasinya paling bawah itu e.. kadang-kadang kan tidak mendapatkan air. Itu jaringan irigasi. Kemudian ada program yang namanya e... kebun bibit rayap. Hari ini tadi ada survey. Hehehehe... di kebun bibit rayap itu dapat hibah 50juta bersama kelompok tapi kelompok itu menjadi pelaku utama dalam pembuatan e... pembibitan khusus tanaman kehutanan. Jadi untuk tanaman kehutanan nanti akan disalurkan di kelompok-kelompok tani yang memang masih ada lokasi lokasi e... yang secara gratis kita berikan.itu tadi dari tanaman pangan. kemudian ada satu lagi yang belum terealisasi, yaitu Hibah Tanaman PanganKelapa. Lengkap Dhik. Suruh kebetulan dapat program yang lengkap. Dalam rangka e.... untuk ini <i>nggih</i> melestarikan komoditas hutan, tanaman perkebunan kelapa untuk Desa Krandon salah satunya mendapatkan hibah Kelapa dan sarana produksi. Tapi ini belum terealisasi karena satu realisasi komoditas pertanian itu harus disesuaikan dengan musimnya. Kalau pas tidak musinya. Yang dinamakan bibit hidro, itu kan harus tumbuh. Kemudian yang paling akhir kemarin , dari ketahanan pangan itu, mengalokasikan ... nanti akan dialokasikan bantuan rawan pangan di Desa Dadapayam karena dipandang emang e..... Dadapayam itu... e,.... Karena perubahan iklim <i>nggih</i>... perubahan iklim itu ada beberapa petani yang tidak panen. Sehingga, untuk tiga bulan ke depan itu dikhawatirkan akan terjadi rawan pangan.”</p> <p>P : “Itu benar-benar tidak bisa ditanami padi atau....”</p> <p>I : “tidak... Karena musim dia <i>puso</i>, artinya tidak panen karena kering. Tapi dia kan gagal panen”</p> <p>P : “Tapi dengar-dengar di Surat Kabar juga beberapa daerah yang sempat juga Ibu katakaa di Surat Kabar juga itu gagal panen semua. Apakah itu termasuk yang dimaksud?”</p> <p>I : “Itu lain.. Karena itu ada hama. Ada beberapa sekitar enam desa</p> | <p>tikus, bagaimana memutus siklus hama agar petani itu resiko kegagalannya sedikit dengan mengubah pola tanam; padi, palawija, lalu padi lagi. Misalnya dalam satu hektar tanah setelah masa panen di tanami cabe. Tanaman tersebut bisa digunakan sebagai komodias substitusi. Dengan kata lain, hasil panen cabe tersebut dalam lahan satu hektar bisa dijual dan dibelikan kebutuhan pangan yang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengubah sikap pengetahuan, ketrampilan petani untuk mengubah kebiasaan petani tidak mudah. - Ada perubahan sikap petani dalam menggunakan pupuk. Mereka sudah mulai mengurani penggunaan pupuk kimia karena perubahan iklim. Di sisi lain mereka mulai berpikir kalau yang namanya pupuk kimia diberikan secara berkepanjangan, ini akibatnya kepada kesuburan tanah. Alangkah sebaiknya diberikan pupuk organik. <p>d. Antara petani pemilik dan penggarap.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petani, rata-rata adalah petani buruh sehingga dalam pengelolaan pertaniannya mereka menggunakan versi buruh. Mereka mengerjakan tugas mereka (menggarap) dengan pikiran bahwa hasil yang akan didapat akan dekenyam lebih banyak untuk para pemilik tanah. -Seharusnya ada interaksi antara petani dan pemilik. Supaya saling menunjang. Kenyataannya, hanya 10% yang bisa memberikan satu subsidi silang. Pemilik kadang tidak mau tahu. |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>gagal panen yang diakibatkan oleh hama tikus, karena perubahan iklim seperti ini kan <i>ndak</i> bisa. <i>Ndak</i> bisa diprediksi panen. Dan karena tidak adanya perubahan pola tanam. tidak ada.. e.... petani itu cenderung menanam komoditas yang sama dalam satu tahun. Seharusnya harus ada satu perubahan komoditas lain untuk memotong siklus hama tersebut. Tapi kalau yang namanya petani, kalau dia mengatakan bahwa dia menanam padi terus menerus lalu gagal, dia kurang menganggap bahwa dirinya adalah petani. Kita juga tetap memberikan satu penyuluhan, satu gerakan massal <i>sampek</i> bagaimana cara pengendalian hama tikus, bagaimana memutus siklus hama agar e.. petani itu resiko kegagalannya sedikit dengan mengubah pola tanam. tidak padi, padi, padi, dalam satu tahun, tapi juga palawija. Padi, palawija, lalu padi lagi. Ini sudah mulai di daerah sini sudah tidak ditanam...padi.. ditanam ubi, ubi jalar atau komoditas horti yaitu cabe. Karena memang tiga kali e.. tiga sampai empat kali musim itu tidak panen kan rugi tetapi missal dalam satu tahun sudah rugi kok tahun yang berikutnya pasti melakukan usaha tani seperti itu. La itulah yang namanya 'petani'. Merubah sikap pengetahuan, ketrampilan petani untuk merubah <i>anu</i> kan tidak mudah dhik."</p> <p>P : "Tapi kan komoditas makan petani tetap padi?"</p> <p>I : "nggak.. kemarin coba kita bayangkan, yang namanya padi e... dengan cabe.. apakah ya.. e... luasan satu hektar apakah mungkin mereka makan sendiri? Kan bisa <i>istilaha</i> disubstitusi kan? Sebagai pengganti mungkin dia ... dari cabe, hasil cabe lebih dia bisa membeli bahan pangan pokok beras. Buktinya analisa usaha tani harus dipikirkan oleh petani juga <i>tho</i>? Kalau yang namanya analisa usaha tani keuntungannya lebih besar dari komoditas padi mengapa dia nggak tanam yang lebih besar?"</p> <p>P : "Berarti itu bisa dikatakan penyuluhan belum berhasil?"</p> <p>I : "ya... perubahan sikap dan perilaku itu tadi. Tidaaaak ini, tidak mudah. Itu proses. Sebagai contoh gini lah, kalau penyuluhan <i>ketok kasat mata</i> itu tanam <i>larikan</i>. Sekarang mereka sudah nanam <i>larikan</i> semua. Sudah mulai menggunakan pupuk organik, pupuk alami. Sing kelihatan itu.. tapi untuk mengubah pola tanam itu kan juga nantinya mengikut. Kalau mereka menanam selalu gagal. Selalu gagal, mereka akan selalu merubah. '<i>moso yo saya akan nanem padi terus tho</i>?' kalau cuaca terus menerus seperti ini, hama terus menerus seperti ini, kan dia mesti berpikir. Dulu penggunaan urea sudah di... pupuk sekarang yo disukai. Kembali ke alam lagi."</p> <p>P : "Apakah itu alasan kenapa toko-toko jarang menjual pupuk?"</p> <p>I : "hehehe... ada satu perubahan sikap. E.... untuk tahun terakhir ini e... peningkatan sikap jelas dalam penggunaan pupuk. Perubahan sikap petani dalam menggunakan pupuk. Dia sudah mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia. Dia sudah mengurangi. Karena perubahan iklim seperti ini. di sisi lain mereka mulai berpikir kalau yang namanya pupuk kimia diberikan secara berkepanjangan, ini akibatnya kepada kesuburan tanah. Dia sudah mulai berpikir seperti itu. Alangkah sebaiknya diberikan pupuk organik. Itu perubahan-perubahan sikap yang saya kira tidak mudah. Saya menjadi penyuluh sudah sejak 27 tahun. Satu hal yang saya alami dulu penggunaan pupuk urea. Dia ogah.. '<i>kalau tidak pupuk urea tidak</i>' <i>mainded</i>.. prinsip sekali. Selama lima tahun <i>mainded</i> banget. Sampai terjadi ... sampai yang namanya pupuk harganya melambung tinggi kemudian sekarang sudah beralih ke pupuk organik, sedikit demi sedikit kembali ke alam. Pupuk kimia</p> | <p>Yang namanya adat istiadat bagi hasil 50%:50% itu terus menjadi satu turun temurun.</p> <p>-Tidak mudah memberikan satu pengertian kepada pemilik tanah. Penguasa dalam hal ini pemilik masih <i>alot</i>. Produktivitas tidak akan dikatakan baik kalau sarana produksinya tidak terenuhi. Maksudnya biaya yang dikeluarkan buruh, juga menjadi biaya pemilik tetapi selama ini jarang dilakukan. Buruh sudah mengeluarkan tenaga juga ngeluarin dana.</p> <p>e. Antara Pemerintah dan Petani</p> <p>- Modal menjadi kendala utama karena merupakan basis nyata. Dengan kata lain, modal dari pemerintah tidak cukup untuk membiayai usaha petani.</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| | <p>mulai ditinggalkan penggunaannya tapi tidak seratus persen. <i>Back to nature</i>. Kembali lagi”.</p> |
| P | : “Berarti kalau sudah dua puluh tujuh tahun menjadi penyuluh, berarti ketika revolusi hijau sudah...” |
| I | : “E... sudah saya kira ya. Malah tahun-tahun seperti itu sistem penyuluhan itu mengarah ke sistem laku bisnis, sistem yang .. kembali ke alam itu sudah mulai. Sekarang kembali lagi <i>back to nature</i> . Kan kembali lagi <i>dhik</i> . Tapi dulu susah. Disuruh pakai pupuk alami susah, alasan. E. bawanya susah, kotor, tidak cepet terlihat secara fisiologi.” |
| P | : “Lalu bentuk interaksi dengan kelompok tani seperti apa, ” |
| I | : “E...sistem penyuluhan kita itu, saat latihan dan kunjungan.. baik perorangan maupun per kelompok itu kita menggunakan ceramah. Misalnya yang tadi SLPTT, kemudian ada pertemuan yang namanya pertemuan GAPOKTAN. Karena pada dasarnya e... terus terang, tidak semua dari 101 kelompok ini mempunyai satu kegiatan yang rutin ini tidak. 101 ini hanya sekitan 60% yang mereka mengadakan kegiatan rutin.” |
| P | : “Itu terpantau, termonitoring gitu?” |
| I | : “Ya... Saya anggap ada sepuluh. Sepuluh GAPOKTAN dari 10 Desa yang mendapatkan dana PUAP secara tidak langsung dia akan mengadakan pertemuan.” |
| P | : “Kalau Desa Suruh...?” |
| I | : “Ada pertemuan, GAPOKTAN” |
| P | : “Termasuk 60% tadi?” |
| I | : “Iya..” |
| P | : “Berarti peran penyuluh di setiap Desa Suruh, secara rutin...” |
| I | : “Kalau pertemuan GAPOKTAN sekali, satu bulan sekali. Kalau penyuluhan POKTAN nya, mereka ikut masing-masing di setiap kelompok mereka. Ada yang sebulan sekali, ada yang dua bulan sekali, tapi pertemuan rutin itu satu bulan sekali. Pasti ada” |
| P | : “Apakah itu termonitoring terus kemajuan-kemajuannya?” |
| I | : “Evaluasi di setiap program di dalam penyuluhan itu sementara teman-teman baru mengevaluasi di sekitar 60%” |
| P | : “Permasalahan atau kendala yang dihadapi seperti apa? Ibu sebagai aktor pemerintahan dengan level petani biasanya selalu tidak sinkron...” |
| I | : “Yang pertama modal. Modal itu merupakan basis nyata. Di tingkat kelembagaan GAPOKTAN itu sudah kita sediakan. Yang kedua, kalau petani itu sebagai petani buruh . kalau petani itu sebagai petani buruh, sehingga dalam pengelolaan pertaniannya ya versi buruh. Jikalau versi buruh itu menganggap, seandainya yang namanya luasan hektar ini saya berikan pemupukan berimbang dianggap, <i>toh</i> yang mengenyam si pemilik. Makanya harus ada interaksi antara petani dan pemilik. Supaya saling menunjang. Dan ini hanya 10% yang bisa memberikan satu subsidi silang. Pemilik kadang nggak mau tau. Yang namanya adat istiadat bagi hasil 50%:50% it uterus menjadi satu turun temurun. Ini yang sering saya sampaikan ke kelompok tani ‘tidak bisa Pak seperti itu, mari kita buka bersama yang namanya pemilik ya tolonglah bisa mensubsidi buruh. Tapi ya tolong, buruh jangan hanya mengandalkan tenaga.’ Kan gitu. Memang tidak mudah memberikan satu pengertian kepada pemilik tidak mudah. Penguasa dalam hal ini pemilik masih <i>a lot</i> . Bagaimana mungkin yang namanya produktivitas dikatakan baik kalau sarana produksinya tidak terenuhi. Maksud saya begini, kalau memang itu pemilik.. e... buruh tani.. analisa nya kita hitung |

| | |
|---|--|
| <p>yang betul. Nanti biaya yang dikeluarkan buruh, juga menjadi biaya pemilik juga kan begitu. Sehingga seperti itu. Tapi selama ini kan jarang dilakukan. Kan capek sebagai buruh, sudah ngeluarin tenaga juga ngeluarin dana 'saya tetap harus mendapatkan bagian 50% saya' tetap bagi buruh seperti itu. tetapi ada memang e.... untuk saya sendiri.. kebetulan kan saya juga petani. Suami saya kepala desa tapi terus petani. Dia sudah menerapkan Satu hektar pemupukan berimbang, mungkin pakai urea 300 piye bagi-bagi. Saya mensubsidi buruh itu seratus lima puluh. <i>Sing jenenge</i> buruh harus membeli pupuk. Diitung. Kalau memang yang namanya buruh ini tidak punya duit, sarana produksi ini saya total, nanti setelah panen, sarana produksi <i>tak</i> ambil dulu. Kan gitu. Habis itu baru <i>tak</i> bagi. Kalau memang itu yang menyediakan sarana produksi si pemilik semua. Ini sudah mulai seperti itu. <i>Yen pemilik kuma-kuma</i>, kalau memang lahannya pengen juga bagus, artinya bagus dalam artian dalam jangka waktu yang lama kesuburan tanah masih tetap dipertahankan kan? Tapi berapa persen pemilik yang mempunyai satu orientasi pemikiran seperti itu? Jarang sekali. Ya bukannya sombong, tapi memang kenyataan suami saya termasuk petani yang memiliki wibawa. Jadi hubungan pemilik dalam hal ini dia, dengan buruhnya tidak seperti petani pada umumnya yang memeras buruh ”</p> <p>P : “Ternyata feodalisme masih berkembang subur..”</p> <p>I : “Itulah makanya permasalahannya, yang saya ambil dari sebuah kasus, saya punya...kebetulan juga kasus satu tulisan ya.. satu tulisan.. sebuah kasus yang menghubungkan antara pemilik dan penggarap sawah.”</p> <p>(mencari buku yang dimaksudkan... beberapa saat... lalu kemudian wawancara diakhiri karena Suami informan pulang)</p> | |
|---|--|

| Hasil Wawancara | Kategorisasi Isu |
|---|--|
| <p>Bapak Sambudi (Petani sejak 25 tahun yang lalu) 6 Agustus 2011, 20:08 – 20:37 Ketahanan Pangan Era Orde Baru dan Reformasi</p> <p>P : “Bedane sakniki kalih mbiyen jamane Pak Harto napa?” (Perbedaan yang anda rasakan sekarang ini dengan zaman Soeharto apa?)</p> <p>I : “Jamane Pak Harto ki, cara saiki... nganu... bedane ki antara Pak Harto ki ikiiii Pemerintahane Pak Harto ki gene lho... Ndisik ki keras ngono. Nak saiki lak cara-cara meh kaya demokrasi. Nak Pak Harto lak duwe kebutuhan ngene kudune isoh, kudu kelakon. Iki lak nak demokrasi kudu dimusyawarahke saiki ngono. Gampange ngene, okeh wonge. Nak kaya Pak Harto ki keras. Pemerintahane Pak Harto ki jane apik angen-angen ku.. Ora kakean ngomong ngono lho. Kokean pemuka-pemuka ne saiki kakean. Dadine ora wong siji ngono lho.. dadine ki wong arep ngrembug apa ngono wi kakean wong.”</p> <p>(Pada masa Soeharto, pemerintahannya sangat keras. Kalau sekarang kan lebih demokratis. Pak Harto, jika memiliki keinginan harus bisa dicapai. Kalau sekarang, demokrasi semua harus dimusyawarahkan dulu. Dengan kata lain,</p> | <p>a. Kondisi petani Era Orde Baru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - petani diberi pinjaman pupuk dari pemerintah. Selain itu juga ada bantuan ternak seperti sapid an bantuan dana sebesar 2 juta rupiah per orang (petani). - Pembangunan iri gasi <p>b. Kondisi petani Era Reformasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada bantuan berupa uang untuk pembangunan pertanian. - Bantuan uang diganti dengan sembako murah. <p>c. Relasi antara Petani pemilik dan petani buruh.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penggarap dan Pemilik tanah |

| | |
|---|--|
| <p>semakin banyak orang, maka setiap keinginan haruslah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sekarang, aktor-aktor/pemuka terlalu banyak sehingga justru kebanyakan bicara.)</p> <p>P : “La nak nganu... kebijakane jaman Pak Harto teng petani bentene jaman sakniki bedane pripun?” (Kebijakan pertanian yang diturunkan di Masa Pemerintahan Soeharto seperti?)</p> <p>...</p> <p>I : “Bedane iku nganu.. masalah Pak Harto kae ki masalah pupuk kuwi diutang jaman Pak Harto. La saiki ora iso utang. Jaman Pak Harto kae ndhisik diutang sik petani. Petani mula do ngelem Pak Harto. Pak Harto kae ki jane nak ora ono masalah ki jane apik. Ngonooo... dadine Pak Harto nak ra keneng masalah. Wi pemerintahan Soeharto apik nak masalah petani. Pak Harto ki jane termasuk e ki... nang pemerintahan apik.” (Bedanya, pada masa itu, petani diberi pinjaman pupuk. Oleh karenanya, petani lebih pro kepada Pak Harto. Jika Pak Harto tidak tersandung masalah anak-anaknya, sebenarnya bagus. Pemerintahan Soeharto sangat bagus terhadap petani.)</p> <p>P : “Kesejahteraane petani...” (Bagaimana dengan kesejahteraan petani?)</p> <p>I : “Apik... Apik! Apik Pak Harto daripada saiki ki. Pandha’an rekasa saiki. Rekasane masalah utang ki ra gelem nguatangi o’... wong tani ki keadaan mes kudu diutang nak njaluk apik. Kaya Pak Harto kae apik.” (Pak Harto lebih bagus daripada sekarang ini. sekarang malah justru serba susah. Pemerintah tidak mau memberi pinjaman. Petani itu butuh bantuan (hutang) pupuk jika pemerintah menginginkan hasil yang bagus. Seperti kebijakan Pak Harto itu bagus.)</p> <p>P : “Cara mbalek ke ne?” (Bagaimana cara mengembalikannya?)</p> <p>I : “Nak Panen.. nak saiki mandhak ora eneng...” (Pinjaman itu dikembalikan kalau sudah panen. Kalau sekarang malah tidak ada.)</p> <p>P : “La ngoteniki njikuk bathi, pemerintah?” (Apakah pemerintah mengambil keuntungan?)</p> <p>I : “Pemerintah? Yo njikuk bathi... ning sithik.. sithik guran, rong persen opo piro...jikuk’e bathi sithik... wong jane ki masalahe saiki kakean wong. Dadi, kakean wong sing dijak rembugan ki kakean. Saiki wong pirang-pirang.. nak ndhisik partai barang ki, telu wi lek padha ngono lho.. antara PDI, terus... Golkar, terus P3. Barang PDI saiki wi dadi menang dhewe wi laky o saking dene kebangeten wi o.... Penak ndhisik.” (Ya, tetapi hanya sedikit hanya dua persen. ...)</p> <p>P : “La ndang krisis piye Pakdhe?” (Bagaimana ketika krisis ekonomi 1998 terjadi?)</p> <p>...</p> <p>I : “La ndang krisis kuwi ... krisis kuwi ndang ra iso golek utangan yooo... berdiri sak karepe dhewe kuwi mau o... pemerintahan ora isoh ngutangi wisan.. dadine wes ra utang karo negara. Negara wes ra ngutangi saiki. Krisis ki negara wes ra ngutani. Negara saiki rak wes ora ngutangi karo petani.. Mboh ddialihke nang sembako opo piye mbuh. Poko’e ya.. nak jane ran eng masalah ngono wi jane apik Pak Harto.. Anakke jane sing... Pak Harto ki apik. Upama utang okeh ki wong tua karepe anakke ra dingerteni. Kaya anak ki</p> | <p>mendapat masing-masing setengah dari hasil total penjualan gabah.</p> <p>d. Ketahanan Pangan: - Aspek Manusia (Kebijakan). - Aspek Pengadaan Pangan:</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| | <p>retine apik, ngono.. Jane rak rakyat, negara rak sukses ngono. Ngono wae. Ra reti utange karo luar negeri. anggere rakyat ki dipimpin apik ngono ki lak wes ... yo ngono ki padane kowe. Wong tuamu duwe utang okeh, ningo karo kowe ki wes ra patek ... Apik no ki lak wes ora ngerti tho.. wong tua nduwe utang akih ngono wi.. PakHarto ki gur masalah anak e.”</p> <p>(Pada saat krisis petani tidak bisa men)</p> |
| P | : “Jaman riyin niku, nebas-nebas ngoten mboten diseneni Pak Harto riyin?” |
| I | : “Oraaa ora diseneni.... Wong nebas ndhisik ora eneng. Ora eneng sing diseneni” |
| | Istri : “ Ning Nganu o Pak, jaman Pak Harto ki nebas-nebas wes eneng po rung?” |
| | : “Uuuuw wes eneng, nebas-nebas ki wes awit ko tahun PKI wi wes ana sing nebas” |
| | Istri : “Po iyo e’?” |
| P | : “Kredit ngoten nggih wonten?” |
| I | : “Heh?” |
| P | : “Kredit?” |
| I | : “Ke’ii ndhisik Pak Harto!” |
| | (Zaman Soeharto ada bantuan kredit) |
| P | : “Mboten pupuk thok?” |
| | (Jadi tidak hanya pupuk?) |
| I | : “Sapi barang kae..” |
| | (Sapi juga) |
| P | : “Awit kapan tho Pakdhe, njenengan niku ngidak pertama teng sawah?” |
| I | : “Aku??? Wes selawe taun aku.. La sakwene cah cilik-cilik rung do metu wi aku wes ngidak sawah o’.. Jane yo nganu...” |
| P | : “La dadine swasembada beras ngoten niku kemutan mboten?” |
| | (Apakah anda ingat adanya swasembada beras?) |
| I | : “Yo reti e” |
| | (tahu saya) |
| P | : “Critane pripun?” |
| | (Ceritakan tentang masa itu) |
| I | : “Swasembada beras i beras karepe nang luar negeri kae?” |
| | (Swasembada beras itu waktu beras banyak dikirim ke luar negeri itu kan?) |
| P | : “Nggih..” |
| I | : “La kae karepe Indonesia kan ngene, karepe upama ngko ki Indonesia petani maju, karepe arep kirim gabah nang luar negeri ngono. Karepe utang-utang ki yo gen petani melimpah-melimpah ngono karepe. Jane apik wi. Ning lek gejer-gejeran kuwi lho.. Jaman ndhisik ki wong siji petani diutang rong njuta.. ” |
| | (Swasembada beras itu maksudnya, petani-petani Indonesia diharapkan untuk maju sehingga dengan kemajuan tersebut mampu menghasilkan beras yang melimpah dan mampu dikirim ke luar negeri. Jadi, banyaknya hutang yang dilakukan oleh Soeharto pada waktu itu memang ditujukan untuk kepentingan petani. Sebenarnya kan bagus. Namun, wakt itu tidak lama. Petani saat itu diberi pinjaman sebesar dua juta rupiah.) |
| P | : “Mpun kathah nggih?” |
| I | : “Akeeh... wi ..kelompokku wong seket. Seratus juta... Yo ki kowe njajal tekok wong sak liyane aku, lak Pemerintahane Pak Harto ki apik. Saiki we dit ge utang-utang we ra ono o’.. Utange |

| | |
|-----|---|
| | <p>wi pandhak dike' I sembako tuku murah wi lho...kek ke nang kono kuwi kira-kira njajal. ”</p> <p>(Saya memiliki kelompok tani sejumlah lima puluh orang. Jadi, waktu itu pemerintah memberi pinjaman kepada kami sebesar seratus juta rupiah. Coba tanyakan kepada orang-orang selain saya, pasti mereka akan mengatakan pemerintahan Soeharto itu memang lebih bagus. Kalau sekarang, tidak ada pinjaman semacam itu. Pinjaman uang sekarang ini malah dialihkan ke sembako murah)</p> |
| P | <p>: “La niku terus le utang nteng pundi?”</p> <p>(Sekarang, dimana bisa mendapat pinjaman uang?)</p> |
| I | <p>: “Heh... yo golek utangan njaba, wes ora anuu yo golek utangan njaba..”</p> <p>(Kita cari keluar)</p> |
| P | <p>: “Mboso krisis niku lak istilabe apa-apa mundhak, nasibe petani piye?”</p> |
| I | <p>: “O... kuwi..”</p> |
| P | <p>: “Antara penebas, pemilik sawah, buruh kaliyan petani piye niku?”</p> |
| I | <p>: “O... kuwi? Wa yo ki nganu... masalah anuu.. rego gabah ki ana penyakit sing marak ke mlorot kumu.. Ama tikus.. Ngunu. Dadine regane dhuwur kuwi, masalaha panganan kurang okeh. Gur dipangan tikus karo wereng.”</p> |
| P | <p>: “Sakniki?”</p> |
| I | <p>: “He’eh.. Ora I lo.. urusane rega pangan dhuwur ki ngono wi. Ning ngko nak sing jenenge panen raya ki yo ambleg neh.. Petani ki ngono wi. Angger petani panen okeh melimpah, panen raya.. Wi ngko regane ambleg. Angger bulan anuu...Bulan Pebruari wi, gabah ambleg. Pangan murah. Ngendi-ngendi panen kabeh. Ning nak ngene iki kurang, mula gabah larang. Angger Pebruari beras murah! Pebruari sampai kira-kira limang sasi, pokok e kira-kira sekitar Mei ngko murah beras. Ngono. Beras kuwi patang sasi mlorot. Ngko bar kuwi mundak meneh. Patang sasi... anggere Pebruari mlorot. Nak harga beras melambung masalah kahanan eneng ama. Melambung eneng ama, tikus, wereng. ”</p> <p>(... petani itu seperti itu. Ketika panen raya, harga gabah jatuh sehingga harga pangan murah. ... Kalau harga beras melambung itu biasanya sawah sedang diserang hama sehingga beras langka. Namun, dengan adanya kelangkaan beras itu, petani pun hanya bisa menjual hasil panennya sedikit. Petani juga yang akhirnya mendapatkan kerugian.)</p> |
| ... | |
| P | <p>: “Njenengan nggih gadah sawah tho nggih?”</p> <p>(Apakah anda juga memiliki tanah garapan?)</p> |
| I | <p>: “Nduwe..”</p> <p>(Ya, punya)</p> |
| P | <p>: “Carane mbagi karo pegawene piye?”</p> <p>(Bagaimana cara membaginya dengan penggarap?)</p> |
| I | <p>: “Sing nggarap? Separo.. bagi dua. Penggarap dibagi dua. Pemilik sawah separo, pemnggarap separo. Pama nggarap sak hektar mau entuk sekitar 6x3.5 rong puluh juta, satu hektar adalah dua puluh juta. Berarti entuk sepuluh juta, penggarap.”</p> <p>(Penggarap mendapatkan setengah dari hasil panen. Pemilik tanah mendapat setengah dan penggarapnya juga mendapatkan setengah.)</p> |
| ... | |

| | |
|-----|--|
| I | : “Sing macul ngko sing nggarap penggarap.. ngono.. dadine sing nggarap sepuluh juta mau ngge kalong macul, kalong ngopeni, ngemes, la kuwi ngko jikuk e kira-kira perkiraan lima juta .. Lima jut age nggarap, lima juta bathi.. ” (yang mencangkul nanti si penggarapnya. Jadi, si penggarap mendapat setengah dari hasil jual panen masih digunakan juga untuk biaya perawatan, pupuk dan buruh. Sehingga, kalau dihitung-hitung, misalnya setengah dari hasil jual gabah 10juta, 5juta digunakan untuk biaya sawah dan yang setengahnya lagi adalah keuntungan dari si penggarap tersebut.) |
| ... | |
| I | : “pemilik e ra keneng opo-opo. Keneng pajek negara thok. Pajak sawah ngono thok.” (Pemilik tidak dibebani apa-apa hanya membayar pajak dari negara saja.) |
| ... | |
| I | : “Ora.. ora nguruni ! marai nang kene sing nggarap sawah okeh. dadine ra isoh.. sing duwe pari ra nguruni opo-opo marai sing arep nggarap okeh... sing pedesaan kono diuruni .. metune gur patang ton. Anu sakhektare metune patang ons. Nak ken ewes metu 6 ton. Sing diuruni me ski sing tanahe ora subur. Nak ken ewes termasuk rada subur.. sing metune sithik wi sing diuruni. Sing sak hektar patang ton wi sing diuruni mes.” (...Pemilik tanah tidak mengiuri uang untuk menggarap sawah karena di daerah sini termasuk daerah yang masih banyak penggarap sawah. Kalau di daerah pedesaan yang pelosok sana masih diiuri karena hasil gabah tidak sebanyak disini. Yang mendapat iuran uang dari pemilik sawah biasanya daerah yang memiliki tanah kurang subur.) |
| ... | |
| I | : “Wes pokok e ki ngene ya, zaman Pak Harto kae ki apik ngono. Wong kae ki irigasi dibangun kok. Yo nang mudal kuwi lak tinggalane Pak Harto tho.. Ndak ora ono kuwi sak Suruh ki ra eneng banyu. La nyatane endi, tekan seprene malakan ra tahu dibenak ke utawa didandani nok malah” (Intinya, Zaman Soeharto dahulu lebih bagus dibanding dengan sekarang. Irigasi pun juga menjadi salah satu agenda pembangunannya di bidang pertanian. “mudal” merupakan bangunan irigasi peninggalan Soeharto tetapi sayang hingga saat ini tidak ada perbaikan padahal jika sumber mata air itu tidak dibangun dan dijadikan sumber air irigasi se Desa Suruh tidak akan mendapat air.) |

| Hasil Wawancara | Kategorisasi Isu |
|--|--|
| Bapak Ali Ma'sum (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Dusun,Dusun Pandean-Karang Asem Desa Suruh) 31 Juli 2011, 07:16 – 07:54 Ketahanan Pangan dan Keberadaan Kelompok Tani | a. Peran Ketua Kelompok Tani -menghubungkan antara petani dengan pemerintah |

| | | |
|---|---|--|
| P | : “Pekerjaan bayan apa saja?” | daerah setempat |
| I | : “Pertama tangan kanan lurah, kedua bisa mengayomi masyarakat setempat. Terus... jembatan antara apa... antara Dusun dengan Desa. Terus bisa menyatukan antara Dusun yang satu dengan Dusun yang lainnya. Karang Asem.. bisa rukun dengan Jati Rejo.. teruuuse... membantu e kebutuhan warga, misalnya kemiskinan, surat menyurat. Intinya pokok, tugas utamanya itu. Administrasi Dusun ke Desa. Terus paling pokok yang paling berat penarikan pajak.” | -menjembatani antara kelompok dengan Dinas pertanian yang ada hubungannya dengan irigasi. |
| P | : “Tugas yang berkaitan dengan petani apa?” | -Perantara antara pemerintah dengan kelompok tani dalam mendistribusikan subsidi pupuk. |
| I | : “Ya itu mensejahterakan petani. Menambah penghasilan petani. Petani itu kan masalah apa ya masalah... e... apa ya e... pengetahuan tentang pertanian itu kan tradisional. Dengan dibentuknya kelompok-kelompok ini bisa berkomunikasi dengan dinas pertanian. mensejahterakan .. bisa menambah hasil pengetahuan tani, kedua bisa menjembatani antara kelompok dengan Dinas pertanian yang ada hubungannya dengan irigasi. Kelancaran pertanian itu sendiri. Sawah-sawah yang kemaren tidak panen rutin, sekarang bisa. Irigasi yang lancar. Biasanya kelompok tani dapat bantuan pemerintah” | b. Fungsi Kelompok tani |
| P | : “Apakah <i>Bayan</i> (Sekretaris Dusun) itu sudah selalu pasti gabung dengan kelompok tani?” | - Sebagai prasyarat mengajukan bantuan, misalnya pupuk bersubsidi yang sekarang ini tidak diedarkan secara luas. Selain itu juga bantuan berupa kelancaran sarana dan prasarana pertanian. semua bantuan yang diajukan kepada pemerintah harus atas nama kelompok tani setempat. |
| I | : “Belum tentu, tidak harus gabung. Artinya, kelompok tani mengajukan bantuan. Kami membantu mencari <i>mes</i> (pupuk). Mes kan sekarang sulit. Kita <i>nalangi</i> dulu. Jadi tidak harus” | c. Petani dan Entitas/ Kelompok. |
| P | : “Peran <i>Pakdhe</i> di dalam kelompok tani?” | - Kelompok tani kurang bisa berjalan dengan baik karena petani rata-rata adalah petani buruh (bukan petani yang memiliki lahan sendiri). |
| I | : “Sebagai ketua. Kelompok tani” | - Untuk mensejahterakan petani pribadi kurang karena lahan-lahan petani yang luas adalah milik <i>wong sugih-sugih</i> (orang-orang kaya). |
| P | : “Tingkat?” | - Kedala petani terletak pada biaya. Jika biaya sudah tidak ada, petani sudah tidak bisa menggarap/ sudah tidak mau lagi menggarap. |
| I | : “Dusun, Pandean Karang Asem.” | - Biaya petani (biaya yang seharusnya dialokasikan khusus untuk menggarap sawah) digunakan juga untuk makan dan kebutuhan lain seperti sekolah. Sehingga, pada saat menggarap, dana sudah habis. |
| P | : “Kelompok Tani ada sejak kapan?” | - Kelompok tani Pandean Karang Asem kurang maju. Diberi penyuluhan tidak mau. Yang mereka inginkan |
| I | : “Berdirinya tahuun..... lama banget. Kalau tidak salah kelompok tani tahunnn.. malah nggak jelas” | |
| P | : “Menjabat jadi ketua tani itu dari...” | |
| I | : “Dua ribu tujuh” | |
| P | : “Hmm... pertemuan berapa kali dilakukan?” | |
| I | : “Normalnya, dua bulan sekali. Tapi karena petani-petani sendiri petani monoton, artinya nanem <i>pariii</i> (padi) terus, jadi kan nggak ada anu nya.. kadang-kadang 6 bulan sekali. Sesudah panen, sudah. Seharusnya ka nada palawija, jadi ada penyuluhan-penyuluhan.” | |
| P | : “Sejauh ini apakah penyuluhan terbilang lancar?” | |
| I | : “Ya Alhamdulillah lancar. Kadang didampingi penyuluh di Dinas Pertanian Kecamatan.” | |
| P | : “Apakah kelompok tani berjalan dengan baik menurut <i>Pakdhe</i> ?” | |
| I | : “Menurutku kurang bisa berjalan dengan baik karena petani-petani itudi Pandean Karang Asem itu petani buruh. Artinya bukan petani yang memiliki lahan sendiri gitu lho. Jadi untuk mensejahterakan petani pribadi ya kurang . Jadi lahan-lahan petani yang luas itu punya <i>wong sugih-sugih</i> . Terkedala petani itu biaya. Kalau biaya sudah tidak ada <i>yowes</i> petani sudah tidak bisa menggarap. Sudah tidak mau lagi. Kurang lancarnya begitu. Lain kalau kelompok petani kalau petani yang punya jiwa petani itu lain, jadi dia punya program ‘aku harus punya tabungan sekian, untuk biaya khusus padi’. Sekarang kan nggak. Biaya petani juga digunakan untuk makan, ya untuk sekolah. Nah nanti pada saat menggarap, dana sudah habis. Kelompok tani Pandean Karang | |

| | |
|---|--|
| <p>Asem kurang maju. Artinya ya itu.. dikasih penyuluhan ini begini ya tidak mau. Maunya mes ya udah”</p> <p>P : “Di dalam kelompok tani itu terdiri dari buruh taninya atau juga dengan pemiliknya?”</p> <p>I : “Rata-rata pemilik sendiri datang ya... tapi rata-rata buruh. Punya Pak Jito itu menggarap Pak Khozin. Yang milik sendiri itu paling Pak Wahab, Pak Nurhadi. Jadi yang milik sendiri jarang. Yang pemilik sendiri paling hanya 20% dari jumlah petani.”</p> <p>P : “Apakah Pakdhe ingat jaman sebelum reformasi?”</p> <p>I : “He’eh he’eh”</p> <p>P : “Bedanya pertanian jaman itu dengan jaman sekarang?”</p> <p>I : “O la ya jauh tho yo... Pada masa Pak Harto itu petani proaktif, sering ada apa itu namanya e... penayangan-penayangan tentang pertanian. dulu kan harus menayangan ini ini. Jadi petani tau <i>problem</i> tentang petani dengan adanya media elektronik kan. Yak an tau dari Presiden langsung. Presiden menyampaikan sendiri secara langsung di media. Terus ada GAPOKTAN, ada lomba yang hubungan dengan pertanian. dulu sering termasuk ya membuat animo masyarakat dengan adanya bantuan-bantuan. Cuma hanya sekarang saja, adanya petani modern tapi pada kenyataannya di lapangan tidak bisa modern”</p> <p>P : “Petani modern seperti apa?”</p> <p>I : “Petani modern ya yang dulu pakai pembajak, terus sudah ada traktor, sistem tanamnya, pupuknya ada yang pupuk sebar ada yang tablet. Sekarang untuk hasil daripada petani kan belum. Sekarang juga ada sistem <i>open</i>. Begitu panen, lalu dimasukkan kedalam <i>open</i> semalam, padi langsung kering. Paginya diseleb. Proses.. istilahnya yo kuwi, petani modern. Ehhh.. dulu kan belum ada. Semua masih pake tradisional. Sekarang sudah modern lah.</p> <p>P : “Menurut Pakdhe, jual beli petani sekarang ini seperti apa?”</p> <p>I : “ya kalau jual petani, harga dulu dengan sekarang lebih sejahtera sekarang. Artinya harga plapon ya. Harga standar per kilo atau per kintal. Misalnya katakan per kilo 3000 rupiah, itu sudah standar. Itu kan pemantauan dari pemerintah. Kalau masalah sejahtera lebih sejahtera sekarang. Cuma hasil daripada anu... yo lebih sejahtera sekarang daripada dulu. Dengan adanya berbagai macam e... bibit unggul bisa menghasilkan seperti itu. Tapi nilainya hasil petani itu lebih unggul dulu. Artinya, kalau dulu harga gabah sekintal dijual untuk membeli pupuk masih ada sisa, sekarang bagah sekintal dijual buat beli pupuk kurang. Jadi terbalik kan? Jadi nilai nominal hasil pertanian itu sejahtera dulu. Kalau hasil panen dua juta terus digunakan untuk pupuk Cuma 40ribu, perbandingannya jauh kan. Sekarang nggak. Hasil tanem satu kintal katakana harganya sejuta tigaratus, lalu buat beli pupuk, malah kurang. Nilainya ya.. makanya petani-petani dulu makmur-makmur, sisa hasil jual gabah dipakai untuk beli tanah.”</p> <p>P : “Maksudnya dulu itu pada jaman Pak Harto?”</p> <p>I : “Ya, jaman Pak Harto ke belakang. Dulu dengan sekarang itu lebih sejahtera Pak Harto sistem pertaniannya. ”</p> <p>P : “Lalu, perbedaan peran pasar dulu dengan sekarang?”</p> <p>I : “Dalam hal:”</p> <p>P : “intervensi”</p> <p>I : “Kalau pasar itu sekarang malah e... ya bukan mengambil alih pemerintah ya. Mungkin pemerintah kurang ke lapangan langsung ke pasar. Jadi harga jual petani itu bisa dipermainkan oleh pedagang-pedagang pasar. Jadi katakan dulu KUD bisa</p> | <p>hanya pupuk saja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok tani rata-rata / sebagian besar terdiri dari petani buruh sedangkan petani pemilik jarang. - Petani pemilik kurang lebih hanya 20% dari total petani yang ada. <p>d. Petani di Masa Orba dan Reformasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada masa Pak Harto (ORBA) itu petani proaktif karena sering ada penayangan-penayangan tentang pertanian. Jadi petani tahu <i>problem</i> tentang petani dengan adanya media elektronik. Presiden menyampaikan sendiri secara langsung di media. - Dulu (ORBA) sering ada lomba yang hubungan dengan pertanian. selain itu, pemerintah membuat animo masyarakat dengan adanya bantuan-bantuan. - Sekarang adanya petani modern justru pada kenyataannya di lapangan tidak bisa modern. (Petani modern -- sudah ada traktor, pupuknya ada yang pupuk sebar ada yang tablet, sistem pengeringan gabah dengan <i>oven</i> semalam, padi langsung kering. Paginya diseleb). - Petani saat ini terjebak pada bantuan BANK thithil. Bnatuan modal untuk membangun usaha tanpa bunga justru tidak ditanggapi secara aktif. - Dulu, sekitar tahun 1983, Dusun Pandean Karang Asem pernah mendapat bantuan sapi dari KUD. Sebenarnya dimaksudkan supaya petani bisa mendapat bantuan tetapi angsuran pengembalian dari bantuan tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan/ tidak pernah dikembalikan. <p>e. Nilai Jual Petani Masa Kini dan Masa Orba.</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>mengambil hasil panen petani, lha sekarang nggak kan. Bukan tidak perhatian, tapi kurang seperti dulu lah. Jadi harga padi sekarang, pemerintah mematok per kilo sekian, katakan tiga ribu. Terus itu harga gabah ya.. la nanti pedagang malah melakukan permainan harga. Katakan harga beras sekian, pemerintah nggak bisa. Kalah di lapangan. Mungkin harga ke pasar pemerintah kurang pro aktif. Ya sudah perhatian, tapi kurang proaktif. Masalah harga dipermainkan oleh pedagang-pedagang pasar.”</p> <p>P : “Kalau kesejahteraan petani dilihat dari nilai tukar gabah dilihat dari pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, pendidikan bagaimana?”</p> <p>I : “Nak menurutku, <i>fifty fifty</i>. Kalau untuk hasil sekarang, untuk... ke depan sudah habis lagi. Jadi <i>fifty fifty</i>. Ehmm keseimbangannya gimana ya? Contoh ya, sekarang aku panen. Hasil ini untuk ke depan, nggak usah ditabung-ditabung lagi. Ya tadi itu masalahnya. Petani itu petani buruh. Kalau pemilik sendiri kan biaya untuk menggarap kan seperempat dari biaya panen, misalnya panen itu harganya dua juta, petani buruh itu Cuma satu juta, yang satu jutanya lagi untuk yang punya sawah. Jadinya petani kan punya satu juta. Yang dipake untuk biaya tadi setengah juta. Jadi penggarap kan panen dua juta. Sejuta untuk pemilik. Sejutanya buat penggarap. Nah yang setengah juta daripadanya digunakan untuk menggarap lagi. Na itu kan kalau dipakai untuk makan kan habis lagi. Gitu.. nanti waktunya menggarap, uang sudah habis. Jadi seperempat... jadi petani ini hanya mendapat seperempat dari harga total. Itupun kalau tidak ada kendala, kendala yang lain. Artinya, tidak terkena hama tikus, wereng. Nah, kalau sekarang kan malah rugi. Nah saat ini petani gagal panen. Jadi saya rugi ini. misalnya Bulan Juli gajian, ini nggak gajian. Kalau gaji Bulan ini lima juta, ya habis dimakan tikus. Nunggu gajian berikutnya Bulan Januari. Itupun kalau Bulan Januari panen lagi. Tapi kalau tidak ya itu sudah nasib. Ya <i>fifty fifty</i> tadi, ndak bisa buat patokan secara pasti. Kalau punya sendiri dan mengolah sendiri, misalnya dua juta itu seperempatnya untuk makan, seperempatnya lagi untuk menggarap sawah berikutnya, dan satu jutanya kan bisa untuk keuntungan. Kalau buruh kan nggak gitu. Yang setengahnya udah dikasih ke buruh, itupun masih dibagi dua, yaitu untuk menggarap sawah. Nah, kelemahan kelompok tani yang saya tangani ya seperti itu. Kelompok tani pribadi”</p> <p>P : “Bantuan kredit dari pemerintah...”</p> <p>I : “Sementara ini belum ada bantuan kredit dari pemerintah. Ya mungkin itu karena tidak jempot bola. Artinya, dari kelompok tani itu sendiri tidak terlaksana..nah bantuan pemerintah belum ada karena kan anu... belum konsisten. Artinya kadang dana talangan itu kan tidak dapat dialokasikan secara umum kan nggak. Sementara belum. Cuma kemarin bantuan pupuk untuk hama wereng dan tikus.”</p> <p>P : “Semua dapat?”</p> <p>I : “Iya... semua petani.”</p> <p>P : “Bagaimana sistem menurunkan mes secara birokrasi bagaimana?”</p> <p>I : “Kelompok tani mengajukan PDKK” “Kepanjangannya saya lupa, itu rencana anggaran yang akan dibutuhkan itu lho. Nanti bulan ini misalnya butuh sekian, dalam satu tahun itu ya. Dalam satu tahun ini missal mengajukan PDKK kepada pemerintah. Nanti pemerintah pergi ke distributor.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Harga dulu dengan sekarang lebih sejahtera sekarang karena ada standar harga dari pemerintah. - Nilai jual petani lebih sejahtera dulu (ORBA) – Zaman OrBA, Nilai Tukar Gabah masih bisa digunakan untuk membeli pupuk untuk biaya perawatan berikutnya dan sisa untuk menghidupi keluarga. Sekarang, Harga jual gabah satu kuintal tidak cukup digunakan untuk membeli pupuk. Dulu, hasil panen 2juta kemudian digunakan membeli pupuk hanya 40ribu. Oleh karenanya, petani zaman dulu lebih makmur-makmur dibanding dengan sekarang. Sisa hasil jual gabah bisa digunakan untuk membeli tanah. - Sistem pertanian lebih sejahtera di Zaman Soeharto dibanding dengan sekarang. <p>f. Peran Pasar: ORBA vs Masa Kini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekarang ini, pasar seolah-olah mengambil alih pemerintah pemerintah kurang ke lapangan langsung. - Dulu KUD bisa mengambil hasil panen petani, sekarang sudah tridak lagi. - Jadi harga padi sekarang dipatok oleh pemerintah. Nanti pedagang malah melakukan permainan harga. Katakan harga beras sekian, pemerintah justru kalah di lapangan. - Pemerintah kurang pro aktif dalam memberi standardisasi harga ke pasar. - Harga dipermainkan oleh pedagang-pedagang pasar. <p>g. Nilai Tukar Petani dan Kebutuhan Hidup Sehari-hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petani rata-rata adalah petani buruh yang secara |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>Misalnya Kelompok Tani Karang Asem mengajukan pupuk sebesar 15 ton dalam jangka waktu dua musim. Artinya, disini kan musimnya dua kali dalam satu tahun, nanti pembagiannya dua kali, Januari sampai Bulan Juli nanti turun pertama, yaitu pas mau turun panen. Kedua, Bulan Juli sampai Desember. Nah, nanti distributor nunggu kapan Kelompok tani mengajukan, 'Aku butuh mes 5 ton, butuhnya setengah bulan setelah mengurus. Nah distributor nanti ada pengecer, lha nanti, aku masuk ke distributor. distributor melalui pengecer. Lha pengecer ini adalah seseorang yang ditunjuk ke dinas. Ehmmm ... Pupuk Logistis tingkat Kabupaten. Petani ya menunggu karena pupuk sudah tidak bisa lagi diperjualkan secara bebas. Artinya, itu ada pengendalinya lah untuk mengantisipasi permainan harga. Oleh karenanya harga pupuk bisa dikendalikan. Ehmmm harga pupuk dari pengecer paling selisihnya 1000 atau 2000 aja. Harga <i>plapon</i> 80.000, sampai sini 82.000 itu termasuk transport. Kan dulu tidak. Delapan puluh rib uterus harga pengecernya 100 ribu sampai seratus lima. Nah itu permainan harga pengecer. Sekarang nggak bisa. Dari pemerintah delapan puluh ribu ya disini delapan puluh ribu. Terus sampai pengecer... pengecer nanti kesini 82.000. transportasi, ganti ini, ganti itu."</p> <p>P : "Berarti tidak dibagi-bagi ya, itu harus mengajukan?"</p> <p>I : "Mengajukan dulu, nanti di drop di kelompok, baru nanti petani baru datang.. Dari kelompok tani itu ke pengecer sudah naik. Artinya naik, kan sudah disepakati bersama, yang 5000 untuk kas, yang 2000 untuk transport tadi, 3000 untuk operasional lain. Buat ojeg. Kan saya antar sampai tempat. Disana kan juga butuh ojeg. Nah, daripada cari ojeg, mending darisini sudah disediakan."</p> <p>P : "Apakah Pakdhe sendiri sebagai ketuanya yang mengantarkan pupuk itu?"</p> <p>I : "Iya... hehehehe.. Ya itu tadi kelompok tani. Kalau aku tidak mengajukan mes. Tidak mengajukan anu... ya Petani bingung soalnya di toko-toko ndak ada."</p> <p>P : "Apakah itu termasuk kebijakan?"</p> <p>I : "Ya bukan kebijakan ya... artinya begini, kan kelompok tani Pandean Karang Asem kan begini '<i>Besok seminggu lagi mes turun, ayo pada bayar kalau tidak bayar saya tinggal</i>' itu kenyataannya pada nggak mau bayar. Kan disini bingung. Masalah kesejahteraan bingung juga. Beli mes itu <i>owel</i> (pelit). '<i>Nanti saja saya bayar kalau sudah panen</i>' Lha uang siapa yang akan dipake untung menalangi mes nya itu? Akhirnya dengan demikian saya dan Pakdhe Din menalangi dulu. Tapi ya itu, begitu mes turun mereka baru mengambil mes itu sebulan dua bulan. Lain dengan Petani yang ada di Karang Salam, Kedong Jati, Cukilan. Lain. Kalau di sana gini. Di sana petani menabung dulu. Nanti bulan lima nge-mes, bulan Januari mereka memberi uang ke Ketua Kelompok tani '<i>Pak kula titip arta e... kagem njing nak mes turun</i>' petani-petani pada datang ngasih uang nanti untuk beli mes. Nah, begitu mes datang, tinggal mengumumkan.. '<i>Bapak-bapak ibu-ibu mes turun</i>'.. Blass... mereka datang pada ngambil mes nya tadi. Nah disini lain. Dimintain uang sulit, akhirnya saya menalangi dulu. Itu pun juga nggak diambil-ambil. Diambil kalau sudah punya uang. Tapi kalau butuh... missal yang sudah diambil tidak diambil-ambil dan saya berikan untuk yang membutuhkan, kemudian nanti dia mau ambil, <i>nabrak-nabrak</i>. Kalau saya jahat ya, saya nggak mau lagi beli mes. Ya petani-petani disini</p> | <p>hitungan hanya mendapat total harga jual gabah seperempatnya.</p> <p>- Seperempatnya lagi digunakan untuk menggarap. Namun, kenyataannya, seperempatnya untuk menggarap digunakan pula untuk makan dan kebutuhan anak. Sehingga, pada saat menggarap tiba, mereka tidak bisa lagi. Ini adalah kelemahannya.</p> <p>- Saat ini belum ada bantuan kredit dari pemerintah untuk para petani.</p> |
|--|--|

kelabakan nggak bisa melakukan apa-apa. Saya kalau beli nalangi terus. Kas nya saya tabung ke BANK sekarang *wes nyampe* sejuta setengah. La... itu dari pertemuan dua bulan sekali. Sekarang misale ya, kas-kas kadang-kadang 300, 400, kadang 200... ya kalau tiap pertemuan, itu kan selalu ada uang konsumri. Paling tidak 'A' itu 2000 sampai 3000. Setiap pertemuan, yang datang antara 60 orang sampai 70 orang. Kalikan saja berapa itu. 3000 dikali 60 berapa? 180 kan ya. Kalau 3000 dikali 70 udah 210..dipotongkan dari uang kas..ya itu sisanya yang saya tabung itu. Padahal kan uang ngumpul tiap pertemuan 200 saja. Jadi uang habis untuk pertemuan saja. Disini petani diajak nabung dulu tidak mau. Tapi kalau saya nggak beli mes, ya mereka sendiri sebenarnya yang susah. Yang *angel* itu *ketuane opo piye* la itu nggak ngerti. Kan bingung, kenapa petani disini kok nggak maju?"

P : "Mereka sadar tidak iklim sudah tidak bisa dipastikan?"

I : "Sekarang ini, sawah sedang *puso*. Tahun 80 kesana itu musim hujan terus musim ini, gitu sudah pasti... tapi akhir-akhir ini musim kan sudah mulai berubah"

P : "Apakah Pakdhe ingat jaman dulu itu?"

I : "Ya... Dulu itu Desember Januari itu bulan-bulan musim ... September itu sudah mulai hujan. Cuaca ekstrim kaya sekarang ini belum pernah ada. Bisa dipatikan musimnya. Petani bisa stabil. Sekarang musim ekstrim. Padi nggak sehat. Sekarang .. buah-buahan klengkeng nggak keluar, mangga nggak stabil..angka nggak keluar. Keluarnya jarang-jarang lah. Karena cuaca yang tidak..."

P : "Apakah kelompok tani punya cara untuk mengantisipasi itu?"

I : "Sementara ini tidak memiliki alternatif untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim karena pemikiran-pemikiran *piye* ya... diberi pupuk cair misalnya.yang harganya lebih efektif, ya tanggapannya pasif. Petani kalau tidak pakai mes ndak percaya. Terus kalau saya rasa ya, disini itu masyarakatnya ... *piye* ya. Dulu pernah ada bantuan dari pemerintah. Tapi ya itu, yang *dipinjemi* ndak bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Kan itu dicatat. Nah tahun berikutnya saya mengajukan lagi, pemerintah kan Tanya '*yang tahun lalu buat apa?*' wah ya saya bingung *tho* jawabnya, wong saya ngerti itu bantuan dipakai untuk apa kok. Hasilnya kemaren *jane* bagus, tapi... misalnya gini, kemaren diberi bantuan sapi saya suruh *ngerumat* ya biar kembali modal lah. Nanti kan modalnya *dibalik'e* kesana lagi tapi kalau nggak ada ya aku *wegah*."

P : "Hehehe..."

I : "Dulu itu pernah juga, tahun tahun... tahun berapa ya? Tahun 83, Pandean Karang Asem itu dapat bantuan sapi dari KUD, 1 juta pada waktu itu. Tapi kan satu juta pada waktu itu kan banyak sekali. Sekarang diberi bantuan seperti itu tapi juga nggak beres. Maksudnya kan tiap panen setor, tiap panen setor, gitu... ketidakberesan itu dari petani ke ketua kelompok atau sudah sampai ke ketua kelompok tapi nggak disetorkan, la itu yang nggak tahu. Ya... jadinya Pandean Karang Asem ini sudah cacat. La sekarang bagaimana caranya mengubah ini itu *piye* gitu. *Tak talangi sik* itu kan sebenarnya untuk menge mbalikan kepercayaan. Kalau sampai *tegel* (tega), gitu nggak tak talangi dulu petani yaa gimana... Kemarin dari PKS malah memberi bantuan, dari partai

| | |
|---|--|
| <p>diberi bantuan perikanan. Nah sebenarnya bantuan-bantuan itu tadi kan buat membantu kesejahteraan masyarakat juga. ‘<i>ini tak silihi modal gawenen usaha</i>’ kan gitu. <u>Malah BANK thithil</u> ini masih menjadi sarang bantuan kredit masyarakat. Lawong dipinjami, ini modalnya, ngembalikannya nggak usah pakai bunga, ya <i>to</i>. Semampunya. Tapi nggak ditanggapi secara aktif.”</p> <p>P : “BANK <i>thithil</i> itu apa?”</p> <p>I : “BANK <i>Thithil</i> missal, seseorang pinjam seratus ribu. Ngembalikannya itu maunya gimana, apa setiap hari atau gimana... gitu. Kalau sebulan ya hitung aja berapa kalau minjamnya seratus ribu. Nah tapi itu bunganya melilit tinggi. Belum untung misalnya kalau berdagang gitu, sudah diminta. Rata-rata mereka yang ikut BANK <i>thithil</i>, ya itu kena. Nggak sukses..”</p> | |
|---|--|

| Hasil Wawancara | Kategorisasi Isu |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Bapak Abdul Wahab (Bendahara Kelompok Tani) Rabu, 30 Juli 2011; 13:03 – 13: 30 Kelompok Tani</p> | <p>a. Kelompok Tani - /</p> <p>b. Kelompok Tani dan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para petani bertani sendiri-sendiri karena tidak ada kebijakan pemerintah yang melindungi petani saat puso. - saat panen, petani menjual hasil panennya sendiri-sendiri tanpa melibatkan keberadaan kelompok tani dan juga tidak dijual ke koperasi. - Petani jalan sendiri-sendiri. - Petani (rakyat kecil) saling berebut dengan orang-orang yang kaya. - Lembaga penyuluh pertanian belum pernah turun lapangan secara langsung untuk memantau tani atau kelompok tani. |
| <p>... P : “Lha terus ndherek kelompok tani?” “Terus, ikut kelompok tani?”</p> <p>I : “Yoo... anuu.. sejak mulai diadakan.” (informan lupa tahun diadakannya)</p> <p>... P : “Jarene <i>Pakdhe</i> dados bendahara?” “Katanya <i>Pakdhe</i> jadi bendahara?”</p> <p>I : “<i>Hayaah</i>, bendahara opo?” “<i>Hayaah</i>, bendahara apa?”</p> <p>... I : “Oraa... bendahara opo, <i>wong</i> pandha’an ra tau nyekel duit ya.. kuwi anu... mung dilebok ke thok ge njaluk tanda tangan..” “Nggak.. bendahara apa, <i>wong</i> malah tidak pernah megang uang ya.. itu anuu.. hanya dimasukan nama saya hanya untuk meminta tanda tangan”</p> <p>P : (Istri: “hahaha.. he’eh”) : “Dadi gur formalitas thok tho?” “Jadi hanya untuk formalitas saja?”</p> <p>I : “Iyo yoooo.. <i>wong mes</i> we ra tau tuku gulo. Tukune malah nang njobo. Murah njobo” “Iyaaa...<i>wong</i> pupuk saja tidak pernah beli ini. belinya malah di luar. Murah di luar”</p> <p>P : “Regane piro?” “Harganya berapa?”</p> <p>I : “Kelompok tani sangang puluh, aku tuku no njaba wolu loro.. ” “Kelompok tani Sembilan puluh ribu, saya beli di luar hanya delapan puluh dua” (istri: “Kacek lapan ribu.. hahaha. Nak limang kintal kacek empat puluh ribu”) : (istri: “selisih delapan ribu. Kalau lima kuintal selisih empat puluh</p> | |

| | |
|---|--|
| | ribu”) |
| P | : “La turene nak mboten melu kelompok tani ra dike’i <i>mes</i> ?” : “Katanya kalau tidak ikut kelompok tani tidak diberi pupuk?” |
| I | : “Ra dike’i o’ .. yo tuku ngono lho.. maksud e kelompok tani wi yo kon tuku o’ .. hahahaha” : “Tidak diberi.. ya beli.. maksudnya kelompok tani itu juga disuruh beli.. hahahaha” |
| P | : “Sembilan puluh ribu niku?” : “Sembilan puluh ribu itu?” |
| I | : “He’em.. ngono wi nak arep ngerti, ngono lho. Situasi pemerintahan kan ngono kuwi. Dadine jane organisasi gur ge kudung. Nak aku no jeneng kanca we piye yoo? Wes karepmu .. hahaha” “He’em.. begitu lah kalau ingin tau, begitu. Situasi pemerintahan kan begitu itu. Jadi organisasi sebenarnya hanya sebagai ‘kerudung saja. Kalau saya yang namanya teman ya bagaimana lagi? Sudahlah terserah.. hahaha” (istri: “yo ngono kuwi mau, fomalitas.. opo <i>nduk</i> ?”) (istri: “ya begitu itu, fomalitas.. apa <i>nduk</i> ?”) |
| P | : “Formalitas” |
| I | : “La njajal takono <i>Kang Diman</i> barang kae. Kae yo melu kelompok tani” “La coba Tanya saja ke <i>Kang Diman</i> juga, dia juga ikut gabung di kelompok tani” |
| P | : “Kumpul-kumpul...” |
| I | : a |
| P | : “La kelompok tani.... Mung ge formalitas?” |
| I | : “Lawong aku yo nyatane rung tau teka nang kumpul kelompok tani kuwi. La padhare, kene, Pakdhe anan kegiatan yo ra iso.. ” Saya sendiri sebenarnya juga belum pernah menghadiri kelompok tani karena saya juga ada kegiatan sendiri. |
| P | : “La nak panen?” Kalau panen? |
| I | : “Yo didol dhewe-dhewe...tegese ora didol nang koperasi kan ora. Kan kelompok tani kan kuwi termasuk koperasi tho kuwi.” Dijual sendiri-sendiri. Maksudnya tidak dijual di koperasi. Kelompok tani sebenarnya kan juga termasuk koperasi kan. |
| P | : “La koperasine kuwi ge apa?” Fungsi koperasi untuk apa? |
| I | : “Yo ra nggenah ho... Awit mbiyen ki ngono wi, sing jenenge koperasi Suruh ki yo ngono wi. Awit jaman Mbah Mbah ki ngono wi. Mulane aku dipameri koperasi ki wes ra gumun soale aku pernah dadi bendahara. Terus kon kumpul mandhak an kebobolan” Tidak begitu paham karena memang dari dulu yang namanya Koperasi Suruh itu ya seperti itu. Dari zaman embah-embah dulu seperti itu oleh karenanya saya sudah tidak lagi salut dengan adanya keberadaan koperasi. Saya pernah jadi bendahara koperasi juga dan itupun kebobolan. |
| | ... |
| I | : “Rung tau ana sing sukses ngono ki rung tau. Mangka jane kudune anu o’ nasib e tani diperjuangke.. ” Koperasi Suruh belum pernah terdengar sukses padahal seharusnya nasib-nasib petani harus diperjuangkan. |
| P | : “Koperasi unit tani niku jane wonten?” Koperasi Unit Tani ada? |
| I | : “Yo ono tho nduk... Kan wi kan jane saka anuuuu... saka KUD |

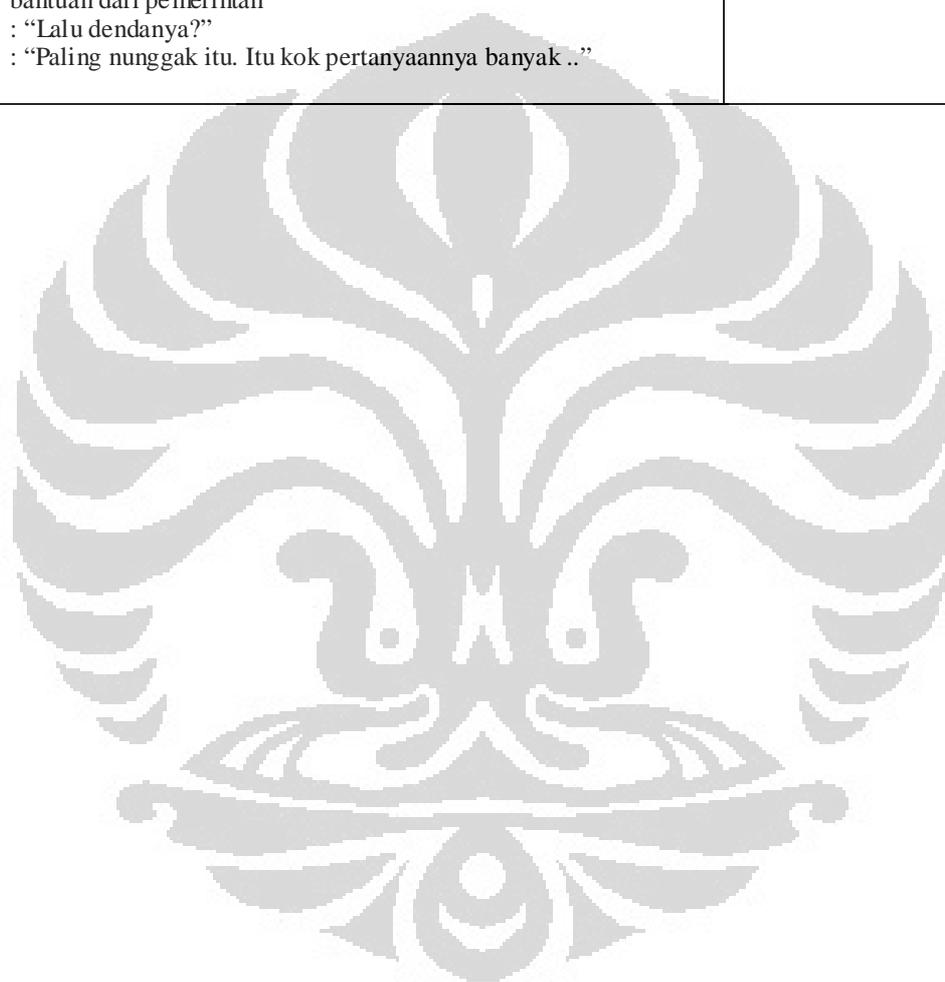
| | |
|--|--|
| <p>kono kuwi ta jane. Kan termasuk anak ke tho kuwi.” Ada. Itu merupakan anak KUD</p> <p>...</p> <p>I : “Yo... KUT ne takok’o Slamed .. Slamed Pandean kuwi tho, Slamed listrik. Dadine kelompok-kelompok tani, nasibe petani ki yon gene iki. Urip e dho dhewe-dhewe neng mesti kaya-kaya ge rebutan kao sing nang ndhuwur kok” Ya, KUT tanyakan saja ke Slamet, Slamet Listrik. Jadi, kelompok-kelompok tani nasibnya ya seperti ini. hidup sendiri-sendiri tetapi seolah-olah saling berebut dengan orang-orang berada ‘di atas’</p> <p>...</p> <p>I : “Yo iyo, saiki njajal sing dho nduwe lak sing sugih-sugih. Padhane aku melu klompok tani ning aku malah njikuk nang kelompok tani ngkersa. Wong nyang Mbawangan. Sing sik aku njikuk Njati. Kene kadhang telat, ngono lho. Utang ora oleh. La nak kelompok tani Seban kuwi njikuk sik ning wayahe panen mbayar kok. Wi sing kelompok tani, ngono lho.” Ya, sekarang lihat saja yang memiliki sarana produksi adalah mereka yang kaya. Meskipun saya ikut dalam anggota kelompok tani tetapi malah ikut kelompok tani bukan Desa sini. Disini kadang suka telat dan tidak boleh hutang dulu. Seharusnya kan boleh nanti dibayar kalau sudah panen.</p> <p>...</p> <p>P : “lembaga-lembaga nduwur. Penyuluh pertanian...” Lembaga-lembaga di atas? Penyuluh pertanian?</p> <p>I : “Penyuluh pertanian kene rung tau ketekanan. Nak Pak Sambudi mbuh. Nak Pak Sambudi rak.... hehehehe. Kene ki egois dhewe-dhewe. Rung tau ana tanggane ana masalah, ayo nyengkuyung piye mecahke nmasalahe. Ngono ki lho. Mulane angele ngono kuwi. Piye carane aku isoh nyambut gawe, tanggaku isoh nyambut gawe, kan ora. Padhane, kae ngko tani hasile apik, la ngko kancaku isoh apik yo an, ngono ora o’ piye. Istilahe, sing penting nggonku apik nggone wong-wong karepmu.. ning nak wong-wong sak ora-orane, tanggaku apik sik. Ngko yo isoh nganu... istilahe gelem ngalah ngono lho nduk.. lha nak aku kan ora, sing penting wong-wong sik.” Penyuluh pertanian disini belum pernah didatangi. Kalau Pak Sambudi nggak tahu saya (tengkulak). Disini orang-orangnya egois. Belum pernah ada jika ada tetangga yang ditimpa masalah bagaimana secara bersama menyelesaikannya. Jadi, mereka berprinsip, yang penting hasil panen saya paling bagus dibanding dengan tetangga saya.</p> | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Bapak Slamet (Manager KUT (Kredit Usaha Tani)) Rabu, 9 Agustus 2011; 15:55 – 16:17 Kelompok Tani</p> | <p>a. Seputar Kredit Usaha Tani (KUT) dan Koperasi Unit Desa (KUD) - KUT berdiri 1998, setelah</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>... P : “Sejak kapan berdirinya KUT itu?” I : “KUT itu berdiri 1998” P : “Setelah krisis ekonomi?” I : “He’eh, setelah krisis ekonomi. Habibie yang <i>menganu...</i>” P : “Ceritakan sejarah lahirnya Pak?” I : “Awalnya, Pemerintah mengucurkan dana melalui Bank-Bank, habis itu dari Bank-Bank menunjuk koperasi salah satunya KUD. Lalu dikucurkan ke kelompok tani. KUD lewat kelompok tani, kelompok tani ke anggotanya.” P : “Visi Misi KUT?” I : “KUT untuk mensejahterakan petani. Petani kan dimodali dari pemerintah, berupa uang. KUD yang mengelola dengan memberikan pupuk dan uang. Sebenarnya KUT itu bentuk uang dari BANK yang diserahkan ke KUD untuk beli pupuk. Pupuk untuk petani dan uang. Sebenarnya petani dapat uang dan pupuk sesuai yang dibutuhkan.” P : “KUT itu koperasinya petani?” I : “Kredit Usaha Tani” P : “<i>Njenengan</i> sebagai ketua?” I : “Aku manager nya.” P : “Sejauh ini apakah sudah berhasil?” I : “Belum berhasil. Ada tunggakan.” P : “Kendalanya..” I : “Kendalanya, petani <i>mbeling</i> (tidak bertanggung jawab). Mereka tidak membayar hutang. Hehehe... Itu kan sebenarnya begini mbak, petani mikirnya, ‘itu kan dari pemerintah, jadi ya ndak usah dibayar utangnya. hehee’. Dulu pernah pada saat Gus Dur mengucapkan statement KUT dibebaskan, begitu. Tapi ndak. Cuma sebentar. Petani kan jadinya ndak mau membayar utang.” P : “peran KUD di pemerintah menurut <i>njenengan</i> seperti apa?” I : “KUD diberi fasilitas oleh pemerintah, sekarang tidak. Dari aspek anggota kelonmpok tani, sumber dananya kan tadinya dari KUD. Ya membayar listrik, pengadaan pangan... kan KUD beli beras ke petani, dijual ke DOLOG, itu dulu. Sembako, beras, Gula, gandum, KUD kan beli untuk para nasabah.” P : “Sekarang?” I : “Sekarang malah membayar listrik itupun banyak yang menjual bebas.” P : “Jadi, KUD itu sekarang melayani?” I : “Rekening listrik dan simpan pinjam. Simpan pinjam pun juga macet. Mereka mikirnya, ‘ini dari KUD, berarti dari pemerintah, udah ndak usah dibayar’.” P : “O... Normalnya kan, seharusnya, KUD menerima atau membeli hasil panen dari petani, nah menurut <i>njenengan</i> bagaimana?” I : “Prosedurnya dulu begini, pemerintah kan memberi dana untuk membeli padi, KUD lalu beli, KUD beli, lalu diseleb lalu dibawa ke DOLOG, lalu DOLOG membayar ke KUD untuk dibelikan padi lagi, begitu.” P : “DOLOG itu kepanjangannya apa?” I : “DOLOG.. LOG nya logistik. DO nya lupa <i>nduk..</i> hahahaha” P : “Menurut Pak Slamed, tengkulak itu posisinya bagaimana? Kan itu mengambil alih posisi KUD tho?” I : “O... itu begini, tadinya tengkulak juga jadi <i>best friend</i> nya KUD. Kaya pupuk misalnya, pupuk kan butuh pengecer gitu lo. Pengecer itu missal TPK organik. KUD kan jualnya begitu. Nanti</p> | <p>krisis ekonomi. - Merupakan program yang dibentuk oleh Habibie. - Alur: Pemerintah mengucurkan dana melalui Bank-Bank. Bank-Bank menunjuk koperasi salah satunya KUD untuk member bantuan kepada petani melalui kelompok tani. Dari kelompok tani diserahkan ke anggota-anggotanya. - KUT belum berhasil mencapai visi misinya untuk mensejahterakan petani. Kendala dari pihak petani adalah mereka enggan mengembalikan dana bantuan yang dipakai untuk hutang karena dianggap uang dari pemerintah yang mana sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan secara Cuma-Cuma. Kendala dari pemerintah, pemerintah sejak tahun 2000-an sudah tidak member otoritas kepada koperasi untuk menjalankan perannya. - Secara normative KUT, melalui KUD memiliki peran untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat, khususnya dalam hal ini masalah pengadaan pangan termasuk membeli gabah dari petani langsung. - Sekarang ini, KUD hanya melayani jasa pembayaran rekening listrik. - Usaha Simpan pinjam (melalui KUT) yang mulanya ada, kini mengalami kemacetan karena masalah pengembalian oleh nasabah. - Prosedurnya dulu, pemerintah memberi dana untuk membeli padi kepada KUD. Dari KUD lalu diseleb dan dibawa ke</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>KUD ngedrop ke pengecer. KUD juga punya. Misalnya gini, minyak goreng, nah KUD nanti ngedrop ke toko-toko kayak misalnya di Pak Kasrin, Mbak Halim, gitu. TPK itu Tempat Pelayanan Koperasi. Mereka tadinya gabung dengan KUD. Khususnya yang diprioritaskan petani gitu.”</p> <p>P : “Jadi mereka tidak langsung membeli ke KUD?”</p> <p>I : “KUD juga menyediakan. Kadang partai besar kan KUD modelnya sedikit-sedikit, belum habis sudah datang lagi. Makanya dipasok biar rata. Tapi harga tetap ditentukan KUD”</p> <p>P : “Sekarang?”</p> <p>I : “Sekarang Pemerintah sudah tidak memberi fasilitas dan prioritas jadi tidak jual.”</p> <p>P : “Kalau sekarang ini harga pangan khususnya beras, kan dulunya dibeli KUD, nah sekarang justru dibeli para tengkulak, itu gimana?”</p> <p>I : “KUD sekarang sudah tidak diberi prioritas untuk membeli padi, yang beli DOLOG langsung ke petani, namanya satgas. Dari petugas DOLOG itu disuruh langsung ke petani. Tapi disini belum ada.”</p> <p>P : “tengkulak sudah ada dari kapan?”</p> <p>I : “Dari zaman dulu. KUD dulunya juga beli ke tengkulak-tengkulak gitu.”</p> <p>P : “Apa tidak dilarang Soeharto?”</p> <p>I : “Tidak, mereka itu sendiri-sendiri. Mandiri. kalau tengkulak itu. Tadinya KUD juga beli ke tengkulak itu.”</p> <p>P : “ Kalau sekarang, KUD mau dibawa kemana ini Pak?”</p> <p>I : “Waaah, hidup segan mati tak mau. Hehehe. Tidak diurus pemerintah tapi masih dianggap badan usaha. Sudah dilepaskan pemerintah sekarang”</p> <p>P : “Itu sejak kapan?”</p> <p>I : “Sejak tahun dua ribuan”</p> <p>P : “Kalau zaman Soeharto seperti apa dulu?”</p> <p>I : “Kalau dulu malahan banyak, contohnya pelayanan listrik, sembako, tebu, terasi, pengadaan pangan, cengkeh.”</p> <p>P : “Apakah itu dilindungi pemerintah?”</p> <p>I : “Iya, dilindungi”</p> <p>P : “Perlindungannya dalam bentuk apa?”</p> <p>I : “misalnya tebu. Dari KUD mengkoordinir petani untuk menanam tebu. Nanti tebu-tebu diseleb ke pabrik gula. Nanti harganya segini gitu misalnya.. nanti hasilnya diberitahukan ke petani”</p> <p>P : “O..”</p> <p>I : “KUD disini jadi perantara. KUD bagus di zaman Soeharto. Perubahan zaman ya mungkin. Tadinya pupuk pupuk diberikan. Nah KUD berdirinya itu 30 Agustus 1970, di Suruh”</p> <p>P : “Jadi..”</p> <p>I : “KUD kosong, hanya pelayanan listrik. Itupun sudah banyak pelayanannya dimana-mana, BMT misalnya. Tadinya kan membayar di Bank itu kena biaya tambahan tapi sekarang kan ndak.”</p> <p>P : “Kembali lagi ke soal pertanian, KUD apakah tidak ada kegiatan lain selain membayar listrik?”</p> <p>I : “Sudah tidak ada. Hanya pembayaran rekening listrik.”</p> <p>P : “Kalau bantuan uang seperti apa? KUT?”</p> <p>I : “ya seperti tadi. Pemerintah melalui KUD memberi dana untuk petani. Lha petani itu melalui kelompok tani nanti dananya diberikan kesitu. Gitu.”</p> | <p>DOLOG. Kemudian, DOLOG membayar ke KUD untuk dibelikan padi lagi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam aspek pengadaan kebutuhan pangan masyarakat, KUD kadang membeli gabah dari para tengkulak. - Kebutuhan pangan masyarakat tidak hanya disediakan di KUD tetapi juga di TPK (Tempat Pelayanan Koperasi). TPK adalah took-toko yang berpartner dengan KUD karena KUD memiliki stok yang banyak sehingga untuk mempermudah masyarakat mendapatkan KUD memasok ke took-toko. Namun, harga jual tetap ditentukan KUD. Sayangnya, sekarang sudah tidak lagi. - Sekarang KUD sudah tidak memiliki prioritas untuk membeli padi karena pemerintah telah melepaskan KUD. - Di Zaman pemerintahan Soeharto, KUD mendapat perlindungan dari pemerintah. KUD menjadi coordinator para petani untuk menanam beberapa komoditas pangan. Hasil panen dari komoditas tersebut dibeli oleh KUD dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dari KUD dibawa ke seleb untuk kemudian dijual. Dengan kata lain, KUD adalah perantara antara petani dan pasar. |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| P | : “Kredit per orangan dikelola oleh KUT itu?” | |
| I | : “KUT memberi ke kelompok tani, la nanti petani pinjamnya dari situ. Kalau sudah panen, baru petani-petani nanti mengembalikan ke kelompok tani. Setelah itu baru disetor ke KUD, gitu. Sebagian kecil ada juga yang langsung ke KUD. Kelompok tani kan mengkoordinir ke petani” | |
| P | : “Bantuannya sebesar?” | |
| I | : “sepuluh juta ada untuk satu hektar” | |
| P | : “Apa ada bunga?” | |
| I | : “ada sepuluh setengah persen, setahun. Ringan sebenarnya. Tapi tidak mengembalikan. Ya begitu itu. Uang KUD dianggap dana bantuan dari pemerintah” | |
| P | : “Lalu dendanya?” | |
| I | : “Paling nunggak itu. Itu kok pertanyaannya banyak ..” | |



LAMPIRAN 1.1

PETA KECAMATAN SURUH



Sumber: Data Kecamatan Suruh

LAMPIRAN 1.2

Jumlah penduduk Kecamatan Suruh di tahun 2010 sebanyak 67.833 jiwa. Adapun klasifikasi penduduk berdasarkan profesi sebagai berikut:

| No. | PROFESI | JIWA |
|-----|----------------|-------|
| 1. | PNS | 1210 |
| 2. | TNI | 24 |
| 3. | POLRI | 17 |
| 4. | Pegawai Swasta | 574 |
| 5. | Pensiunan | 570 |
| 6. | Pengusaha | 58 |
| 7. | Buruh Bangunan | 1290 |
| 8. | Buruh Industri | 1218 |
| 9. | Buruh Tani | 16880 |
| 10. | Petani | 4488 |
| 11. | Peternak | 385 |
| 12. | Nelayan | - |
| 13. | Lain-Lain | 38180 |

Sumber: Monografi Kecamatan Suruh

Tabel di atas merupakan penjelasan terperinci dari Grafik 4.1 tentang Profesi Penduduk Kecamatan Suruh pada halaman 41.

LAMPIRAN 1.3

Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Suruh menurut Data Terakhir Tahun 2010

| No. | Jenjang Pendidikan | Jiwa |
|-----|--------------------|-------|
| 1 | Tidak Sekolah | - |
| 2 | Tidak Tamat SD | 11625 |
| 3 | Tamat SD | 14530 |
| 4 | Tamat SMP | 10908 |
| 5 | Tamat SMA | 9842 |
| 6 | Sarjana | 1222 |

Sumber: Data monografi Kecamatan Suruh

Tabel di atas merupakan penjelasan terperinci dari Grafik 4.2 tentang jenjang pendidikan masyarakat Kecamatan Suruh menurut data terakhir 2010 pada halaman 42.

LAMPIRAN 1.4

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan kelompok tani, di Kecamatan Suruh telah terbentuk 106 Kelompok Tani sesuai dengan kemampuan kelas kelompok tani masing-masing Desa. Berikut merupakan table pemaparannya:

Kemampuan kelas kelompok tani di Kecamatan Suruh

| No | DESA | KELAS KELOMPOK TANI | | | | JUMLAH |
|----|----------------|---------------------|--------|-------|-------|--------|
| | | PEMULA | LANJUT | MADYA | UTAMA | |
| 1 | Suruh | 5 | 2 | 1 | - | 8 |
| 2 | Plumbon | 3 | 5 | 1 | - | 9 |
| 3 | Krandon Lor | 4 | 3 | 1 | - | 8 |
| 4 | Cukilan | 8 | 1 | - | - | 9 |
| 5 | Dadapayam | 6 | 2 | - | - | 8 |
| 6 | Kedung Ringin | - | 7 | - | - | 7 |
| 7 | Sukorejo | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
| 8 | Bonomerto | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
| 9 | Medayu | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 10 | Ketanggi | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 11 | Dersansari | - | 3 | - | - | 3 |
| 12 | Kebowan | 4 | 3 | 1 | - | 8 |
| 13 | Bejilor | 2 | 3 | - | - | 5 |
| 14 | Jatirejo | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 15 | Purworejo | - | 3 | - | - | 3 |
| 16 | Reksosari | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 17 | Gunung Tumpeng | - | 7 | - | - | 7 |
| | JUMLAH | 38 | 56 | 11 | 1 | 106 |

Berdasarkan tabel Kelas Kemampuan Kelompok Tani tersebut, peneliti tertarik melihat kondisi Desa Suruh untuk dijadikan lokasi penelian. Sebab, Desa Suruh merupakan pusat aksesabilitas kebutuhan masyarakat yang menyediakan seluruh fasilitas pelayanan masyarakat. Dengan demikian, peneliti mudah untuk mendapat berbagai informasi yang dibutuhkan terkait dengan aksesabilitas pertanian.

LAMPIRAN 1.5

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Usia

| Usia \ Thn | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | |
|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 0 < 1 | 187 | 104 | 97 | 98 | 104 | 102 | 109 | 105 | 92 | 91 | 99 | 100 |
| 1-5 | 341 | 277 | 256 | 366 | 241 | 296 | 338 | 276 | 118 | 119 | 116 | 119 |
| 6-10 | 314 | 318 | 316 | 317 | 316 | 317 | 321 | 317 | 320 | 306 | 313 | 305 |
| 11-15 | 309 | 313 | 309 | 315 | 306 | 306 | 309 | 314 | 311 | 312 | 316 | 317 |
| 16-20 | 305 | 307 | 316 | 303 | 311 | 312 | 306 | 306 | 303 | 301 | 306 | 302 |
| 21-25 | 367 | 376 | 293 | 309 | 383 | 386 | 357 | 369 | 352 | 364 | 353 | 363 |
| 26-30 | 293 | 269 | 289 | 291 | 277 | 253 | 295 | 271 | 385 | 380 | 382 | 382 |
| 31-40 | 424 | 423 | 461 | 425 | 448 | 426 | 425 | 421 | 424 | 420 | 420 | 420 |
| 41-50 | 403 | 431 | 413 | 424 | 417 | 465 | 407 | 426 | 405 | 420 | 401 | 417 |
| 51-60 | 435 | 425 | 440 | 467 | 448 | 427 | 433 | 397 | 343 | 394 | 343 | 391 |
| 60+ | 338 | 397 | 443 | 339 | 381 | 341 | 343 | 440 | 774 | 691 | 791 | 673 |
| Jumlah | 7293 | | 7287 | | 7263 | | 7285 | | 7625 | | 7629 | |

LAMPIRAN 1.6

Berikut adalah pemaparan tabel jumlah penduduk menurut pendidikan, dimaksudkan bahwa tabel ini menjadi penjabar dari grafik 4.3 pada halaman 45.

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

| Jenis Pendidikan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Tidak sekolah | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Blm tamat SD | 1914 | 1866 | 1866 | 1914 | 1914 | 1913 |
| Tidak tamat SD | 907 | 810 | 811 | 908 | 994 | 991 |
| Tamat SD | 1522 | 1478 | 1524 | 1130 | 1619 | 1619 |
| Tamat SMP | 1561 | 1567 | 1516 | 1560 | 1648 | 1647 |
| Tamat SMA | 1101 | 1103 | 1101 | 1101 | 1187 | 1202 |
| Tamat Akademi/Diploma | 100 | 95 | 100 | 100 | 110 | 119 |
| Sarjana Ke atas | 118 | 118 | 292 | 118 | 143 | 130 |

LAMPIRAN 1.7

HASIL OBSERVASI MENGENAI KEHIDUPAN PETANI DI DESA SURUH



Gambar di atas merupakan kegiatan buruh penggiling gabah milik perorangan di Desa Suruh.

Gambar properti yang dimiliki salah seorang informan (Abdul Wahab)



Sarana MCK para petani Desa Suruh, khususnya untuk Dusun Pandean dan Karang Asem





Gambaran Kehidupan Petani Desa Suruh



Kondisi Sawah (Padi sisa serangan wereng dan kondisi resistensi tanah)

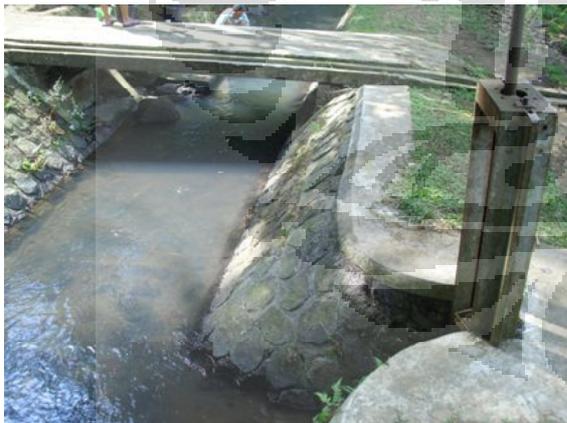


Gambar-gambar di bawah ini adalah kegiatan memanen gabah sisa serangan hama wereng. Beberapa buruh laki-laki adalah pekerja dari penebas/ tengkulak yang dibagi atas beberapa pekerjaan: (memotong batang padi, merontokan gabah dari batangnya, kemudian mengangkut jerami yang sudah tidak ada gabahnya untuk dijadikan satu dan kemudian diangkut kendaraan untuk dijual). Selain itu, terlihat beberapa buruh perempuan yang melakukan kegiatan merontokan gabah dari batang jerami. Mereka bukan buruh sewaan dari penebas/ tengkulak melainkan warga setempat yang menyengajakan diri datang ke tempat panen untuk mencari sisa rontokan. Sisa rontokan yang mereka dapatkan biasanya bisa digunakan untuk kebutuhan makan keluarga kurang lebih sepuluh hari hingga dua minggu. Namun, mereka diwajibkan membantu para buruh laki-laki untuk mengangkut batang jerami ke kendaraan angkutan.





Gambar-gambar jaringan irigasi di Desa Suruh, peninggalan masa pemerintahan Orde Baru



Jaringan irigasi sudah banyak yang mengalami kerusakan dan belum pernah ada perbaikan sejak pertama kalinya di bangun (tahun 1980-an)

